BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 708/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Undang–Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) Sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
20. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.436.353.775.772,00 bertambah sejumlah Rp904.072.408.762,60 sehingga menjadi Rp4.340.426.184.534,60 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	
	1. Semula	Rp. 3.366.370.761.800,00
	2. Bertambah	Rp. 923.999.050.975,59
	Jumlah	Rp. 4.290.369.812.775,59
b.	Belanja Daerah	
	1. Semula	Rp. 3.408.867.666.146,00
	2. Bertambah	Rp. 904.972.408.762,60
	Jumlah	Rp 4.313.840.074.908,60
	Defisit	Rp. (23.470.262.133,01)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan		
a. Semula	Rp.	69.983.013.972,00
b. Berkurang	Rp.	(19.926.642.212,99)
Jumlah	Rp.	50.056.371.759,01
2. Pengeluaran		
a. Semula	Rp.	27.486.109.626,00
b. Berkurang	Rp.	(900.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran	Rp.	26.586.109.626,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	23.470.262.133,01
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp.	529.884.959.800,00
2. Bertambah	Rp	57.493.721.308,99
Jumlah	Rp.	587.378.681.108,99

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	2.836.485.802.000,00
2. Bertambah	Rp.	866.505.329.666,60
Jumlah	Rp.	3.702.991.131.666,60

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah ;

1. Semula	Rp.	216.466.151.000,00
2. Bertambah	Rp	7.508.865.750,00
Jumlah	Rp.	223.975.016.750,00

b. Retribusi Daerah ;

1. Semula	Rp.	5.195.787.000,00
2. Bertambah	Rp.	465.000.000,00
Jumlah	Rp.	5.660.787.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	30.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	278.223.021.800,00
2. Bertambah	Rp.	49.519.855.558,99
Jumlah	Rp.	327.742.877.358,99

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp	2.710.885.802.000,00
2. Bertambah	Rp.	794.515.181.500,00
Jumlah	Rp.	3.505.400.983.500,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp.	125.600.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	71.990.148.166,60
Jumlah	Rp.	197.590.148.166,60

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1. Semula	Rp.	2.384.132.390.457,00
2. Bertambah	Rp.	541.589.788.078,88
Jumlah	Rp.	2.925.722.178.535,88

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	523.070.692.769,00
2. Bertambah	Rp.	314.952.795.845,17
Jumlah	Rp.	838.023.488.614,17

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	6.997.200.620,00
2. Berkurang	Rp.	(1.554.916.115,45)
Jumlah	Rp.	5.442.284.504,55

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.	494.667.382.300,00
2. Bertambah	Rp.	49.984.740.954,00
Jumlah	Rp.	544.652.123.254,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	1.260.994.266.412,00
2. Bertambah	Rp.	344.856.381.332,57
Jumlah	Rp.	1.605.850.647.744,57

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	915.867.821.096,00
2. Bertambah	Rp.	62.988.247.446,31
Jumlah	Rp.	978.856.068.542,31

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	140.278.069.039,00
2. Bertambah	Rp.	123.068.701.210,00
Jumlah	Rp.	263.346.770.249,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	66.992.233.910,00
2. Bertambah	Rp.	10.676.458.090,00
Jumlah	Rp.	77.668.692.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	10.314.120.000,00
2. Berkurang	Rp	(8.317.334.250,00)
Jumlah	Rp.	1.996.785.750,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	74.347.961.221,00
2. Bertambah	Rp	40.294.178.169,28
Jumlah	Rp.	114.642.139.390,28

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	100.593.747.003,00
2. Bertambah	Rp	40.539.598.257,00
Jumlah	Rp.	141.133.345.260,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp.	336.951.016.463,00
2. Bertambah	Rp.	222.934.756.720,89
Jumlah	Rp.	559.885.773.183,89

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	797.330.777,00
2. Bertambah	Rp	20.319.139.076,00
Jumlah	Rp.	21.116.469.853,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp	66.517.305,00
2. Bertambah	Rp	29.875.872,00
Jumlah	Rp.	96.393.177,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula	Rp.	6.997.200.620,00
b. Berkurang	Rp.	(1.554.916.115,45)
Jumlah	Rp.	5.442.284.504,55

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

1. Semula	Rp.	494.667.382.300,00
2. Bertambah	Rp.	49.984.740.954,00
Jumlah	Rp.	544.652.123.254,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp.	69.983.013.972,00
2. Berkurang	Rp.	(19.926.642.212,99)
Jumlah	Rp.	50.056.371.759,01

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp.	27.486.109.626,00
2. Berkurang	Rp.	(900.000.000,00)
Jumlah	Rp.	26.586.109.626,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula	Rp.	69.983.013.972,00
2. Berkurang	Rp.	(19.926.642.212,99)
Jumlah	Rp.	50.056.371.759,01

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	27.486.109.626,00
2. Berkurang	Rp.	(900.000.000,00)
Jumlah	Rp.	26.586.109.626,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

a. Lampiran I — Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II — Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III — Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJM/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Propinsi;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Perubahan APBD;
j.	LAMPIRAN X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
k.	LAMPIRAN XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	LAMPIRAN XII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
m.	LAMPIRAN XIII	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
n.	LAMPIRAN XIV	Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
o.	LAMPIRAN XV	Daftar Dana Cadangan Daerah;
p.	LAMPIRAN XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

HI APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (10 - 71 /2025)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN

BERITA ACARA

Nomor : 159 /BA/ DPRD /2025
Nomor : 8 /BA/BPKAD/2025

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15 - 09 - 2025), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. M. Toha : Bupati Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang beralamat di Jl.Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Afitni Junaidi Gumay, SE : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
3. Irwin Zulyani, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
4. H. Ahmadi : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
5. Edi Pramono : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA *dengan peyesuaian dan perubahan sebagaimana* tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas R-PAPBD Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, 15 September 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

AFITNI JUNAIDI GUMAY, SE

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

IRWIN ZULYANI, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. AHMADI

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

EDI PRAMONO

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN STRUKTUR RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA.2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / BERKURANG	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	4.290.369.812.775,59	923.999.050.975,59	4.290.369.812.775,59	-	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	587.378.681.108,99	57.493.721.308,99	587.378.681.108,99	-	
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	223.975.016.750,00	7.508.865.750,00	223.975.016.750,00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.660.787.000,00	465.000.000,00	5.660.787.000,00	-	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	327.742.877.358,99	49.519.855.558,99	327.742.877.358,99	-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	3.702.991.131.666,60	866.505.329.666,60	3.702.991.131.666,60	-	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	3.505.400.983.500,00	794.515.181.500,00	3.505.400.983.500,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	197.590.148.166,60	71.990.148.166,60	197.590.148.166,60	-	
5	BELANJA	3.408.867.666.146,00	4.313.840.074.908,60	904.972.408.762,60	4.313.840.074.908,60	-	
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.390.457,00	2.923.266.734.140,55	539.134.343.683,55	2.923.266.734.140,55	-	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00	1.605.860.647.744,57	344.866.381.332,57	1.605.860.647.744,57	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00	975.692.050.058,98	59.824.228.962,98	975.692.050.058,98	-	
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	264.045.344.337,00	123.767.275.298,00	264.045.344.337,00	-	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	77.668.692.000,00	10.676.458.090,00	77.668.692.000,00	-	

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA.2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / BERKURANG	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
5.2	**BELANJA MODAL**	**523.070.692.769,00**	**840.478.933.009,50**	**317.408.240.240,50**	**840.478.933.009,50**	-	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	1.996.785.750,00	(8.317.334.250,00)	1.996.785.750,00	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	117.240.911.785,61	42.892.950.564,61	117.240.911.785,61	-	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00	139.842.599.260,00	39.248.852.257,00	139.842.599.260,00	-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	560.185.773.183,89	223.234.756.720,89	560.185.773.183,89	-	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	21.116.469.853,00	20.319.139.076,00	21.116.469.853,00	-	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	96.393.177,00	29.875.872,00	96.393.177,00	-	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.997.200.620,00**	**5.442.284.504,55**	**(1.554.916.115,45)**	**5.442.284.504,55**	-	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	(1.554.916.115,45)	5.442.284.504,55	-	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**494.667.382.300,00**	**544.652.123.254,00**	**49.984.740.954,00**	**544.652.123.254,00**	-	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00	544.652.123.254,00	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(42.496.904.346,00)**	**(23.470.262.133,01)**	**19.026.642.212,99**	**(23.470.262.133,01)**	-	
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**69.983.013.972,00**	**50.056.371.759,01**	**(19.926.642.212,99)**	**50.056.371.759,01**	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	50.056.371.759,01	(19.926.642.212,99)	50.056.371.759,01	-	

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA.2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / BERKURANG	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**27.486.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**(900.000.000,00)**	**26.586.109.626,00**	-	
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)	26.586.109.626,00	-	
	Penyertaan Modal PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	26.586.109.626,00	2.100.000.000,00	26.586.109.626,00	-	
	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	-	-	
6.2.02	Pembentukan Dana Cadangan	-					
	PEMBIAYAAN NETTO	**42.496.904.346,00**	**23.470.262.133,01**	**(19.026.642.212,99)**	**23.470.262.133,01**	-	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	0,00	0,00	0,00	-	
TOTAL RANCANGAN APBD		**3.436.353.775.772,00**	**4.340.426.184.534,60**	**904.072.408.762,60**	**4.340.426.184.534,60**	-	

SEKAYU, 15 SEPTEMBER 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. M. TOHA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E
KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

H. AHMADI
WAKIL KETUA

EDI PRAMONO
WAKIL KETUA

Plafon Anggaran Per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah
Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2025

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	668.321.874.088,00	1.004.601.364.281,00	336.279.490.193,00	1.004.601.364.281,00	-	
2	Dinas Kesehatan	334.276.542.332,00	419.816.271.829,00	85.539.729.497,00	419.816.271.829,00	-	
	2.01 RSUD Sungai Lilin	31.250.000.000,00	34.595.209.582,00	3.345.209.582,00	34.595.209.582,00	-	
	2.02 RSUD Bayung Lencir	27.500.000.000,00	43.720.334.423,00	16.220.334.423,00	43.720.334.423,00	-	
	2.03 Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	3.823.709.566,00	1.534.864.566,00	3.823.709.566,00	-	
	2.04 Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00	4.837.309.682,00	2.174.491.682,00	4.837.309.682,00	-	
	2.05 Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00	2.447.926.919,00	(213.915.081,00)	2.447.926.919,00	-	
	2.06 Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	1.308.830.388,00	(351.804.612,00)	1.308.830.388,00	-	
	2.07 Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	1.305.040.059,00	446.040.059,00	1.305.040.059,00	-	
	2.08 Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	895.813.305,00	254.405.305,00	895.813.305,00	-	
	2.09 Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.744.506.035,00	543.592.035,00	1.744.506.035,00	-	
	2.10 Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	1.565.919.541,00	487.742.541,00	1.565.919.541,00	-	
	2.11 Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.000,00	1.401.820.130,00	369.275.130,00	1.401.820.130,00	-	
	2.12 Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.618.665.549,00	196.607.549,00	2.618.665.549,00	-	
	2.13 Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	2.289.681.026,00	885.418.026,00	2.289.681.026,00	-	
	2.14 Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	4.671.730.749,00	937.200.749,00	4.671.730.749,00	-	
	2.15 Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	3.555.216.929,00	705.898.929,00	3.555.216.929,00	-	
	2.16 Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	3.702.692.875,60	919.558.375,60	3.702.692.875,60	-	

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
	2.17 Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	1.244.732.621,00	312.337.121,00	1.244.732.621,00	-	
	2.18 Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	1.372.814.148,00	112.183.148,00	1.372.814.148,00	-	
	2.19 Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	2.342.665.692,00	633.498.892,00	2.342.665.692,00	-	
	2.20 Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	3.722.190.820,00	774.255.120,00	3.722.190.820,00	-	
	2.21 Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.873.768.829,00	565.561.829,00	1.873.768.829,00	-	
	2.22 Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	2.416.302.647,00	594.788.647,00	2.416.302.647,00	-	
	2.23 Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	1.791.890.699,00	857.004.699,00	1.791.890.699,00	-	
	2.24 Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	5.936.044.738,00	1.246.674.738,00	5.936.044.738,00	-	
	2.25 Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	1.621.608.986,00	148.595.986,00	1.621.608.986,00	-	
	2.26 Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	2.329.776.304,00	669.141.304,00	2.329.776.304,00	-	
	2.27 Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	1.496.473.051,00	305.850.051,00	1.496.473.051,00	-	
	2.28 Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	1.685.915.583,00	672.140.583,00	1.685.915.583,00	-	
	2.29 Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	2.034.105.151,00	904.858.151,00	2.034.105.151,00	-	
	2.30 Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	2.798.926.381,00	1.018.587.381,00	2.798.926.381,00	-	
	2.31 Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	1.198.322.676,00	593.059.176,00	1.198.322.676,00	-	
	2.101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	149.999.999.929,00	151.722.825.896,00	1.722.825.967,00	151.722.825.896,00	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.116.319.679,00	599.212.139.583,60	210.095.819.904,60	599.212.139.583,60	-	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	228.409.255.813,00	291.126.352.195,00	62.717.096.382,00	291.126.352.195,00	-	

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.866.072.375,00	25.617.774.825,00	10.751.702.450,00	25.617.774.825,00	-	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	29.402.308.186,00	38.551.075.727,00	9.148.767.541,00	38.551.075.727,00	-	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.670.022.828,00	16.439.235.163,00	(1.230.787.665,00)	16.439.235.163,00	-	
8	Dinas Sosial	73.044.030.887,00	77.199.200.617,00	4.155.169.730,00	77.199.200.617,00	-	
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.705.863.681,00	15.283.388.890,00	577.525.209,00	15.283.388.890,00	-	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.885.876.989,00	9.351.115.648,00	465.238.659,00	9.351.115.648,00	-	
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.297.553.505,00	10.613.654.680,00	(683.898.825,00)	10.613.654.680,00	-	
12	Dinas Lingkungan Hidup	47.694.443.605,00	57.281.888.783,00	9.587.445.178,00	57.281.888.783,00	-	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.471.692.694,00	22.560.453.778,00	88.761.084,00	22.560.453.778,00	-	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.010.951.733,00	17.707.159.264,00	(2.303.792.469,00)	17.707.159.264,00	-	
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	15.899.994.282,00	22.894.940.858,00	6.994.946.576,00	22.894.940.858,00	-	
16	Dinas Perhubungan	18.878.907.179,00	18.140.479.690,00	(738.427.489,00)	18.140.479.690,00	-	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.541.448.619,00	33.239.317.426,70	5.697.868.807,70	33.239.317.426,70	-	
18	Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	11.850.517.905,00	16.818.749.442,00	4.968.231.537,00	16.818.749.442,00	-	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.600.812.462,00	18.893.414.726,50	292.602.264,50	18.893.414.726,50	-	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	101.941.941.622,00	121.911.962.752,00	19.970.021.130,00	121.911.962.752,00	-	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.156.812.449,00	12.283.598.469,00	1.126.786.020,00	12.283.598.469,00	-	

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
22	Dinas Perikanan	16.494.925.674,00	16.197.107.218,00	(297.818.456,00)	16.197.107.218,00	-	
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.549.807.214,00	52.512.743.436,00	5.962.936.222,00	52.512.743.436,00	-	
24	Dinas Perkebunan	42.364.296.804,00	45.065.363.508,00	2.701.066.704,00	45.065.363.508,00	-	
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	26.881.266.906,00	22.330.566.460,00	(4.550.700.446,00)	22.330.566.460,00	-	
26	Sekretariat Daerah	120.811.591.060,00	139.334.235.055,00	18.522.643.995,00	139.334.235.055,00	-	
27	Sekretariat DPRD	106.813.431.705,00	120.372.873.231,00	13.559.441.526,00	120.372.873.231,00	-	
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.261.719.593,00	21.712.999.554,50	(1.548.720.038,50)	21.712.999.554,50	-	
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	522.899.586.811,00	571.334.940.609,24	48.435.353.798,24	571.334.940.609,24	-	
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	31.567.465.696,00	38.136.859.136,00	6.569.393.440,00	38.136.859.136,00	-	
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.775.086.251,00	18.901.341.166,00	126.254.915,00	18.901.341.166,00	-	
32	Inspektorat	25.621.100.590,00	30.408.129.304,00	4.787.028.714,00	30.408.129.304,00	-	
33	Kecamatan Sekayu	9.724.469.839,00	10.324.889.048,00	600.419.209,00	10.324.889.048,00	-	
	33.01 Kelurahan Serasan Jaya	849.999.937,00	600.219.072,00	(249.780.865,00)	600.219.072,00	-	
	33.02 Kelurahan Soak Baru	849.999.948,00	684.148.533,00	(165.851.415,00)	684.148.533,00	-	
	33.03 Kelurahan Balai Agung	850.000.000,00	669.522.773,00	(180.477.227,00)	669.522.773,00	-	
	33.04 Kelurahan Kayuara	850.000.000,00	682.065.034,00	(167.934.966,00)	682.065.034,00	-	
34	Kecamatan Lais	4.671.575.953,00	4.725.637.985,00	54.062.032,00	4.725.637.985,00	-	
35	Kecamatan Babat Toman	5.111.810.737,00	6.864.524.708,99	1.752.713.971,99	6.864.524.708,99	-	
	35.01 Kelurahan Babat	849.998.751,00	758.024.172,96	(91.974.578,04)	758.024.172,96	-	
	35.02 Kelurahan Mangun Jaya	849.998.767,00	766.737.231,51	(83.261.535,49)	766.737.231,51	-	

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
36	Kecamatan Keluang	4.541.453.123,00	5.060.224.145,00	518.771.022,00	5.060.224.145,00	-	
	36.01 Kelurahan Keluang	849.999.875,00	841.784.711,00	(8.215.164,00)	841.784.711,00	-	
37	Kecamatan Sanga Desa	5.231.826.315,00	5.566.745.605,00	334.919.290,00	5.566.745.605,00	-	
	37.01 Kelurahan Ngulak I	848.720.148,00	832.978.633,00	(15.741.515,00)	832.978.633,00	-	
	37.02 Kelurahan Ngulak	848.564.566,00	833.612.894,00	(14.951.672,00)	833.612.894,00	-	
38	Kecamatan Plakat Tinggi	3.452.126.423,00	4.293.670.603,00	841.544.180,00	4.293.670.603,00	-	
39	Kecamatan Batanghari Leko	3.838.838.954,00	4.166.315.645,00	327.476.691,00	4.166.315.645,00	-	
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.729.241.886,00	3.982.090.009,00	252.848.123,00	3.982.090.009,00	-	
41	Kecamatan Sungai Lilin	4.992.630.396,00	5.546.584.823,00	553.954.427,00	5.546.584.823,00	-	
	41.01 Kelurahan Sungai Lilin	850.000.000,00	833.014.354,00	(16.985.646,00)	833.014.354,00	-	
	41.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	850.000.000,00	838.919.254,00	(11.080.746,00)	838.919.254,00	-	
42	Kecamatan Bayung Lencir	4.491.388.274,00	5.061.972.049,00	570.583.775,00	5.061.972.049,00	-	
	42.01 Kelurahan Bayung Lencir	849.014.113,00	823.842.083,00	(25.172.030,00)	823.842.083,00	-	
	42.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah	849.918.355,00	829.391.585,00	(20.526.770,00)	829.391.585,00	-	
43	Kecamatan Lalan	4.164.662.653,00	4.762.891.988,00	598.229.335,00	4.762.891.988,00	-	
44	Kecamatan Tungkal Jaya	4.684.002.562,00	4.995.802.499,00	311.799.937,00	4.995.802.499,00	-	
45	Kecamatan Lawang Wetan	4.418.768.712,00	4.742.295.672,00	323.526.960,00	4.742.295.672,00	-	
46	Kecamatan Babat Supat	3.548.719.688,00	4.217.302.289,00	668.582.601,00	4.217.302.289,00	-	
47	Kecamatan Jirak Jaya	2.649.926.025,00	3.611.399.223,00	961.473.198,00	3.611.399.223,00	-	
TOTAL BELANJA DAERAH		**3.408.867.666.146,00**	**4.313.840.074.908,60**	**904.972.408.762,60**	**4.313.840.074.908,60**		

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
PEMBIAYAAN							
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**27.486.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**(900.000.000,00)**	**26.586.109.626,00**	-	
1	Penyertaan Modal PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	26.586.109.626,00	2.100.000.000,00	26.586.109.626,00	-	
1	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO		(27.486.109.626,00)	(26.586.109.626,00)	900.000.000,00	(26.586.109.626,00)	-	
TOTAL RANCANGAN APBD		**3.436.353.775.772,00**	**4.340.426.184.534,60**	**904.072.408.762,60**	**4.340.426.184.534,60**	-	

SEKAYU, 15 SEPTEMBER 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. M. TOHA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E
KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

H. AHMADI
WAKIL KETUA

EDI PRAMONO
WAKIL KETUA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 708 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1), dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Dearah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentigan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantun dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Musi Banyuasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Bupati Musi Banyuasin menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bupati Musi Banyuasin menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan Penyempurnaan dan Penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga untuk mendapatkan nomor register.

KEENAM : Bupati Musi Banyuasin menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapat nomor register sebagaimana Diktum Kelima.

KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATER SELATAN
NOMOR : 708 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. kepentingan umum;
C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF);
D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagaimana maksud Pasal 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur Sumatera Selatan ditetapkan meliputi:

A. Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Proyeksi IPM pada tahun 2025 sebesar 72,67.

2. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

   Proyeksi LPE pada tahun 2025 sebesar 5,0% – 5,2%.

3. Proyeksi Angka Kemiskinan

   Proyeksi Angka Kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 12,7 – 12,8%.

4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

   Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 sebesar 2,08%

5. Proyeksi Indeks Gini

   Proyeksi Indeks Gini pada tahun 2025 sebesar 0,290 – 0,300.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan Belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diuraikan tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel. 1

Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		%	Target RAPBDP Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025	Rata-Rata Rasio
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	(%)	(%)	(%)	(%)
PENDAPATAN DAERAH	4.078.146.093.777,00	3.807.807.962.928,72	93,37%	4.654.239.641.897,00	3.754.947.990.722,66	80,68%	3.366.370.761.800	2.616.118.094.976,75	77,71%	4.290.369.812.775,59	114,13%	72,33%	127,45%	104,63%
Pendapatan Asli Daerah	407.152.294.811	369.450.573.693,72	90,74%	619.651.955.525,00	393.331.951.633,26	63,48%	529.884.959.800	326.568.706.302,62	61,63%	587.378.681.108,99	152,19%	85,51%	110,85%	116,19%
Pendapatan Transfer	3.668.811.786.966	3.436.298.411.805,00	93,66%	4.027.080.510.372,00	3.354.108.863.089,40	83,29%	2.836.485.802.000	2.289.549.388.674,13	80,72%	3.702.991.131.666,60	109,77%	70,44%	130,55%	103,58%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.182.012.000	2.058.977.430,00	94,36%	7.507.176.000,00	7.507.176.000,00	100,00%	0	0	0,00%	0	344,05%	0,00%	0,00%	114,68%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata sebesar 106,63% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

   Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

   Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

   Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

   Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

   Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan *platform digital* untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

   Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

   Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diuraikan tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel.2

Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		%	Target RAPBDP Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025	Rata-Rata Rasio
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi (Per 31 Agustus 2025)		Target	(%)	(%)	(%)	(%)
BELANJA DAERAH	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02	90,27 %	4.750.926.224.507,58	3.811.670.043.170,23	80,23 %	3.408.867.666.146,00	1.799.333.429.522,16	52,78 %	4.310.999.685.017,10	118,37%	71,75%	126,46%	105,53 %
Belanja Operasi	2.664.600.118.894	2.368.483.329.746,10	88,89 %	2.977.667.797.595,18	2.507.571.123.568,16	84,21 %	2.384.132.390.457,00	1.313.208.181.166,16	55,08 %	2.924.137.655.711,05	111,75%	80,07%	122,65%	104,82 %
Belanja Modal	819.557.133.607	756.123.871.417,92	92,26 %	1.233.172.084.375,40	814.583.797.586,07	66,06 %	523.070.692.769,00	238.158.230.773,00	45,53 %	836.767.621.547,50	150,47%	42,42%	159,97%	117,62 %
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	21.000.000	0,47%	5.435.810.272,00	2.155.951.800,00	39,66 %	6.997.200.620,00	77.330.054,00	1,11%	5.442.284.504,55	120,80%	128,72%	77,78%	109,10 %
Belanja Transfer	525.070.099.600	498.411.709.200	94,92 %	534.650.532.265,00	487.359.170.216,00	91,15 %	494.667.382.300,00	247.889.687.529,00	50,11 %	544.652.123.254,00	101,82%	92,52%	110,10%	101,48 %

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata sebesar 105,53% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

   Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

   Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Biaya per Layanan Publik

   Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

   Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. *E-Government* dan *E-Procurement*

   Penguatan implementasi *platform e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui *platform e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

6. Monitoring dan Evaluasi Program

   Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan *output* yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, diuraikan tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel.3

Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		%	Target RAPBDP Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025	Rata-Rata Rasio
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi (Per 31 Agustus 2025)		Target	(%)	(%)	(%)	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH	179.463.956.965,00	190.027.102.126,88	105,89%	97.469.123.598,00	156.678.424.206,58	160,75%	70.329.100.998,00	0	0,00%	76.642.481.385,01	54,31%	72,16%	108,98%	78,48%
Penerimaan Pembiayaan	63.371.679.556	62.401.787.597,88	98,47%	69.983.013.972,00	131.728.424.206,58	188,23%	45.842.991.372,00	0	0,00%	50.056.371.759,01	110,43%	65,51%	109,19%	95,04%
Pengeluaran Pembiayaan	127.790.421.232	127.625.314.529,00	99,87%	27.486.109.626,00	24.950.000.000,00	90,77%	24.486.109.626,00	0	0,00%	26.586.109.626,00	21,51%	89,09%	108,58%	73,06%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata sebesar 78,48% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Evaluasi Kinerja Program

   Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

6. Tahapan dan Jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:

Tabel. 4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah	B-900/671/SETDA/2025	6 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
2	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin	B-900/685/BPKAD II/2025	1 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	6 dan 15 Tahun 2025	21 Agustus 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan	7 dan 16 Tahun 2025	21 Agustus 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat

	DPRD Kabupaten Musi Banyuasin			minggu II bulan Agustus)
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	B-910/968/BPKAD II/2025	28 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
7	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	NO.155/BA/DPRD/2025 NO. 8 /BA/BPKAD/2025	15 September 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
9	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	B-910/1058/BPKAD II/2025	Tanggal 16 September disampaikan ke Provinsi tanggal 17 September 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin *telah* berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah; dan
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

   Penyediaan anggaran untuk Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(weight faltering)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita semula Rp246.241.578.202,00 bertambah Rp36.377.336.765,60 menjadi Rp282.618.914.967,41 atau 6,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula Rp1.263.265.600 berkurang sebesar Rp698.822.160,00 menjadi Rp564.443.440,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp67.580.000,00 bertambah Rp4.020.000,00 menajadi Rp71.600.000,00 atau 12,69 % dari total sub kegiatan;

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp5.025.386.200,0 bertambah sebesar Rp838.259.000,00 menjadi Rp5.863.645.200,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp4.825.386.200 bertambah Rp738.864.000,00 menjadi Rp5.564.250.200,00 atau 1,22 % dari total sub kegiatan;

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi semula Rp407.238.582.435 bertambah Rp157.075.612.739 menjadi Rp564.314.195.174 atau 38,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya semula Rp900.000.000 bertambah Rp386.057.500 menjadi Rp1.286.057.500 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan semula Rp40.161.009.827 berkurang Rp5.217.636.696 menjadi Rp34.943.373.131 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:

Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp393.550.000,00 berkurang Rp183.975.000,00 menjadi Rp209.575.000,00 atau 0,60% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas PU Pekerjaan Umum Penataan Ruang.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

   Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem semula Rp85.345.506.397 bertambah Rp67.844.656.210 menjadi Rp153.190.162.606 atau 3,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana semula Rp199.983.000,00 berkurang Rp128.061.000,00 menjadi Rp71.922.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp22.542.000,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan atau 31,34% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Sehat

Penyediaan anggaran Makan Bergizi Sehat semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp2.498.317.000,00 berkurang Rp163.982.004,00 menjadi Rp2.334.334.996,00 pada Rancangan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025atau 0,054% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Alokasi Anggaran Program Tiga Juta Rumah

   Penyediaan anggaran Program Tiga Juta Rumah semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp33.795.133.450,00 bertambah Rp11.745.759.350,00 menjadi Rp45.540.892.800,00 atau 1,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pembangunan infrastuktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

   Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengambil langkah-langkah, antara lain:

   a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR;
   b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR;
   c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan
   d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

   sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

6. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

   Penyediaan anggaran Swasembada Pangan semula Rp20.269.556.534,00 bertambah Rp265.248.406,00 menjadi Rp20.534.804.940,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian.

Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; dan
c. Monitoring harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

   Penyediaan anggaran Swasembada Energi belum dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

   Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi *fosil* dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi di tingkat daerah.

8. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat

   Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung program Sekolah Rakyat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

   Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah:

   a. penyiapan lahan;
   b. perizinan;
   c. penyiapan guru dan tenaga pendidik;

   dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

9. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah semula Rp1.397.170.529.632,00 bertambah Rp360.621.758.505,30 menjadi Rp1.757.792.288.137,30 atau 86,05% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp1.545.804.933.912,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	P- APBD 2025	RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
1	Meningkatkan Produktivitas Dan	115.495.298.045	2,68%

	Hilirisasi Komoditas Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Moderasi Beragama Dan Ekonomi Keummatan		
2	Meningkatkan Pendapatan Dan Mengurangi Beban Masyarakat Untuk Menurunkan Kemiskinanrekonstruksi Sosial Dan Ekonomi Melalui Peningkatan Pendapatan Dan Mengurangi Beban Masyarakat Untuk Menurunkan Kemiskinan	88.220.583.213	2,05%
3	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Untuk Konektivitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	895.297.125.892	20,75%
4	Meningkatkan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	82.694.877.608	1,92%
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.855.147.723.793	43,00%
6	Transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, inovatif dan melayani	1.276.984.466.358	29,60%
JUMLAH		4.313.840.074.909	100.00%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dimaksud belum sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan/mempertahankan keselarasan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(Mandatory Spending)*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

   Penyediaan anggaran Fungsi Pendidikan yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 semula Rp703.544.185.836,00 bertambah Rp398.185.958.646,35 menjadi Rp1.101.321.078.282,35 atau 25,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula Rp1.263.265.600 berkurang sebesar Rp698.822.160,00 menjadi Rp564.443.440,00
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp5.025.386.200,0 bertambah sebesar Rp838.259.000,00 menjadi Rp5.863.645.200,

   telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

   Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan/mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula Rp1.263.265.600 berkurang sebesar Rp698.822.160,00 menjadi Rp564.443.440,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp67.580.000,00 bertambah Rp4.020.000,00 menajadi Rp71.600.000,00 atau 12,69 % dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.305.485.869.532,00 bertambah Rp363.902.317.664,29 menjadi Rp1.669.388.187.196,29 atau 44,29% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp5.025.386.200,0 bertambah sebesar Rp838.259.000,00 menjadi Rp5.863.645.200;
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya semula Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp1.898.845.000,00 menjadi Rp1.898.845.000,00;

Telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp2.094.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp1.464.000.000 semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp1.464.000.000,00 atau 69,91% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD

   Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp1.260.994.266.412,00 bertambah Rp345.265.231.332,57menjadi Rp1.606.259.497.744,57 atau 37,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya semula Rp1.260.994.266.412,00 bertambah Rp345.265.231.332,57 menjadi Rp1.397.758.266.309,57 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 atau 32,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dengan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dalam penganggaran Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru harus mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-3406 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

   Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

   Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan PKB semula Rp4.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp6.000.000.000,00

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

   Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan semula Rp22.535.444.050,00 bertambah sebesar Rp10.670.565.250,00 menjadi Rp33.206.009.300,00 atau 3,36% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp989.582.029.956,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

   a. Angka Partisipasi Sekolah semula Rp12.323.570.550,00 bertambah sebesar Rp11.763.941.700,00 menjadi Rp24.087.512.250,00
   b. Literasi dan Numerasi semula Rp5.473.432.000,00 berkurang sebesar Rp3.874.928.900,00 menjadi Rp1.598.503.100,00;
   c. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas semula Rp2.400.000.000,00 berkurang sebesar Rp118.190.000,00 menjadi Rp2.281.810.000,00;
   d. Kekhususan PAUD semula Rp2.338.441.500, bertambah sebesar Rp2.899.742.450,00 menjadi Rp5.238.183.950,00.

   harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp400.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.295.142.000,00 menjadi Rp1.695.142.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp17.806.000,00 atau 0,38% dari total sub kegiatan;
2) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah semula Rp2.887.200.750,00 bertambah Rp.115.815.250,00 menjadi Rp6.003.016.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp1.916.713.750,00 bertambah Rp3.115.815.250,00 menjadi Rp 5.032.529.000,00 atau 83,83% dari total sub kegiatan

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan semula Rp876.946.666,00 bertambah sebesar Rp4.480.546.549,00 menjadi Rp5.357.493.215,00 atau 0,74% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp719.889.042.809,60.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula Rp85.884.666,00 bertambah sebesar Rp1.686.089.610,00 menjadi Rp1.771.974.276,00;
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp191.341.000,00 menjadi Rp241.341.000,00;
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula Rp109.256.000,00 bertambah sebesar Rp477.955.600,00 menjadi Rp587.211.600,00;
d. Pelayanan Kesehatan Balita semula Rp109.256.000,00 bertambah sebesar Rp477.955.600,00 menjadi Rp587.211.600,00;
e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar semula Rp74.232.000,00 bertambah sebesar Rp1.312.488.339,00 menjadi Rp1.386.720.339,00;
f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif semula Rp83.673.000,00 berkurang sebesar Rp50.708.000,00menjadi Rp32.965.000,00;
g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula Rp46.778.000,00 bertambah Rp64.982.000,00 menjadi Rp111.760.000,00
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula Rp84.493.000,00 berkurang sebesar Rp51.477.000,00 menjadi Rp33.016.000,00;

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula Rp36.240.000,00 berkurang sebesar Rp22.110.000,00 menjadi Rp14.130.000,00;

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula Rp49.980.000,00 bertambah sebesar Rp442.106.000,00 menjadi Rp492.086.000,00

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula Rp57.865.000,00 bertambah sebesar Rp479.675.000,00 menjadi Rp537.540.000,00

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) semula Rp62.040.000,00 berkurang sebesar Rp26.610.000,00 menjadi Rp35.430.000,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula Rp109.256.000,00 bertambah sebesar Rp477.955.600,00 menjadi Rp587.211.600,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.740.000,00 pada Rancangan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan atau 0,03% dari total sub kegiatan;

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula Rp83.673.000,00 berkurang Rp50.708.000,00 menjadi Rp32.965.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas biasa semula Rp6.960.000,00 atau 0,12% dari total sub kegiatan;

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penyediaan anggaran kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp594.763.031.261,00 bertambah sebesar Rp125.126.011.548,60 menjadi Rp719.889.042.809,60 atau 16,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada:

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota semula Rp 594.501.700,00 bertambah Rp 399.241.300,00 menjadi Rp 993.743.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *Stunting*:
    1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
    2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
    3) pemeriksaan kehamilan *(Antenatal Care)*;
    4) konsumsi TTD ibu hamil;
    5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);

6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting,* dan *Stunting*);
10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.

c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
1) Tuberkulosis (TBC);
2) *Human lmmunodeficiency Virus* (HIV);
3) Malaria; dan
4) Penyakit menular lainnya.

d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
1) Diabetes Melitus;
2) Hipertensi; dan
3) Penyakit tidak menular lainnya.

e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu;
3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;

2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*)
4) tenaga kesehatan di Labkesda;
5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp18.432.071.512,00 bertambah sebesar Rp19.701.155.138,00 menjadi Rp38.133.226.650,00 atau 6.65% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp573.184.547.383,60;

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula Rp8.795.004.600,00 bertambah sebesar Rp9.411.983.400,00 menjadi Rp 18.206.988.000,00;
b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula Rp9.637.066.912,00 bertambah sebesar Rp10.289.171.738,00 menjadi Rp19.926.238.650,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat semula Rp8.842.902.712,00 bertambah sebesar Rp7.216.443.588,00 menjadi Rp16.059.346.300,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp239.659.512,00 berkurang Rp169.659.512,00 menjadi Rp70.000.000,00 atau 1,17% dari total sub kegiatan; dan
2) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Rp299.764.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp55.344.000,00 atau 18,46% dari total sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp5.485.523.050,00 bertambah sebesar Rp1.045.292.950,00 menjadi Rp6.530.816.000,00 atau 2,25% total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp289.964.938.445,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota semula Rp0.00 menjadi Rp1.636.866.250,00.
2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota semula Rp5.485.523.050,00 berkurang Rp591.573.300,00 menjadi Rp4.893.949.750,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota semula Rp5.435.523.050,00 berkurang sebesar Rp573.523.050,00 menjadi Rp4.862.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp50.800.000,00 berkurang Rp25.400.000,00 menjadi Rp25.400.000,00 atau 0,52% dari total sub kegiatan;
2) Sub Kegiatan Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp1.636.866.250,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp1.501.866.250,0 atau 91,75% dari total sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten

dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. SPM Sosial

   Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial semula Rp2.482.983.700,00 berkurang sebesar Rp86.825.000,00 menjadi Rp2.396.158.700,00 atau 3,10% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp77.199.200.617,00.

   Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula Rp2.115.216.700,00 berkurang sebesar Rp23.238.000,00 menjadi Rp2.091.978.700,00; dan
   b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota semula Rp367.767.000,00 berkurang sebesar Rp63.587.000,00 menjadi Rp304.180.000,00.

   harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Sosial, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana

maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial semula Rp367.767.000,00 berkurang sebesar Rp63.587.000,00 menjadi Rp304.180.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp 35.870.000,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
2) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan sebesar semula tidak dianggarlan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp400.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula tidak dianggarlan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp400.000.000,00;

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat semula Rp7.465.082.861,00 bekurang sebesar Rp2.300.970.003,00 menjadi Rp5.164.112.858,00 atau 8,05% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp64.168.850.552,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota semula Rp1.279.053.250,00 berkurang sebesar Rp602.478.000,00 menjadi Rp676.575.250,00;
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana semula Rp147.480.590,00 berkurang sebesar Rp21.991.503,00 menjadi Rp125.489.087,00;
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana semula Rp2.741.853.321,00 berkurang sebesar Rp1.409.982.500,00 menjadi Rp1.331.870.821,00;

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula Rp2.653.306.700,00 berkurang sebesar Rp217.060.000,00. menjadi Rp2.436.246.700,00;

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran semula Rp643.389.000,00 berkurang sebesar Rp49.458.000,00 menjadi Rp593.931.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan semula Rp421.425.000,00 berkurang sebesar Rp112.800.000,00 menjadi Rp308.625.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp 47.225.000,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan atau 15,30% dari total sub kegiatan

2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja fungsional Polisi Pamong Praja dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp89.400.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp15.000.000,00 atau 16,78% dari total sub kegiatan;

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 5.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pengawasan

   Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin semula Rp25.621.100.590,00 bertambah Rp4.787.028.714,00 menjadi

Rp30.408.129.304,00 atau 0,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat semula Rp17.064.693.797,00 bertambah Rp4.583.498.311,00 menjadi Rp21.648.192.108,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
b. Alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat semula Rp10.313.171.143,00 bertambah Rp1.544.830.746,00 menjadi Rp11.858.001.889,00;

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN Rp9.790.190.219,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal semula Rp315.000.000,00 berkurang Rp 4.643.000,00 menjadi Rp 310.357.000,00;
b. Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp829.999.900,00 berkurang Rp15.159.450,00 menjadi Rp814.840.450,00;

Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) (menyesuaikan dengan kabupaten/kota). tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.1) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:
   1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
   2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
   3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   4) Reviu Laporan Keuangan;
   5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
   6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton;

sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang tercantum pada SKPD Inspektorat Daerah semula Rp4.843.924.000,00 berkurang Rp1.321.247.000,00 menjadi Rp3.522.677.000,00 atau 0,24% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp14.169.606.790,00 berkurang Rp1.186.496.046,00 menjadi Rp12.983.110.744,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp8.901.765.152,00 bertambah Rp1.133.941.520,00 menjadi Rp10.035.706.672,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp524.510.000,00 dan tidak mengalami perubahan atau 0,012% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp2.422.894.072,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp149.421.000,00;

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

   Penyediaan anggaran untuk FKUB semula Rp627.682.890 berkurang Rp117.033.500 menjadi Rp510.649.390 atau 0,012% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja:

   a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional pada SKPD 15 Kecamatan semula Rp227.745.000 berkurang Rp98.915.500 menjadi Rp128.829.500;
   b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp399.937.890 berkurang Rp18.118.000 menjadi Rp381.819.890;

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

   Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten Musi Banyuasin semula Rp527.745.000 berkurang Rp254.418.200 menjadi Rp273.326.800 atau 0,0063% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp300.000.000 berkurang sebesar Rp155.502.700 menjadi Rp144.497.300
   b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional pada SKPD 15 Kecamatan semula Rp227.745.000 berkurang sebesar Rp98.915.500 menjadi Rp128.829.500

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

   Penyediaan anggaran TP-PKK yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga semula Rp1.178.507.025 berkurang Rp251.817.208 menjadi Rp926.689.817 atau 0,021% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Musi Banyuasin melalui:

a. Upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *Stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
    1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
    2) gotong royong;
    3) pangan;
    4) sandang;
    5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
    6) pendidikan dan keterampilan;
    7) kesehatan;

8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
9) kelestarian lingkungan hidup; dan
10) perencanaan sehat.

g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Musi Banyuasin dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

h. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Musi Banyuasin serta kegiatan lainnya; dan

i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa semula Rp1.178.507.025,00 berkurang sebesar Rp251.817.208,00 menjadi Rp926.689.817,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp441.637.000,00 berkurang Rp207.301.000,00 menjadi Rp234.336.000,00 atau 25,29% dari total jumlah sub kegiatan;

b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp147.175.000,00 berkurang Rp53.195.000,00 menjadi Rp93.980.000,00 atau 10,14% dari total jumlah sub kegiatan

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran penguatan Posyandu semula Rp5.774.979.746,00 dan tidak mengalami perubahan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 serta pemutakhirannya.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas:
   1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
   2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
   3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM; dan
c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat semula Rp174.999.850,00 berkurang Rp-57.418.400,0 menjadi Rp117.581.450,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp80.480.000,00 berkurang Rp12.881.000,00 menjadi Rp67.599.000,00 atau 57,49% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Posyandu.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial

   Belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pembiayaan pengelolaan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

8. Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa semula Rp240.398.499 berkurang sebesar Rp112.932.000 menjadi Rp127.466.499 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya semula Rp298.552.000 berkurang sebesar Rp148.526.500 menjadi Rp150.025.500 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.34.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

9. Alokasi Anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia.

Penyediaan anggaran memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota semula Rp326.408.000,00 berkurang Rp155.404.000,00 menjadi Rp171.004.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

10. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran Bantuan Hukum yang tercantum pada Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula Rp622.433.499,00 berkurang Rp2.531.521,50 menjadi Rp619.901.977,50;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

11. Alokasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyediaan anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan semula Rp1.815.870.270,00 bertambah Rp185.860.000,00 menjadi Rp1.630.010.270;

b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula

Rp150.139.000,00 berkurang Rp61.917.000,00 menjadi Rp88.222.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

12. Alokasi Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

    Penyediaan anggaran BAZNAS yang tercantum pada Belanja Hibah kepada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus berpedoman pada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

13. Alokasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

    Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, yang tercantum pada:

    a. Belanja Pegawai BLUD semula Rp117.162.895.797,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp915.076.618,00 menjadi Rp118.077.972.415,00
    b. Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp114.983.832.798,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp14.071.638.412,60 menjadi Rp129.055.471.210,60.
    c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula Rp10.681.752.212,00 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp290.940.061,00 menjadi Rp10.972.692.273,00;
    a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp2.658.008.193,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp4.539.209.942,00 menjadi Rp7.197.218.135,00.

    dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

14. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, yang tercantum pada:

a. BOS Reguler Sekolah Dasar Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp66.351.400.000,00;
b. BOS Reguler Sekolah Dasar Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp6.311.160.000,00;
c. BOS Kinerja Sekolah Dasar Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp1.712.500.000,00;
d. BOS Kinerja Sekolah Dasar Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp157.500.000,00;
e. BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp27.255.624.000,00;
f. BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp8.455.216.000,00;
g. BOS Kinerja Sekolah Menengah Pertama Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp737.500.000,00;
h. BOS Kinerja Sekolah Menengah Pertama Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp351.250.000,00;
i. BOSP PAUD Reguler Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp549.600.000,00;
j. BOSP PAUD Reguler Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp10.691.413.000,00;
k. BOSP PAUD Kinerja Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp30.000.000,00;
l. SKB Reguler Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp105.300.000,00;
m. BOSP Reguler Kesetaraan semula Rp0,00 pada Rancangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp1.207.000.000,00;
n. BOSP Kinerja Kesetaraan semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp90.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No.	URAIAN	Perubahan RKPD		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		RANCANGAN Perubahan APBD TA 2025	
		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)
1	PROGRAM	128	4.340.426.184.534,60	128	4.340.426.184.534,60	128	4.340.426.184.534,60
2	KEGIATAN	250		250		250	
3	SUB KEGIATAN	737		737		737	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, diuraikan pada Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah

sepenuhnya berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka

Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasinberpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

   Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

   Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai *(performance based)*, harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi sesuai, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang diterima

perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp3.366.370.761.800,00 bertambah Rp923.999.050.975,59 menjadi Rp4.290.369.812.775,59 diuraikan sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Pendapatan Daerah

Uraian	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	4.290.369.812.775,59	100,00
Pendapatan Asli Daerah	587.378.681.108,99	13,69
Pajak Daerah	223.975.016.750,00	5,22
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	60.000.000.000,00	1,40
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.000.000.000,00	0,70
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	90.000.000.000,00	2,10
Pajak Air Permukaan (PAP)	600.000.000,00	0,01

Pajak Rokok	35.000.000.000,00	0,82
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.029.103.000,00	0,05
Retribusi Daerah	5.660.787.000,00	0,13
Retribusi Jasa Umum	727.000.000,00	0,02
Retribusi Jasa Usaha	2.433.787.000,00	0,06
Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00	0,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,70
Lain-lain PAD yang Sah	327.742.877.358,99	7,64
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.243.250,00	0,001
Jasa Giro	5.500.000.000,00	0,12
Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	0,11
Pendapatan Denda Pajak Daerah	326.600.000,00	0,008
Pendapatan BLUD	244.280.123.524,00	5,69
Pendapatan Transfer	3.702.991.131.666,60	86,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.505.400.983.500,00	81,70
Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.590.148.166,60	4,60
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD semula Rp529.884.959.800,00 bertambah Rp57.493.721.308,99 menjadi Rp587.378.681.108,99 atau 13,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp529.884.959.800,00 atau 15,74% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.366.370.761.800,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp619.651.955.525,00 atau 13,31% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp4.654.239.641.897,00 dan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp407.152.294.811,00 atau 9,98% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2023 Rp4.078.146.093.777,00.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 Rp278.359.008.032,77 atau 52,53% dari target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp529.884.959.800,00;

b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp393.331.951.633,26 atau 63,48% dari target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp619.651.955.525,00;

c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp369.450.573.693,72 atau 90,74% dari target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp407.152.294.811,00.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    1) Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah semula Rp216.466.151.000,00 bertambah Rp7.508.865.750,00 menjadi

Rp223.975.016.750,00 atau 5,22% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

a) Pajak Reklame Rp2.729.859.000,00;
b) Pajak Air Tanah Rp420.000.000,00;
c) Pajak Sarang Burung Walet semula Rp332.697.000,00 berkurang Rp83.174.250,00 menjadi Rp249.522.750,00;
d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2.029.103.000,00;
e) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp29.904.394.000,00;
f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25.139.938.000,00;
g) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Rp65.910.160.000,00 bertambah Rp7.592.040.000,00 menjadi Rp73.502.200.000,00;
h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp40.000.000.000,00 bertambah Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp60.000.000.000,00; dan
i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) semula Rp50.000.000.000,00 berkurang Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp30.000.000.000,00.

2) Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp5.195.787.000,00 bertambah Rp465.000.000,00 menjadi Rp5.660.787.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

1) Retribusi Jasa Umum semula Rp447.000.000,00 bertambah Rp280.000.000,00 menjadi Rp727.000.000,00;
2) Retribusi Jasa Usaha semula Rp2.248.787.000,00 bertambah Rp185.000.000,00 menjadi Rp2.433.787.000,00; dan
3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp 2.500.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2), butir 3.3.1.1.1.o.3) dan butir 3.3.1.1.1.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir a.1).a) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp30.000.000.000,00 atau 0,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp30.000.000.000,00 atau 0,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Selanjutnya, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimaksud, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

Selanjutnya, terhadap BUMD yang kinerjanya belum memadai *(performance based)* dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp278.223.021.800,00 bertambah Rp49.519.855.558,99 menjadi Rp327.742.877.358,99 atau 7,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 30 Juni 2025 Rp163.529.218.711,80 atau 58,78% dari total target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp278.223.021.800,00;

2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 Rp245.157.602.663,51 atau 53,30% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp459.922.314.525,00; dan
3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp248.485.877.831,93 atau 92,82% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp267.701.459.811,00.

Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp35.000.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp6.243.250,00 atau 0,0001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Jasa Giro Rp5.500.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4) Pendapatan Bunga Rp 5.000.000.000,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR) Rp15.000.000.000,00 atau 0,35% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp1.628.262.810,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp1.000.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

8) Pendapatan denda pajak daerah Rp326.600.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

9) Pendapatan denda hasil eksekusi atas jaminan Rp1.000.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

10) Pendapatan dari pengembalian Rp54.965.647.774,99 atau 1,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

11) Pendapatan BLUD Rp244.280.123.524,00 atau 5,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 3.3.1.3.16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp2.836.485.802.000,00 bertambah Rp 866.505.329.666,60 menjadi Rp3.702.991.131.666,60 atau 86,31% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.710.885.802.000,00 bertambah Rp794.515.181.500,00 menjadi Rp3.505.400.983.500,00 atau 81,70% total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan:

1) Transfer Ke Daerah (TKD) semula Rp2.710.885.802.000,00 bertambah Rp794.515.181.500,00 menjadi Rp3.505.400.983.500,00 atau 81,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
   a) Dana Desa Rp225.564.334.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Rp225.564.334.000,00;
   b) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2.298.679.867.500,00 sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Rp2.298.679.867.500,00;
   c) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp583.685.042.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Rp583.685.042.000,00;
   d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp35.072.538.000,00 sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Rp35.072.538.000,00; dan
   e) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp362.399.202.000,00 sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Rp362.399.202.000,00.

2) Insentif Fiskal Rp0,00 atau 0% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp125.600.000.000,00 bertambah Rp71.990.148.166,60 menjadi Rp197.590.148.166,60 atau 4,61% total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Rp125.600.000.000,00 atau 2,93% dan Bantuan Keuangan Rp71.990.148.166,60 atau 1,68% dari total dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

   Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi sebagaimana maksud Pasal 47 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Belanja Daerah untuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan Jenis Belanja Daerah, diuraikan sebagaimana Tabel.8 sebagai berikut:

Tabel. 8

Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja									
	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	625.845.580.157,00	909.525.627.669,00	31.921.364.081,00	80.056.402.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.766.944.238,00	989.582.029.956,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	569.004.413.838,00	654.844.111.238,60	25.758.617.423,00	65.044.931.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.763.031.261,00	719.889.042.809,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	107.562.097.659,00	130.436.637.000,71	264034222020,00	442747910382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	371.596.319.679,00	573.184.547.383,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	107.591.587.121,00	157.758.345.086,00	110817668692,00	132206593359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.409.255.813,00	289.964.938.445,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.729.882.451,00	50.890.660.181,20	6.538.498.110,00	13.278.190.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.268.380.561,00	64.168.850.552,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	72.705.219.887,00	77.017.300.617,00	338.811.000,00	181.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.044.030.887,00	77.199.200.617,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.119.860.850,00	5.819.156.325,00	329.100.000,00	428.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.960.850,00	6.248.141.325,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.839.070.000,00	11.782.455.700,00	7.680.930.000,00	14.245.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520.000.000,00	26.027.592.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	385.880.000,00	54.760.000,00	9.614.120.000,00	1.106.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	1.161.413.750,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	13.098.363.191,00	14.929.235.508,00	1.307.500.490,00	198.114.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405.863.681,00	15.127.350.304,00
Urusan Pemerintah Daerah	**Belanja**									
	Operasi		**Modal**		**Tidak Terduga**		**Transfer**		**Jumlah Sebelum**	**Jumlah Sesudah**
	Sebelum	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.740.738.044,00	9.317.327.679,00	145.138.945,00	33.787.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885.876.989,00	9.351.115.648,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.079.945.775,00	10.387.760.824,00	217.607.730,00	225.893.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297.553.505,00	10.613.654.680,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	41.951.378.955,00	48.587.897.508,00	5.743.064.650,00	8.693.991.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694.443.605,00	57.281.888.783,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.726.788.029,00	16.978.015.723,00	5.744.904.665,00	5.582.438.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471.692.694,00	22.560.453.778,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.729.610.578,00	17.461.971.919,00	281.341.155,00	245.187.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010.951.733,00	17.707.159.264,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.787.992.272,00	20.493.738.932,00	4.112.002.010,00	2.401.201.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899.994.282,00	22.894.940.858,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.118.545.257,00	16.502.397.612,60	1.760.361.922,00	1.638.082.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.878.907.179,00	18.140.479.690,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	26.083.932.077,00	31.906.743.345,80	1.457.516.542,00	1.332.574.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.541.448.619,00	33.239.317.426,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.575.530.505,00	16.551.407.142,00	274.987.400,00	267.342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850.517.905,00	16.818.749.442,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	16.145.093.131,00	15.582.076.395,50	2.455.719.331,00	3.311.338.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.812.462,00	18.893.414.726,50
Urusan Pemerintah Daerah	**Belanja**									
	Operasi		**Modal**		**Tidak Terduga**		**Transfer**		**Jumlah Sebelum**	**Jumlah Sesudah**
	Sebelum	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	83.462.634.692,00	92.791.629.644,00	15.102.456.080,00	25.540.642.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.565.090.772,00	118.332.272.052,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.669.664.651,00	11.393.974.144,00	487.147.798,00	889.624.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156.812.449,00	12.283.598.469,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	300.000.000,00	156.038.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	156.038.586,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.376.850.850,00	3.379.690.700,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.850.850,00	3.579.690.700,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.210.218.567,00	15.956.557.534,00	284.707.107,00	240.549.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494.925.674,00	16.197.107.218,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	83.367.994.502,00	94.625.655.694,00	5.546.109.516,00	2.952.451.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.914.104.018,00	97.578.106.944,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	20.529.951.765,00	21.121.377.145,00	6.351.315.141,00	1.209.189.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.881.266.906,00	22.330.566.460,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	217.794.793.847,00	228.644.481.156,79	9.830.228.918,00	31.062.627.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	227.625.022.765,00	259.707.108.286,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	99.263.634.483,00	106.538.019.166,19	1.681.609.948,00	2.224.906.541,00	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	602.609.827.351,00	658.857.333.465,74
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.325.343.690,00	30.031.219.164,00	295.756.900,00	376.910.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.621.100.590,00	30.408.129.304,00
UNSUR KEWILAYAHAN	77.645.953.605,00	85.575.086.637,16	2.651.702.395,00	2.341.519.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.297.656.000,00	87.916.606.622,46
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	17.363.840.028,00	16.225.378.163,00	306.182.800,00	213.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670.022.828,00	16.439.235.163,00
TOTAL	2.384.132.390.457,00	2.923.266.734.140,55	523.070.692.769,00	840.478.933.009,50	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	3.408.867.666.146,00	4.313.840.074.908,60

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp3.408.867.666.146,00 bertambah Rp904.972.408.762,60 menjadi Rp4.313.840.074.908,60 diuraikan sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel 9

Postur Belanja Daerah

Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025(Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	4.313.840.074.908,60	100
Belanja Operasi	2.923.266.734.140,55	67,76
Belanja Pegawai	1.605.860.647.744,57	37,22
Belanja Barang dan Jasa	975.692.050.058,98	22,61
Belanja Hibah	264.045.344.337,00	6,12
Belanja Bantuan Sosial	77.668.692.000,00	1,80
Belanja Modal	840.478.933.009,50	19,48
Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	0,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.240.911.785,61	2,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.842.599.260,00	3,24
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	560.185.773.183,89	12,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.116.469.853,00	0,48
Belanja Modal Aset Lainnya	96.393.177,00	0,002
Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	0,12
Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	0,12

Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025(Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
Belanja Transfer	544.652.123.254,00	12,62
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp2.384.132.390.457,00 bertambah Rp539.134.343.683,55 menjadi Rp2.923.266.734.140,55 atau 67,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

   a. Belanja Pegawai

      Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp1.260.994.266.412,00 bertambah Rp344.866.381.332,57 menjadi Rp1.605.860.647.744,57 atau 37,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

      1) Gaji dan Tunjangan ASN

         Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp786.371.961.977,00 bertambah Rp83.938.931.278,27 menjadi Rp870.310.893.255,27 atau 20,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji

pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp29.672.641.389,00 bertambah Rp13.906.287.179,00 menjadi Rp43.578.928.568,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp62.726.201.582,94 atau terdapat selisih kurang Rp19.147.273.014,94.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp200.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan DPRD seharusnya Rp113.895.852,00 atau terdapat selisih lebih Rp86.104.148,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp19.600.000,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp7.364.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp12.236.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp1.564.566.306,00 bertambah Rp388.011.139,00 menjadi Rp1.952.577.445,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp4.195.921.913,00 bertambah Rp854.517.248,00 menjadi Rp5.050.439.161,00,

belum memenuhi alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp1.554.138.662,19 atau terdapat selisih lebih Rp398.438.782,81; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp4.662.415.986,56 atau terdapat selisih lebih Rp388.023.174,44.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD semula Rp2.000.000,00 bertambah Rp13.000.000,00 menjadi Rp15.000.000,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula Rp35.755.000,00 berkurang Rp13.000.000,00 menjadi Rp22.755.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp1.205.928,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp600.000,00.

dianggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* semula Rp229.100.000,00 berkurang Rp10.400.000,00 menjadi Rp218.700.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 dan diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, ~~dan~~ sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp2.498.185.054,00 berkurang Rp934.470.852,60 menjadi Rp1.563.714.201,40 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula Rp25.074.684.780,00 bertambah Rp1.085.000.000,00 menjadi Rp26.159.684.780,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Uang Representasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula Rp1.374.408.000,00 bertambah Rp81.406.500,00 menjadi Rp1.455.814.500,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula Rp178.315.200,00 bertambah Rp5.481.000,00 menjadi Rp183.796.200,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 telah memenuhi ketentuan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula Rp1.323.000.000,00 bertambah Rp661.500.000,00 menjadi Rp1.984.500.000,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Reses.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Reses DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp5.166.000.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp6.642.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp600.000.000,00 bertambah Rp199.000.000,00 menjadi Rp799.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp587.378.681.108,99 yaitu Rp881.068.021,66.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Belanja TPP ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp328.348.833.195,00 bertambah Rp259.538.123.436,30 menjadi Rp587.886.956.631,30 atau 13,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp298.797.072.717,00 bertambah Rp43.750.179.516,90 menjadi Rp342.547.252.233,90;

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp13.596.445.000,00 bertambah Rp1.132.378.984,00 menjadi Rp14.728.823.984,00;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp14.181.241.500,00 bertambah Rp525.383.500,40 menjadi Rp14.706.625.000,40; dan
d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp1.774.073.978,00 bertambah Rp214.130.181.435,00 menjadi Rp215.904.255.413,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal:

a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan
c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan

yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran Rp153.721.480,00;
b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Rp403.468.090,00;
c) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada:
    (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp193.134.453.405,00;
    (2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp12.543.803.030,00; dan
    (3) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) PNSD Rp2.822.975.000,00.
d) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp915.867.821.096,00 bertambah Rp59.824.228.962,98 menjadi Rp975.692.050.058,98 atau 22,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula Rp156.533.126.248,00 berkurang Rp2.814.379.845,91 menjadi Rp153.718.746.402,09 atau 3,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp149.644.597.481,00 berkurang Rp2.772.016.445,91 menjadi Rp146.872.581.035,09 atau 3,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula Rp4.949.940.575,00 bertambah Rp656.571.410,00 menjadi Rp5.606.511.985,00;

(2) Belanja Bahan-Bahan Kimia semula Rp1.594.813.493,00 berkurang Rp41.346.333,01 menjadi Rp1.553.467.159,99;

(3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp7.595.488.920,00 bertambah Rp51.618.889,50 menjadi Rp7.647.107.809,50;

(4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula Rp1.945.394.230,00 berkurang Rp608.809.600,00 menjadi Rp1.336.584.630,00;

(5) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel semula Rp715.500.000,00 berkurang Rp213.087.400,00 menjadi Rp502.412.600,00;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp11.936.305.187,00 berkurang Rp2.899.348.292,19 menjadi Rp9.036.956.894,81;

(7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp16.553.060.211,00 berkurang Rp3.538.853.047,51 menjadi Rp13.014.207.163,49;

(8) Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula Rp1.516.705.127,00 bertambah Rp144.581.442,00 menjadi Rp1.661.286.569,00;

(9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula Rp6.937.599.609,00 bertambah Rp2.749.838.251,00 menjadi Rp9.687.437.860,00;

(10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp2.221.120.336,00 berkurang Rp554.148.395,00 menjadi Rp1.666.971.941,00;

(11) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp4.653.565.650,00 bertambah Rp413.126,00 menjadi Rp4.653.978.776,00;

(12) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula Rp4.444.131.840,00 bertambah Rp4.586.124.806,00 menjadi Rp9.030.256.646,00;

(13) Belanja Barang untuk Dijual Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp20.875.051.496,00 berkurang Rp13.204.136.692,00 menjadi Rp7.670.914.804,00;

(14) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula Rp7.952.310.842,00 bertambah Rp2.949.259.836,00 menjadi Rp10.901.570.678,00;

(15) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp21.556.671.868,00 berkurang Rp2.173.579.191,90 menjadi Rp19.383.092.676,10;

(16) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp11.929.235.900,00 bertambah Rp2.107.179.633,70 menjadi Rp14.036.415.533,70;

(17) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp5.963.976.678,00 bertambah Rp160.082.520,00 menjadi Rp6.124.059.198,00;

(18) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp1.113.750.000,00;

(19) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula Rp1.981.529.000,00 bertambah Rp10.574.253.500,00 menjadi Rp12.555.782.500,00; dan

(20) Belanja Pakaian Olahraga semula Rp1.266.900.000,00 berkurang Rp264.700.000,00 menjadi Rp1.002.200.000,00.

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula Rp6.888.528.767,00 berkurang Rp42.363.400,00 menjadi Rp6.846.165.367,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp6.597.936.420,00;

(2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya semula Rp290.592.347,00 berkurang Rp88.298.800,00 menjadi Rp202.293.547,00;

(3) Belanja Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Rp21.935.400,00; dan

(4) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan Rp24.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume

pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula semula Rp11.936.305.187,00 berkurang Rp2.899.348.292,19 menjadi Rp9.036.956.894,81 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp1.467.518.674,00 atau 16,23% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

(b) SKPD Sekretariat Daerah Daerah semula Rp1.268.232.564,00 berkurang Rp480.465.820,10 menjadi Rp787.766.743,90 atau 8,71% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; dan

(c) SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00 atau 3,31% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp16.553.060.211,00 berkurang Rp3.538.853.047,51 menjadi Rp13.014.207.163,49 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp817.439.000,00 berkurang Rp374.899.725,00 menjadi Rp442.539.275,00 atau 3,40% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;

(b) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Rp540.330.900,00 atau 4,15% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak; dan

(c) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp777.164.860,00 berkurang Rp132.923.389,72 menjadi Rp644.241.470,28 atau 4,96% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak.

(3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp21.556.671.868,00 berkurang Rp2.173.579.191,90 menjadi Rp19.383.092.676,10 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Rp810.563.000,00 atau 4,18% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

(b) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp2.556.180.000,00 bertambah Rp191.839.000,00 menjadi Rp2.748.019.000,00 atau 14,17% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat; dan

(c) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semula Rp753.163.000,00 berkurang Rp50.488.000,00 menjadi Rp 702.675.000,00 atau 3,63% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

(4) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp11.929.235.900,00 bertambah Rp2.107.179.633,70 menjadi Rp14.036.415.533,70 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp2.606.619.200,00 bertambah Rp1.396.348.905,00 menjadi Rp4.002.968.105,00 atau 28,51% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;

(b) SKPD Sekretariat DPRD Rp400.500.000,00 atau 2,85% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu; dan

(c) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Rp111.000.000,00 atau 0,79% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.

untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp20.875.051.496,00 berkurang Rp13.204.136.692,00 menjadi Rp7.670.914.804,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

f) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp10.567.095.000,00 bertambah Rp3.459.396.072,00 menjadi Rp14.026.491.072,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp10.567.095.000,00 bertambah Rp2.854.396.072,00 menjadi Rp13.421.491.072,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp4.887.395.000,00 berkurang Rp182.000.000,00 menjadi Rp4.705.395.000,00; dan

(b) Belanja Beasiswa semula Rp5.679.700.000,00 bertambah Rp3.036.396.072,00 menjadi Rp8.716.096.072,00.

(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp605.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp605.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinuntuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;

b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;

c) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD; dan

d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula Rp411.034.740.193,08 berkurang Rp17.760.357.847,48 menjadi Rp393.274.382.345,60 atau 9,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor semula Rp285.843.908.350,00 berkurang Rp25.847.281.238,00 menjadi Rp259.996.627.112,00 atau 6,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp7.156.325.000,00 berkurang Rp1.412.915.819,80 menjadi Rp5.743.409.180,20;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp16.435.289.568,00 berkurang Rp3.599.462.767,50 menjadi Rp12.835.826.800,50;

(3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara semula Rp691.580.000,00 berkurang Rp78.300.000,00 menjadi Rp613.280.000,00;

(4) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp3.215.340.000,00 berkurang Rp122.045.600,00 menjadi Rp3.093.294.400,00;

(5) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp50.121.700.000,00 berkurang Rp47.047.700.000,00 menjadi Rp3.074.000.000,00:

(6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp20.102.750.000,00 bertambah Rp4.760.255.000,00 menjadi Rp24.863.005.000,00:

(7) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula Rp5.468.300.000,00 berkurang Rp1.329.900.000,00 menjadi Rp4.138.400.000,00;

(8) Belanja Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp5.412.590.000,00 berkurang Rp948.525.000,00 menjadi Rp4.464.065.000,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan semula Rp4.770.480.000,00 bertambah Rp794.830.916,50 menjadi Rp5.565.310.916,50;

(10) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula Rp16.592.500.000,00 berkurang Rp1.773.300.000,00 menjadi Rp14.819.200.000,00;

(11) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp9.049.210.800,00 bertambah Rp443.900.000,00 menjadi Rp9.493.110.800,00;

(12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp30.704.157.956,00 bertambah Rp9.350.037.766,00 menjadi Rp40.054.195.722,00;

(13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp5.706.600.000,00 bertambah Rp964.600.000,00 menjadi Rp6.671.200.000,00;

(14) Belanja Belanja Jasa Tenaga Supir semula Rp5.860.844.444,00 bertambah Rp1.806.480.000,00 menjadi Rp7.667.324.444,00; dan

(15) Belanja Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik semula Rp3.306.600.000,00 bertambah Rp82.700.000,00 menjadi Rp3.389.300.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan

program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp59.412.437.761,00 bertambah Rp11.895.973.945,00 menjadi Rp71.308.411.706,00 atau 1,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp5.061.078.240,00;

   (2) Belanja Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula Rp36.386.658.000,00 bertambah Rp14.750.000.000,00 menjadi Rp51.136.658.000,00: dan

   (3) Belanja Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula Rp588.000.000,00.

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

   (1) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

   (2) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III; dan

(3) dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menganggarkan kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

(1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;

(2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan

(3) menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula Rp5.239.600.000,00 berkurang Rp886.400.000,00 menjadi Rp4.353.200.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula Rp9.548.329.710,00 berkurang Rp2.845.755.555,00 menjadi Rp6.702.574.155,00; dan

(c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula Rp19.545.311,00 bertambah Rp817.212.300,00 menjadi Rp836.757.611,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(5) Penyediaan anggaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah semula Rp2.569.226.500,00 bertambah Rp60.917.200,00 menjadi Rp2.630.143.700,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Tanah tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp9.909.792.000,00 bertambah Rp3.393.236.700,00 menjadi Rp13.303.028.700,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   (a) Belanja Sewa Electric Generating Set Rp57.960.000,00;
   (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp4.258.120.000,00 bertambah Rp2.117.761.200,00 menjadi Rp6.375.881.200,00;
   (c) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp265.600.000,00 berkurang Rp60.100.000,00 menjadi Rp205.500.000,00;
   (d) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp2.782.025.500,00 bertambah Rp857.530.000,00 menjadi Rp 3.639.555.500,00;
   (e) Belanja Sewa Alat Pendingin semula Rp458.489.500,00 betambah Rp16.570.500,00 menjadi Rp475.060.000,00; dan
   (f) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula Rp1.229.640.000,00 bertambah Rp106.950.000,00 menjadi Rp 1.336.590.000,00.

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp8.052.568.000,00 berkurang Rp483.221.250,00 menjadi Rp7.569.346.750,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp2.227.878.000,00 berkurang Rp544.934.000,00 menjadi Rp1.682.944.000,00;
   (b) Belanja Sewa Belanja Sewa Taman semula Rp560.310.000,00 berkurang Rp40.830.000,00 menjadi Rp519.480.000,00;
   (c) Belanja Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp329.175.000,00 berkurang Rp30.000.000,00 menjadi Rp299.175.000,00; dan
   (d) Belanja Sewa Hotel semula Rp3.994.645.000,00 berkurang Rp283.097.250,00 menjadi Rp3.711.547.750,00.

(4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(5) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp31.259.746.082,08 berkurang Rp7.184.863.354,48 menjadi Rp24.074.882.727,60 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula Rp4.381.900.000,00 berkurang Rp4.282.954.600,00 menjadi Rp98.945.400,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula Rp3.736.616.000,00 berkurang Rp140.969.200,40 menjadi Rp 3.595.646.799,60;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula Rp8.908.001.332,00 bertambah Rp1.460.987.901,00 menjadi Rp10.368.989.233,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa-Perencanaan Wilayah semula Rp5.976.000.000,00 berkurang Rp779.643.430,00 menjadi Rp5.196.356.570,00;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp4.120.449.973,00 berkurang Rp3.233.477.591,90 menjadi Rp886.972.381,10; dan

(f) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan semula Rp835.000.000,00 berkurang Rp329.800.000,00 menjadi Rp505.200.000,00.

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp3.572.000.000,00 bertambah Rp66.932.600,00 menjadi Rp3.638.932.600,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika semula Rp1.972.000.000,00 berkurang Rp16.687.400,00 menjadi Rp1.955.312.600,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Konsultansi Manajemen semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp92.600.000,00 menjadi Rp1.592.600.000,00; dan

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp91.020.000.

(3) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan belanja jasa ketersediaan layanan *(Availability Payment)* untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d dan butir 3.4.1.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa sebagaimana maksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp12.059.088.000,00

bertambah Rp803.464.750,00 menjadi Rp12.862.552.750,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp10.436.113.000,00 bertambah Rp1.014.226.000,00 menjadi Rp11.450.339.000,00; dan

(2) Belanja Diklat Kepemimpinan semula Rp1.622.975.000,00 berkurang Rp210.761.250,00 menjadi Rp1.412.213.750,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2), butir 3.4.1.2.2.f.3) dan butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasinharus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya

serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan semula Rp78.437.883.623,92 bertambah Rp26.106.962.733,00 menjadi Rp104.544.846.356,92 atau 2,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp26.544.731.830,00 bertambah Rp1.320.950.497,00 menjadi Rp27.865.682.327,00 atau 0,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya semula Rp2.266.000.000,00 berkurang Rp312.584.490,00 menjadi Rp1.953.415.510,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set semula Rp533.914.700,00 berkurang Rp6.775.171,00 menjadi Rp527.139.529,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp20.589.016.300,00 bertambah Rp1.018.336.308,00 menjadi Rp21.607.352.608,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula Rp Rp60.000.000,00 berkurang Rp60.000.000,00 menjadi Rp0,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp226.560.000,00;

(6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga semula

Rp228.000.000,00 bertambah Rp178.108.000,00 menjadi Rp406.108.000,00;

(7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp443.330.000,00;

(8) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya semula Rp80.808.000,00 bertambah Rp35.025.000,00 menjadi Rp115.833.000,00;

(9) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp160.260.000,00;

(10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula Rp17.146.680,00 bertambah Rp42.000.000,00 menjadi Rp59.146.680,00;

(11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula Rp1.536.238.000,00 bertambah Rp25.192.000,00 menjadi Rp1.561.430.000,00;

(12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Rp14.500.000,00;

(13) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp100.000.000,00;

(14) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp41.388.850,00;

(15) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Rp51.132.150,00;

(16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya semula Rp47.286.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp147.286.000,00;

(17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe Rp100.000.000,00;

(18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp100.000.000,00; dan

(19) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar Rp250.800.000,00.

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp11.804.779.711,92 bertambah Rp3.342.317.098,00 menjadi Rp15.147.096.809,92 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp11.707.279.711,92 bertambah Rp3.250.632.098,00 menjadi Rp14.957.911.809,92;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp104.185.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum semula Rp97.500.000,00 berkurang Rp12.500.000,00 menjadi Rp85.000.000,00;

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp40.002.567.220,00 bertambah Rp21.443.695.138,00 menjadi Rp61.446.262.358,00 atau 1,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten semula Rp30.283.775.220,00 bertambah Rp3.635.238.768,00 menjadi Rp33.919.013.988,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya semula Rp9.718.792.000,00 bertambah Rp17.510.680.050,00 menjadi Rp27.229.472.050,00; dan

(3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp297.776.320,00.

d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp85.804.862,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik Rp85.804.862,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan
b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp144.311.143.233,00 berkurang Rp32.078.591.398,23 menjadi Rp112.232.551.834,77 atau 2,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp143.820.878.500,00 berkurang Rp31.701.982.665,23 menjadi Rp112.118.895.834,77 atau 2,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp104.208.786.313,00 berkurang Rp28.193.411.724,88 menjadi Rp76.015.374.588,12 atau 67,73% dari total Belanja Perjalanan Dinas, yang antara lain tercantum pada:
      (a) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp44.665.252.923,00 berkurang Rp14.863.100.293,69 menjadi Rp29.802.152.629,31 atau 39,21% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
      (b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp11.720.803.706,00 bertambah Rp1.645.405.680,65 menjadi Rp10.075.398.025,35 atau 13,25% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

   (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp39.612.092.187,00 berkurang Rp3.508.570.940,35 menjadi Rp36.103.521.246,65 atau 32,20% dari total Belanja Perjalanan Dinas, yang antara lain tercantum pada:
      (a) SKPD Inspektorat Daerah semula Rp1.809.345.000,00 berkurang Rp245.321.000,00 menjadi Rp1.564.024.000,00 atau 4,33% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
      (b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp2.584.594.000,00 berkurang Rp1.035.048.000,00 menjadi Rp1.549.546.000,00 atau 4,29% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
      (c) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp973.300.000,00 bertambah Rp1.001.448.000,00 menjadi Rp1.974.748.000,00 atau 5,46% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula Rp490.264.733,00 berkurang Rp376.608.733,00 menjadi Rp113.656.000,00 atau

0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula Rp490.264.733,00 berkurang Rp376.608.733,00 menjadi Rp113.656.000,00, yang hanya tercantum pada SKPD Sekretariat Daerah semula Rp490.264.733,00 berkurang Rp376.608.733,00 menjadi Rp113.656.000,00 atau 100% dari total Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan atau sejenisnya yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada:

a) Sekretariat Daerah semula Rp14.795.662.439,00 berkurang Rp3.057.062.413,65 menjadi Rp11.738.600.025,35 atau 8,42% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp139.334.235.055,00; dan
b) Sekretariat DPRD semula Rp45.638.552.923,00 berkurang Rp13.861.652.293,69 menjadi Rp31.776.900.629,31 atau 26,40% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp120.372.873.231,00.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk perjalanan dinas biasa yang dilakukan di luar negeri, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
b) transparansi dan akuntabilitas;
c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah;

sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Keluar Negeri.

Penambahan pagu anggaran belanja perjalanan dinas diperkenankan sepanjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kepatutan, kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:

a) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
b) kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
c) batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;
d) belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

C. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula Rp140.278.069.039,00 bertambah Rp123.767.275.298,00 menjadi Rp264.045.344.337,00 atau 6,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 10, sebagai berikut:

Tabel. 10

Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah(Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	111.781.321.093,00	112,095,635,679.00	100.28	4.013.727.352.101,00	2,78
APBD 2024	167.145.566.663,00	136,655,551,455.00	81.76	4.750.926.224.507,58	3,52
APBD 2025	140.278.069.039,00	96,469,004,403.00	36.54	3.408.867.666.146,00	4,12
Rancangan Perubahan APBD 2025	264.045.344.337,00	0	0	4.313.840.074.908,60	6,12

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp140.278.069.039,00 atau 4,12% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp167.145.566.663,00 atau 3,52% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp4.750.926.224.507,58, dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp111.781.321.093,00 atau 2,78% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp4.013.727.352.101,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

1) Realisasi Belanja Hibah per Juli 2025 Rp96,469,004,403.00 atau 36.54% dari total target Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp140.278.069.039,00;
2) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp136,655,551,455.00 atau 81.76% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp167.145.566.663,00; dan

3) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp112,095,635,679.00 atau 100.28% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp111.781.321.093,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.704.000.000,00 bertambah Rp21.126.699.375,00 menjadi Rp30.830.699.375,00 atau 0,71% % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
   a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp500.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp450.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp500.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp450.000.000,00;
   b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.204.000.000,00 bertambah Rp21.163.699.375,00 menjadi Rp30.367.699.375,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.204.000.000,00 bertambah Rp21.163.699.375,00 menjadi Rp30.367.699.375,00; dan
   c) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp13.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp13.000.000,00.
2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.390.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi

Rp1.390.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.390.000.000,00;

3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp129.434.069.039,00 bertambah Rp71.418.100.794,00 menjadi Rp200.852.169.833,00 atau 4,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
   a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp85.469.023.722,00 bertambah Rp45.307.612.511,00 menjadi Rp130.776.636.233,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp37.582.556.672,00 bertambah Rp359.981.628,00 menjadi Rp37.942.538.300,00, yang antara lain tercantum pada:
         (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya; dan
         (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp27.061.098.300,00 bertambah Rp1.420.000.000,00 menjadi Rp28.481.098.300,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota.
      (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp47.886.467.050,00 bertambah Rp44.947.630.883,00 menjadi Rp92.834.097.933,00, yang antara lain tercantum pada:
         (a) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp5.148.944.600,00 bertambah Rp9.667.365.200,00 menjadi Rp14.816.309.800,00 pada Sub Kegiatan

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan;

(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp8.224.643.200,00 bertambah Rp7.097.138.100,00 menjadi Rp15.321.781.300,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat; dan

(c) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp32.508.680.000,00 bertambah Rp13.012.000.150,00 menjadi Rp45.520.680.150,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp38.915.407.084,00 bertambah Rp15.266.833.603,00 menjadi Rp54.182.240.687,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp38.915.407.084,00 bertambah Rp15.266.833.603,00 menjadi Rp54.182.240.687,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp2.720.671.000,00 bertambah Rp1.760.113.500,00 menjadi Rp4.480.784.500,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan

(2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp2.221.000.000,00 bertambah Rp1.414.000.000,00 menjadi Rp3.635.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.

c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp696.223.913,00 bertambah Rp8.106.200.000,00 menjadi Rp8.802.423.913,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp695.968.613,00 bertambah Rp8.106.200.000,00 menjadi Rp8.802.168.613,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp8.083.890.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; dan

(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp541.408.883,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp255.300,00, yang hanya tercantum pada sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan.

d) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.808.414.320,00 bertambah Rp2.872.454.680,00 menjadi Rp5.680.869.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.808.414.320,00 bertambah Rp2.872.454.680,00 menjadi Rp5.680.869.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp98.914.320,00 berkurang Rp98.914.320,00 menjadi Rp0,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); dan

(2) Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.709.500.000,00 bertambah Rp2.971.369.000,00 menjadi Rp5.680.869.000,00 pada Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

e) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp1.545.000.000,00 berkurang Rp135.000.000,00 menjadi Rp1.410.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang

kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp1.545.000.000,00 berkurang Rp135.000.000,00 menjadi Rp1.410.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.050.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan

(2) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka

Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp961.515.264,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Belanja Bantuan Sosial

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin semula Rp66.992.233.910,00 bertambah Rp10.676.458.090,00 menjadi Rp77.668.692.000,00 atau 1,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel. 11

Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	200.000.000,00	200.000.000,00	100	4.013.727.352.101,00	0,005
APBD 2024	20.765.666.000,00	5.385.000.000,00	25,93	4.750.926.224.507,58	0,43
APBD 2025	66.992.233.910,00	12.395.725.000,00	18,50	3.408.867.666.146,00	1,96
Rancangan Perubahan APBD 2025	77.668.692.000,00	0	0	4.313.840.074.908,60	1,80

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp66.992.233.910,00 atau 1,96% dari total belanja daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp20.765.666.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp4.750.926.224.507,58 dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp200.000.000,00 atau 0,005% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp4.013.727.352.101,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial per bulan Juli 2025 Rp12.395.725.000,00 atau 18,50% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp66.992.233.910,00;
2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 Rp5.385.000.000,00 atau 25,93% dari total Belanja Bantuan Sosial

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp20.765.666.000,00;

3) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Rp200.000.000,00 atau 100% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp200.000.000,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang antara lain antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp48.182.233.910,00 bertambah Rp4.576.458.090,00 menjadi Rp52.758.692.000,00 atau 1,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
   a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp47.653.791.910,00 bertambah Rp4.652.108.090,00 menjadi Rp52.305.900.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp47.653.791.910,00 bertambah Rp4.652.108.090,00 menjadi Rp52.305.900.000,00, yang antara lain tercantum pada:
      (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp1.460.000.000,00 bertambah Rp21.540.000.000,00 menjadi Rp23.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
      (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp45.785.000.000,00 berkurang Rp16.879.100.000,00 menjadi Rp28.905.900.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
   b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp528.442.000,00 berkurang Rp75.650.000,00 menjadi Rp452.792.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp528.442.000,00 berkurang Rp75.650.000,00 menjadi Rp452.792.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.
2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga semula Rp18.810.000.000,00 bertambah Rp6.100.000.000,00 menjadi

Rp24.910.000.000,00 atau 0,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga semula Rp18.810.000.000,00 bertambah Rp6.100.000.000,00 menjadi Rp24.910.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga semula Rp18.810.000.000,00 bertambah Rp6.100.000.000,00 menjadi Rp24.910.000.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja bantuan sosial dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah,

paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, sedangkan ~~dan~~ Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarannya pada saat

penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut:

a. bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras;
b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, *top up* bantuan sosial reguler, dan bantuan beras; dan
c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp523.070.692.769,00 bertambah Rp317.408.240.240,50 menjadi Rp840.478.933.009,50 atau 19,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah semula Rp10.314.120.000,00 berkurang Rp8.317.334.250,00 menjadi Rp1.996.785.750,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah semula Rp10.314.120.000,00 berkurang Rp8.317.334.250,00 menjadi Rp1.996.785.750,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    1) Belanja Modal Tanah Persil semula Rp10.314.120.000,00 berkurang Rp8.317.334.250,00 menjadi Rp1.996.785.750,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
        a) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal semula Rp7.072.280.000,00 berkurang Rp6.977.689.600,00 menjadi Rp94.590.400,00;
        b) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp54.761.850,00;
        c) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah semula Rp49.320.000,00 berkurang Rp49.320.000,00 menjadi Rp0,00; dan
        d) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya semula Rp2.343.200.000,00 berkurang Rp1.516.478.900,00 menjadi Rp826.721.100,00,00.
    2) Belanja Modal Lapangan semula Rp849.320.000,00 bertambah Rp171.392.400,00 menjadi Rp1.020.712.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
        a) Belanja Modal Tanah untuk Jalan semula Rp800.000.000,00 bertambah Rp90.132.000,00 menjadi Rp890.132.000,00;

b) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi semula Rp49.320.000,00 berkurang Rp49.320.000,00 menjadi Rp0,00; dan

c) Belanja Modal Tanah untuk Makam, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp130.580.400,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp 74.347.961.221,00 bertambah Rp42.892.950.564,61 menjadi Rp117.240.911.785,61 atau 2,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Alat Besar semula Rp4.644.428.398,00 berkurang Rp1.974.935.416,00 menjadi Rp2.669.492.982,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Besar Darat semula Rp3.899.350.080,00 berkurang Rp1.949.675.040,00 menjadi Rp1.949.675.040,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Excavator semula Rp3.899.350.080,00 berkurang Rp1.949.675.040,00 menjadi Rp1.949.675.040,00;

b) Belanja Modal Alat Bantu semula Rp745.078.318,00 berkurang Rp25.260.376,00 menjadi Rp719.817.942,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal *Electric Generating Set* semula Rp572.000.000,00 berkurang Rp22.000.000,00 menjadi Rp550.000.000,00; dan

(2) Belanja Modal Pompa semula Rp173.078.318,00 berkurang Rp3.260.376,00 menjadi Rp169.817.942,00.

2) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp12.393.453.467,00 bertambah Rp9.978.898.930,00 menjadi Rp22.372.352.397,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp12.254.234.077,00 bertambah Rp10.002.561.680,00 menjadi Rp22.256.795.757,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp83.769.147,00;

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp7.039.600.000,00;

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula Rp1.079.997.150,00 berkurang Rp125.001.900,00 menjadi Rp954.995.250,00;

(4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp189.108.480,00 bertambah Rp1.194.422.880,00 menjadi Rp1.383.531.360,00;

(5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga semula Rp688.000.000,00 bertambah Rp255.000.000,00 menjadi Rp943.000.000,00; dan

(6) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp688.000.000,00 bertambah Rp255.000.000,00 menjadi Rp943.000.000,00.

b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor semula Rp3.330.000,00 bertambah Rp11.655.000,00 menjadi Rp14.985.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang semula Rp3.330.000,00 bertambah Rp11.655.000,00 menjadi Rp14.985.000,00;

c) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp15.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang Rp15.000.000,00;

d) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor semula Rp120.889.390,00 berkurang Rp35.317.750,00 menjadi Rp85.571.640,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus

semula Rp120.889.390,00 berkurang Rp35.317.750,00 menjadi Rp85.571.640,00.

3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur semula Rp7.448.490,00 bertambah Rp17.611.121,00 menjadi Rp25.059.611,00 atau 0,0005% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja;
   a) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp6.650.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) Rp6.650.000,00;
   b) Belanja Modal Alat Ukur semula Rp798.490,00 bertambah Rp17.611.121,00 menjadi Rp 18.409.611,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain Rp798.490,00;
      (2) Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp16.955.000,00; dan
      (3) Belanja Modal Anak Timbangan/Biara, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp656.121,00.
4) Belanja Modal Alat Pertanian semula Rp175.387.000,00 berkurang Rp28.917.000,00 menjadi Rp146.470.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian semula Rp175.387.000,00 berkurang Rp28.917.000,00 menjadi Rp146.470.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   a) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman semula Rp68.310.000,00 berkurang Rp330.000,00 menjadi Rp67.980.000,00;
   b) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak semula Rp37.272.000,00 berkurang Rp4.995.000,00 menjadi Rp32.277.000,00;
   c) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan semula Rp9.805.000,00 bertambah Rp36.408.000,00 menjadi Rp46.213.000,00; dan
   d) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan semula Rp60.000.000,00 berkurang Rp60.000.000,00 menjadi Rp0,00.
5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp21.253.686.521,00 bertambah Rp12.022.945.132,27 menjadi

Rp33.276.631.653,27 atau 0,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp2.090.111.032,00 berkurang Rp569.156.544,00 menjadi Rp1.520.954.488,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   (1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor semula Rp23.523.120,00 berkurang Rp23.523.120,00 menjadi Rp0,00; dan
   (2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp2.066.587.912,00 berkurang Rp545.633.424,00 menjadi Rp1.520.954.488,00.

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp15.825.820.429,00 bertambah Rp11.213.363.117,27 menjadi Rp27.039.183.546,27 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   (1) Belanja Modal Mebel semula Rp11.137.478.154,00 bertambah Rp10.552.935.224,10 menjadi Rp21.690.413.378,10;
   (2) Belanja Modal Alat Pembersih semula Rp263.948.140,00 berkurang Rp24.425.140,00 menjadi Rp239.523.000,00;
   (3) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp1.380.683.820,00 berkurang Rp204.576.237,00 menjadi Rp1.176.107.583,00;
   (4) Belanja Modal Alat Dapur semula Rp1.072.125.039,00 bertambah Rp347.887.861,00 menjadi Rp724.237.178,00;
   (5) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) semula Rp1.920.275.442,00 bertambah Rp1.212.331.031,17 menjadi Rp3.132.606.473,17; dan
   (6) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran semula Rp51.309.834,00 bertambah Rp24.986.100,00 menjadi Rp76.295.934,00.

c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula Rp3.337.755.060,00 bertambah Rp1.378.738.559,00 menjadi Rp4.716.493.619,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   (1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat semula Rp984.320.820,00 berkurang Rp54.753.060,00 menjadi Rp929.567.760,00;
   (2) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat semula Rp155.771.590,00 bertambah Rp1.475.688.444,00 menjadi Rp1.631.460.034,00;
   (3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat semula Rp882.855.850,00 bertambah Rp115.502.153,00 menjadi Rp998.358.003,00;

(4) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat semula Rp40.690.000,00 bertambah Rp543.672.000,00 menjadi Rp584.362.000,00;

(5) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat semula Rp1.274.116.800,00 berkurang Rp701.370.978,00 menjadi Rp572.745.822,00.

6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp1.266.738.148,00 bertambah Rp5.998.120.043,00 menjadi Rp7.264.858.191,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Studio semula Rp1.148.933.448,00 bertambah Rp3.340.383.561,00 menjadi Rp4.489.317.009,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Peralatan Studio Audio semula Rp343.977.285,00 bertambah Rp2.084.706.101,00 menjadi Rp2.428.683.386,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film semula Rp775.091.163,00 bertambah Rp1.231.395.210,00 menjadi Rp2.006.486.373,00;

(3) Belanja Modal Peralatan Cetak semula Rp6.555.000,00 bertambah Rp17.267.250,00 menjadi Rp23.822.250,00; dan

(4) Belanja Modal Alat Studio Lainnya semula Rp23.310.000,00 bertambah Rp7.015.000,00 menjadi Rp30.325.000,00.

b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula Rp117.804.700,00 bertambah Rp2.557.172.702,00 menjadi Rp2.674.977.402,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone* semula Rp75.344.700,00 berkurang Rp22.989.298,00 menjadi Rp52.355.402,00;

(2) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF semula Rp17.760.000,00 bertambah Rp25.000.000,00 menjadi Rp42.760.000,00;

(3) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF semula Rp2.500.000,00 berkurang Rp2.500.000,00 menjadi Rp0,00; dan

(4) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya semula Rp22.200.000,00 bertambah Rp2.557.662.000,00 menjadi Rp2.579.862.000,00.

c) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp100.563.780,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp100.563.780,00;

7) Belanja Modal Komputer semula Rp17.891.163.214,00 berkurang Rp3.261.192.345,66 menjadi Rp14.629.970.868,34 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
   (a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp14.704.857.004,00 berkurang Rp3.588.094.399,94 menjadi Rp11.116.762.604,06, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp6.801.110.756,00 bertambah Rp1.343.919.709,40 menjadi Rp8.145.030.465,40; dan
      (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula Rp7.903.746.248,00 berkurang Rp4.932.014.109,34 menjadi Rp2.971.732.138,66.
   (b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp3.186.306.210,00 bertambah Rp326.902.054,28 menjadi Rp3.513.208.264,28, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp1.194.158.646,00 berkurang Rp114.895.337,00 menjadi Rp1.079.263.309,00;
      (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp501.457.075,00 bertambah Rp128.397.360,00 menjadi Rp629.854.435,00; dan
      (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp1.490.690.489,00 bertambah Rp313.400.031,28 menjadi Rp1.804.090.520,28.
8) Belanja Modal Alat Pengeboran semula Rp42.893.000,00 berkurang Rp3.885.000,00 menjadi Rp39.008.000,00 atau 0,0009% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin semula Rp42.893.000,00 berkurang Rp3.885.000,00 menjadi Rp39.008.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Bantu semula Rp42.893.000,00 berkurang Rp3.885.000,00 menjadi Rp39.008.000,00;

9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian semula Rp181.047.000,00 berkurang Rp181.047.000,00 menjadi Rp0,00;
10) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp12.610.544,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Produksi Rp12.610.544,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya Rp12.610.544,00;
11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja semula Rp181.224.887,00 berkurang Rp70.702.200,00 menjadi Rp110.522.687,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    a) Belanja Modal Alat Pelindung semula Rp83.433.887,00 berkurang Rp32.851.200,00 menjadi Rp50.582.687,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
        (1) Belanja Modal Baju Pengaman semula Rp70.085.087,00 berkurang Rp29.448.000,00 menjadi Rp40.637.087,00; dan
        (2) Belanja Modal Sepatu Lapangan semula Rp13.348.800,00 berkurang Rp3.403.200,00 menjadi Rp9.945.600,00.
    b) Belanja Modal Alat SAR semula Rp97.791.000,00 berkurang Rp37.851.000,00 menjadi Rp59.940.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
        (1) Belanja Modal Alat Penolong semula Rp37.851.000,00 berkurang Rp37.851.000,00 menjadi Rp0,00; dan
        (2) Belanja Modal Alat SAR Lainnya Rp59.940.000,00.
12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.540.000,00 atau 0,00003%, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.540.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.540.000,00;

13) Belanja Modal Rambu-Rambu semula Rp1.444.243.200,00 bertambah Rp5.110.000,00 menjadi Rp1.449.353.200,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat semula Rp1.444.243.200,00 bertambah Rp5.110.000,00 menjadi Rp1.449.353.200,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp499.500.000,00;

b) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar semula Rp849.283.200,00 bertambah Rp5.110.000,00 menjadi Rp854.393.200,00; dan

c) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp95.460.000,00.

14) Belanja Modal Peralatan Olahraga semula Rp970.408.920,00 bertambah Rp909.267.000,00 menjadi Rp1.879.675.920,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga semula Rp970.408.920,00 bertambah Rp909.267.000,00 menjadi Rp1.879.675.920,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Peralatan Permainan semula Rp348.441.000,00 bertambah Rp398.715.000,00 menjadi Rp747.156.000,00; dan

b) Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya semula Rp621.967.920,00 bertambah Rp510.552.000,00 menjadi Rp1.132.519.920,00.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp100.593.747.003,00 bertambah Rp39.248.852.257,00 menjadi Rp139.842.599.260,00 atau 3,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp96.680.990.650,00 bertambah Rp35.116.486.125,00 menjadi Rp131.797.476.775,00 atau 3,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp89.385.857.200,00 bertambah Rp31.222.580.525,00 menjadi Rp120.608.437.725,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp37.687.528.185,00 berkurang Rp10.484.914.954,00 menjadi Rp27.202.613.231,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp3.886.213.600,00 bertambah Rp6.440.119.200,00 menjadi Rp10.326.332.800,00;

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah semula Rp5.500.000.000,00 berkurang Rp5.473.858.250,00 menjadi Rp26.141.750,00;

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp351.500.000,00;

(5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp21.413.840.581,00 bertambah Rp13.793.695.470,00 menjadi Rp35.207.536.051,00;

(6) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula Rp4.238.265.590,00 berkurang Rp3.617.153.140,00 menjadi Rp621.112.450,00;

(7) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp16.260.009.244,00 bertambah Rp30.115.078.949,00 menjadi Rp46.375.088.193,00; dan

(8) Belanja Modal Taman semula Rp400.000.000,00bertambah Rp98.113.250,00 menjadi Rp498.113.250,00.

b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp7.295.133.450,00 bertambah Rp3.893.905.600,00 menjadi Rp11.189.039.050,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Flat/Rumah Susun semula Rp2.319.610.400,00 bertambah Rp2.555.562.400,00 menjadi Rp4.875.172.800,00; dan

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp4.975.523.050,00 bertambah Rp1.338.343.200,00 menjadi Rp6.313.866.250,00.

2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula Rp1.254.748.160,00 berkurang Rp406.843.810,00 menjadi Rp847.904.350,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula Rp1.254.748.160,00 berkurang Rp406.843.810,00 menjadi

Rp847.904.350,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Rp87.017.000,00;

b) Belanja Modal Pagar semula Rp1.039.996.800,00 berkurang Rp449.262.450,00 menjadi Rp590.734.350,00; dan

c) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya semula Rp127.734.360,00 bertambah Rp42.418.640,00 menjadi Rp170.153.000,00.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp336.951.016.463,00 bertambah Rp223.234.756.720,89 menjadi Rp560.185.773.183,89 atau 12,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp305.099.169.477,00 bertambah Rp210.448.355.696,89 menjadi Rp515.547.525.173,89 atau 11,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan semula Rp265.462.469.650,00 bertambah Rp207.471.576.893,00 menjadi Rp472.934.046.543,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula Rp217.382.167.894,00 bertambah Rp184.977.281.940,00 menjadi Rp402.359.449.834,00;

(2) Belanja Modal Jalan Desa semula Rp300.000.000,00 berkurang Rp300.000.000,00 menjadi Rp0,00; dan

(3) Belanja Modal Jalan Lainnya semula Rp47.780.301.756,00 bertambah Rp22.794.294.953,00 menjadi Rp70.574.596.709,00,00

b) Belanja Modal Jembatan semula Rp39.636.699.827,00 bertambah Rp2.976.778.803,89 menjadi Rp42.613.478.630,89 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jembatan pada Jalan semula Rp37.400.309.827,00 berkurang Rp5.179.018.000,00 menjadi Rp32.221.291.827,00;

(2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp7.757.176.000,00; dan

(3) Belanja Modal Jembatan Lainnya semula Rp2.236.390.000,00 bertambah Rp398.620.803,89 menjadi Rp2.635.010.803,89.

2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp24.197.964.986,00 bertambah Rp4.467.674.524,00 menjadi Rp28.665.639.510,00 atau 0,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp313.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp313.000.000,00;

b) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku semula Rp5.376.379.800,00 berkurang Rp3.153.177.750,00 menjadi Rp2.223.202.050,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku semula Rp5.376.379.800,00 berkurang Rp3.153.177.750,00 menjadi Rp2.223.202.050,00;

c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula Rp18.508.585.186,00 bertambah Rp7.620.852.274,00 menjadi Rp26.129.437.460,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor semula Rp18.508.585.186,00 bertambah Rp7.620.852.274,00 menjadi Rp26.129.437.460,00;

3) Belanja Modal Jaringan semula Rp7.653.882.000,00 bertambah Rp8.318.726.500,00 menjadi Rp15.972.608.500,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Jaringan Air Minum semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.727.472.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.727.472.000,00;

b) Belanja Modal Jaringan Listrik semula Rp7.653.882.000,00 bertambah Rp6.591.254.500,00 menjadi Rp14.245.136.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jaringan Distribusi semula Rp6.103.882.000,00 bertambah Rp3.569.924.500,00 menjadi Rp9.673.806.500,00; dan

(2) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya semula Rp1.550.000.000,00 bertambah Rp3.021.330.000,00 menjadi Rp4.571.330.000,00.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp797.330.777,00 bertambah Rp20.319.139.076,00 menjadi Rp21.116.469.853,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan semula Rp281.502.777,0 bertambah Rp388.032.783,00 menjadi Rp669.535.560,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak semula Rp181.263.460,00 bertambah Rp488.272.100,00 menjadi Rp669.535.560,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum semula Rp181.263.460,00 bertambah Rp488.272.100,00 menjadi Rp669.535.560,00; dan

b) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro semula Rp100.239.317,00 berkurang Rp100.239.317,00 menjadi Rp0,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Audio Visual semula Rp100.239.317,00 berkurang Rp100.239.317,00 menjadi Rp0,00.

2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga semula Rp515.828.000,00 bertambah Rp465.668.000,00 menjadi Rp981.496.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian semula Rp465.828.000,00 bertambah Rp365.783.000,00 menjadi Rp831.611.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Musik semula Rp465.828.000,00 bertambah Rp365.783.000,00 menjadi Rp831.611.000,00;

b) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp99.885.000,00 menjadi Rp149.885.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp99.885.000,00 menjadi Rp149.885.000,00;

3) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp13.079.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanaman Koleksi, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp13.079.000,00.

f. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp66.517.305,00 bertambah Rp29.875.872,00 menjadi Rp96.393.177,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud semula Rp66.517.305,00 bertambah Rp29.875.872,00 menjadi Rp96.393.177,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula Rp66.517.305,00 bertambah Rp29.875.872,00 menjadi Rp96.393.177,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise semula Rp26.615.025,00 bertambah Rp49.139.922,00 menjadi Rp75.754.947,00; dan
2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software semula Rp39.902.280,00 berkurang Rp19.264.050,00 menjadi Rp20.638.230,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi asset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp2.609.388.869,00 bertambah Rp7.584.425.334,00 menjadi Rp10.193.814.203,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    1) Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp2.597.838.869,00 bertambah Rp7.584.425.334,00 menjadi Rp10.182.264.203,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
        a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula Rp1.477.838.869,00 bertambah Rp8.129.425.334,00 menjadi Rp9.607.264.203,00;
        b) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp175.000.000,00;
        c) Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy semula Rp320.000.000,00 bertambah Rp80.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00; dan
        d) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya semula Rp800.000.000,00 berkurang Rp800.000.000,00 menjadi Rp800.000.000,00.

2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp11.550.000,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga Rp11.550.000,00.

b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp592.087.351,00 bertambah Rp1.543.133.962,00 menjadi Rp2.135.221.313,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium semula Rp584.087.351,00 bertambah Rp1.543.133.962,00 menjadi Rp2.127.221.313,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum semula Rp218.442.288,00 bertambah Rp1.460.250.412,00 menjadi Rp1.678.692.700,00;

b) Belanja Modal Laboratorium Kearsipan semula Rp28.242.563,00 bertambah Rp948.750,00 menjadi Rp29.191.313,00; dan

c) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp17.630.100,00.

2) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp8.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal System/Power Supply Rp8.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp6.997.200.620,00 berkurang Rp1.554.916.115,45 menjadi Rp5.442.284.504,55 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja Transfer

   Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp494.667.382.300,00 bertambah Rp49.984.740.954,00 menjadi Rp544.652.123.254,00 atau 12,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada jenis Belanja Bantuan Keuangan semula Rp494.667.382.300,00 bertambah Rp49.984.740.954,00 menjadi Rp544.652.123.254,00, yang hanya diuraikan dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp494.667.382.300,00 bertambah Rp49.984.740.954,00 menjadi Rp544.652.123.254,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp494.667.382.300,00 bertambah Rp49.984.740.954,00 menjadi Rp544.652.123.254,00 yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa.

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.4.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp1.962.958.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp234.540.000,00 atau 11,94% dari total sub kegiatan;
   b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp1.105.440.000,00 atau 56,31% dari total sub kegiatan; dan
   c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp190.200.000,00 atau 9,68% dari total sub kegiatan.

   pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Rp49.999.850,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
   a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp24.521.800,00 atau 49,04% dari total sub kegiatan; dan
   b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp26.955.000,00 atau 53,91% dari total sub kegiatan.

   pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp12.440.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp12.440.000,00 atau 100% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan.
4. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp135.690.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp27.360.000,00 atau 20,16% dari total sub kegiatan;
   b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp108.330.000,00 atau 79,83% dari total sub kegiatan; dan

   pada SKPD Dinas Kesehatan.
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp67.360.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp63.880.000,00 atau 94,83% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp21.036.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp19.296.000,00 atau 91,72% dari total sub kegiatan.

   Terdapat hampir di seluruh sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan hanya berupa Belanja Perjalanan Dinas;
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota Rp50.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp30.050.000,00 atau 61,10% dari total sub kegiatan;

b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp19.950.000,00 atau 39,9%

pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp3.206.983.283,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

   1) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp10.670.918,00;

   2) Belanja Modal Mebel Rp138.683.800,00; dan

   3) Belanja Modal Alat Pendingin Rp13.275.600,00.

   pada SKPD Dinas Kesehatan;

b. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Rp3.712.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp3.635.000.000,00 pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

c. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp1.962.958.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp33.000.000,00

   pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp5.859.400.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp5.713.600.000,00;

   pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rp6.726.663.110,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

f. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp405.301.418.924,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp191.144.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

g. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp36.350.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp14.000.000,00.

   pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja

Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan defisit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Pembiayaan Daerah

Uraian	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pembiayaan Daerah (%)
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.056.371.759,01	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.056.371.759,01	100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.586.109.626,00	
Penyertaan Modal Daerah	26.586.109.626,00	53,11

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan semula Rp69.983.013.972,00 berkurang Rp19.926.642.212,99 menjadi Rp50.056.371.759,01 atau 1,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp69.983.013.972,00 berkurang Rp19.926.642.212,99 menjadi Rp50.056.371.759,01 atau 1,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp4.313.840.074.908,60.

   Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel. 14, sebagai berikut:

Tabel.14
Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2023	63.371.679.556,00	62.401.787.597,88	98,47	4.013.727.352.101,00	1,58

APBD TA 2024	121.636.582.610,58	131.728.424.207	108,30	4.750.926.224.507,58	2,56
APBD TA 2025	69.983.013.972,00	0,00	0,00	3.408.867.666.146,00	2,05
Rancangan Perubahan APBD TA 2025	50.056.371.759,01	0,00	0,00	4.313.840.074.908,60	1,16

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp69.983.013.972,00 atau 2,05% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00, dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp121.636.582.610,58 atau 2,56% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp4.750.926.224.507,58, dan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp63.371.679.556,00 atau 1,58% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp4.013.727.352.101,00.

Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 Rp0,00 atau 0,00% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp69.983.013.972,00;
b. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 Rp131.728.424.207 atau 108,30% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp121.636.582.610,58; dan
c. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp62.401.787.597,88 atau 98,47% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp63.371.679.556,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.5.2.2.b dan butir 3.5.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.5.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

B. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
   1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
   2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
   3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
   4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
   5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
   6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
   7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
   8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:
   1. Swasembada pangan, energi, dan air;
   2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
   3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
   4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
   5. Pemberantasan kemiskinan;
   6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
   7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
   8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
   9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
   10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan menjadi daerah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

D. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:
    1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
    2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam neger melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas
    4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program upskilling dan *reskitting* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

G. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

H. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

I. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

J. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

K. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan
2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai;

sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.

M. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

N. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal *buton* (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

O. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*;
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Q. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

R. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Musi Banyuasin kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud butir 5.2.19.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
   1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
   2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

   Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
   1. nama kegiatan;
   2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
   3. jumlah anggaran; dan
   4. alokasi anggaran per tahun.

   Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
   1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
   2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

V. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD.

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

W. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

<table>
<tr><th>No.</th><th>Rancangan APBD</th><th>Temuan Evaluasi</th><th>Penjelasan/Tindak Lanjut</th></tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>Tahapan dan Jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Penetapan/Persetujuan /Surat</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Nomor</th><th>Tanggal</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah</td><td>B-900/671/SETDA/2025</td><td>6 Juni 2025</td><td>Sesuai,

(paling lambat minggu I bulan Agustus)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin</td><td>B-900/685/BPKAD II/2025</td><td>1 Juli 2025</td><td>Sesuai,

(paling lambat minggu I bulan Agustus)</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Penetapan/Persetujuan/Surat</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Nomor</th><th>Tanggal</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah</td><td>B-900/671/SETDA/2025</td><td>6 Juni 2025</td><td>Sesuai,

(paling lambat minggu I bulan Agustus)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</td><td>B-900/685/BPKAD II/2025</td><td>1 Juli 2025</td><td>Sesuai,

(paling lambat minggu I bulan Agustus)</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		3	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	6 dan 15 Tahun 2025	21 Agustus 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)		Kabupaten Musi Banyuasin			
		4	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	7 dan 16 Tahun 2025	21 Agustus 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)		3	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	6 dan 15 Tahun 2025	21 Agustus 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
		6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	B-910/968/BPKAD II/2025	28 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)		4	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	7 dan 16 Tahun 2025	21 Agustus 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
		7	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	NO.155/BA/DPRD/2025 NO. 8/BA/BPKAD/2025	15 September 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)		6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	B-910/968/BPKAD II/2025	28 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
								7	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah	NO.155/BA/DPRD/2025 NO. 8		Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun

		9	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	B-910/1058/BPKAD II/2025	Tanggal 16 September disampaikan ke Provinsi tanggal 17 September 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)		tentang Perubahan APBD	/BA/BPKAD/2025	15 September 2025	Anggaran berakhir)
							9	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	B-910/1058/BPKAD II/2025	Tanggal 16 September disampaikan ke Provinsi tanggal 17 September 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)
III.	SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH	1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Penyediaan anggaran untuk Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(weight faltering)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita semula Rp246.241.578.202,00 bertambah Rp36.377.336.765,60 menjadi Rp282.618.914.967,41 atau 6,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang				Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja Percepatan Penurunan *Stunting* Dengan memperhatikan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3)				

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula Rp1.263.265.600 berkurang sebesar Rp698.822.160,00 menjadi Rp564.443.440,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp67.580.000,00 bertambah Rp4.020.000,00 menajadi Rp71.600.000,00 atau 12,69 % dari total sub kegiatan; pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp5.025.386.200,0 bertambah sebesar Rp838.259.000,00 menjadi Rp5.863.645.200,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp4.825.386.200 bertambah Rp738.864.000,00 menjadi Rp5.564.250.200,00 atau 1,22 % dari total sub kegiatan; pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten	

		dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi semula Rp407.238.582.435 bertambah Rp157.075.612.739 menjadi Rp564.314.195.174 atau 38,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berupaya mempertahankan/ mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan capaian target kinerja program,

		Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya semula Rp900.000.000 bertambah Rp386.057.500 menjadi Rp1.286.057.500 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri	kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Selain itu, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan semula Rp40.161.009.827 berkurang Rp5.217.636.696 menjadi Rp34.943.373.131 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja: Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp393.550.000,00 berkurang Rp183.975.000,00 menjadi Rp209.575.000,00 atau 0,60% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas PU Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/	

		mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem semula Rp85.345.506.397 bertambah Rp67.844.656.210 menjadi Rp153.190.162.606 atau 3,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memformulasi uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memperhatikan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang

		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana semula Rp199.983.000,00 berkurang Rp128.061.000,00 menjadi Rp71.922.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp22.542.000,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan atau	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		31,34% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		4. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Sehat Penyediaan anggaran Makan Bergizi Sehat semula tidak dianggarkan pada Rancangan	

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp2.498.317.000,00 berkurang Rp163.982.004,00 menjadi Rp2.334.334.996,00 pada Rancangan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025atau 0,054% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang	

		bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		5. Alokasi Anggaran Program Tiga Juta Rumah Penyediaan anggaran Program Tiga Juta Rumah semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp33.795.133.450,00 bertambah Rp11.745.759.350,00 menjadi Rp45.540.892.800,00 atau 1,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pembangunan infrastuktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengambil langkah-langkah, antara lain: a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR; c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan	

		Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.	
		6. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan Penyediaan anggaran Swasembada Pangan semula Rp20.269.556.534,00 bertambah Rp265.248.406,00 menjadi Rp20.534.804.940,00 atau 0,48% dari	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sepakat guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan pengawasan dan pengendalian

		total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian. Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah dengan mengambil langkah-langkah antara lain: a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;	harga pangan di daerah dengan mengambil langkah-langkah antara lain: a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan; b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; dan c. Monitoring harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; dan c. Monitoring harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		7. Alokasi Anggaran Swasembada Energi Penyediaan anggaran Swasembada Energi belum dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada. Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi *fosil* dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi	Penyediaan anggaran Swasembada Energi belum dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada dikarenakan Kewenangan Sumber daya energi merupakan kewenangan dari Pemerintah provinsi dan Pusat.

		terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi di tingkat daerah.	
		8. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung program Sekolah Rakyat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah: a. penyiapan lahan; b. perizinan; c. penyiapan guru dan tenaga pendidik;	Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung program Sekolah Rakyat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, dikarenakan masih dalam Langkah-langkah persiapan : a. penyiapan lahan; b. perizinan; c. penyiapan guru dan tenaga pendidik; dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

		dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	
		9. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah. Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah semula Rp1.397.170.529.632,00 bertambah Rp360.621.758.505,30 menjadi Rp1.757.792.288.137,30 atau 86,05% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp1.545.804.933.912,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya untuk mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1)

		Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah	

Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	P- APBD 2025	RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
1	Meningkatkan Produktivitas Dan Hilirisasi Komoditas Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Moderasi Beragama Dan Ekonomi Keummatan	115.495.298.045	2,68%

			2	Meningkatkan Pendapatan Dan Mengurangi Beban Masyarakat Untuk Menurunkan Kemiskinanrekonstruksi Sosial Dan Ekonomi Melalui Peningkatan Pendapatan Dan Mengurangi Beban Masyarakat Untuk Menurunkan Kemiskinan	88.220.583.213	2,05%		
			3	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Untuk Konektivitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	895.297.125.892	20,75%		
			4	Meningkatkan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	82.694.877.608	1,92%		

			5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.855.147.723.793	43,00%	
			6	Transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, inovatif dan melayani	1.276.984.466.358	29,60%	
			JUMLAH		4.313.840.074.909	100.00 %	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dimaksud belum sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan/mempertahankan keselarasan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan

		selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.	
		C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(Mandatory Spending)*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Penyediaan anggaran Fungsi Pendidikan yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mengupayakan/mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

		Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 semula Rp703.544.185.836,00 bertambah Rp398.185.958.646,35 menjadi Rp1.101.321.078.282,35 atau 25,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula Rp1.263.265.600 berkurang sebesar Rp698.822.160,00 menjadi Rp564.443.440,00 b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp5.025.386.200,0 bertambah sebesar Rp838.259.000,00 menjadi Rp5.863.645.200, telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus	Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

		mengupayakan/mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten	

		Musi Banyuasin dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang	

		ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula Rp1.263.265.600 berkurang sebesar Rp698.822.160,00 menjadi Rp564.443.440,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp67.580.000,00 bertambah Rp4.020.000,00 menajadi Rp71.600.000,00 atau 12,69 % dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub	

		kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	

		Penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.305.485.869.532,00 bertambah Rp363.902.317.664,29 menjadi Rp1.669.388.187.196,29 atau 44,29% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp5.025.386.200,0 bertambah sebesar Rp838.259.000,00 menjadi Rp5.863.645.200; b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya semula Rp1.000.000.000,00 bertambah	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Rp1.898.845.000,00 menjadi Rp1.898.845.000,00; Telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan	

		Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya,	

		Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp2.094.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp1.464.000.000 semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp1.464.000.000,00 atau 69,91% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub	

		kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp1.260.994.266.412,00 bertambah Rp345.265.231.332,57menjadi Rp1.606.259.497.744,57 atau 37,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya semula Rp1.260.994.266.412,00 bertambah Rp345.265.231.332,57 menjadi Rp1.397.758.266.309,57 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 atau 32,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dengan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dalam penganggaran Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru harus mempedomani

		tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dengan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-3406 Tahun 2024.

		Selanjutnya dalam penganggaran Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru harus mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-3406 Tahun 2024.	
		4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan PKB semula Rp4.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp6.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menganggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		sarana transportasi umum sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

		D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut: 1. SPM Pendidikan Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan semula Rp22.535.444.050,00 bertambah sebesar Rp10.670.565.250,00 menjadi Rp33.206.009.300,00 atau 3,36% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp989.582.029.956,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Angka Partisipasi Sekolah semula Rp12.323.570.550,00 bertambah	1. SPM Pendidikan Telah dianggarkan untuk pemenuhan pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

		sebesar Rp11.763.941.700,00 menjadi Rp24.087.512.250,00 b. Literasi dan Numerasi semula Rp5.473.432.000,00 berkurang sebesar Rp3.874.928.900,00 menjadi Rp1.598.503.100,00; c. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas semula Rp2.400.000.000,00 berkurang sebesar Rp118.190.000,00 menjadi Rp2.281.810.000,00; d. Kekhususan PAUD semula Rp2.338.441.500, bertambah sebesar Rp2.899.742.450,00 menjadi Rp5.238.183.950,00. harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan,	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan	

		Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp400.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.295.142.000,00 menjadi Rp1.695.142.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan	

		Dinas Biasa Rp17.806.000,00 atau 0,38% dari total sub kegiatan; 2) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah semula Rp2.887.200.750,00 bertambah Rp.115.815.250,00 menjadi Rp6.003.016.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp1.916.713.750,00 bertambah Rp3.115.815.250,00 menjadi Rp 5.032.529.000,00 atau 83,83% dari total sub kegiatan Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan	

		dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2. SPM Kesehatan Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan semula Rp876.946.666,00 bertambah sebesar Rp4.480.546.549,00 menjadi Rp5.357.493.215,00 atau 0,74% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp719.889.042.809,60. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:	2. SPM Kesehatan Telah dianggarkan untuk pemenuhan pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang

		a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula Rp85.884.666,00 bertambah sebesar Rp1.686.089.610,00 menjadi Rp1.771.974.276,00; b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp191.341.000,00 menjadi Rp241.341.000,00; c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula Rp109.256.000,00 bertambah sebesar Rp477.955.600,00 menjadi Rp587.211.600,00; d. Pelayanan Kesehatan Balita semula Rp109.256.000,00 bertambah sebesar Rp477.955.600,00 menjadi Rp587.211.600,00; e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar semula Rp74.232.000,00 bertambah sebesar Rp1.312.488.339,00 menjadi Rp1.386.720.339,00; f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif semula Rp83.673.000,00 berkurang sebesar Rp50.708.000,00menjadi Rp32.965.000,00;	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula Rp46.778.000,00 bertambah Rp64.982.000,00 menjadi Rp111.760.000,00 h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula Rp84.493.000,00 berkurang sebesar Rp51.477.000,00 menjadi Rp33.016.000,00; i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula Rp36.240.000,00 berkurang sebesar Rp22.110.000,00 menjadi Rp14.130.000,00; j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula Rp49.980.000,00 bertambah sebesar Rp442.106.000,00 menjadi Rp492.086.000,00 k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula Rp57.865.000,00 bertambah sebesar Rp479.675.000,00 menjadi Rp537.540.000,00 l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	

		manusia (Human Immunodeficiency Virus) semula Rp62.040.000,00 berkurang sebesar Rp26.610.000,00 menjadi Rp35.430.000,00 harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap	

			alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula Rp109.256.000,00 bertambah sebesar Rp477.955.600,00 menjadi Rp587.211.600,00, yang antara lain	

		diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.740.000,00 pada Rancangan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan atau 0,03% dari total sub kegiatan; 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula Rp83.673.000,00 berkurang Rp50.708.000,00 menjadi Rp32.965.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas biasa semula Rp6.960.000,00 atau 0,12% dari total sub kegiatan; Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja	

			program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penyediaan anggaran kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp594.763.031.261,00 bertambah sebesar Rp125.126.011.548,60 menjadi Rp719.889.042.809,60 atau 16,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan	

			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada: Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota semula Rp 594.501.700,00 bertambah Rp 399.241.300,00 menjadi Rp 993.743.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-	

		tingginya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain: a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *Stunting*: 1) peningkatan skrining anemia remaja putri; 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; 3) pemeriksaan kehamilan *(Antenatal Care)*; 4) konsumsi TTD ibu hamil; 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK); 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang	

		berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta); 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting,* dan *Stunting*); 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan 11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita. c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Tuberkulosis (TBC); 2) *Human lmmunodeficiency Virus* (HIV); 3) Malaria; dan 4) Penyakit menular lainnya. d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya. e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:	

		1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu; 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal	

		Emergensi Komprehensif (PONEK); dan 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan: 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana	

		diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*) 4) tenaga kesehatan di Labkesda; 5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan 6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu. sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan	

		dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.	
		3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp18.432.071.512,00 bertambah sebesar Rp19.701.155.138,00 menjadi Rp38.133.226.650,00 atau 6.65% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp573.184.547.383,60; Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula Rp8.795.004.600,00 bertambah sebesar Rp9.411.983.400,00 menjadi Rp 18.206.988.000,00;	3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menganggarkan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula Rp9.637.066.912,00 bertambah sebesar Rp10.289.171.738,00 menjadi Rp19.926.238.650,00. harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat semula Rp8.842.902.712,00 bertambah sebesar Rp7.216.443.588,00 menjadi Rp16.059.346.300,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp239.659.512,00 berkurang Rp169.659.512,00 menjadi Rp70.000.000,00 atau 1,17% dari total sub kegiatan; dan 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Rp299.764.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp55.344.000,00 atau 18,46% dari total sub kegiatan.	

		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp5.485.523.050,00 bertambah sebesar Rp1.045.292.950,00 menjadi Rp6.530.816.000,00 atau 2,25% total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp289.964.938.445,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota semula Rp0.00 menjadi Rp1.636.866.250,00. 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota semula Rp5.485.523.050,00 berkurang Rp591.573.300,00 menjadi Rp4.893.949.750,00.	4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok

		harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan		ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota semula Rp5.435.523.050,00 berkurang sebesar Rp573.523.050,00 menjadi Rp4.862.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp50.800.000,00 berkurang Rp25.400.000,00 menjadi	

		Rp25.400.000,00 atau 0,52% dari total sub kegiatan; 2) Sub Kegiatan Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp1.636.866.250,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp1.501.866.250,0 atau 91,75% dari total sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung	

		capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		5. SPM Sosial Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial semula Rp2.482.983.700,00 berkurang sebesar Rp86.825.000,00 menjadi Rp2.396.158.700,00 atau 3,10% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp77.199.200.617,00.	5. SPM Sosial diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri

		Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula Rp2.115.216.700,00 berkurang sebesar Rp23.238.000,00 menjadi Rp2.091.978.700,00; dan b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota semula Rp367.767.000,00 berkurang sebesar Rp63.587.000,00 menjadi Rp304.180.000,00. harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah	Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Sosial, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

			Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Sosial, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri	3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial semula Rp367.767.000,00 berkurang sebesar Rp63.587.000,00 menjadi Rp304.180.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp 35.870.000,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.	

		2) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan sebesar semula tidak dianggarlan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp400.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula tidak dianggarlan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp400.000.000,00; Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan	

		Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat semula Rp7.465.082.861,00 bekurang sebesar Rp2.300.970.003,00 menjadi Rp5.164.112.858,00 atau 8,05% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp64.168.850.552,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota semula Rp1.279.053.250,00 berkurang sebesar Rp602.478.000,00 menjadi Rp676.575.250,00; b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana semula Rp147.480.590,00 berkurang	6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018

		sebesar Rp21.991.503,00 menjadi Rp125.489.087,00; c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana semula Rp2.741.853.321,00 berkurang sebesar Rp1.409.982.500,00 menjadi Rp1.331.870.821,00; d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula Rp2.653.306.700,00 berkurang sebesar Rp217.060.000,00. menjadi Rp2.436.246.700,00; e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran semula Rp643.389.000,00 berkurang sebesar Rp49.458.000,00 menjadi Rp593.931.000,00. harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan	tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Ketenteraman dan	

		Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,	

		dan Pengawalan semula Rp421.425.000,00 berkurang sebesar Rp112.800.000,00 menjadi Rp308.625.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp 47.225.000,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan atau 15,30% dari total sub kegiatan 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja fungsional Polisi Pamong Praja dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp89.400.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp15.000.000,00 atau 16,78% dari total sub kegiatan;	

		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib	

		terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 5.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya dalam pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 5.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran Pengawasan Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin semula Rp25.621.100.590,00 bertambah Rp4.787.028.714,00 menjadi Rp30.408.129.304,00 atau 0,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran	1. Alokasi Anggaran Pengawasan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan mengalokasikan pemenuhan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), yang akan dipenuhi pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya untuk pemenuhan alokasi anggaran

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut: a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat semula Rp17.064.693.797,00 bertambah Rp4.583.498.311,00 menjadi Rp21.648.192.108,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan b. Alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat semula Rp10.313.171.143,00 bertambah Rp1.544.830.746,00 menjadi Rp11.858.001.889,00; Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN Rp9.790.190.219,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam	dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) (menyesuaikan dengan kabupaten/kota). tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.1) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal semula Rp315.000.000,00 berkurang Rp 4.643.000,00 menjadi Rp 310.357.000,00; b. Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp829.999.900,00 berkurang Rp15.159.450,00 menjadi Rp814.840.450,00; Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total	

			belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) (menyesuaikan dengan kabupaten/kota). tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.1) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: a. kegiatan pengawasan, yaitu: 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan	

		yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja; 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD; 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan	

		perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan	

		investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP. c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton; sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c	

		Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang tercantum pada SKPD Inspektorat Daerah semula Rp4.843.924.000,00 berkurang Rp1.321.247.000,00 menjadi Rp3.522.677.000,00 atau 0,24% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

		Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp14.169.606.790,00 berkurang Rp1.186.496.046,00 menjadi Rp12.983.110.744,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut: a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp8.901.765.152,00 bertambah Rp1.133.941.520,00 menjadi Rp10.035.706.672,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan	Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan mengupayakan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp524.510.000,00 dan tidak mengalami perubahan atau 0,012% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp2.422.894.072,00 atau 0,06%	

		dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum semula tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp149.421.000,00; Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka	

		Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		c. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan anggaran untuk FKUB semula Rp627.682.890 berkurang	c. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

		Rp117.033.500 menjadi Rp510.649.390 atau 0,012% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja: a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional pada SKPD 15 Kecamatan semula Rp227.745.000 berkurang Rp98.915.500 menjadi Rp128.829.500; b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp399.937.890	Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan

		berkurang Rp18.118.000 menjadi Rp381.819.890; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam	FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		d. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten Musi Banyuasin semula Rp527.745.000 berkurang Rp254.418.200 menjadi	d. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung

		Rp273.326.800 atau 0,0063% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp300.000.000 berkurang sebesar Rp155.502.700 menjadi Rp144.497.300 b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional pada SKPD 15 Kecamatan semula Rp227.745.000 berkurang sebesar Rp98.915.500 menjadi Rp128.829.500 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		e. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Penyediaan anggaran TP-PKK yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	

		Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga semula Rp1.178.507.025 berkurang Rp251.817.208 menjadi Rp926.689.817 atau 0,021% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Musi Banyuasin melalui: a. Upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan	

		harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *Stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan	

		antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan	

		kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; 2) gotong royong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; dan 10) perencanaan sehat. g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Musi Banyuasin dianggarkan dalam	

		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024; h. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam	

		percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Musi Banyuasin serta kegiatan lainnya; dan i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah; sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		Selain itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa semula Rp1.178.507.025,00 berkurang sebesar Rp251.817.208,00 menjadi Rp926.689.817,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp441.637.000,00 berkurang Rp207.301.000,00 menjadi Rp234.336.000,00 atau 25,29% dari total jumlah sub kegiatan; b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp147.175.000,00 berkurang Rp53.195.000,00 menjadi Rp93.980.000,00 atau 10,14% dari total jumlah sub kegiatan diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran	

		belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		f. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu Penyediaan anggaran penguatan Posyandu semula Rp5.774.979.746,00 dan tidak mengalami perubahan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau 0,13% dari total	f. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna

		belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 serta pemutakhirannya. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penguatan	mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 serta pemutakhirannya.

		Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain: a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas: 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa; 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa. b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM; dan c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	

		sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat semula Rp174.999.850,00 berkurang Rp-57.418.400,0 menjadi Rp117.581.450,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp80.480.000,00 berkurang Rp12.881.000,00 menjadi Rp67.599.000,00 atau 57,49% dari total sub kegiatan;	

		diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Posyandu. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam	

		Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		g. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial Belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pembiayaan pengelolaan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	g. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial Belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 , merupakan kewenangan propinsi dan Pemerintah Pusat . sebagaimana maksud Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
		h. Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

		Penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa semula Rp240.398.499 berkurang sebesar Rp112.932.000 menjadi Rp127.466.499 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; b. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya semula Rp298.552.000 berkurang sebesar Rp148.526.500 menjadi Rp150.025.500 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,	

		dengan berpedoman pada butir 5.3.34.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		i. Alokasi Anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia. Penyediaan anggaran memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada: Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota semula Rp326.408.000,00 berkurang Rp155.404.000,00 menjadi Rp171.004.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	i. Alokasi Anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia. Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
		j. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum	j. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum

		Penyediaan anggaran Bantuan Hukum yang tercantum pada Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula Rp622.433.499,00 berkurang Rp2.531.521,50 menjadi Rp619.901.977,50; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
		k. Alokasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada:	k. Alokasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

		a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan semula Rp1.815.870.270,00 bertambah Rp185.860.000,00 menjadi Rp1.630.010.270; b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula Rp150.139.000,00 berkurang Rp61.917.000,00 menjadi Rp88.222.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka	Anggaran 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		l. Alokasi Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Penyediaan anggaran BAZNAS yang tercantum pada Belanja Hibah kepada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus berpedoman pada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	l. Alokasi Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Penyediaan anggaran BAZNAS yang tercantum pada Belanja Hibah kepada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dikarenakan Prposal dan hasil verifikasi dari OPD Teknis belum ada pada saat RKPD Perubahan 2025 ditetapkan, sebagai dasar penganggaran dalam KUA dan PPAS Perubahan serta Raperda Perubahan APBD Kab. Musi banyuasin Tahun 2025.
		m. Alokasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	m. Alokasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

		Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, yang tercantum pada: a. Belanja Pegawai BLUD semula Rp117.162.895.797,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp915.076.618,00 menjadi Rp118.077.972.415,00 b. Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp114.983.832.798,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp14.071.638.412,60 menjadi Rp129.055.471.210,60. c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula Rp10.681.752.212,00 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp290.940.061,00 menjadi Rp10.972.692.273,00; a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp2.658.008.193,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran	Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp4.539.209.942,00 menjadi Rp7.197.218.135,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		n. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, yang tercantum pada:	n. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

		a. BOS Reguler Sekolah Dasar Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp66.351.400.000,00; b. BOS Reguler Sekolah Dasar Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp6.311.160.000,00; c. BOS Kinerja Sekolah Dasar Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp1.712.500.000,00; d. BOS Kinerja Sekolah Dasar Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp157.500.000,00;	Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		e. BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp27.255.624.000,00; f. BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp8.455.216.000,00; g. BOS Kinerja Sekolah Menengah Pertama Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp737.500.000,00; h. BOS Kinerja Sekolah Menengah Pertama Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp351.250.000,00;	

		i. BOSP PAUD Reguler Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp549.600.000,00; j. BOSP PAUD Reguler Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp10.691.413.000,00; k. BOSP PAUD Kinerja Swasta semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp30.000.000,00; l. SKB Reguler Negeri semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp105.300.000,00;	

		m. BOSP Reguler Kesetaraan semula Rp0,00 pada Rancangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp1.207.000.000,00; n. BOSP Kinerja Kesetaraan semula Rp0,00 pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi Rp90.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	

		dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut: Tabel. 6 Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Berkaitan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ***telah sepenuhnya berpedoman*** pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya untuk tetap konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan

		<table><tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">URAIAN</td><td colspan="2">Perubahan RKPD</td><td colspan="2">Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</td><td colspan="2">RANCANGAN Perubahan APBD TA 2025</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Pagu (Rp)</td><td>Jumlah</td><td>Pagu (Rp)</td><td>Jumlah</td><td>Pagu (Rp)</td></tr><tr><td>1</td><td>PROGRAM</td><td>128</td><td rowspan="3">4.340.426.184.534,60</td><td>128</td><td rowspan="3">4.340.426.184.534,60</td><td>128</td><td rowspan="3">4.340.426.184.534,60</td></tr><tr><td>2</td><td>KEGIATAN</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td>3</td><td>SUB KEGIATAN</td><td>737</td><td>737</td><td>737</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, diuraikan pada Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

		Berkaitan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sepenuhnya berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang	Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

		Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak	

		diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan	

		bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan	

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp3.366.370.761.800,00 bertambah Rp923.999.050.975,59 menjadi Rp4.290.369.812.775,59 diuraikan sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut: Tabel 7 Pendapatan Daerah	

Uraian	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Rasio Terhadap

	(Rp)	Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	4.290.369.812.775,59	100,00
Pendapatan Asli Daerah	587.378.681.108,99	13,69
Pajak Daerah	223.975.016.750,00	5,22
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	60.000.000.000,00	1,40
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.000.000.000,00	0,70
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	90.000.000.000,00	2,10
Pajak Air Permukaan (PAP)	600.000.000,00	0,01
Pajak Rokok	35.000.000.000,00	0,82
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.029.103.000,00	0,05
Retribusi Daerah	5.660.787.000,00	0,13
Retribusi Jasa Umum	727.000.000,00	0,02
Retribusi Jasa Usaha	2.433.787.000,00	0,06
Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00	0,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,70
Lain-lain PAD yang Sah	327.742.877.358,99	7,64
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.243.250,00	0,001
Jasa Giro	5.500.000.000,00	0,12
Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	0,11
Pendapatan Denda Pajak Daerah	326.600.000,00	0,008
Pendapatan BLUD	244.280.123.524,00	5,69
Pendapatan Transfer	3.702.991.131.666,60	86,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.505.400.983.500,00	81,70

		Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.590.148.166,60	4,60
		Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00
		Pendapatan Hibah	0,00	0,00
		Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD semula Rp529.884.959.800,00 bertambah Rp57.493.721.308,99 menjadi Rp587.378.681.108,99 atau 13,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan perhitungan atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah,

		tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp529.884.959.800,00 atau 15,74% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.366.370.761.800,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp619.651.955.525,00 atau 13,31% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang		ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp4.654.239.641.897,00 dan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp407.152.294.811,00 atau 9,98% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2023 Rp4.078.146.093.777,00. Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut: a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 Rp278.359.008.032,77 atau 52,53% dari target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp529.884.959.800,00;	maksud butir 3.3.1.1.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp393.331.951.633,26 atau 63,48% dari target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp619.651.955.525,00; c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp369.450.573.693,72 atau 90,74% dari target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp407.152.294.811,00. Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan	

			ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut: a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah semula Rp216.466.151.000,00 bertambah Rp7.508.865.750,00 menjadi Rp223.975.016.750,00 atau 5,22% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,	

			yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a) Pajak Reklame Rp2.729.859.000,00; b) Pajak Air Tanah Rp420.000.000,00; c) Pajak Sarang Burung Walet semula Rp332.697.000,00 berkurang Rp83.174.250,00 menjadi Rp249.522.750,00; d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2.029.103.000,00; e) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp29.904.394.000,00; f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25.139.938.000,00; g) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Rp65.910.160.000,00 bertambah	

		Rp7.592.040.000,00 menjadi Rp73.502.200.000,00; h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp40.000.000.000,00 bertambah Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp60.000.000.000,00; dan i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) semula Rp50.000.000.000,00 berkurang Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp30.000.000.000,00. 2) Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp5.195.787.000,00 bertambah Rp465.000.000,00 menjadi Rp5.660.787.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	

		Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: 1) Retribusi Jasa Umum semula Rp447.000.000,00 bertambah Rp280.000.000,00 menjadi Rp727.000.000,00; 2) Retribusi Jasa Usaha semula Rp2.248.787.000,00 bertambah Rp185.000.000,00 menjadi Rp2.433.787.000,00; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp 2.500.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan	

		pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana	

		maksud butir 3.3.1.1.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan	

			Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan: 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan	

		Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan	

		menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen); sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2), butir 3.3.1.1.1.o.3) dan butir 3.3.1.1.1.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir a.1).a) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp30.000.000.000,00 atau 0,70% dari total pendapatan daerah	b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran

		dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp30.000.000.000,00 atau 0,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp30.000.000.000,00 atau 0,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Selanjutnya, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimaksud, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Selanjutnya, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimaksud, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai

		harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau	akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.	

		Selanjutnya, terhadap BUMD yang kinerjanya belum memadai *(performance based)* dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.	
		c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan

		Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp278.223.021.800,00 bertambah Rp49.519.855.558,99 menjadi Rp327.742.877.358,99 atau 7,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 30 Juni 2025 Rp163.529.218.711,80 atau 58,78% dari total target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah	Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp35.000.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

		Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp278.223.021.800,00; 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 Rp245.157.602.663,51 atau 53,30% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp459.922.314.525,00; dan 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp248.485.877.831,93 atau 92,82% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan	2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp6.243.250,00 atau 0,0001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3) Jasa Giro Rp5.500.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp267.701.459.811,00. Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:	dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 4) Pendapatan Bunga Rp 5.000.000.000,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

		1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp35.000.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp6.243.250,00 atau 0,0001% dari total	Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 5) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR) Rp15.000.000.000,00 atau 0,35% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

		pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3) Jasa Giro Rp5.500.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan	dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp1.628.262.810,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4)

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 4) Pendapatan Bunga Rp 5.000.000.000,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 7) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp1.000.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

		Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 5) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR) Rp15.000.000.000,00 atau 0,35% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 8) Pendapatan denda pajak daerah Rp326.600.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman

		Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp1.628.262.810,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 9) Pendapatan denda hasil eksekusi atas jaminan Rp1.000.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 7) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp1.000.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja	10) Pendapatan dari pengembalian Rp54.965.647.774,99 atau 1,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 11) Pendapatan BLUD Rp244.280.123.524,00 atau 5,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

		Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 8) Pendapatan denda pajak daerah Rp326.600.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan	Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 3.3.1.3.16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 9) Pendapatan denda hasil eksekusi atas jaminan Rp1.000.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja	

		Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 10) Pendapatan dari pengembalian Rp54.965.647.774,99 atau 1,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f	

		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 11) Pendapatan BLUD Rp244.280.123.524,00 atau 5,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	

		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 3.3.1.3.16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2. Pendapatan Transfer Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp2.836.485.802.000,00 bertambah Rp 866.505.329.666,60 menjadi Rp3.702.991.131.666,60 atau 86,31% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan	2. Pendapatan Transfer Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan: c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.710.885.802.000,00 bertambah Rp794.515.181.500,00 menjadi Rp3.505.400.983.500,00 atau

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.710.885.802.000,00 bertambah Rp794.515.181.500,00 menjadi Rp3.505.400.983.500,00 atau 81,70% total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan: 1) Transfer Ke Daerah (TKD) semula Rp2.710.885.802.000,00 bertambah Rp794.515.181.500,00 menjadi Rp3.505.400.983.500,00 atau 81,70% dari total pendapatan	81,70% total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan: 3) Transfer Ke Daerah (TKD) semula Rp2.710.885.802.000,00 bertambah Rp794.515.181.500,00 menjadi Rp3.505.400.983.500,00 atau 81,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan: f) Dana Desa Rp225.564.334.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan

		daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan: a) Dana Desa Rp225.564.334.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Rp225.564.334.000,00; b) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2.298.679.867.500,00 sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan	Nomor 29 Tahun 2025, Rp225.564.334.000,00; g) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2.298.679.867.500,00 sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Rp2.298.679.867.500,00; h) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp583.685.042.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran

		Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Rp2.298.679.867.500,00; c) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp583.685.042.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Rp583.685.042.000,00; d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp35.072.538.000,00 sesuai dibandingkan dengan	yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Rp583.685.042.000,00; i) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp35.072.538.000,00 sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Rp35.072.538.000,00; dan j) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp362.399.202.000,00 sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

		besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Rp35.072.538.000,00; dan e) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp362.399.202.000,00 sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Rp362.399.202.000,00. 2) Insentif Fiskal Rp0,00 atau 0% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,	Tahun Anggaran 2025, Rp362.399.202.000,00. 4) Insentif Fiskal Rp0,00 atau 0% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; d. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp125.600.000.000,00 bertambah Rp71.990.148.166,60 menjadi Rp197.590.148.166,60 atau 4,61% total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Pendapatan Bagi Hasil

		sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp125.600.000.000,00 bertambah Rp71.990.148.166,60 menjadi Rp197.590.148.166,60 atau 4,61% total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Rp125.600.000.000,00 atau 2,93% dan Bantuan Keuangan Rp71.990.148.166,60 atau 1,68% dari total dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Rp125.600.000.000,00 atau 2,93% dan Bantuan Keuangan Rp71.990.148.166,60 atau 1,68% dari total dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan butir 3.3.2.1.c Lampiran

		dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

		Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam	

		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.	
		3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp0,00 atau

		Pendapatan Daerah yang Sah Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran	0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi sebagaimana maksud Pasal 47 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	IV. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp3.408.867.666.146,00 bertambah Rp904.972.408.762,60 menjadi Rp4.313.840.074.908,60 diuraikan sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel 9

Postur Belanja Daerah

Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025(Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	4.313.840.074.908,60	100
Belanja Operasi	2.923.266.734.140,55	67,76
Belanja Pegawai	1.605.860.647.744,57	37,22
Belanja Barang dan Jasa	975.692.050.058,98	22,61
Belanja Hibah	264.045.344.337,00	6,12
Belanja Bantuan Sosial	77.668.692.000,00	1,80
Belanja Modal	840.478.933.009,50	19,48
Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	0,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.240.911.785,61	2,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.842.599.260,00	3,24
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	560.185.773.183,89	12,98

			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.116.469.853,00	0,48	
			Belanja Modal Aset Lainnya	96.393.177,00	0,002	
			Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	0,12	
			Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	0,12	
			Belanja Transfer	544.652.123.254,00	12,62	
			Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	
		1. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp2.384.132.390.457,00 bertambah Rp539.134.343.683,55 menjadi Rp2.923.266.734.140,55 atau 67,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diuraikan ke dalam jenis belanja: a. Belanja Pegawai		1. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp1.260.994.266.412,00 bertambah Rp344.866.381.332,57 menjadi Rp1.605.860.647.744,57 atau 37,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan

		Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp1.260.994.266.412,00 bertambah Rp344.866.381.332,57 menjadi Rp1.605.860.647.744,57 atau 37,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp786.371.961.977,00 bertambah Rp83.938.931.278,27 menjadi Rp870.310.893.255,27 atau 20,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c	

		Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp29.672.641.389,00 bertambah Rp13.906.287.179,00 menjadi Rp43.578.928.568,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan	2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

			Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp62.726.201.582,94 atau terdapat selisih kurang Rp19.147.273.014,94. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan	2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah	

			Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
			(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp200.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	(2) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

			seharusnya Rp113.895.852,00 atau terdapat selisih lebih Rp86.104.148,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana	Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33	

		Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp19.600.000,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	(3) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan

			Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp7.364.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp12.236.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran	Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018	

		sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:	b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp1.564.566.306,00 bertambah Rp388.011.139,00 menjadi Rp1.952.577.445,00; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp4.195.921.913,00	sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		bertambah Rp854.517.248,00 menjadi Rp5.050.439.161,00, belum memenuhi alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN seharusnya: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp1.554.138.662,19 atau terdapat selisih lebih Rp398.438.782,81; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh	

		puluh dua persen) dari gaji pokok Rp4.662.415.986,56 atau terdapat selisih lebih Rp388.023.174,44. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang	

		Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada: (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD semula Rp2.000.000,00 bertambah Rp13.000.000,00 menjadi Rp15.000.000,00; dan (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula Rp35.755.000,00	

		berkurang Rp13.000.000,00 menjadi Rp22.755.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden	

		Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	

			tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp1.205.928,00; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp600.000,00. dianggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman	

		pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di	Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan Kesehatan;

		luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa: 1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* semula Rp229.100.000,00 berkurang Rp10.400.000,00 menjadi Rp218.700.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil	1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

		Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan	
		2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD akan disesuaikan dengann hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

			Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, ~~dan~~ sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, ~~dan~~ sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp2.498.185.054,00 berkurang Rp934.470.852,60 menjadi Rp1.563.714.201,40 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dimaksud dalam Rancangan Peraturan	3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

			Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula Rp25.074.684.780,00 bertambah Rp1.085.000.000,00 menjadi Rp26.159.684.780,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain tercantum pada: (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD dalam Rancangan	3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula Rp25.074.684.780,00 bertambah Rp1.085.000.000,00 menjadi Rp26.159.684.780,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain tercantum pada: (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

			Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula Rp1.374.408.000,00 bertambah Rp81.406.500,00 menjadi Rp1.455.814.500,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan	

			DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak	

		Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	
		(2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula Rp178.315.200,00 bertambah Rp5.481.000,00 menjadi Rp183.796.200,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif	(2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1)

			Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 telah memenuhi ketentuan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

		Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.	
		(4)	Belanja Tunjangan Reses DPRD semula Rp1.323.000.000,00 bertambah Rp661.500.000,00 menjadi Rp1.984.500.000,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Reses. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam	Belanja Tunjangan Reses DPRD telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Reses. sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

		mengalokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Reses DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan	

		Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.	
		(5) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp5.166.000.000,00; dan (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp6.642.000.000,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak	Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

		Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah	

		Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.	
		b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam mengalokasi anggaran untuk	Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD, telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

			Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan	

		Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.	
		4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp600.000.000,00 bertambah Rp199.000.000,00 menjadi Rp799.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp587.378.681.108,99 yaitu Rp881.068.021,66. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

			Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp587.378.681.108,99 yaitu Rp881.068.021,66. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8	

		huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.	
		5) Belanja TPP ASN Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp328.348.833.195,00 bertambah Rp259.538.123.436,30 menjadi Rp587.886.956.631,30 atau 13,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp298.797.072.717,00 bertambah Rp43.750.179.516,90 menjadi Rp342.547.252.233,90;	Belanja TPP ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

		b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp13.596.445.000,00 bertambah Rp1.132.378.984,00 menjadi Rp14.728.823.984,00; c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp14.181.241.500,00 bertambah Rp525.383.500,40 menjadi Rp14.706.625.000,40; dan d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp1.774.073.978,00 bertambah Rp214.130.181.435,00 menjadi Rp215.904.255.413,00. dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	

		Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal: a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan	

		TPP ASN Tahun Anggaran 2024; b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN; sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK	

		dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan	

			Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran Rp153.721.480,00; b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Rp403.468.090,00; c) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang	

		bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada: (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp193.134.453.405,00; (2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp12.543.803.030,00; dan (3) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) PNSD Rp2.822.975.000,00. d) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	

		tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang	

		Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.	
		b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp915.867.821.096,00 bertambah Rp59.824.228.962,98 menjadi Rp975.692.050.058,98 atau 22,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

		Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang	termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) Belanja Barang Penyediaan anggaran Belanja Barang semula Rp156.533.126.248,00 berkurang Rp2.814.379.845,91 menjadi Rp153.718.746.402,09 atau 3,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	

		a) Belanja Barang Pakai Habis Rp149.644.597.481,00 berkurang Rp2.772.016.445,91 menjadi Rp146.872.581.035,09 atau 3,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	
		b) Belanja Barang Tak Habis Pakai tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan

		Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula Rp6.888.528.767,00 berkurang Rp42.363.400,00 menjadi Rp6.846.165.367,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

			Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
		dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan	

		menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		d) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula semula Rp11.936.305.187,00 berkurang Rp2.899.348.292,19 menjadi Rp9.036.956.894,81 yang antara lain tercantum pada: (a) SKPD Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp1.467.518.674,00 atau 16,23% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; (b) SKPD Sekretariat Daerah Daerah semula Rp1.268.232.564,00 berkurang	

		Rp480.465.820,10 menjadi Rp787.766.743,90 atau 8,71% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; dan (c) SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00 atau 3,31% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp16.553.060.211,00 berkurang	

			Rp3.538.853.047,51 menjadi Rp13.014.207.163,49 yang antara lain tercantum pada: (a) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp817.439.000,00 berkurang Rp374.899.725,00 menjadi Rp442.539.275,00 atau 3,40% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; (b) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Rp540.330.900,00 atau 4,15% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak; dan	

		(c) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp777.164.860,00 berkurang Rp132.923.389,72 menjadi Rp644.241.470,28 atau 4,96% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak. (3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp21.556.671.868,00 berkurang Rp2.173.579.191,90 menjadi Rp19.383.092.676,10 yang antara lain tercantum pada: (a) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Rp810.563.000,00 atau 4,18% dari total Belanja	

		Makanan dan Minuman Rapat; (b) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp2.556.180.000,00 bertambah Rp191.839.000,00 menjadi Rp2.748.019.000,00 atau 14,17% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat; dan (c) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semula Rp753.163.000,00 berkurang Rp50.488.000,00 menjadi Rp 702.675.000,00 atau 3,63% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat. (4) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	

			semula Rp11.929.235.900,00 bertambah Rp2.107.179.633,70 menjadi Rp14.036.415.533,70 yang antara lain tercantum pada: (a) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp2.606.619.200,00 bertambah Rp1.396.348.905,00 menjadi Rp4.002.968.105,00 atau 28,51% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu; (b) SKPD Sekretariat DPRD Rp400.500.000,00 atau 2,85% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu; dan (c) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Rp111.000.000,00 atau	

		0,79% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu. untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	

		sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp20.875.051.496,00 berkurang Rp13.204.136.692,00 menjadi Rp7.670.914.804,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga

			RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan	beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

			sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
		f)	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp10.567.095.000,00 bertambah Rp3.459.396.072,00 menjadi Rp14.026.491.072,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD,

			Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp10.567.095.000,00 bertambah Rp2.854.396.072,00 menjadi Rp13.421.491.072,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp4.887.395.000,00 berkurang Rp182.000.000,00 menjadi	sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinuntuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Rp4.705.395.000,00; dan (b) Belanja Beasiswa semula Rp5.679.700.000,00 bertambah Rp3.036.396.072,00 menjadi Rp8.716.096.072,00. (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp605.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp605.000.000,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	

			dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain	

		dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinuntuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa	

			untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan: a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD; b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial; c) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD; dan d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman	

		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2) Belanja Jasa Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula Rp411.034.740.193,08 berkurang Rp17.760.357.847,48 menjadi Rp393.274.382.345,60 atau 9,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Kantor semula Rp285.843.908.350,00 berkurang Rp25.847.281.238,00 menjadi Rp259.996.627.112,00 atau 6,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	2) Belanja Jasa dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan

			Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan	kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

			yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan	

			perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
			b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp59.412.437.761,00 bertambah Rp11.895.973.945,00 menjadi Rp71.308.411.706,00 atau 1,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

			Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp5.061.078.240,00; (2) Belanja Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula Rp36.386.658.000,00 bertambah Rp14.750.000.000,00 menjadi Rp51.136.658.000,00: dan (3) Belanja Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula Rp588.000.000,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran	

			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
			Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain: (1) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan	

			Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; (2) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III; dan (3) dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa	

		dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menganggarkan kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran	

			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
			Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain: (1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;	

		(2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan (3) menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan	

		Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan	

		butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		(4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula Rp5.239.600.000,00 berkurang Rp886.400.000,00 menjadi Rp4.353.200.000,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula Rp9.548.329.710,00 berkurang Rp2.845.755.555,00 menjadi Rp6.702.574.155,00; dan	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		(c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula Rp19.545.311,00 bertambah Rp817.212.300,00 menjadi Rp836.757.611,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir	

			3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
			(5) Penyediaan anggaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah semula Rp2.569.226.500,00 bertambah Rp60.917.200,00 menjadi Rp2.630.143.700,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	(5) Penyediaan anggaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Dianggarkan pada Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		C) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Sewa Tanah tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp9.909.792.000,00 bertambah Rp3.393.236.700,00 menjadi Rp13.303.028.700,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan

		Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Electric Generating Set Rp57.960.000,00; (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp4.258.120.000,00 bertambah Rp2.117.761.200,00 menjadi Rp6.375.881.200,00; (c) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp265.600.000,00 berkurang Rp60.100.000,00 menjadi Rp205.500.000,00; (d) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp2.782.025.500,00 bertambah Rp857.530.000,00 menjadi Rp 3.639.555.500,00; (e) Belanja Sewa Alat Pendingin semula Rp458.489.500,00 betambah Rp16.570.500,00 menjadi Rp475.060.000,00; dan	aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		(f) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula Rp1.229.640.000,00 bertambah Rp106.950.000,00 menjadi Rp 1.336.590.000,00. (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp8.052.568.000,00 berkurang Rp483.221.250,00 menjadi Rp7.569.346.750,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp2.227.878.000,00 berkurang Rp544.934.000,00 menjadi Rp1.682.944.000,00; (b) Belanja Sewa Belanja Sewa Taman semula Rp560.310.000,00 berkurang Rp40.830.000,00 menjadi Rp519.480.000,00; (c) Belanja Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp329.175.000,00 berkurang Rp	

		30.000.000,00 menjadi Rp299.175.000,00; dan (d) Belanja Sewa Hotel semula Rp 3.994.645.000,00 berkurang Rp 283.097.250,00 menjadi Rp 3.711.547.750,00. (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (5) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah	

		(BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan	

		Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp31.259.746.082,08 berkurang Rp7.184.863.354,48 menjadi Rp24.074.882.727,60 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula Rp4.381.900.000,00	Penyediaan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi. ***dianggarkan*** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, uraian tersebut di atas juga telah memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang

		berkurang Rp4.282.954.600,00 menjadi Rp98.945.400,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula Rp3.736.616.000,00 berkurang Rp140.969.200,40 menjadi Rp 3.595.646.799,60; (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula Rp8.908.001.332,00 bertambah Rp1.460.987.901,00 menjadi Rp10.368.989.233,00; (d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa-Perencanaan Wilayah semula Rp5.976.000.000,00 berkurang Rp779.643.430,00 menjadi Rp5.196.356.570,00; (e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp4.120.449.973,00 berkurang Rp3.233.477.591,90 menjadi Rp886.972.381,10; dan	perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan anggaran tersebut telah memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan belanja jasa ketersediaan layanan *(Availability Payment)* untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d

		(f) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan semula Rp835.000.000,00 berkurang Rp329.800.000,00 menjadi Rp505.200.000,00. (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp3.572.000.000,00 bertambah Rp66.932.600,00 menjadi Rp3.638.932.600,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika semula Rp1.972.000.000,00 berkurang Rp16.687.400,00 menjadi Rp1.955.312.600,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Konsultansi Manajemen semula Rp1.500.000.000,00 bertambah	dan butir 3.4.1.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Rp92.600.000,00 menjadi Rp1.592.600.000,00; dan (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp91.020.000. (3) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang	

		perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan belanja jasa ketersediaan layanan *(Availability Payment)* untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan	

		dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d dan butir 3.4.1.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. d) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa sebagaimana maksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp12.059.088.000,00	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, telah dianggarkan dalam Rancangan

		bertambah Rp803.464.750,00 menjadi Rp12.862.552.750,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek: (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp10.436.113.000,00 bertambah Rp1.014.226.000,00 menjadi Rp11.450.339.000,00; dan (2) Belanja Diklat Kepemimpinan semula Rp1.622.975.000,00 berkurang Rp210.761.250,00 menjadi Rp1.412.213.750,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD,	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2), butir 3.4.1.2.2.f.3) dan butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2), butir 3.4.1.2.2.f.3) dan butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133	

		Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasinharus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas,	

		dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan	
		3) Belanja Pemeliharaan Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan semula Rp78.437.883.623,92 bertambah Rp26.106.962.733,00 menjadi Rp104.544.846.356,92 atau 2,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp26.544.731.830,00 bertambah Rp1.320.950.497,00 menjadi Rp27.865.682.327,00 atau 0,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara	3) Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

		lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya semula Rp2.266.000.000,00 berkurang Rp312.584.490,00 menjadi Rp1.953.415.510,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set semula Rp533.914.700,00 berkurang Rp6.775.171,00 menjadi Rp527.139.529,00; (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp20.589.016.300,00 bertambah Rp1.018.336.308,00 menjadi Rp21.607.352.608,00; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula Rp Rp60.000.000,00 berkurang Rp60.000.000,00 menjadi Rp0,00;	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		(5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp226.560.000,00; (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga semula Rp228.000.000,00 bertambah Rp178.108.000,00 menjadi Rp406.108.000,00; (7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp443.330.000,00; (8) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya semula Rp80.808.000,00 bertambah Rp35.025.000,00 menjadi Rp115.833.000,00; (9) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	

		Anggaran 2025 dianggarkan Rp160.260.000,00; (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula Rp17.146.680,00 bertambah Rp42.000.000,00 menjadi Rp59.146.680,00; (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula Rp1.536.238.000,00 bertambah Rp25.192.000,00 menjadi Rp1.561.430.000,00; (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Rp14.500.000,00; (13) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp100.000.000,00; (14) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	

		Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp41.388.850,00; (15) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Rp51.132.150,00; (16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya semula Rp47.286.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp147.286.000,00; (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe Rp100.000.000,00; (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp100.000.000,00; dan (19) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar Rp250.800.000,00.	
		b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp11.804.779.711,92 bertambah	4) Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan,

		Rp3.342.317.098,00 menjadi Rp15.147.096.809,92 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp11.707.279.711,92 bertambah Rp3.250.632.098,00 menjadi Rp14.957.911.809,92; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp104.185.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum semula Rp97.500.000,00 berkurang Rp12.500.000,00 menjadi Rp85.000.000,00;	***Telah*** dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp40.002.567.220,00 bertambah Rp21.443.695.138,00 menjadi Rp61.446.262.358,00 atau 1,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten semula Rp30.283.775.220,00 bertambah Rp3.635.238.768,00 menjadi Rp33.919.013.988,00; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya semula Rp9.718.792.000,00 bertambah Rp17.510.680.050,00 menjadi Rp27.229.472.050,00; dan (3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp297.776.320,00.	

		d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp85.804.862,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik Rp85.804.862,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang,	

		pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada: a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan	

		pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.	
		4. Belanja Perjalanan Dinas Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp144.311.143.233,00 berkurang Rp32.078.591.398,23 menjadi Rp112.232.551.834,77 atau 2,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp143.820.878.500,00 berkurang Rp31.701.982.665,23 menjadi Rp112.118.895.834,77 atau 2,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	4. Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah

		Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp104.208.786.313,00 berkurang Rp28.193.411.724,88 menjadi Rp76.015.374.588,12 atau 67,73% dari total Belanja Perjalanan Dinas, yang antara lain tercantum pada: (a) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp44.665.252.923,00 berkurang Rp14.863.100.293,69 menjadi Rp29.802.152.629,31 atau 39,21% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan (b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp11.720.803.706,00 bertambah Rp1.645.405.680,65 menjadi Rp10.075.398.025,35 atau 13,25% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa. (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp39.612.092.187,00 berkurang Rp3.508.570.940,35 menjadi Rp36.103.521.246,65 atau 32,20% dari total Belanja Perjalanan Dinas, yang antara lain tercantum pada:	daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		(a) SKPD Inspektorat Daerah semula Rp1.809.345.000,00 berkurang Rp245.321.000,00 menjadi Rp1.564.024.000,00 atau 4,33% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; (b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp2.584.594.000,00 berkurang Rp1.035.048.000,00 menjadi Rp1.549.546.000,00 atau 4,29% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan (c) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp973.300.000,00 bertambah Rp1.001.448.000,00 menjadi Rp1.974.748.000,00 atau 5,46% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula Rp490.264.733,00 berkurang Rp376.608.733,00 menjadi Rp113.656.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan	

		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula Rp490.264.733,00 berkurang Rp376.608.733,00 menjadi Rp113.656.000,00, yang hanya tercantum pada SKPD Sekretariat Daerah semula Rp490.264.733,00 berkurang Rp376.608.733,00 menjadi Rp113.656.000,00 atau 100% dari total Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya juga	

		harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan atau sejenisnya yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau	

		sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada: a) Sekretariat Daerah semula Rp14.795.662.439,00 berkurang Rp3.057.062.413,65 menjadi Rp11.738.600.025,35 atau 8,42% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp139.334.235.055,00; dan b) Sekretariat DPRD semula Rp45.638.552.923,00 berkurang Rp13.861.652.293,69 menjadi Rp31.776.900.629,31 atau 26,40% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp120.372.873.231,00. harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan	

		anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	

		tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk perjalanan dinas biasa yang dilakukan di luar negeri, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan	

		Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria: a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; b) transparansi dan akuntabilitas; c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah;	

		sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Keluar Negeri. Penambahan pagu anggaran belanja perjalanan dinas diperkenankan sepanjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	

		Anggaran 2025, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kepatutan, kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan: a) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen); b) kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan; c) batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>d) belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>C. Belanja Hibah.

Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula Rp140.278.069.039,00 bertambah Rp123.767.275.298,00 menjadi Rp264.045.344.337,00 atau 6,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 10, sebagai berikut:

Tabel. 10

Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

<table>
<tr><th>Tahun Anggaran</th><th>Belanja Hibah (Rp)</th><th>Realisasi Belanja Hibah(Rp)</th><th>%</th><th>Total Belanja Daerah (Rp)</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4=3:2</td><td>5</td><td>6=2:5</td></tr>
<tr><td>APBD 2023</td><td>111.781.321.093</td><td>112,095,635,679</td><td>100.28</td><td>4.013.727.352.101</td><td>2,78</td></tr>
</table>
</td>
<td>C. Belanja Hibah.
Penyediaan anggaran Belanja Hibah
Terkait penganggaran belanja hibah yang telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran</td>
</tr>
</table>

APBD 2024	167.145.566.663	136,655,551,455	81.76	4.750.926.224.507	3,52
APBD 2025	140.278.069.039	96,469,004,403	36.54	3.408.867.666.146	4,12
Rancangan Perubahan APBD 2025	264.045.344.337	0	0	4.313.840.074.908	6,12

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp140.278.069.039,00 atau 4,12% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp167.145.566.663,00 atau 3,52% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 246 Tahun 2021 tentang Tatacara penganggaran¸pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp4.750.926.224.507,58, dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp111.781.321.093,00 atau 2,78% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp4.013.727.352.101,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Belanja Hibah per Juli 2025 Rp96,469,004,403.00 atau 36.54% dari total target Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp140.278.069.039,00; 2) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp136,655,551,455.00 atau 81.76% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp167.145.566.663,00; dan 3) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp112,095,635,679.00 atau 100.28% dari total	

		Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp111.781.321.093,00. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula Rp 9.704.000.000,00 bertambah Rp 21.126.699.375,00 menjadi Rp30.830.699.375,00 tau 0,71% % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp500.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp450.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp500.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp450.000.000,00;	

		b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.204.000.000,00 bertambah Rp21.163.699.375,00 menjadi Rp30.367.699.375,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.204.000.000,00 bertambah Rp21.163.699.375,00 menjadi Rp30.367.699.375,00; dan c) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp13.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	

		Anggaran 2025 dianggarkan Rp13.000.000,00.	
		2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.390.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.390.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.390.000.000,00;	Penyediaan anggaran Belanja Hibah Terkait penganggaran belanja hibah yang telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan

			peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 246 Tahun 2021 tentang Tatacara penganggaran,pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
		3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp129.434.069.039,00 bertambah Rp71.418.100.794,00 menjadi Rp200.852.169.833,00 atau 4,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp85.469.023.722,00 bertambah Rp45.307.612.511,00 menjadi Rp130.776.636.233,00, yang antara lain	Penyediaan anggaran Belanja Hibah Terkait penganggaran belanja hibah yang telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

		diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp37.582.556.672,00 bertambah Rp359.981.628,00 menjadi Rp37.942.538.300,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya; dan (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp27.061.098.300,00 bertambah Rp1.420.000.000,00 menjadi Rp28.481.098.300,00 pada Sub	2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 246 Tahun 2021 tentang Tatacara penganggaran¸pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

		Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota. (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp47.886.467.050,00 bertambah Rp44.947.630.883,00 menjadi Rp92.834.097.933,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp5.148.944.600,00 bertambah Rp9.667.365.200,00 menjadi Rp14.816.309.800,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan;	

		(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp8.224.643.200,00 bertambah Rp7.097.138.100,00 menjadi Rp15.321.781.300,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat; dan (c) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp32.508.680.000,00 bertambah Rp13.012.000.150,00 menjadi Rp45.520.680.150,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan	

		Strategis Daerah Kabupaten/Kota. b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp38.915.407.084,00 bertambah Rp15.266.833.603,00 menjadi Rp54.182.240.687,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp38.915.407.084,00 bertambah Rp15.266.833.603,00 menjadi Rp54.182.240.687,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp2.720.671.000,00 bertambah Rp1.760.113.500,00 menjadi Rp4.480.784.500,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai	

		dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp2.221.000.000,00 bertambah Rp1.414.000.000,00 menjadi Rp3.635.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan. c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp696.223.913,00 bertambah Rp8.106.200.000,00 menjadi Rp8.802.423.913,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp695.968.613,00 bertambah Rp8.106.200.000,00 menjadi	

		Rp8.802.168.613,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp8.083.890.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; dan (b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp541.408.883,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang	

		Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp255.300,00, yang hanya tercantum pada sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan. d) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.808.414.320,00 bertambah Rp2.872.454.680,00 menjadi Rp5.680.869.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.808.414.320,00 bertambah Rp2.872.454.680,00 menjadi Rp5.680.869.000,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp98.914.320,00 berkurang Rp98.914.320,00 menjadi Rp0,00 pada	

		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); dan (2) Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.709.500.000,00 bertambah Rp2.971.369.000,00 menjadi Rp5.680.869.000,00 pada Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi. e) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp1.545.000.000,00 berkurang Rp135.000.000,00 menjadi Rp1.410.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp1.545.000.000,00 berkurang Rp135.000.000,00 menjadi	

		Rp1.410.000.000,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.050.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan (2) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor	

		2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan	

		pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan	

		alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci	

		menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada	

		SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp961.515.264,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan	

		Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.390.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.390.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.390.000.000,00;	Penyediaan anggaran Belanja Hibah Terkait penganggaran belanja hibah yang telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

		3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp129.434.069.039,00 bertambah Rp71.418.100.794,00 menjadi Rp200.852.169.833,00 atau 4,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp85.469.023.722,00 bertambah Rp45.307.612.511,00 menjadi Rp130.776.636.233,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp37.582.556.672,00 bertambah Rp359.981.628,00 menjadi	2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 246 Tahun 2021 tentang Tatacara penganggaran,pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

		Rp37.942.538.300,00, yang antara lain tercantum pada: a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya; dan b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp27.061.098.300,00 bertambah Rp1.420.000.000,00 menjadi Rp28.481.098.300,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota. (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp47.886.467.050,00 bertambah	

		Rp44.947.630.883,00 menjadi Rp92.834.097.933,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp5.148.944.600,00 bertambah Rp9.667.365.200,00 menjadi Rp14.816.309.800,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan; (b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp8.224.643.200,00 bertambah Rp7.097.138.100,00 menjadi Rp15.321.781.300,00 pada Sub	

		Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat; dan (c) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp32.508.680.000,00 bertambah Rp13.012.000.150,00 menjadi Rp45.520.680.150,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota. b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp38.915.407.084,00 bertambah Rp15.266.833.603,00 menjadi	

		Rp54.182.240.687,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp38.915.407.084,00 bertambah Rp15.266.833.603,00 menjadi Rp54.182.240.687,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp2.720.671.000,00 bertambah Rp1.760.113.500,00 menjadi Rp4.480.784.500,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	

		Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp2.221.000.000,00 bertambah Rp1.414.000.000,00 menjadi Rp3.635.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan. c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp696.223.913,00 bertambah Rp8.106.200.000,00 menjadi Rp8.802.423.913,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp695.968.613,00 bertambah Rp8.106.200.000,00 menjadi	

		Rp8.802.168.613,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp8.083.890.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; dan	

		(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp541.408.883,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp255.300,00, yang hanya tercantum pada sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan. d) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.808.414.320,00 bertambah Rp2.872.454.680,00 menjadi	

		Rp5.680.869.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.808.414.320,00 bertambah Rp2.872.454.680,00 menjadi Rp5.680.869.000,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp98.914.320,00 berkurang Rp98.914.320,00 menjadi Rp0,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); dan (2) Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp2.709.500.000,00 bertambah Rp2.971.369.000,00 menjadi Rp5.680.869.000,00 pada Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	

		Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi. e) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp1.545.000.000,00 berkurang Rp135.000.000,00 menjadi Rp1.410.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp1.545.000.000,00 berkurang Rp135.000.000,00 menjadi Rp1.410.000.000,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.050.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan (2) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp200.000.000,00	

		pada Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	

		Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada	

		SKPD Inspektorat, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,	

		pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah	

		dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp961.515.264,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	

		sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		D. Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin semula Rp66.992.233.910,00 bertambah Rp10.676.458.090,00 menjadi Rp77.668.692.000,00 atau 1,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel 11, sebagai berikut:	D. Belanja Bantuan Sosial Terkait penganggaran belanja bantuan sosial, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupaya tetap berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Tabel. 11

Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%
1	2	3	4=3:2
APBD 2023	200.000.000,00	200.000.000,00	100
APBD 2024	20.765.666.000,00	5.385.000.000,00	25,93
APBD 2025	66.992.233.910,00	12.395.725.000,00	18,50
Rancangan Perubahan APBD 2025	77.668.692.000,00	0	0

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 246 Tahun 2021 tentang Tatacara penganggaran¸pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp66.992.233.910,00 atau 1,96% dari total belanja daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp20.765.666.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp4.750.926.224.507,58 dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp200.000.000,00 atau 0,005% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp4.013.727.352.101,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:	

		1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial per bulan Juli 2025 Rp12.395.725.000,00 atau 18,50% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp66.992.233.910,00; 2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 Rp5.385.000.000,00 atau 25,93% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp20.765.666.000,00; 3) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Rp200.000.000,00 atau 100% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp200.000.000,00. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang antara lain antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp48.182.233.910,00 bertambah Rp4.576.458.090,00 menjadi Rp52.758.692.000,00 atau 1,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	

		Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp47.653.791.910,00 bertambah Rp4.652.108.090,00 menjadi Rp52.305.900.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp47.653.791.910,00 bertambah Rp4.652.108.090,00 menjadi Rp52.305.900.000,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp1.460.000.000,00 bertambah Rp21.540.000.000,00 menjadi Rp23.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	

		Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota; dan (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp45.785.000.000,00 berkurang Rp16.879.100.000,00 menjadi Rp28.905.900.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp528.442.000,00 berkurang Rp75.650.000,00 menjadi Rp452.792.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp528.442.000,00 berkurang Rp75.650.000,00 menjadi Rp452.792.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	
		2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga semula Rp18.810.000.000,00 bertambah	Terkait penganggaran belanja bantuan sosial,

		Rp6.100.000.000,00 menjadi Rp24.910.000.000,00 atau 0,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga semula Rp18.810.000.000,00 bertambah Rp6.100.000.000,00 menjadi Rp24.910.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga semula Rp18.810.000.000,00 bertambah Rp6.100.000.000,00 menjadi Rp24.910.000.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupaya tetap berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 246 Tahun 2021 tentang Tatacara penganggaran,pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

		2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja bantuan sosial dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program	

		Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan	

		Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan	

		Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, sedangkan ~~dan~~ Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat	

		penerima dan besarannya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut: a. bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras;	

		b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, *top up* bantuan sosial reguler, dan bantuan beras; dan c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia); sebagaimana maksud butir 5.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp523.070.692.769,00 bertambah Rp317.408.240.240,50 menjadi Rp840.478.933.009,50 atau 19,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran	2. Belanja Modal Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada: a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada: a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 .

		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada: a. Belanja Modal Tanah semula Rp10.314.120.000,00 berkurang Rp8.317.334.250,00 menjadi Rp1.996.785.750,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah semula Rp10.314.120.000,00 berkurang Rp8.317.334.250,00 menjadi Rp1.996.785.750,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Tanah Persil semula Rp10.314.120.000,00 berkurang Rp8.317.334.250,00 menjadi Rp1.996.785.750,00, yang antara lain	Penyediaan anggaran Belanja Modal tanah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

		diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal semula Rp7.072.280.000,00 berkurang Rp6.977.689.600,00 menjadi Rp94.590.400,00; b) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp54.761.850,00; c) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah semula Rp49.320.000,00 berkurang Rp49.320.000,00 menjadi Rp0,00; dan d) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya semula Rp2.343.200.000,00	

		berkurang Rp1.516.478.900,00 menjadi Rp826.721.100,00,00. 2) Belanja Modal Lapangan semula Rp849.320.000,00 bertambah Rp171.392.400,00 menjadi Rp1.020.712.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Tanah untuk Jalan semula Rp800.000.000,00 bertambah Rp90.132.000,00 menjadi Rp890.132.000,00; b) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi semula Rp49.320.000,00 berkurang Rp49.320.000,00 menjadi Rp0,00; dan c) Belanja Modal Tanah untuk Makam, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	

		Anggaran 2025 dianggarkan Rp130.580.400,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	
		b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp 74.347.961.221,00 bertambah Rp42.892.950.564,61 menjadi Rp117.240.911.785,61 atau 2,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang	Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Besar semula Rp4.644.428.398,00 berkurang Rp1.974.935.416,00 menjadi Rp2.669.492.982,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Besar Darat semula Rp3.899.350.080,00 berkurang Rp1.949.675.040,00 menjadi Rp1.949.675.040,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Excavator semula Rp3.899.350.080,00 berkurang Rp1.949.675.040,00 menjadi Rp1.949.675.040,00; b) Belanja Modal Alat Bantu semula Rp745.078.318,00 berkurang Rp25.260.376,00 menjadi Rp719.817.942,00, yang antara lain	pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi asset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka

		diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal *Electric Generating Set* semula Rp572.000.000,00 berkurang Rp22.000.000,00 menjadi Rp550.000.000,00; dan (2) Belanja Modal Pompa semula Rp173.078.318,00 berkurang Rp3.260.376,00 menjadi Rp169.817.942,00. 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp12.393.453.467,00 bertambah Rp9.978.898.930,00 menjadi Rp22.372.352.397,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp12.254.234.077,00 bertambah Rp10.002.561.680,00 menjadi Rp22.256.795.757,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

		(1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp83.769.147,00; (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp7.039.600.000,00; (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula Rp1.079.997.150,00 berkurang Rp125.001.900,00 menjadi Rp954.995.250,00; (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp189.108.480,00 bertambah Rp1.194.422.880,00 menjadi Rp1.383.531.360,00; (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga semula Rp688.000.000,00 bertambah Rp255.000.000,00 menjadi Rp943.000.000,00; dan	

		(6) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp688.000.000,00 bertambah Rp255.000.000,00 menjadi Rp943.000.000,00. b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor semula Rp3.330.000,00 bertambah Rp11.655.000,00 menjadi Rp14.985.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang semula Rp3.330.000,00 bertambah Rp11.655.000,00 menjadi Rp14.985.000,00; c) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp15.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang Rp15.000.000,00; d) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor semula Rp120.889.390,00 berkurang Rp35.317.750,00 menjadi	

		Rp85.571.640,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus semula Rp120.889.390,00 berkurang Rp35.317.750,00 menjadi Rp85.571.640,00. 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur semula Rp7.448.490,00 bertambah Rp17.611.121,00 menjadi Rp25.059.611,00 atau 0,0005% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja; a) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp6.650.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) Rp6.650.000,00; b) Belanja Modal Alat Ukur semula Rp798.490,00 bertambah Rp17.611.121,00 menjadi Rp 18.409.611,00, yang antara lain	

		diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain Rp798.490,00; (2) Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp16.955.000,00; dan (3) Belanja Modal Anak Timbangan/Biara, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp656.121,00. 4) Belanja Modal Alat Pertanian semula Rp175.387.000,00 berkurang Rp28.917.000,00 menjadi Rp146.470.000,00, yang hanya	

		diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian semula Rp175.387.000,00 berkurang Rp28.917.000,00 menjadi Rp146.470.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman semula Rp68.310.000,00 berkurang Rp330.000,00 menjadi Rp67.980.000,00; b) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak semula Rp37.272.000,00 berkurang Rp4.995.000,00 menjadi Rp32.277.000,00; c) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan semula Rp9.805.000,00 bertambah Rp36.408.000,00 menjadi Rp46.213.000,00; dan d) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan semula Rp60.000.000,00 berkurang	

		Rp60.000.000,00 menjadi Rp0,00. 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp21.253.686.521,00 bertambah Rp12.022.945.132,27 menjadi Rp33.276.631.653,27 atau 0,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp2.090.111.032,00 berkurang Rp569.156.544,00 menjadi Rp1.520.954.488,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor semula Rp23.523.120,00 berkurang Rp23.523.120,00 menjadi Rp0,00; dan (2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp2.066.587.912,00	

		berkurang Rp545.633.424,00 menjadi Rp1.520.954.488,00. b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp15.825.820.429,00 bertambah Rp11.213.363.117,27 menjadi Rp27.039.183.546,27 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Mebel semula Rp11.137.478.154,00 bertambah Rp10.552.935.224,10 menjadi Rp21.690.413.378,10; (2) Belanja Modal Alat Pembersih semula Rp263.948.140,00 berkurang Rp24.425.140,00 menjadi Rp239.523.000,00; (3) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp1.380.683.820,00 berkurang Rp204.576.237,00 menjadi Rp1.176.107.583,00; (4) Belanja Modal Alat Dapur semula Rp1.072.125.039,00 bertambah Rp347.887.861,00 menjadi Rp724.237.178,00; (5) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) semula	

		Rp1.920.275.442,00 bertambah Rp1.212.331.031,17 menjadi Rp3.132.606.473,17; dan (6) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran semula Rp51.309.834,00 bertambah Rp24.986.100,00 menjadi Rp76.295.934,00. c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula Rp3.337.755.060,00 bertambah Rp1.378.738.559,00 menjadi Rp4.716.493.619,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat semula Rp984.320.820,00 berkurang Rp54.753.060,00 menjadi Rp929.567.760,00; (2) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat semula Rp155.771.590,00 bertambah Rp1.475.688.444,00 menjadi Rp1.631.460.034,00;	

		(3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat semula Rp882.855.850,00 bertambah Rp115.502.153,00 menjadi Rp998.358.003,00; (4) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat semula Rp40.690.000,00 bertambah Rp543.672.000,00 menjadi Rp584.362.000,00; (5) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat semula Rp1.274.116.800,00 berkurang Rp701.370.978,00 menjadi Rp572.745.822,00. 6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp1.266.738.148,00 bertambah Rp5.998.120.043,00 menjadi Rp7.264.858.191,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain	

		diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Studio semula Rp1.148.933.448,00 bertambah Rp3.340.383.561,00 menjadi Rp4.489.317.009,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan Studio Audio semula Rp343.977.285,00 bertambah Rp2.084.706.101,00 menjadi Rp2.428.683.386,00; (2) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film semula Rp775.091.163,00 bertambah Rp1.231.395.210,00 menjadi Rp2.006.486.373,00; (3) Belanja Modal Peralatan Cetak semula Rp6.555.000,00 bertambah Rp17.267.250,00 menjadi Rp23.822.250,00; dan	

		(4) Belanja Modal Alat Studio Lainnya semula Rp23.310.000,00 bertambah Rp7.015.000,00 menjadi Rp30.325.000,00. b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula Rp117.804.700,00 bertambah Rp2.557.172.702,00 menjadi Rp2.674.977.402,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone* semula Rp75.344.700,00 berkurang Rp22.989.298,00 menjadi Rp52.355.402,00; (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF semula Rp17.760.000,00 bertambah Rp25.000.000,00 menjadi Rp42.760.000,00; (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	

		semula Rp2.500.000,00 berkurang Rp2.500.000,00 menjadi Rp0,00; dan (4) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya semula Rp22.200.000,00 bertambah Rp2.557.662.000,00 menjadi Rp2.579.862.000,00. c) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp100.563.780,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang	

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp100.563.780,00; 7) Belanja Modal Komputer semula Rp17.891.163.214,00 berkurang Rp3.261.192.345,66 menjadi Rp14.629.970.868,34 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp14.704.857.004,00 berkurang Rp3.588.094.399,94 menjadi Rp11.116.762.604,06, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp6.801.110.756,00 bertambah Rp1.343.919.709,40	

		menjadi Rp8.145.030.465,40; dan (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula Rp7.903.746.248,00 berkurang Rp4.932.014.109,34 menjadi Rp2.971.732.138,66. (b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp3.186.306.210,00 bertambah Rp326.902.054,28 menjadi Rp3.513.208.264,28, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp1.194.158.646,00 berkurang Rp114.895.337,00 menjadi Rp1.079.263.309,00; (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp501.457.075,00 bertambah	

		Rp128.397.360,00 menjadi Rp629.854.435,00; dan (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp1.490.690.489,00 bertambah Rp313.400.031,28 menjadi Rp1.804.090.520,28. 8) Belanja Modal Alat Pengeboran semula Rp42.893.000,00 berkurang Rp3.885.000,00 menjadi Rp39.008.000,00 atau 0,0009% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin semula Rp42.893.000,00 berkurang Rp3.885.000,00 menjadi Rp39.008.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Bantu semula Rp42.893.000,00 berkurang Rp3.885.000,00 menjadi Rp39.008.000,00;	

		9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian semula Rp181.047.000,00 berkurang Rp181.047.000,00 menjadi Rp0,00; 10) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp12.610.544,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Produksi Rp12.610.544,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya Rp12.610.544,00; 11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja semula Rp181.224.887,00 berkurang Rp70.702.200,00 menjadi Rp110.522.687,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan	

			dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Pelindung semula Rp83.433.887,00 berkurang Rp32.851.200,00 menjadi Rp50.582.687,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Baju Pengaman semula Rp70.085.087,00 berkurang Rp29.448.000,00 menjadi Rp40.637.087,00; dan (2) Belanja Modal Sepatu Lapangan semula Rp13.348.800,00 berkurang Rp3.403.200,00 menjadi Rp9.945.600,00. b) Belanja Modal Alat SAR semula Rp97.791.000,00 berkurang Rp37.851.000,00 menjadi	

		Rp59.940.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Penolong semula Rp37.851.000,00 berkurang Rp37.851.000,00 menjadi Rp0,00; dan (2) Belanja Modal Alat SAR Lainnya Rp59.940.000,00. 12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.540.000,00 atau 0,00003%, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang	

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.540.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.540.000,00; 13) Belanja Modal Rambu-Rambu semula Rp1.444.243.200,00 bertambah Rp5.110.000,00 menjadi Rp1.449.353.200,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat semula Rp1.444.243.200,00 bertambah Rp5.110.000,00 menjadi Rp1.449.353.200,00, yang antara	

		lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp499.500.000,00; b) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar semula Rp849.283.200,00 bertambah Rp5.110.000,00 menjadi Rp854.393.200,00; dan c) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp95.460.000,00. 14) Belanja Modal Peralatan Olahraga semula Rp970.408.920,00 bertambah Rp909.267.000,00 menjadi Rp1.879.675.920,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal	

		Peralatan Olahraga semula Rp970.408.920,00 bertambah Rp909.267.000,00 menjadi Rp1.879.675.920,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Peralatan Permainan semula Rp348.441.000,00 bertambah Rp398.715.000,00 menjadi Rp747.156.000,00; dan b) Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya semula Rp621.967.920,00 bertambah Rp510.552.000,00 menjadi Rp1.132.519.920,00.	
		c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp100.593.747.003,00 bertambah Rp39.248.852.257,00 menjadi Rp139.842.599.260,00 atau 3,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:	***Belanja Modal Gedung dan Bangunan*** Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal

		1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp96.680.990.650,00 bertambah Rp35.116.486.125,00 menjadi Rp131.797.476.775,00 atau 3,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp89.385.857.200,00 bertambah Rp31.222.580.525,00 menjadi Rp120.608.437.725,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp37.687.528.185,00 berkurang Rp10.484.914.954,00 menjadi Rp27.202.613.231,00; (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp3.886.213.600,00 bertambah Rp6.440.119.200,00 menjadi Rp10.326.332.800,00; (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah semula	kapitalisasi asset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

		Rp5.500.000.000,00 berkurang Rp5.473.858.250,00 menjadi Rp26.141.750,00; (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp351.500.000,00; (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp21.413.840.581,00 bertambah Rp13.793.695.470,00 menjadi Rp35.207.536.051,00; (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula Rp4.238.265.590,00 berkurang Rp3.617.153.140,00 menjadi Rp621.112.450,00; (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp16.260.009.244,00 bertambah Rp30.115.078.949,00 menjadi Rp46.375.088.193,00; dan	

		(8) Belanja Modal Taman semula Rp400.000.000,00bertambah Rp98.113.250,00 menjadi Rp498.113.250,00. b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp7.295.133.450,00 bertambah Rp3.893.905.600,00 menjadi Rp11.189.039.050,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Flat/Rumah Susun semula Rp2.319.610.400,00 bertambah Rp2.555.562.400,00 menjadi Rp4.875.172.800,00; dan (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp4.975.523.050,00 bertambah Rp1.338.343.200,00 menjadi Rp6.313.866.250,00. 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula Rp1.254.748.160,00 berkurang Rp406.843.810,00 menjadi Rp847.904.350,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan	

		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula Rp1.254.748.160,00 berkurang Rp406.843.810,00 menjadi Rp847.904.350,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Rp87.017.000,00; b) Belanja Modal Pagar semula Rp1.039.996.800,00 berkurang Rp449.262.450,00 menjadi Rp590.734.350,00; dan c) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya semula Rp127.734.360,00 bertambah Rp42.418.640,00 menjadi Rp170.153.000,00.	
		d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp336.951.016.463,00 bertambah Rp223.234.756.720,89 menjadi Rp560.185.773.183,89 atau 12,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	

		Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp305.099.169.477,00 bertambah Rp210.448.355.696,89 menjadi Rp515.547.525.173,89 atau 11,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jalan semula Rp265.462.469.650,00 bertambah Rp207.471.576.893,00 menjadi Rp472.934.046.543,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula Rp217.382.167.894,00 bertambah Rp184.977.281.940,00 menjadi Rp402.359.449.834,00; (2) Belanja Modal Jalan Desa semula Rp300.000.000,00 berkurang Rp300.000.000,00 menjadi Rp0,00; dan	

		(3) Belanja Modal Jalan Lainnya semula Rp47.780.301.756,00 bertambah Rp22.794.294.953,00 menjadi Rp70.574.596.709,00,00 b) Belanja Modal Jembatan semula Rp39.636.699.827,00 bertambah Rp2.976.778.803,89 menjadi Rp42.613.478.630,89 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Jembatan pada Jalan semula Rp37.400.309.827,00 berkurang Rp5.179.018.000,00 menjadi Rp32.221.291.827,00; (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp7.757.176.000,00; dan (3) Belanja Modal Jembatan Lainnya semula Rp2.236.390.000,00	

		bertambah Rp398.620.803,89 menjadi Rp2.635.010.803,89. 2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp24.197.964.986,00 bertambah Rp4.467.674.524,00 menjadi Rp28.665.639.510,00 atau 0,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp313.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp313.000.000,00; b) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku semula Rp5.376.379.800,00 berkurang Rp3.153.177.750,00 menjadi Rp2.223.202.050,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku semula Rp5.376.379.800,00 berkurang Rp3.153.177.750,00 menjadi Rp2.223.202.050,00;	

		c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula Rp18.508.585.186,00 bertambah Rp7.620.852.274,00 menjadi Rp26.129.437.460,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor semula Rp18.508.585.186,00 bertambah Rp7.620.852.274,00 menjadi Rp26.129.437.460,00; 3) Belanja Modal Jaringan semula Rp7.653.882.000,00 bertambah Rp8.318.726.500,00 menjadi Rp15.972.608.500,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jaringan Air Minum semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.727.472.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal	

		Jaringan Induk Distribusi, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.727.472.000,00; b) Belanja Modal Jaringan Listrik semula Rp7.653.882.000,00 bertambah Rp6.591.254.500,00 menjadi Rp14.245.136.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Jaringan Distribusi semula Rp6.103.882.000,00 bertambah Rp3.569.924.500,00 menjadi Rp9.673.806.500,00; dan (2) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya semula Rp1.550.000.000,00 bertambah Rp3.021.330.000,00 menjadi Rp4.571.330.000,00.	
		e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp797.330.777,00 bertambah Rp20.319.139.076,00 menjadi Rp21.116.469.853,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	***Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*** Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan

		Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan semula Rp281.502.777,0 bertambah Rp388.032.783,00 menjadi Rp669.535.560,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak semula Rp181.263.460,00 bertambah Rp488.272.100,00 menjadi Rp669.535.560,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum semula Rp181.263.460,00 bertambah Rp488.272.100,00 menjadi Rp669.535.560,00; dan b) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro semula Rp100.239.317,00 berkurang Rp100.239.317,00 menjadi Rp0,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub	pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi asset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

		rincian objek Belanja Modal Audio Visual semula Rp100.239.317,00 berkurang Rp100.239.317,00 menjadi Rp0,00. 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga semula Rp515.828.000,00 bertambah Rp465.668.000,00 menjadi Rp981.496.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian semula Rp465.828.000,00 bertambah Rp365.783.000,00 menjadi Rp831.611.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Musik semula Rp465.828.000,00 bertambah Rp365.783.000,00 menjadi Rp831.611.000,00; b) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan semula Rp50.000.000,00	

		bertambah Rp99.885.000,00 menjadi Rp149.885.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp99.885.000,00 menjadi Rp149.885.000,00; (3) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp13.079.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanaman Koleksi, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp13.079.000,00.	
		f. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp66.517.305,00 bertambah Rp29.875.872,00 menjadi Rp96.393.177,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset	***Belanja Modal Aset Lainnya*** Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan

		Lainnya-Aset Tidak Berwujud semula Rp66.517.305,00 bertambah Rp29.875.872,00 menjadi Rp96.393.177,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula Rp66.517.305,00 bertambah Rp29.875.872,00 menjadi Rp96.393.177,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise semula Rp26.615.025,00 bertambah Rp49.139.922,00 menjadi Rp75.754.947,00; dan 2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software semula Rp39.902.280,00 berkurang Rp19.264.050,00 menjadi Rp20.638.230,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi asset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud,	pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi asset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

		biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.	

		Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp2.609.388.869,00 bertambah Rp7.584.425.334,00 menjadi Rp10.193.814.203,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp2.597.838.869,00 bertambah Rp7.584.425.334,00 menjadi	

		Rp10.182.264.203,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula Rp1.477.838.869,00 bertambah Rp8.129.425.334,00 menjadi Rp9.607.264.203,00; b) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp175.000.000,00; c) Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy semula Rp320.000.000,00 bertambah Rp80.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00; dan	

		d) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya semula Rp800.000.000,00 berkurang Rp800.000.000,00 menjadi Rp800.000.000,00. 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp11.550.000,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga Rp11.550.000,00. b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp592.087.351,00 bertambah Rp1.543.133.962,00 menjadi Rp2.135.221.313,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium semula Rp584.087.351,00 bertambah Rp1.543.133.962,00 menjadi	

		Rp2.127.221.313,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum semula Rp218.442.288,00 bertambah Rp1.460.250.412,00 menjadi Rp1.678.692.700,00; b) Belanja Modal Laboratorium Kearsipan semula Rp28.242.563,00 bertambah Rp948.750,00 menjadi Rp29.191.313,00; dan c) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp17.630.100,00. 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp8.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal System/Power Supply Rp8.000.000,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang	

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		3. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp6.997.200.620,00 berkurang Rp1.554.916.115,45 menjadi Rp5.442.284.504,55 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	***3. Belanja Tidak Terduga*** Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri

		Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
		4. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp494.667.382.300,00 bertambah Rp49.984.740.954,00 menjadi Rp544.652.123.254,00 atau 12,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang	4. Belanja Transfer Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada jenis Belanja Bantuan Keuangan semula Rp494.667.382.300,00 bertambah Rp49.984.740.954,00 menjadi Rp544.652.123.254,00, yang hanya diuraikan dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp494.667.382.300,00 bertambah Rp49.984.740.954,00 menjadi Rp544.652.123.254,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp494.667.382.300,00 bertambah Rp49.984.740.954,00 menjadi Rp544.652.123.254,00 yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.4.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman	dan butir 3.4.4.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		D. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp1.962.958.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp234.540.000,00 atau 11,94% dari total sub kegiatan; b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp1.105.440.000,00 atau 56,31% dari total sub kegiatan; dan c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp190.200.000,00 atau 9,68% dari total sub kegiatan.	D. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menindaklanjuti dan memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Rp49.999.850,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek: a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp24.521.800,00 atau 49,04% dari total sub kegiatan; dan b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp26.955.000,00 atau 53,91% dari total sub kegiatan. pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp12.440.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp12.440.000,00 atau 100% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan. 4. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp135.690.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	

		a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp27.360.000,00 atau 20,16% dari total sub kegiatan; b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp108.330.000,00 atau 79,83% dari total sub kegiatan; dan pada SKPD Dinas Kesehatan. 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp67.360.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp63.880.000,00 atau 94,83% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan; 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp21.036.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp19.296.000,00 atau 91,72% dari total sub kegiatan. Terdapat hampir di seluruh sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan hanya berupa Belanja Perjalanan Dinas; 7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

		Rp50.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp30.050.000,00 atau 61,10% dari total sub kegiatan; b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp19.950.000,00 atau 39,9% pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan,	

		sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		E. Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp3.206.983.283,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:	E. Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menindaklanjuti dan memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

		1) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp10.670.918,00; 2) Belanja Modal Mebel Rp138.683.800,00; dan 3) Belanja Modal Alat Pendingin Rp13.275.600,00. pada SKPD Dinas Kesehatan; b. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Rp3.712.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp3.635.000.000,00 pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. c. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp1.962.958.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp33.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		d. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp5.859.400.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp5.713.600.000,00; pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; e. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rp6.726.663.110,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; f. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp405.301.418.924,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp191.144.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. g. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp36.350.000,00, yang antara lain	

		diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp14.000.000,00. pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,	

		penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah 1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima	VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

		kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan	1. Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah di Perda kan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 5. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan defisit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

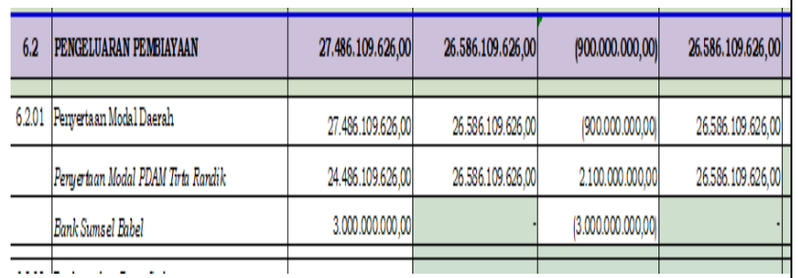
B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Pembiayaan Daerah

Uraian	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pembiayaan Daerah (%)
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.056.371.759,01	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.056.371.759,01	100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.586.109.626,00	
Penyertaan Modal Daerah	26.586.109.626,00	53,11

2. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan Pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :



6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)	26.586.109.626,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)	26.586.109.626,00
	Penyertaan Modal PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	26.586.109.626,00	2.100.000.000,00	26.586.109.626,00
	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	-

		Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan semula Rp69.983.013.972,00 berkurang Rp19.926.642.212,99 menjadi Rp50.056.371.759,01 atau 1,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp69.983.013.972,00 berkurang Rp19.926.642.212,99 menjadi Rp50.056.371.759,01 atau 1,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp4.313.840.074.908,60. Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama	

3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel. 14, sebagai berikut:

Tabel.14

Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2023	63.371.679.556,00	62.401.787.597,88	98,47	4.013.727.352.101,00	1,58
APBD TA 2024	121.636.582.610,58	131.728.424.207	108,30	4.750.926.224.507,58	2,56
APBD TA 2025	69.983.013.972,00	0,00	0,00	3.408.867.666.146,00	2,05
Rancangan Perubahan APBD TA 2025	50.056.371.759,01	0,00	0,00	4.313.840.074.908,60	1,16

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp69.983.013.972,00 atau 2,05% dari total belanja

		daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00, dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp121.636.582.610,58 atau 2,56% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp4.750.926.224.507,58, dan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp63.371.679.556,00 atau 1,58% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp4.013.727.352.101,00. Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: a. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 Rp0,00 atau 0,00% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp69.983.013.972,00;	

		b. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 Rp131.728.424.207 atau 108,30% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp121.636.582.610,58; dan c. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp62.401.787.597,88 atau 98,47% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp63.371.679.556,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	

		tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan. dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.5.2.2.b dan butir 3.5.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 16	

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.5.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		VIII. REKOMENDASI Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:	A. REKOMENDASI B. Terkait Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 telah ditampung dalam Rancangan Perubahan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025;

		A. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025; B. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru; 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	C. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah melakukan sinkronisasi Program prioritas Nasional , Program prioritas propinsi dan Program prioritas daerah untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.; D. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan sinkronisasi Program prioritas Nasional , Program prioritas propinsi dan Program prioritas daerah.; E. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sepakat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi; F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan

		mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. C. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; G. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

		untuk menunjang 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: 1. Swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;	keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. H. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan menjadi daerah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. D. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui: 1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;	I. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. J. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. K. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki

		2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam neger melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program upskilling dan *reskitting* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol

		Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. F. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,	koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. L. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan 2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai; sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

		Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. G. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung	Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN. M. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; N. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan

		tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. H. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. I. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang	penggunaan aspal *buton* (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; O. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;

		tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. J. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. K. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja	2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; P. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: 5. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

		sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan	*(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 6. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*; 7. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan 8. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat

		Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. L. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan 2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai;	dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. R. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 1. Keadaan darurat meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 2. Keperluan mendesak meliputi: e. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

		sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN. M. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. N. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel	f. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; g. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau h. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau masyarakat; sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

		dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal *buton* (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. O. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara	Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1) nama kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat

		bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. P. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: 1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran	menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat

		dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*; 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan	Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya. sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

		Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Q. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 1. Keadaan darurat meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.	U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5) menyediakan dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah; 6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus

		2. Keperluan mendesak meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau masyarakat; sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. R. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:	Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan 7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. V. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

		1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. 2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; 3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; 4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah; 5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan 6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan

		3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Musi Banyuasin kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI. 4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud butir 5.2.19.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah	Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD. sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; W. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu	X. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

		penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1) nama kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan	

		berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya. sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor	

		400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;	

		5) menyediakan dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah; 6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan 7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. V. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	

		untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; 2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; 3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; 4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;	

		5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan 6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD. sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. W. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang	

		tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. X. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus	

		berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		Y. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.	Y. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

Sekayu, 6 Oktober 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Kel. Serasan Jaya Telp / Fax. (0714) 322568
SEKAYU 30711

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 18 /KEP/PIMP/DPRD/2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 708/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah ditetapkan melalui rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran pada tanggal 6 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Undang–Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) Sebagaimana Telah diubah dengan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
20. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 18);
32. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 13);

Menetapkan :

PERTAMA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan ini.

KEDUA : Menyesuaikan program dan kegiatan, objek dan rincian objek pendapatan/belanja/pembiayaan, sumber pendapatan belanja yang dianggarkan lokasi kegiatan dan dasar hukum penganggaran yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan format dan tata cara pengisian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

TIGA : Agar Bupati Musi Banyuasin segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 708/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 6 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

IRWIN ZULYANI, S.H.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. AHMADI

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

EDI PRAMONO

Lampiran I : Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Musi Banyuasin
Nomor : 18 /KEP/PIMP/DPRD/2025
Tanggal : 6 Oktober 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN STRUKTUR RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA.2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / BERKURANG	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.366.370.761.800,00**	**4.290.369.812.775,59**	**923.999.050.975,59**	**4.290.369.812.775,59**	-	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**529.884.959.800,00**	**587.378.681.108,99**	**57.493.721.308,99**	**587.378.681.108,99**	-	
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	223.975.016.750,00	7.508.865.750,00	223.975.016.750,00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.660.787.000,00	465.000.000,00	5.660.787.000,00	-	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	327.742.877.358,99	49.519.855.558,99	327.742.877.358,99	-	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.836.485.802.000,00**	**3.702.991.131.666,60**	**866.505.329.666,60**	**3.702.991.131.666,60**	-	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	3.505.400.983.500,00	794.515.181.500,00	3.505.400.983.500,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	197.590.148.166,60	71.990.148.166,60	197.590.148.166,60	-	
5	**BELANJA**	**3.408.867.666.146,00**	**4.313.840.074.908,60**	**904.972.408.762,60**	**4.313.840.074.908,60**	**0,00**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.384.132.390.457,00**	**2.923.266.734.140,55**	**539.134.343.683,55**	**2.925.722.178.535,88**	**2.455.444.395,33**	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00	1.605.860.647.744,57	344.866.381.332,57	1.605.850.647.744,57	(10.000.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00	975.692.050.058,98	59.824.228.962,98	978.856.068.542,31	3.164.018.483,33	
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	264.045.344.337,00	123.767.275.298,00	263.346.770.249,00	(698.574.088,00)	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	77.668.692.000,00	10.676.458.090,00	77.668.692.000,00	-	

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA.2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / BERKURANG	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
5.2	**BELANJA MODAL**	**523.070.692.769,00**	**840.478.933.009,50**	**317.408.240.240,50**	**838.023.488.614,17**	**(2.455.444.395,33)**	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	1.996.785.750,00	(8.317.334.250,00)	1.996.785.750,00	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	117.240.911.785,61	42.892.950.564,61	114.723.099.390,28	(2.517.812.395,33)	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00	139.842.599.260,00	39.248.852.257,00	141.133.345.260,00	1.290.746.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	560.185.773.183,89	223.234.756.720,89	558.957.395.183,89	(1.228.378.000,00)	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	21.116.469.853,00	20.319.139.076,00	21.116.469.853,00	-	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	96.393.177,00	29.875.872,00	96.393.177,00	-	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.997.200.620,00**	**5.442.284.504,55**	**(1.554.916.115,45)**	**5.442.284.504,55**	**-**	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	(1.554.916.115,45)	5.442.284.504,55	-	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**494.667.382.300,00**	**544.652.123.254,00**	**49.984.740.954,00**	**544.652.123.254,00**	**-**	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00	544.652.123.254,00	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(42.496.904.346,00)**	**(23.470.262.133,01)**	**19.026.642.212,99**	**(23.470.262.133,01)**	**(0,00)**	
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**69.983.013.972,00**	**50.056.371.759,01**	**(19.926.642.212,99)**	**50.056.371.759,01**	**-**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	50.056.371.759,01	(19.926.642.212,99)	50.056.371.759,01	-	

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA.2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / BERKURANG	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**27.486.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**(900.000.000,00)**	**26.586.109.626,00**	**-**	
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)	26.586.109.626,00	-	
	Penyertaan Modal PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	26.586.109.626,00	2.100.000.000,00	26.586.109.626,00	-	
	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	-	-	
6.2.02	Pembentukan Dana Cadangan	-					
	PEMBIAYAAN NETTO	**42.496.904.846,00**	**23.470.262.133,01**	**(19.026.642.212,99)**	**23.470.262.133,01**	**-**	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	0,00	0,00	0,00	-	
TOTAL RANCANGAN APBD		**3.436.353.775.772,00**	**4.340.426.184.584,60**	**904.072.408.762,60**	**4.340.426.184.584,60**	**-**	

SEKAYU, 6 OKTOBER 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. M. TORA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E
KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

H. AHMADI
WAKIL KETUA

EDI PRAMONO
WAKIL KETUA

Lampiran II : Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Musi Banyuasin
Nomor : 18 /KEP/PIMP/DPRD/2025
Tanggal : 6 Oktober 2025

Plafon Anggaran Per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah
Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin
Penyempurnaan Hasul Evaluasi Provinsi
Tahun Anggaran 2025

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	668.321.874.088,00	1.004.601.364.281,00	336.279.490.193,00	1.004.601.364.281,00	-	
2	Dinas Kesehatan	334.276.542.332,00	419.816.271.829,00	85.539.729.497,00	419.816.271.829,00	-	
	2.01 RSUD Sungai Lilin	31.250.000.000,00	34.595.209.582,00	3.345.209.582,00	34.595.209.582,00	-	
	2.02 RSUD Bayung Lencir	27.500.000.000,00	43.720.334.423,00	16.220.334.423,00	43.720.334.423,00	-	
	2.03 Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	3.823.709.566,00	1.534.864.566,00	3.823.709.566,00	-	
	2.04 Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00	4.837.309.682,00	2.174.491.682,00	4.837.309.682,00	-	
	2.05 Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00	2.447.926.919,00	(213.915.081,00)	2.447.926.919,00	-	
	2.06 Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	1.308.830.388,00	(351.804.612,00)	1.308.830.388,00	-	
	2.07 Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	1.305.040.059,00	446.040.059,00	1.305.040.059,00	-	
	2.08 Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	895.813.305,00	254.405.305,00	895.813.305,00	-	
	2.09 Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.744.506.035,00	543.592.035,00	1.744.506.035,00	-	
	2.10 Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	1.565.919.541,00	487.742.541,00	1.565.919.541,00	-	
	2.11 Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.000,00	1.401.820.130,00	369.275.130,00	1.401.820.130,00	-	
	2.12 Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.618.665.549,00	196.607.549,00	2.618.665.549,00	-	
	2.13 Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	2.289.681.026,00	885.418.026,00	2.289.681.026,00	-	
	2.14 Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	4.671.730.749,00	937.200.749,00	4.671.730.749,00	-	

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
	2.15 Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	3.555.216.929,00	705.898.929,00	3.555.216.929,00	-	
	2.16 Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	3.702.692.875,60	919.558.375,60	3.702.692.875,60	-	
	2.17 Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	1.244.732.621,00	312.337.121,00	1.244.732.621,00	-	
	2.18 Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	1.372.814.148,00	112.183.148,00	1.372.814.148,00	-	
	2.19 Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	2.342.665.692,00	633.498.892,00	2.342.665.692,00	-	
	2.20 Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	3.722.190.820,00	774.255.120,00	3.722.190.820,00	-	
	2.21 Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.873.768.829,00	565.561.829,00	1.873.768.829,00	-	
	2.22 Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	2.416.302.647,00	594.788.647,00	2.416.302.647,00	-	
	2.23 Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	1.791.890.699,00	857.004.699,00	1.791.890.699,00	-	
	2.24 Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	5.936.044.738,00	1.246.674.738,00	5.936.044.738,00	-	
	2.25 Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	1.621.608.986,00	148.595.986,00	1.621.608.986,00	-	
	2.26 Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	2.329.776.304,00	669.141.304,00	2.329.776.304,00	-	
	2.27 Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	1.496.473.051,00	305.850.051,00	1.496.473.051,00	-	
	2.28 Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	1.685.915.583,00	672.140.583,00	1.685.915.583,00	-	
	2.29 Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	2.034.105.151,00	904.858.151,00	2.034.105.151,00	-	
	2.30 Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	2.798.926.381,00	1.018.587.381,00	2.798.926.381,00	-	
	2.31 Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	1.198.322.676,00	593.059.176,00	1.198.322.676,00	-	
	2.101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	149.999.999.929,00	151.722.825.896,00	1.722.825.967,00	151.722.825.896,00	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.116.319.679,00	599.212.139.583,60	210.095.819.904,60	599.212.139.583,60	-	

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	228.409.255.813,00	291.126.352.195,00	62.717.096.382,00	291.126.352.195,00	-	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.866.072.375,00	25.617.774.825,00	10.751.702.450,00	25.617.774.825,00	-	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	29.402.308.186,00	38.551.075.727,00	9.148.767.541,00	38.551.075.727,00	-	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.670.022.828,00	16.439.235.163,00	(1.230.787.665,00)	16.439.235.163,00	-	
8	Dinas Sosial	73.044.030.887,00	77.199.200.617,00	4.155.169.730,00	77.199.200.617,00	-	
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.705.863.681,00	15.283.388.890,00	577.525.209,00	15.283.388.890,00	-	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.885.876.989,00	9.351.115.648,00	465.238.659,00	9.351.115.648,00	-	
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.297.553.505,00	10.613.654.680,00	(683.898.825,00)	10.613.654.680,00	-	
12	Dinas Lingkungan Hidup	47.694.443.605,00	57.281.888.783,00	9.587.445.178,00	57.281.888.783,00	-	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.471.692.694,00	22.560.453.778,00	88.761.084,00	22.560.453.778,00	-	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.010.951.733,00	17.707.159.264,00	(2.303.792.469,00)	17.707.159.264,00	-	
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	15.899.994.282,00	22.894.940.858,00	6.994.946.576,00	22.894.940.858,00	-	
16	Dinas Perhubungan	18.878.907.179,00	18.140.479.690,00	(738.427.489,00)	18.140.479.690,00	-	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.541.448.619,00	33.239.317.426,70	5.697.868.807,70	33.239.317.426,70	-	
18	Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	11.850.517.905,00	16.818.749.442,00	4.968.231.537,00	16.818.749.442,00	-	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.600.812.462,00	18.893.414.726,50	292.602.264,50	18.893.414.726,50	-	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	101.941.941.622,00	121.911.962.752,00	19.970.021.130,00	121.911.962.752,00	-	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.156.812.449,00	12.283.598.469,00	1.126.786.020,00	12.283.598.469,00	-	
22	Dinas Perikanan	16.494.925.674,00	16.197.107.218,00	(297.818.456,00)	16.197.107.218,00	-	

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.549.807.214,00	52.512.743.436,00	5.962.936.222,00	52.512.743.436,00	-	
24	Dinas Perkebunan	42.364.296.804,00	45.065.363.508,00	2.701.066.704,00	45.065.363.508,00	-	
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	26.881.266.906,00	22.330.566.460,00	(4.550.700.446,00)	22.330.566.460,00	-	
26	Sekretariat Daerah	120.811.591.060,00	139.334.235.055,00	18.522.643.995,00	139.334.235.055,00	-	
27	Sekretariat DPRD	106.813.431.705,00	120.372.873.231,00	13.559.441.526,00	120.372.873.231,00	-	
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.261.719.593,00	21.712.999.554,50	(1.548.720.038,50)	21.712.999.554,50	-	
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	522.899.586.811,00	571.334.940.609,24	48.435.353.798,24	571.334.940.609,24	-	
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	31.567.465.696,00	38.136.859.136,00	6.569.393.440,00	38.136.859.136,00	-	
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.775.086.251,00	18.901.341.166,00	126.254.915,00	18.901.341.166,00	-	
32	Inspektorat	25.621.100.590,00	30.408.129.304,00	4.787.028.714,00	30.408.129.304,00	-	
33	Kecamatan Sekayu	9.724.469.839,00	10.324.889.048,00	600.419.209,00	10.324.889.048,00	-	
	33.01 Kelurahan Serasan Jaya	849.999.937,00	600.219.072,00	(249.780.865,00)	600.219.072,00	-	
	33.02 Kelurahan Soak Baru	849.999.948,00	684.148.533,00	(165.851.415,00)	684.148.533,00	-	
	33.03 Kelurahan Balai Agung	850.000.000,00	669.522.773,00	(180.477.227,00)	669.522.773,00	-	
	33.04 Kelurahan Kayuara	850.000.000,00	682.065.034,00	(167.934.966,00)	682.065.034,00	-	
34	Kecamatan Lais	4.671.575.953,00	4.725.637.985,00	54.062.032,00	4.725.637.985,00	-	
35	Kecamatan Babat Toman	5.111.810.737,00	6.864.524.708,99	1.752.713.971,99	6.864.524.708,99	-	
	35.01 Kelurahan Babat	849.998.751,00	758.024.172,96	(91.974.578,04)	758.024.172,96	-	
	35.02 Kelurahan Mangun Jaya	849.998.767,00	766.737.231,51	(83.261.535,49)	766.737.231,51	-	
36	Kecamatan Keluang	4.541.453.123,00	5.060.224.145,00	518.771.022,00	5.060.224.145,00	-	
	36.01 Kelurahan Keluang	849.999.875,00	841.784.711,00	(8.215.164,00)	841.784.711,00	-	

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
37	Kecamatan Sanga Desa	5.231.826.315,00	5.566.745.605,00	334.919.290,00	5.566.745.605,00	-	
	37.01 Kelurahan Ngulak I	848.720.148,00	832.978.633,00	(15.741.515,00)	832.978.633,00	-	
	37.02 Kelurahan Ngulak	848.564.566,00	833.612.894,00	(14.951.672,00)	833.612.894,00	-	
38	Kecamatan Plakat Tinggi	3.452.126.423,00	4.293.670.603,00	841.544.180,00	4.293.670.603,00	-	
39	Kecamatan Batanghari Leko	3.838.838.954,00	4.166.315.645,00	327.476.691,00	4.166.315.645,00	-	
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.729.241.886,00	3.982.090.009,00	252.848.123,00	3.982.090.009,00	-	
41	Kecamatan Sungai Lilin	4.992.630.396,00	5.546.584.823,00	553.954.427,00	5.546.584.823,00	-	
	41.01 Kelurahan Sungai Lilin	850.000.000,00	833.014.354,00	(16.985.646,00)	833.014.354,00	-	
	41.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	850.000.000,00	838.919.254,00	(11.080.746,00)	838.919.254,00	-	
42	Kecamatan Bayung Lencir	4.491.388.274,00	5.061.972.049,00	570.583.775,00	5.061.972.049,00	-	
	42.01 Kelurahan Bayung Lencir	849.014.113,00	823.842.083,00	(25.172.030,00)	823.842.083,00	-	
	42.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah	849.918.355,00	829.391.585,00	(20.526.770,00)	829.391.585,00	-	
43	Kecamatan Lalan	4.164.662.653,00	4.762.891.988,00	598.229.335,00	4.762.891.988,00	-	
44	Kecamatan Tungkal Jaya	4.684.002.562,00	4.995.802.499,00	311.799.937,00	4.995.802.499,00	-	
45	Kecamatan Lawang Wetan	4.418.768.712,00	4.742.295.672,00	323.526.960,00	4.742.295.672,00	-	
46	Kecamatan Babat Supat	3.548.719.688,00	4.217.302.289,00	668.582.601,00	4.217.302.289,00	-	
47	Kecamatan Jirak Jaya	2.649.926.025,00	3.611.399.223,00	961.473.198,00	3.611.399.223,00	-	
TOTAL BELANJA DAERAH		**3.408.867.666.146,00**	**4.313.840.074.908,60**	**904.972.408.762,60**	**4.313.840.074.908,60**		

No.	Perangkat Daerah	PAGU INDIKATIF APBD INDUK TA. 2025	PAGU INDIKATIF RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
PEMBIAYAAN							
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**27.486.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**(900.000.000,00)**	**26.586.109.626,00**	-	
1	Penyertaan Modal PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	26.586.109.626,00	2.100.000.000,00	26.586.109.626,00	-	
1	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO		(27.486.109.626,00)	(26.586.109.626,00)	900.000.000,00	(26.586.109.626,00)	-	
TOTAL RANCANGAN APBD		**3.436.353.775.772,00**	**4.340.426.184.534,60**	**904.072.408.762,60**	**4.340.426.184.534,60**	-	

SEKAYU, 6 OKTOBER 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. M. TOHA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E
KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

H. AHMADI
WAKIL KETUA

EDI PRAMONO
WAKIL KETUA

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**529.884.959.800,00**	**587.378.681.108,99**	**57.493.721.308,99**
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	223.975.016.750,00	7.508.865.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.660.787.000,00	465.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	327.742.877.358,99	49.519.855.558,99
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.836.485.802.000,00**	**3.702.991.131.666,60**	**866.505.329.666,60**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	3.505.400.983.500,00	794.515.181.500,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	197.590.148.166,60	71.990.148.166,60
	Jumlah Pendapatan	**3.366.370.761.800,00**	**4.290.369.812.775,59**	**923.999.050.975,59**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.384.132.390.457,00**	**2.925.722.178.535,88**	**541.589.788.078,88**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00	1.605.850.647.744,57	344.856.381.332,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00	978.856.068.542,31	62.988.247.446,31
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	263.346.770.249,00	123.068.701.210,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	77.668.692.000,00	10.676.458.090,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**523.070.692.769,00**	**838.023.488.614,17**	**314.952.795.845,17**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	1.996.785.750,00	-8.317.334.250,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	114.723.099.390,28	40.375.138.169,28
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00	141.133.345.260,00	40.539.598.257,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	558.957.395.183,89	222.006.378.720,89
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	21.116.469.853,00	20.319.139.076,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	96.393.177,00	29.875.872,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.997.200.620,00**	**5.442.284.504,55**	**-1.554.916.115,45**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	-1.554.916.115,45
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**494.667.382.300,00**	**544.652.123.254,00**	**49.984.740.954,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
	Jumlah Belanja	**3.408.867.666.146,00**	**4.313.840.074.908,60**	**904.972.408.762,60**
	Total Surplus/(Defisit)	**-42.496.904.346,00**	**-23.470.262.133,01**	**19.026.642.212,99**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**69.983.013.972,00**	**50.056.371.759,01**	**-19.926.642.212,99**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	50.056.371.759,01	-19.926.642.212,99
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**27.486.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**-900.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	26.586.109.626,00	-900.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**27.486.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**-900.000.000,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	**42.496.904.345,00**	**23.470.262.133,01**	**-19.026.642.212,99**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	248.223.489.800,00	247.022.123.524,00	1.520.438.781.113,00	1.982.929.353.792,51	439.409.181.326,00	731.059.255.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.847.962.439,00	2.713.988.609.763,20	754.140.647.324,20
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	625.845.580.157,00	909.525.627.669,00	31.921.364.081,00	80.056.402.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.766.944.238,00	989.582.029.956,00	331.815.085.718,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	625.845.580.157,00	909.525.627.669,00	31.921.364.081,00	80.056.402.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.766.944.238,00	989.582.029.956,00	331.815.085.718,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	245.486.489.800,00	244.280.123.524,00	569.004.413.838,00	654.844.111.238,60	25.758.617.423,00	65.044.931.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.763.031.261,00	719.889.042.809,60	125.126.011.548,60
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	326.900.208.586,00	379.501.974.698,00	7.376.333.746,00	40.314.297.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.276.542.332,00	419.816.271.829,00	85.539.729.497,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	28.750.000.000,00	29.000.000.000,00	26.650.000.000,00	31.080.963.622,00	4.600.000.000,00	3.514.245.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250.000.000,00	34.595.209.582,00	3.345.209.582,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	25.000.000.000,00	26.500.000.000,00	24.624.616.728,00	35.163.294.901,00	2.875.383.272,00	8.557.039.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000.000,00	43.720.334.423,00	16.220.334.423,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	2.632.172.659,00	2.007.905.000,00	3.292.769.566,00	280.940.000,00	530.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.845.000,00	3.823.709.566,00	1.534.864.566,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Babat Toman	2.662.818.300,00	3.161.128.960,00	2.396.536.200,00	4.471.027.882,00	266.281.800,00	366.281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.818.000,00	4.837.309.682,00	2.174.491.682,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00	1.800.000.000,00	2.262.565.700,00	2.258.577.230,00	399.276.300,00	189.349.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.842.000,00	2.447.926.919,00	-213.915.081,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	850.000.000,00	1.411.539.750,00	1.240.830.388,00	249.095.250,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00	1.308.830.388,00	-351.804.612,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	550.000.000,00	730.150.000,00	1.250.040.059,00	128.850.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.000.000,00	1.305.040.059,00	446.040.059,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	450.000.000,00	513.126.400,00	850.813.305,00	128.281.600,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.408.000,00	895.813.305,00	254.405.305,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.200.914.951,00	1.024.835.800,00	1.568.427.835,00	176.078.200,00	176.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.914.000,00	1.744.506.035,00	543.592.035,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	1.078.177.000,00	862.541.600,00	1.350.284.141,00	215.635.400,00	215.635.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.177.000,00	1.565.919.541,00	487.742.541,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.500,00	929.290.500,00	829.864.574,00	1.238.286.669,00	202.680.426,00	163.533.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.545.000,00	1.401.820.130,00	369.275.130,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.060.837.338,00	2.058.749.300,00	2.536.232.056,00	363.308.700,00	82.433.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.058.000,00	2.618.665.549,00	196.607.549,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	1.404.263.000,00	1.381.756.800,00	2.108.478.584,00	22.506.200,00	181.202.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.263.000,00	2.289.681.026,00	885.418.026,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	3.734.530.000,00	3.284.530.000,00	4.221.730.749,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.530.000,00	4.671.730.749,00	937.200.749,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	2.849.318.442,00	2.475.768.000,00	3.177.360.469,00	373.550.000,00	377.856.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.318.000,00	3.555.216.929,00	705.898.929,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	2.783.134.500,00	2.514.506.768,00	3.345.235.390,60	268.627.732,00	357.457.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.134.500,00	3.702.692.875,60	919.558.375,60
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	810.650.280,00	792.535.500,00	1.163.667.621,00	139.860.000,00	81.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.395.500,00	1.244.732.621,00	312.337.121,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja											
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0018	Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	800.000.000,00	1.109.355.280,00	1.291.495.623,00	151.275.720,00	81.318.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.631.000,00	1.372.814.148,00	112.183.148,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0019	Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	1.609.166.800,00	1.552.361.800,00	2.185.860.692,00	156.805.000,00	156.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.166.800,00	2.342.665.692,00	633.498.892,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0020	Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	2.947.935.700,00	2.647.935.700,00	3.422.190.820,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.935.700,00	3.722.190.820,00	774.255.120,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0021	Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.339.546.545,00	1.177.957.000,00	1.743.518.829,00	130.250.000,00	130.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.207.000,00	1.873.768.829,00	565.561.829,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0022	Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	1.890.000.000,00	1.620.413.157,00	2.174.201.804,00	201.100.843,00	242.100.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.514.000,00	2.416.302.647,00	594.788.647,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0023	Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	1.034.886.000,00	841.397.400,00	1.598.402.099,00	93.488.600,00	193.488.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.886.000,00	1.791.890.699,00	857.004.699,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0024	Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	4.487.727.488,00	4.029.028.000,00	5.275.702.738,00	660.342.000,00	660.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.370.000,00	5.936.044.738,00	1.246.674.738,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0025	Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	900.000.000,00	1.253.372.516,00	1.540.758.986,00	219.640.484,00	80.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.013.000,00	1.621.608.986,00	148.595.986,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0026	Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	1.660.635.753,00	1.411.539.750,00	2.059.281.054,00	249.095.250,00	270.495.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00	2.329.776.304,00	669.141.304,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0027	Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	950.623.000,00	1.065.623.000,00	1.371.473.051,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.623.000,00	1.496.473.051,00	305.850.051,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0028	Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	1.013.775.000,00	912.397.500,00	1.401.058.083,00	101.377.500,00	284.857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.775.000,00	1.685.915.583,00	672.140.583,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0029	Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	1.373.503.251,00	959.859.950,00	1.864.718.101,00	169.387.050,00	169.387.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.247.000,00	2.034.105.151,00	904.858.151,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0030	Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	1.872.642.857,00	1.556.339.000,00	2.498.926.381,00	224.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.339.000,00	2.798.926.381,00	1.018.587.381,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0031	Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	605.263.500,00	544.737.150,00	1.109.696.326,00	60.526.350,00	88.626.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.263.500,00	1.198.322.676,00	593.059.176,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0101	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	145.600.359.929,00	145.486.831.486,00	4.399.640.000,00	6.235.994.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.999.929,00	151.722.825.896,00	1.722.825.967,00	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.000.000,00	215.000.000,00	107.562.097.659,00	130.436.637.000,71	264.034.222.020,00	442.747.910.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	371.596.319.679,00	573.184.547.383,60	201.588.227.704,60	
1	03	1.03.2.15.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	210.000.000,00	215.000.000,00	107.562.097.659,00	130.436.637.000,71	264.034.222.020,00	442.747.910.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	371.596.319.679,00	573.184.547.383,60	201.588.227.704,60	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.527.000.000,00	2.527.000.000,00	107.591.587.121,00	160.215.017.086,00	110.817.668.692,00	129.749.921.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.409.255.813,00	289.964.938.445,00	71.555.682.632,00	
1	04	1.04.1.03.2.10.05.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	73.720.769.000,00	115.963.915.163,00	54.288.952.336,00	47.819.229.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.009.721.336,00	163.783.144.823,00	35.773.423.487,00	
1	04	1.04.1.03.2.10.05.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.527.000.000,00	2.527.000.000,00	33.870.818.121,00	44.251.101.923,00	56.528.716.356,00	81.930.691.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.399.534.477,00	126.181.793.622,00	35.782.259.145,00	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	37.729.882.451,00	50.890.660.181,20	6.538.498.110,00	13.278.190.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.268.380.561,00	64.168.850.552,00	19.900.469.991,00	
1	05	1.05.0.00.0.00.08.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	12.917.458.036,00	17.043.603.975,20	1.948.614.339,00	8.574.170.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866.072.375,00	25.617.774.825,00	10.751.702.450,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja											
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	1.05.1.04.0.00.07.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	24.812.424.415,00	33.847.056.206,00	4.589.883.771,00	4.704.019.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.402.308.186,00	38.551.075.727,00	9.148.767.541,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	72.705.219.887,00	77.017.300.617,00	338.811.000,00	181.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.044.030.887,00	77.199.200.617,00	4.155.169.730,00
1	06	1.06.0.00.0.00.09.0000	Dinas Sosial	0,00	0,00	72.705.219.887,00	77.017.300.617,00	338.811.000,00	181.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.044.030.887,00	77.199.200.617,00	4.155.169.730,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.343.927.000,00	1.828.927.000,00	302.515.028.007,00	340.540.548.401,90	56.713.898.718,00	66.140.993.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	359.228.926.725,00	406.681.542.396,20	47.452.615.671,20
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	0,00	4.119.860.850,00	5.819.156.325,00	329.100.000,00	428.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.960.850,00	6.248.141.325,00	1.799.180.475,00
2	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	4.119.860.850,00	5.819.156.325,00	329.100.000,00	428.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.960.850,00	6.248.141.325,00	1.799.180.475,00
2	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0,00	0,00	9.839.070.000,00	11.782.455.700,00	7.680.930.000,00	14.245.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520.000.000,00	26.027.592.200,00	8.507.592.200,00
2	03	1.03.2.15.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	9.839.070.000,00	11.782.455.700,00	7.680.930.000,00	14.245.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520.000.000,00	26.027.592.200,00	8.507.592.200,00
2	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	385.880.000,00	54.760.000,00	9.614.120.000,00	1.106.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	1.161.413.750,00	-8.838.586.250,00
2	04	1.04.1.03.2.10.05.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	385.880.000,00	54.760.000,00	9.614.120.000,00	1.106.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	1.161.413.750,00	-8.838.586.250,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	0,00	13.098.363.191,00	14.929.235.508,00	1.307.500.490,00	198.114.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405.863.681,00	15.127.350.304,00	721.486.623,00
2	07	2.07.0.00.5.06.10.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	4.506.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00
2	07	2.07.0.00.5.06.10.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	13.098.363.191,00	10.422.343.508,00	1.307.500.490,00	198.114.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405.863.681,00	10.620.458.304,00	-3.785.405.377,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	8.740.738.044,00	9.317.327.679,00	145.138.945,00	33.787.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885.876.989,00	9.351.115.648,00	465.238.659,00
2	08	2.08.0.00.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	8.740.738.044,00	9.317.327.679,00	145.138.945,00	33.787.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885.876.989,00	9.351.115.648,00	465.238.659,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	0,00	11.079.945.775,00	10.387.760.824,00	217.607.730,00	225.893.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297.553.505,00	10.613.654.680,00	-683.898.825,00
2	09	2.09.0.00.0.00.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	11.079.945.775,00	10.387.760.824,00	217.607.730,00	225.893.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297.553.505,00	10.613.654.680,00	-683.898.825,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.130.000.000,00	1.630.000.000,00	41.951.378.955,00	48.587.897.508,00	5.743.064.650,00	8.693.991.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694.443.605,00	57.281.888.783,00	9.587.445.178,00
2	11	2.11.0.00.0.00.13.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1.130.000.000,00	1.630.000.000,00	41.951.378.955,00	48.587.897.508,00	5.743.064.650,00	8.693.991.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694.443.605,00	57.281.888.783,00	9.587.445.178,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	16.726.788.029,00	16.978.015.723,00	5.744.904.665,00	5.582.438.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471.692.694,00	22.560.453.778,00	88.761.084,00
2	12	2.12.0.00.0.00.14.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	16.726.788.029,00	16.978.015.723,00	5.744.904.665,00	5.582.438.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471.692.694,00	22.560.453.778,00	88.761.084,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	19.729.610.578,00	17.461.971.919,00	281.341.155,00	245.187.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010.951.733,00	17.707.159.264,00	-2.303.792.469,00
2	13	2.13.4.01.0.00.15.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	19.729.610.578,00	17.461.971.919,00	281.341.155,00	245.187.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010.951.733,00	17.707.159.264,00	-2.303.792.469,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	11.787.992.272,00	20.493.738.932,00	4.112.002.010,00	2.401.201.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899.994.282,00	22.894.940.858,00	6.994.946.576,00
2	14	2.14.0.00.0.00.16.0000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	11.787.992.272,00	20.493.738.932,00	4.112.002.010,00	2.401.201.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899.994.282,00	22.894.940.858,00	6.994.946.576,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	71.500.000,00	56.500.000,00	17.118.545.257,00	16.502.397.612,60	1.760.361.922,00	1.638.082.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.878.907.179,00	18.140.479.690,00	-738.427.489,00
2	15	2.15.0.00.0.00.17.0000	Dinas Perhubungan	71.500.000,00	56.500.000,00	17.118.545.257,00	16.502.397.612,60	1.760.361.922,00	1.638.082.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.878.907.179,00	18.140.479.690,00	-738.427.489,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	26.083.932.077,00	31.906.743.345,80	1.457.516.542,00	1.332.574.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.541.448.619,00	33.239.317.426,70	5.697.868.807,70
2	16	2.16.2.20.0.00.18.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	1.219.935.906,00	1.246.227.661,00	62.664.495,00	306.502.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.600.401,00	1.552.730.108,00	270.129.707,00
2	16	2.16.2.20.0.00.18.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	1.144.013.017,00	594.775.805,30	119.204.758,00	171.233.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.217.775,00	766.009.363,30	-497.208.411,70
2	16	2.16.2.20.0.00.18.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	23.719.983.154,00	30.065.739.879,50	1.275.647.289,00	854.838.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.995.630.443,00	30.920.577.955,40	5.924.947.512,40
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	11.575.530.505,00	16.551.407.142,00	274.987.400,00	267.342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850.517.905,00	16.818.749.442,00	4.968.231.537,00
2	17	2.17.0.00.0.00.19.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	11.575.530.505,00	16.551.407.142,00	274.987.400,00	267.342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850.517.905,00	16.818.749.442,00	4.968.231.537,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	16.145.093.131,00	15.582.076.395,50	2.455.719.331,00	3.311.338.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.812.462,00	18.893.414.726,50	292.602.264,50
2	18	2.18.4.01.0.00.20.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	16.145.093.131,00	15.582.076.395,50	2.455.719.331,00	3.311.338.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.812.462,00	18.893.414.726,50	292.602.264,50

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja											
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	142.427.000,00	142.427.000,00	83.462.634.692,00	92.791.629.644,00	15.102.456.080,00	25.540.642.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.565.090.772,00	118.332.272.052,00	19.767.181.280,00	
2	19	2.19.3.26.0.00.21.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	142.427.000,00	142.427.000,00	83.462.634.692,00	92.791.629.644,00	15.102.456.080,00	25.540.642.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.565.090.772,00	118.332.272.052,00	19.767.181.280,00	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	10.669.664.651,00	11.393.974.144,00	487.147.798,00	889.624.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156.812.449,00	12.283.598.469,00	1.126.786.020,00	
2	23	2.23.2.24.0.00.22.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	703.229.553,00	370.823.593,00	52.978.025,00	52.978.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.207.578,00	423.801.618,00	-332.405.960,00	
2	23	2.23.2.24.0.00.22.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	9.966.435.098,00	11.023.150.551,00	434.169.773,00	836.646.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.604.871,00	11.859.796.851,00	1.459.191.980,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	899.860.000,00	874.860.000,00	123.785.015.684,00	135.239.319.659,00	12.182.131.764,00	4.602.190.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967.147.448,00	139.841.509.908,00	3.874.362.460,00	
3	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	300.000.000,00	156.038.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	156.038.586,00	-143.961.414,00	
3	07	2.07.0.00.5.06.10.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	300.000.000,00	156.038.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	156.038.586,00	-143.961.414,00	
3	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	0,00	3.376.850.850,00	3.379.690.700,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.850.850,00	3.579.690.700,00	202.839.850,00	
3	19	2.19.3.26.0.00.21.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	0,00	0,00	3.376.850.850,00	3.379.690.700,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.850.850,00	3.579.690.700,00	202.839.850,00	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	60.000.000,00	35.000.000,00	16.210.218.567,00	15.956.557.534,00	284.707.107,00	240.549.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494.925.674,00	16.197.107.218,00	-297.818.456,00	
3	25	3.25.0.00.0.00.23.0000	Dinas Perikanan	60.000.000,00	35.000.000,00	16.210.218.567,00	15.956.557.534,00	284.707.107,00	240.549.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494.925.674,00	16.197.107.218,00	-297.818.456,00	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	179.860.000,00	179.860.000,00	83.367.994.502,00	94.625.655.694,00	5.546.109.516,00	2.952.451.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.914.104.018,00	97.578.106.944,00	8.664.002.926,00	
3	27	3.27.0.00.0.00.24.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	40.000.000,00	40.000.000,00	45.563.169.109,00	52.036.660.957,00	986.638.105,00	476.082.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.549.807.214,00	52.512.743.436,00	5.962.936.222,00	
3	27	3.27.0.00.0.00.25.0000	Dinas Perkebunan	139.860.000,00	139.860.000,00	37.804.825.393,00	42.588.994.737,00	4.559.471.411,00	2.476.368.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.364.296.804,00	45.065.363.508,00	2.701.066.704,00	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	660.000.000,00	660.000.000,00	20.529.951.765,00	21.121.377.145,00	6.351.315.141,00	1.209.189.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.881.266.906,00	22.330.566.460,00	-4.550.700.446,00	
3	30	3.30.3.31.0.00.26.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	1.391.297.019,00	1.080.594.362,50	1.907.261.038,00	435.334.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.558.057,00	1.515.928.854,50	-1.782.629.202,50	
3	30	3.30.3.31.0.00.26.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	660.000.000,00	660.000.000,00	19.138.654.746,00	20.040.782.782,50	4.444.054.103,00	773.854.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.582.708.849,00	20.814.637.605,50	-2.768.071.243,50	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	250.000.000,00	250.000.000,00	217.794.793.847,00	228.643.253.552,12	9.830.228.918,00	31.063.854.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227.625.022.765,00	259.707.108.286,00	32.082.085.521,00	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	250.000.000,00	250.000.000,00	114.637.078.253,00	132.544.645.494,72	6.174.512.807,00	6.789.589.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	120.811.591.060,00	139.334.235.055,00	18.522.643.995,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	4.01.5.02.0.00.27.0000	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	114.637.078.253,00	132.544.645.494,72	6.174.512.807,00	6.789.589.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	120.811.591.060,00	139.334.235.055,00	18.522.643.995,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	103.157.715.594,00	96.098.608.057,40	3.655.716.111,00	24.274.265.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.813.431.705,00	120.372.873.231,00	13.559.441.526,00
4	02	4.02.0.00.0.00.28.0000	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	103.157.715.594,00	96.098.608.057,40	3.655.716.111,00	24.274.265.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.813.431.705,00	120.372.873.231,00	13.559.441.526,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.115.653.485.000,00	4.040.393.902.251,59	99.263.634.483,00	106.538.019.166,19	1.681.609.948,00	2.224.906.541,00	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	602.609.827.351,00	658.857.333.465,74	56.247.506.114,74
5	01		KEUANGAN	0,00	0,00	6.105.969.000,00	8.771.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.969.000,00	8.771.193.000,00	2.665.224.000,00
5	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	6.105.969.000,00	8.771.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.969.000,00	8.771.193.000,00	2.665.224.000,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	0,00	23.012.469.093,00	21.501.932.721,50	249.250.500,00	211.066.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261.719.593,00	21.712.999.554,50	-1.548.720.038,50
5	01	5.01.5.05.0.00.44.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	22.036.879.569,00	20.314.338.742,80	249.250.500,00	210.410.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.286.130.069,00	20.524.749.454,80	-1.761.380.614,20
5	01	5.01.5.05.0.00.44.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	975.589.524,00	1.187.593.978,70	0,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.589.524,00	1.188.250.099,70	212.660.575,70
5	02		KEUANGAN	3.115.653.485.000,00	4.040.393.902.251,59	51.914.453.659,00	57.760.118.390,69	888.015.928,00	1.617.273.596,00	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	554.467.052.507,00	609.471.799.745,24	55.004.747.238,24
5	02	5.02.0.00.0.00.45.0000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.836.485.802.000,00	3.757.691.779.441,59	20.945.167.093,00	20.228.161.993,69	289.836.798,00	1.012.370.857,00	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	522.899.586.811,00	571.334.940.609,24	48.435.353.798,24
5	02	5.02.0.00.0.00.46.0000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	279.167.683.000,00	282.702.122.810,00	30.969.286.566,00	37.531.956.397,00	598.179.130,00	604.902.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567.465.696,00	38.136.859.136,00	6.569.393.440,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	18.230.742.731,00	18.504.775.054,00	544.343.520,00	396.566.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775.086.251,00	18.901.341.166,00	126.254.915,00
5	03	5.03.0.00.0.00.47.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	18.230.742.731,00	18.504.775.054,00	544.343.520,00	396.566.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775.086.251,00	18.901.341.166,00	126.254.915,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	25.325.343.690,00	30.031.219.164,00	295.756.900,00	376.910.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.621.100.590,00	30.408.129.304,00	4.787.028.714,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	25.325.343.690,00	30.031.219.164,00	295.756.900,00	376.910.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.621.100.590,00	30.408.129.304,00	4.787.028.714,00
6	01	6.01.0.00.0.00.44.0000	Inspektorat	0,00	0,00	25.325.343.690,00	30.031.219.164,00	295.756.900,00	376.910.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.621.100.590,00	30.408.129.304,00	4.787.028.714,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	77.645.953.605,00	85.575.086.637,16	2.651.702.395,00	2.341.519.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.297.656.000,00	87.916.606.622,46	7.618.950.622,46
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	77.645.953.605,00	85.575.086.637,16	2.651.702.395,00	2.341.519.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.297.656.000,00	87.916.606.622,46	7.618.950.622,46
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Sekayu	0,00	0,00	9.529.675.232,00	10.179.487.031,00	194.794.607,00	145.402.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724.469.839,00	10.324.889.048,00	600.419.209,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0001	Kelurahan Serasan Jaya	0,00	0,00	816.794.287,00	583.616.247,00	33.205.650,00	16.602.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.999.937,00	600.219.072,00	-249.780.865,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0002	Kelurahan Soak Baru	0,00	0,00	789.035.198,00	646.917.468,00	60.964.750,00	37.231.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.999.948,00	684.148.533,00	-165.851.415,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0003	Kelurahan Balai Agung	0,00	0,00	425.762.201,00	250.984.974,00	424.237.799,00	418.537.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	669.522.773,00	-180.477.227,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0004	Kelurahan Kayuara	0,00	0,00	815.592.053,00	661.175.944,00	34.407.947,00	20.889.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	682.065.034,00	-167.934.966,00
7	01	7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Lais	0,00	0,00	4.538.006.612,00	4.646.172.996,20	133.569.341,00	79.464.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.575.953,00	4.725.637.985,00	54.062.032,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Babat Toman	0,00	0,00	4.987.192.813,00	6.778.741.908,99	124.617.924,00	85.782.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.810.737,00	6.864.524.708,99	1.752.713.971,99
7	01	7.01.0.00.0.00.31.0001	Kelurahan Babat	0,00	0,00	807.917.652,00	736.697.187,96	42.081.099,00	21.326.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.998.751,00	758.024.172,96	-91.974.578,04
7	01	7.01.0.00.0.00.31.0002	Kelurahan Mangun Jaya	0,00	0,00	776.776.840,00	728.756.805,51	73.221.927,00	37.980.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.998.767,00	766.737.231,51	-83.261.535,49
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Keluang	0,00	0,00	4.419.923.081,00	4.938.567.897,00	121.530.042,00	121.656.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541.453.123,00	5.060.224.145,00	518.771.022,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0001	Kelurahan Keluang	0,00	0,00	844.000.325,00	835.785.161,00	5.999.550,00	5.999.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.999.875,00	841.784.711,00	-8.215.164,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Sanga Desa	0,00	0,00	5.102.652.063,00	5.471.891.665,00	129.174.252,00	94.853.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231.826.315,00	5.566.745.605,00	334.919.290,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0001	Kelurahan Ngulak I	0,00	0,00	827.963.148,00	802.231.633,00	20.757.000,00	30.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.720.148,00	832.978.633,00	-15.741.515,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0002	Kelurahan Ngulak	0,00	0,00	848.564.566,00	831.947.894,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.564.566,00	833.612.894,00	-14.951.672,00
7	01	7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Plakat Tinggi	0,00	0,00	3.330.141.147,00	4.074.776.538,00	121.985.276,00	218.894.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.126.423,00	4.293.670.603,00	841.544.180,00
7	01	7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Batanghari Leko	0,00	0,00	3.717.001.669,00	4.093.213.274,00	121.837.285,00	73.102.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.838.954,00	4.166.315.645,00	327.476.691,00
7	01	7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Sungai Keruh	0,00	0,00	3.621.855.956,00	3.910.791.179,00	107.385.930,00	71.298.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.241.886,00	3.982.090.009,00	252.848.123,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Sungai Lilin	0,00	0,00	4.904.619.550,00	5.502.630.377,00	88.010.846,00	43.954.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992.630.396,00	5.546.584.823,00	553.954.427,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0001	Kelurahan Sungai Lilin	0,00	0,00	824.364.550,00	822.057.211,00	25.635.450,00	10.957.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	833.014.354,00	-16.985.646,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0002	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	0,00	0,00	811.462.354,00	811.482.274,00	38.537.646,00	27.436.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	838.919.254,00	-11.080.746,00
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Bayung Lencir	0,00	0,00	4.364.040.416,00	4.986.092.338,00	127.347.858,00	75.879.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.388.274,00	5.061.972.049,00	570.583.775,00
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0001	Kelurahan Bayung Lencir	0,00	0,00	809.464.036,00	800.058.224,00	39.550.077,00	23.783.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.014.113,00	823.842.083,00	-25.172.030,00
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0002	Kelurahan Bayung Lencir Indah	0,00	0,00	810.999.091,00	803.792.321,00	38.919.264,00	25.599.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.918.355,00	829.391.585,00	-20.526.770,00
7	01	7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Lalan	0,00	0,00	4.041.464.553,00	4.639.693.888,00	123.198.100,00	123.198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.662.653,00	4.762.891.988,00	598.229.335,00
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Tungkal Jaya	0,00	0,00	4.553.575.675,00	4.865.375.612,00	130.426.887,00	130.426.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684.002.562,00	4.995.802.499,00	311.799.937,00
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Lawang Wetan	0,00	0,00	4.330.735.456,00	4.608.031.213,00	88.033.256,00	134.264.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.768.712,00	4.742.295.672,00	323.526.960,00
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Babat Supat	0,00	0,00	3.469.032.459,00	4.069.395.378,50	79.687.229,00	147.906.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.719.688,00	4.217.302.289,00	668.582.601,00
7	01	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Jirak Jaya	0,00	0,00	2.527.340.622,00	3.494.721.997,00	122.585.403,00	116.677.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.926.025,00	3.611.399.223,00	961.473.198,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	17.363.840.028,00	16.225.378.163,00	306.182.800,00	213.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670.022.828,00	16.439.235.163,00	-1.230.787.665,00
8	05		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	17.363.840.028,00	16.225.378.163,00	306.182.800,00	213.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670.022.828,00	16.439.235.163,00	-1.230.787.665,00
8	05	1.05.8.01.0.00.06.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	17.363.840.028,00	16.225.378.163,00	306.182.800,00	213.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670.022.828,00	16.439.235.163,00	-1.230.787.665,00
			TOTAL	**3.366.370.761.800,00**	**4.290.369.812.775,59**	**2.384.132.390.457,00**	**2.925.722.178.535,88**	**523.070.692.769,00**	**838.023.488.614,17**	**6.997.200.620,00**	**5.442.284.504,55**	**494.667.382.300,00**	**544.652.123.254,00**	**3.408.867.666.146,00**	**4.313.840.074.908,60**	**904.972.408.762,60**

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	4.290.369.812.775,59	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	587.378.681.108,99	
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	223.975.016.750,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.660.787.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	327.742.877.358,99	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	3.702.991.131.666,60	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	3.505.400.983.500,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	197.590.148.166,60	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	53.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.700,00	49.999.850,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	550.078.483.467,00	772.564.354.246,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.998.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.385.000,00	97.385.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.993.640,00	29.993.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.191.500,00	514.564.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	222.586.500,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.800.000,00	723.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.632.000,00	453.058.200,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.582.400,00	2.810.542.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.101.500.000,00	5.626.300.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.499.600,00	535.499.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.608.000,00	730.608.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.787.000,00	139.787.000,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.364.900.000,00	3.364.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.050.000,00	1.135.566.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	650.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.784.000.000,00	7.462.836.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.889.300.000,00	5.037.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	362.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.082.000,00	705.554.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	318.852.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	47.553.314.936,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	6.468.660.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	7.040.337.351,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	13.665.720.893,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.066.850,00	298.991.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.791.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	330.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	299.395.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.825.386.200,00	5.564.250.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.850.000,00	265.951.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	970.487.000,00	970.487.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.916.713.750,00	5.032.529.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.997.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.187.500.000,00	324.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	300.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.107.450.000,00	1.107.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	148.701.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	847.903.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	3.137.901.901,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	750.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	568.187.050,00	1.760.836.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	481.950.000,00	397.663.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.520.000.000,00	5.520.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.600.000,00	326.941.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.400.000,00	27.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.055.787.200,00	474.101.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.734.000.000,00	1.929.958.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.301.281.897,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	8.806.466.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	3.021.300.592,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	5.786.638.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.648.700,00	110.573.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.700,00	1.227.871.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	800.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	828.203.581,00	1.396.462.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.721.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	137.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.475.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	304.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.912.500.000,00	1.770.902.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	910.000.000,00	1.209.473.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.310.800,00	270.244.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.583.700,00	967.736.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	11.271.013.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.916.600,00	44.958.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	1.695.142.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	198.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.216.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	49.547.000,00	2.849.547.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.000.000,00	725.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	104.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	637.622.250,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.083.600,00	261.032.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	108.670.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	31.363.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	1.402.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.980.200,00	11.490.100,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: JUMLAH KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI TAHUNAN YANG DISUSUN SESUAI PEDOMAN YANG BERLAKU Persenatase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	77.978.710,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	34.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.156.000,00	56.476.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persenatse Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	239.768.555.073,00	268.274.333.909,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.441.000,00	78.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	12.440.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.322.000,00	680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.675.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.997.789,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.904.629,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	116.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.994.100,00	59.994.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	105.142.384,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	55.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.996.000,00	74.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	187.694.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.260,00	2.909.060,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.702.740,00	57.770.940,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persenatse Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.287.120,00	2.150.462.134,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.663.371,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.336.629,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.269.332.489,00	28.359.744.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.660.000,00	733.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.992.000,00	378.578.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.890.000,00	69.352.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE FASYANKES YANG MEMIIKI FASILITASPELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP SESUAI STANDAR Persentase Fasyankes yang memiliki Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497.170.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.572.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	16.975.428.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.404.485.000,00	1.098.900.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	693.475.000,00	693.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	4.025.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.567.300.400,00	3.822.424.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	5.915.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	994.970.000,00	1.892.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	4.055.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	894.610.000,00	894.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	8.709.094.084,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	161.877.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.178.850,00	5.221.743.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000.000,00	14.525.149.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	5.168.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.000.000,00	135.690.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.884.666,00	65.916.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	219.741.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.256.000,00	587.211.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.505.000,00	75.879.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.232.000,00	38.428.499,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.673.000,00	32.965.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.778.000,00	67.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.493.000,00	33.016.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	14.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	21.036.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.865.000,00	23.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.040.000,00	25.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.983.000,00	71.922.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.390.500,00	111.440.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.430.000,00	19.388.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.207.000,00	35.278.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	560.871.322,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.262.000,00	13.704.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.030.000,00	76.679.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.293.900,00	209.702.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000.000,00	56.242.823.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	436.284.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.301.900,00	41.927.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.379.633.527,00	881.023.426,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	785.105.127,00	825.959.857,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.595.000,00	24.875.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.064.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.489.000,00	21.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.892.000,00	22.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			
Indikator Keluaran	: Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.820.000,00	13.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.575.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.968.000,00	132.970.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE TERLAKSANANYA PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.009.000,00	211.194.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar			
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang Berjalan PERSENTASE IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN YANG BERJALAN			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.695.000,00	19.980.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Profil SDMK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN DAN PROFIL SDMK			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.398.000,00	252.755.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Kesehatan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi PERSENTASE SDM KESEHATAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENINGKATAN KOPETENSI			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.501.700,00	993.743.000,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman			
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			

Indikator Keluaran	: Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik serta UMOT yang memiliki izin
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	104.930.800,00	

Kegiatan	: 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah tangga Persentase IRTP yang memiliki sertifikat
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.720.000,00	36.296.000,00	

Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang mendapatkan sertifikat produksi Persentase IRTP yang memiliki sertifikat
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	195.241.200,00	

Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Indikator Keluaran	: " Jumlah TPM, jasa boga, rumah makan, dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene Jumlah TPM, Jasa Boga, Rumah Makan dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene "
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.317.000,00	52.524.996,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.912.000,00	39.240.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.928.000,00	41.539.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.014.980,00	114.488.040,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.650.000.000,00	14.375.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.787.500.000,00	14.475.163.622,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.312.500.000,00	3.226.745.960,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.212.500.000,00	2.230.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.500.000,00	287.500.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.500.000.000,00	16.215.095.945,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000.000,00	16.452.397.525,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	520.000.000,00	5.202.250.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.144.616.728,00	2.495.801.431,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.783.272,00	55.783.272,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.600.000,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	299.006.250,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Ngulak			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.147.422.500,00	1.861.818.347,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.482.500,00	900.482.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.940.000,00	445.940.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	85.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	57.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	77.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.843.573,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.467.828,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	58.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	101.767.318,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	55.600.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.550.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Babat Toman			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.331.409.000,00	2.429.719.660,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.127.200,00	1.137.601.340,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.281.800,00	344.481.800,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	21.800.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	97.471.988,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	77.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	44.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	166.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.150.232,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	93.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	197.231.662,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.028.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	86.200.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Ulak Paceh			

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.428.421.000,00	1.170.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.144.700,00	513.290.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.220.000,00	189.349.689,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	304.056.300,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	93.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	58.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	163.157.139,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.512.880,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	94.650.233,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.846.978,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.300.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.200.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Tanah Abang			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	830.317.500,00	501.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.222.250,00	297.523.360,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.095.250,00	68.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	114.964.971,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.231.897,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	65.012.895,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.886.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.711.265,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Lubuk Bintialo			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	515.400.000,00	385.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.750.000,00	124.781.636,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.850.000,00	55.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	72.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	133.702.236,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.014.628,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	51.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	160.607.559,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	26.664.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.900.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.790.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0008 Puskesmas Bukit Selabu			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	320.704.000,00	270.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.422.400,00	137.313.071,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.281.600,00	45.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.232.840,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	122.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	54.395.372,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	85.832.022,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Cinta Karya			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	583.904.125,00	659.251.914,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.931.675,00	368.118.626,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.022.400,00	77.022.400,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.055.800,00	99.055.800,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	41.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	97.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	60.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	163.788.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.470.618,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.200.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.528.677,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Suka Damai			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	539.088.500,00	539.088.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.453.100,00	342.408.346,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.635.400,00	169.635.400,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.000.000,00	46.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.115.024,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	137.700.838,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	107.401.433,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Sido Rahayu			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	517.272.500,00	501.772.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.592.074,00	274.045.474,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.680.426,00	103.533.461,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	72.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.580.611,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	87.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	78.443.388,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	55.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.174.696,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Tebing Bulang			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: undefined			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: undefined			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.211.029.000,00	1.236.502.403,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.720.300,00	742.625.561,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.308.700,00	82.433.493,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: undefined			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	72.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	57.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	143.721.474,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.504.799,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	94.381.819,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	69.200.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: undefined			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: undefined			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.176.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Jirak			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL undefined			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	888.400.000,00	938.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.356.800,00	505.286.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.506.200,00	81.466.200,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	99.736.242,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	106.363.006,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	29.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	93.756.459,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	158.152.319,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.100.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0014 Puskesmas Balai Agung			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.867.265.000,00	1.974.765.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.417.265.000,00	1.425.089.796,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	350.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	188.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	174.088.516,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	101.602.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	164.158.462,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.686.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.400.975,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	62.800.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Lumpatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.510.759.000,00	1.510.759.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.009.000,00	965.009.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.550.000,00	177.856.460,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.861.486,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	164.998.330,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	36.717.394,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	74.198.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	161.356.259,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.555.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.600.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.356.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Lais			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.391.567.250,00	1.669.880.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.122.939.518,00	1.077.736.362,60	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.627.732,00	357.457.485,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	87.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	121.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.911.510,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	92.145.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	130.701.818,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	64.200.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.790.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Gardu Harapan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	466.198.000,00	405.325.140,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.337.500,00	333.228.451,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.860.000,00	81.065.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	123.417.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	38.519.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	87.665.030,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.100.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.838.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0018 Puskesmas Teluk Kijing			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	630.315.500,00	487.911.148,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.039.780,00	243.955.574,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.275.720,00	81.318.525,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	51.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	121.495.008,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.804.882,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	110.730.592,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.131.341,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	38.600.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.017.078,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0019 Puskesmas Tanjung Kerang			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	854.594.300,00	890.273.410,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.767.500,00	597.767.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.805.000,00	156.805.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	116.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.899.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	163.324.632,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.008.727,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	120.322.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.554.573,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.800.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0020 Puskesmas Sungai Lilin			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.473.967.850,00	1.473.967.850,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.967.850,00	1.184.111.201,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	300.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	41.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	102.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	113.555.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	91.684.788,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	207.576.652,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.245.092,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	69.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.185.237,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0021 Puskesmas Sri Gunung			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	659.513.850,00	690.853.395,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.443.150,00	549.782.660,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.250.000,00	130.250.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	86.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	73.524.716,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	97.748.058,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	36.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.700.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0022 Puskesmas Karya Maju
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.071.308.400,00	1.071.308.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.104.757,00	576.759.523,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.300.000,00	131.300.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.800.843,00	110.800.843,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	65.640.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	70.950.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	153.954.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.071.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.862.881,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.056.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.100.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0023 Puskesmas Mekar jaya			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	560.931.600,00	560.931.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.465.800,00	510.320.994,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.488.600,00	143.488.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	50.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	144.985.067,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	78.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	117.941.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.852.798,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	38.800.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0024 Puskesmas Bayung Lencir			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.344.685.000,00	2.143.042.488,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.684.343.000,00	1.993.362.366,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.342.000,00	340.342.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	320.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	301.886.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	69.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	142.773.471,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	219.940.866,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.958.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.368.447,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	93.840.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.280.900,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0025 Puskesmas Suka Jaya			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			

Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	773.331.825,00	571.559.355,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.040.691,00	261.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.640.484,00	80.850.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	36.341.796,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	63.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	221.532.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	81.394.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	128.378.646,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.469.189,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.944.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	55.400.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.340.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0026 Puskesmas Peninggalan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	830.317.500,00	852.849.266,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.222.250,00	603.982.250,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	41.400.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.095.250,00	229.095.250,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	248.134.740,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.510.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	95.344.780,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	131.879.618,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.300.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.400.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0027 Puskesmas Sumber Harum			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	700.359.000,00	460.359.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.264.000,00	371.915.534,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	125.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	54.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	191.432.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	47.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	91.016.517,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.600.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0028 Puskesmas Berojaya Timur			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	607.387.500,00	637.375.893,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.010.000,00	305.010.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.377.500,00	101.377.500,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	183.480.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	44.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.688.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.135.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	43.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	97.508.690,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.200.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0029 Puskesmas Bandar Agung			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	564.623.500,00	735.185.195,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.236.450,00	539.492.701,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.387.050,00	169.387.050,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	99.097.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	81.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	142.545.205,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.450.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.267.500,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0030 Puskesmas Karang Mukti			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			

Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.174.003.400,00	1.174.003.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.335.600,00	490.942.570,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.000.000,00	160.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	140.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	118.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	43.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	232.222.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	89.416.049,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	168.462.362,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	79.800.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0031 Puskesmas Air Balui			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	302.631.750,00	310.431.750,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.105.400,00	274.572.042,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.526.350,00	88.626.350,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	122.011.137,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.478.806,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	97.472.591,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	43.650.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Perkantoran			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	59.374.041.156,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	64.915.767.447,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.480.244.825,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.084.232.553,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	317.559.900,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.359.929,00	5.632.545.505,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.399.640.000,00	3.622.772.450,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	2.295.662.060,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Organisasi	: 1.03.2.15.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.2.15.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah			
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	47.648.480,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.999.999,80	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.860.667,00	27.712.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.364.480.153,00	16.321.623.503,60	
Kegiatan	: 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlindunginya Kendaraan Dinas dan tersertifikasinya Aset Tanah bawah jalan			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.614.614,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pakaian dinas dan attribut lainnya serta jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.484.000,00	75.484.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.561.329,00	1.397.213.468,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	100.075.101,49	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.738.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	170.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.989.330,00	1.494.665,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.010.670,00	306.903.200,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Terpenuhinya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.424.807.346,00	14.438.487.346,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.769.413.333,00	3.361.070.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.970.000,00	646.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	213.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.878.000,00	925.261.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.872.120,00	108.872.120,00	
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi, sungai dan penampung air lainnya dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.085.000.000,00	1.627.753.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0072 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	22.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai			
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	289.090.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.000.000,00	225.397.475,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0077 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0078 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	282.802.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0079 Operasi dan Pemeliharaan Danau			
Indikator Keluaran	: Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	346.679.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.363.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai			
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.997.010.000,00	22.590.137.350,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
Indikator Keluaran	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	2.095.120.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			
Indikator Keluaran	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	3.697.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.885.000,00	13.942.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	872.115.000,00	1.272.115.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	922.603.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.735.200,00	42.867.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.504.264.800,00	951.087.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000,00	1.044.072.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	347.501.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	615.995.750,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi, sungai dan penampung air lainnya dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	433.636.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	423.934.350,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap			
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000.000,00	3.063.153.307,42	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.284.000.010,00	6.426.663.110,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.597.500,00	223.097.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.402.500,00	401.707.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.805.000,00	1.847.693.090,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	800.000.000,00	890.132.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	217.695.167.894,00	402.563.593.834,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	3.436.903.880,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000,00	2.217.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.310.000,00	278.214.500,40	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.636.699.827,00	34.665.158.630,89	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000.000,00	1.718.864.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan			

Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	5.101.816.526,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000.000,00	31.358.611.682,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat			
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Tenaga Konstruksi yang terampil dan bersertifikat			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga konstruksi yang terlatih dan bersertifikat			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Indikator Hasil	: Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	39.440.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Daerah			

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000.000,00	3.250.167.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	85.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	171.327.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.000.000,00	800.401.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang			

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000.000,00	1.062.577.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	27.491.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	38.876.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	363.156.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	89.072.000,00	
Organisasi	: 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Indikator Hasil	: Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)			

Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.346.060.000,00	1.192.971.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.148.944.600,00	14.816.309.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000.000,00	470.235.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	1.727.472.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)			
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	175.254.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	1.602.780.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.191.061.350,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.160.000,00	9.768.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.434.000,00	77.217.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.570.200,00	477.570.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.259.512,00	715.255.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.224.643.200,00	15.344.091.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	158.241.600,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			

Indikator Hasil	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik			
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Persentase Drainase dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.180.000,00	444.976.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	696.196.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.258.585.186,00	25.439.509.210,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	0,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Indikator Hasil	: Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani			
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani Persentase Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.108.205.088,00	1.521.470.488,00	
5.1.05	Belanja Hibah	41.712.680.000,00	76.265.105.275,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.093.925.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.730.367.150,00	18.286.302.100,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	185.472.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	80.960.000,00	

Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Indikator Hasil	: Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangan
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.632.400,00	1.636.001.800,00	

Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Pesentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	36.350.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	50.023.250,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.192.841.256,00	9.630.489.745,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: PersentaseterlaksananyaKegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.295.000,00	92.295.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.548.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	150.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	280.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	465.436.900,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.448.332.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	819.290.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.000.000,00	564.104.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.729.545,00	870.731.600,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.100.200,00	649.100.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.454.000,00	139.454.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.745.150,00	2.677.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.601.120,00	117.601.120,00	
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab			
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	135.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.501.866.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000,00	250.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.975.523.050,00	4.612.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksana nya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.04.0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	31.949.750,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			

Indikator Keluaran	: persentase terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.05.0003 Pembangunan Rumah Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	74.092.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.319.610.400,00	4.801.080.800,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
Indikator Hasil	: Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki			
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki			
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	624.904.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.810.000.000,00	24.910.000.000,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Persentase PSU Yang dibangun / direhab			
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: n Persentase PSU Yang dibangun / direhab			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.805.249.000,00	610.576.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	2.778.886.333,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.827.837.756,00	67.239.014.649,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	16.774.625,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.08.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.08.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.872.000,00	19.872.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.934.214,00	49.934.214,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.009.985.878,00	7.501.912.693,70	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.375.000,00	185.375.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.418.560,00	680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.867.000,00	195.059.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.958.300,00	19.958.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	1.360.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.568.678,00	313.548.774,80	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.946.458,00	39.946.458,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.991.994,00	169.987.497,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.981,00	49.840.490,50	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.130.000,00	212.060.432,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.248.340,00	46.949.004,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.640.000,00	198.640.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.164.790,00	334.186.790,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.006.811.111,00	2.367.301.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.450.000,00	1.019.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.792.000,00	949.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	24.880.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)			
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Laporan Data Kebencanaan yang Akurat			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			

Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.637.550,00	102.637.550,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi & pengendalian, Desa Siaga Bencana dan Kesiapsiagaan Petugas			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.750.000,00	89.067.750,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.523.157.321,00	257.857.071,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.323.000,00	99.323.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.660.000,00	187.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.623.000,00	885.623.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Laporan Data Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.810.000,00	832.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.950.000,00	102.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.954.700,00	154.954.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	833.760.000,00	833.760.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.741.000,00	199.741.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	7.757.176.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.080.500,00	210.080.500,00	
Organisasi	: 1.05.1.04.0.00.07.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.1.04.0.00.07.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan sangat tepat			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.985.000,00	49.881.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.448.000,00	29.088.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.328.000,00	22.503.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	11.702.794.937,00	23.399.622.621,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.093.250,00	116.357.250,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.758.900,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.851.000,00	73.903.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.397.874,00	14.858.074,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.973.000,00	11.973.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.936.034,00	112.992.284,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.808.486,00	52.808.486,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.603.223,00	96.699.038,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.138.871,00	74.792.165,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.080.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.042.000,00	188.424.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.350.888,00	75.765.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.935.011.111,00	5.530.909.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.230.000,00	84.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.121.950.000,00	1.158.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.662.862,00	89.964.862,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	198.079.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten			
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.500.000,00	105.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.846.000,00	53.099.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			

Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.557.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.850.000,00	176.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	67.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.886.000,00	15.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.950.000,00	25.215.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.425.000,00	308.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.416.000,00	47.416.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.520.000,00	221.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.513,00	767.513,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.947.737,00	37.947.737,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.973.460,00	88.973.460,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.912.000,00	24.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.900.000,00	451.800.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota			
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.843.040,00	22.851.537,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.982.000,00	453.482.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	58.250.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Indikator Hasil	: Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.389.000,00	593.931.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.355.000.000,00	4.355.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: PERSENTASE DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI			
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PD			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.811.000,00	59.908.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	14.429.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.852.000,00	30.336.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN PD			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.251.712.975,00	7.957.740.069,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.778.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.543.000,00	119.668.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM PD			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.075.000,00	27.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.331.000,00	7.651.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.690.000,00	82.469.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.485.200,00	40.485.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.511.000,00	19.511.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.513.750,00	88.818.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.329.675,00	93.315.675,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.132.500,00	49.132.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.004.000,00	229.347.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.360.000,00	79.920.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PD			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.675.440,00	124.010.220,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.854.756,00	1.116.295.600,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.330.000,00	360.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.940.000,00	715.505.238,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.280.000,00	69.280.000,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase PMKS yang mendapat Layanan Persentase PMKS yang mendapat Layanan			
Kegiatan	: 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pemberdayaan Sosial (KAT)			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.052.000,00	49.582.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	59.055.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.222.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.631.000,00	105.045.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.551.495.000,00	6.443.879.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.695.670,00	1.779.869.700,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.460.000.000,00	23.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.383.455.700,00	826.290.950,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.595.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.305.000,00	33.585.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia, Serta Gepeng di Luar			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.259.132.000,00	1.018.771.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	452.792.000,00	452.792.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.292.700,00	220.415.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	400.000.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga			
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.959.800,00	312.434.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.217.853.721,00	1.365.533.825,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.785.000.000,00	28.905.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.250.000,00	0,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.767.000,00	304.180.000,00	
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.948.000,00	655.175.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 2.07.0.00.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
Unit Organisasi	: 2.07.0.00.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja			
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.506.892.000,00	
Organisasi	: 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.360.000,00	50.392.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	14.364.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.619.000,00	20.029.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.607.708.665,00	7.766.652.740,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.590.000,00	17.590.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.164.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.355.000,00	56.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.963.364,00	19.963.364,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.044.490,00	127.342.796,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.602.400,00	39.602.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.785.356,00	68.217.778,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.764.430,00	54.741.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.308.400,00	25.268.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.735.500,00	122.410.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.104.000,00	70.772.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.658.568,00	250.658.568,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.881.333,00	417.131.333,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Umum Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.350.000,00	89.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.873.000,00	96.873.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.490.000,00	25.490.000,00	
Program	: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah			
Kegiatan	: 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
Sub Kegiatan	: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.587.050,00	364.317.050,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja			
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.366.572.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.894.600,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.088.352.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Kab. MUBA Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.962.000,00	0,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Pekerja yang ditempatkan			
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.679.925,00	152.769.925,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.928.000,00	45.642.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.501.000,00	109.323.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.823.700,00	156.422.900,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.102.900,00	47.428.000,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan			
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.940.000,00	165.655.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HUbungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.034.000,00	115.694.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.129.000,00	89.678.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
Kegiatan	: 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.931.000,00	34.354.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.808.000,00	9.904.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.005.500,00	21.131.500,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.485.038.425,00	6.069.903.639,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Terlaksanaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (PD)			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.274.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.125.000,00	99.125.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (PD) Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.912.850,00	19.912.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	809.781,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.494.440,00	33.787.969,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.621.900,00	36.245.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.509.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.193.110,00	124.193.110,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.167.165,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.150.899,00	95.150.899,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.788.000,00	159.822.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhi Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerrintah			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.968.340,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah pada PD			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.665.920,00	101.665.920,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.939.644,00	292.089.644,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan DPPPA			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.100.000,00	200.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.101.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.330.000,00	32.330.000,00	
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Jumlah PD yang menerapkan PUG melalui PPRG Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Lembaga Pemerintah			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.487.250,00	116.743.625,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan MeninkatnyaPemberday aan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.060.000,00	92.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.499.300,00	393.145.300,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan			
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Menurunnya Persentase Kekerasan terhadap Perempuan Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.251.246,00	40.552.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya layanan Perlindungan lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tersedianya [KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.710.000,00	130.415.000,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak Tersedianya Sistem Profil Gender dan Anak Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin dan umur antara Laki laki dan perempua serta Data Terpilha Anak Perempuan dan Anak Laki laki Tersusunnya Data Gender Gender dan Anak secara terpilah tingkat Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.533.000,00	99.387.200,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: Persentase Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan Dunia Usaha Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA) penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Persentase Kecamatan Layak Anak			
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di dalam Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Persentase terbentuknya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.500.000,00	128.060.450,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan upaya dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.747.500,00	150.747.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.558.000,00	56.200.961,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi			
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Menurunnya Persentase kekerasan terhadap anak Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Dampingan Korban bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.563.000,00	625.983.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Memberikan bantuan kepada anak yang berhadapan dengan huku Persentase Menurunannya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk tindak Pidana, Perdagangan Orang dengan Fokus Pada Pencegahan, Penanganan Korban			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.843.500,00	156.824.400,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.12.0000 Dinas Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.12.0000 Dinas Ketahanan Pangan			
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel			
Kegiatan	: 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.098.200,00	49.597.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.784.600,00	20.760.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.089.000,00	20.366.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.973.986.531,00	6.280.357.133,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.730.000,00	40.730.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.020.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.545.000,00	55.730.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.965.373,00	29.965.373,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.536.010,00	165.106.506,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.913.584,00	57.913.584,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.839.136,00	74.903.173,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.750,00	49.976.350,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.994.000,00	49.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.613.000,00	115.529.655,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.071.720,00	59.247.350,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.209.000,00	86.733.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.055.556,00	490.952.800,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.070.000,00	163.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.906.000,00	380.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari			
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Indikator Keluaran	: Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.800.000,00	33.129.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.556.000,00	28.196.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	195.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.173.000,00	187.923.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.508.700,00	98.381.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	16.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.790.200,00	32.226.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.679.545,00	33.912.996,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan			
Indikator Keluaran	: Informasi Harga dan Pasokan Pangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.960.000,00	21.155.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			
Indikator Keluaran	: Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.983.843,00	23.108.196,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.380.000,00	139.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.405.000,00	54.837.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.540.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.964.450,00	47.341.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.163.000,00	123.917.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)			
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan			

Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.902.388,00	40.987.545,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi			
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.998.000,00	44.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.450.900,00	26.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.652.019,00	91.911.019,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
Organisasi	: 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA			
Kegiatan	: 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA			
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.880.000,00	4.760.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.514.120.000,00	1.106.653.750,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.13.0000 Dinas Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.13.0000 Dinas Lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup			
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.988.000,00	22.494.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.688.762,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	32.500.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.914.222.744,00	11.235.623.328,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.917.250,00	99.116.950,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.614.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.858.000,00	38.256.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.873,00	29.998.873,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.826.300,00	489.385.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.272,00	59.992.272,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.997.942,00	99.998.972,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	54.716.561,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	152.385.996,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	60.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.067.252,00	442.467.252,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.475.537.911,00	25.163.425.900,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.240.000,00	263.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.234.000,00	266.054.559,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.119.700,00	172.047.306,00	
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup			

Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kabupaten/Kota yang disusun			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	397.795.000,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai			
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.082.000,00	62.648.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.486.750,00	70.938.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.983.000,00	49.023.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.360.000,00	204.786.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.986.000,00	51.798.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.750.774,00	465.801.174,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.767.400,00	142.857.000,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.048.000,00	12.842.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000.000,00	1.658.172.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	498.113.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	340.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.451.320.000,00	1.451.320.000,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH			
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.998.000,00	62.369.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.737.000,00	65.054.000,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.937.000,00	49.711.000,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadila			
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.952.000,00	84.114.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan sampah			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Indikator Keluaran	: Persentase penanganan sampah			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.939.287,00	5.620.243.903,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.412.802.150,00	3.287.800.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.536.651.200,00	1.381.055.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	40.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.348.800,00	2.315.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	449.514.875,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.14.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.14.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: [deleted] Jumlah Capaian Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	37.897.378,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.985.404.269,00	10.598.617.187,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Diklat PIM dan Bimtek-Bimtek terhadap SDM			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.280.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.386.000,00	97.386.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.953.000,00	119.971.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.555.360,00	60.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.444.640,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.873.000,00	70.936.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	249.933.160,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	400.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.085.029,00	488.127.779,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.744.444,00	1.228.064.444,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.610.000,00	207.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.930.600,00	99.930.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	2.100.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.008.800,00	80.008.800,00	
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	34.365.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	203.778.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.363.500,00	47.839.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	40.004.000,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.315.419,00	126.715.419,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Indikator Hasil	: -			

Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	163.297.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.029.402,00	91.844.402,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	38.377.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.144.701,00	160.144.701,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.602.394.436,00	1.573.873.426,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.768.507.025,00	2.853.671.775,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	58.794.480,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.998.631,00	358.448.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.417.847,00	26.708.923,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.315.995,00	4.361.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.504.510,00	80.752.255,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.996.688,00	57.270.454,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.559.690,00	45.869.845,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.693.000,00	298.933.500,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan			
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.176.708,00	51.919.700,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Organisasi	: 2.13.4.01.0.00.15.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Unit Organisasi	: 2.13.4.01.0.00.15.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan administrasi			
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya perencanaan, penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	68.834.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	22.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	31.550.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.919.344.180,00	6.102.962.376,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya pengelolaan administrasi barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.925.000,00	43.925.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.252.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	99.250.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.787.628,00	29.787.628,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.404.525,00	171.890.715,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.004.582,00	60.004.582,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.135,00	168.738.213,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.925.830,00	102.531.541,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.986.000,00	49.986.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.969.000,00	249.375.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	131.246.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.936.630,00	73.296.630,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoraan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.571.396,00	176.571.396,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.856.267,00	573.149.600,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Sarana dan Prasarana Aparatur Berfungsi dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.910.000,00	318.339.570,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.025.000,00	91.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.888.500,00	30.888.500,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
Indikator Hasil	: Jumlah Desa yang melakukan kerjasama			
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kerjasama antar desa Terpenuhinya Kerjasama antar Desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	53.747.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.223.000,00	43.893.900,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			

Indikator Hasil	: Persentase Desa Tertib Administrasi			
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.701.198,00	145.701.198,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.939.250,00	251.788.075,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.159.740,00	143.434.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.061.078.240,00	5.161.078.240,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.952.000,00	39.952.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.035.334,00	152.094.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.706.316.944,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.597.000,00	52.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.089.980,00	55.464.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.380.600,00	55.464.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.810.000,00	96.888.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina			
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.366.250,00	1.046.484.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.427,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.999.850,00	117.581.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.872.000,00	152.736.225,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.972.047,00	482.682.858,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.999.800,00	91.272.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.571.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.178.507.025,00	926.689.817,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.985.700,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.675,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.16.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana			
Unit Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.16.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana			
Program	: 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Yang Dilaksanakan Sangat Tepat			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	41.105.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.713.950,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.198.999.495,00	9.617.299.460,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada DPPKB Kab. Muba			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.842.400,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.355.691,00	61.677.000,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran (100%)			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.952.255,00	29.952.255,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.496.210,00	119.097.726,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.200,00	49.996.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.980.343,00	100.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.345.625,00	42.173.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.922.500,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.381.000,00	167.274.796,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	638.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.012.000,00	58.207.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.182.825,00	223.182.825,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.546.600,00	346.628.800,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.070.000,00	224.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.554.000,00	63.554.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	13.420.000,00	
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Jumlah peta persebaran penggunaan alat kontrasepsi Persentase stakeholder yang memahami kajian dampak kependudukan.			
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.469.867,00	31.141.500,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.338.000,00	72.309.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	235.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	180.000.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			

Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.966.000,00	85.233.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.017.000,00	87.017.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	375.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.466.000,00	335.483.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	85.120.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.944.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.116.200,00	64.978.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten / Kota			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.395.000,00	67.618.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.078.620.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.498.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.020.000,00	40.246.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	729.476.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.011.000,00	62.005.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.784.498,00	64.342.249,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.182.700,00	82.591.350,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pembinaan Kesertan Ber-KB			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.523.600,00	42.011.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.150.000,00	42.073.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah DASHAT di Kampung KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	136.274.997,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.291.203,00	874.566.500,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina Cakupan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat Yang di Bina			
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			

Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	134.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.285.000,00	90.006.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.928.000,00	130.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	98.914.320,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.528.000,00	77.264.000,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.305.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.566.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Organisasi	: 1.03.2.15.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.2.15.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Persentase lampu jalan dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Lampu Jalan dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.118.000,00	220.200.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.653.882.000,00	14.245.136.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.422.952.000,00	11.562.254.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.048.000,00	0,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.150,00	47.445.150,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.999.850,00	6.912.000,00	

Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.708.891.232,00	8.358.875.877,00	

Kegiatan	: 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik SKPD
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.135.750,00	68.734.750,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.372.994,00	3.197.967,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.627.006,00	85.078.236,60	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.139.200,00	40.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.860.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	83.795.474,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	42.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	194.738.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik SKPD			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	162.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.160.620,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.548.188,00	24.928.912,80	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen enyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.729.655,00	279.577.563,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.660.000,00	1.885.178.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik SKPD			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.809.265.000,00	1.704.427.146,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.919.192,00	190.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manjemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	5.315.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	450.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.265.533.200,00	1.265.533.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.634.000,00	425.897.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Fasilitas Parkir			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.915.300,00	3.724.050,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.089.350,00	2.689.350,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.116.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.084.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.190.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.549.000,00	238.070.161,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.244.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.148.045,00	157.074.023,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.608.000,00	59.194.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.460.000,00	95.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.859.178,00	731.584.678,00	

Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.398.041,00	161.308.720,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.442.378,00	3.442.378,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perizinan dan Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.014.000,00	45.507.000,00	
Kegiatan	: 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabauhan Sungai dan Danau persentase sarana prasarana pelayaran dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.402.000,00	30.201.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.666.050,00	535.253.054,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.760.000,00	17.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.799.000,00	213.719.499,60	
5.1.05	Belanja Hibah	1.400.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.495.000,00	41.947.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.041.000,00	143.190.000,00	
Program	: 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.15.04.2.01 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara			
Sub Kegiatan	: 2.15.04.2.01.0002 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.860.000,00	48.020.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Sistem perencanaan dan evaluasi kinerja berjalan dengan baik Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.720.000,00	25.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.120.000,00	16.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.003.000,00	25.001.500,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran Terlaksananya kelancaran Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.452.246.736,00	7.688.530.587,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dinas Meningkaynya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.824.140,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.855.000,00	94.855.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.427,00	30.000.427,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.816.649,00	120.489.989,40	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.998.117,00	112.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.252.473,00	54.626.236,50	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.950.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.051.000,00	215.350.500,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya peralatan mebeleur penunjang kenyamanan kerja Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.531.390,00	47.118.834,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.931.948,00	427.357.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.287.566.489,00	1.092.069.200,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang kenyamanan bekerja			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.230.000,00	341.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.711.250,00	123.711.250,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.240.000,00	54.240.000,00	
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik			
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah media informasi dan komunikasi publik pemerintah kab. muba yang menyampaikan informasi kepada masyarakat Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Muba yang menyampaikan Informasi Kepada masyarakat			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.924.500,00	166.962.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.312.000,00	643.829.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.557.000.000,00	5.957.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.140.293,00	443.104.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.753.207,00	88.418.070,70	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten			
Indikator Keluaran	: Jumlah Konten Informasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	845.014.002,00	660.222.309,50	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.328.740,00	244.480.800,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya pelayanan pemerintah dan masyarakat melalui teknologi informatika Terlaksananya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.218.760,00	253.609.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.056.657.019,00	10.298.245.729,50	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	1.129.667.050,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.217.303,00	154.330.381,80	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas			
Indikator Keluaran	: Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.616.000,00	121.308.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.532.000,00	37.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000,00	6.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	18.366.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.352.480.321,00	5.473.626.142,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pegawai yang mengikuti Diklat PIm IV dan III serta mengikuti pendidikan dan Pelatihan / Bimtek			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.024.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	86.274.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya layanan administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	147.885.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	77.109.625,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.957.000,00	41.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	27.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.027.000,00	83.856.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	354.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	69.469.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.370.268,00	131.107.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.266.666,00	392.788.400,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.210.000,00	113.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.987.400,00	49.987.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.140.000,00	33.140.000,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Jumlah koperasi aktif			
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.840.000,00	142.255.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.863.800,00	76.040.000,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
Indikator Hasil	: Jumlah Koperasi sehat			
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP serta UKM berprestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Kota			
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	247.357.000,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
Indikator Hasil	: Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya			
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	173.292.250,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing			
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	605.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	224.699.200,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: Jumlah UMK yang berdaya saing			
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan , penguatan kelembagaan dan koordinasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.800,00	160.735.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	139.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.199.800,00	122.799.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.000.000,00	259.500.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Indikator Hasil	: Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil			
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil			
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.679.850,00	487.762.425,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.709.500.000,00	6.790.869.000,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Organisasi	: 2.18.4.01.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Unit Organisasi	: 2.18.4.01.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.999.764,00	38.499.882,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.758,00	9.999.879,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.373.488,00	21.686.744,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan perangkat daerah Persentase adminitrasi keuangan perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.507.763.187,00	10.508.528.008,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.417.000,00	47.417.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.643.640,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.784.000,00	77.892.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi umum perangkat daerah Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.969.087,00	64.629.087,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.416.000,00	2.708.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.185.571.821,00	3.028.111.821,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	13.079.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.789,00	75.075.516,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.998.364,00	124.999.182,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.999.491,00	67.499.745,50	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.310.000,00	47.155.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.977.000,00	99.988.500,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	2.161.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.147.510,00	270.147.510,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.705.146,00	683.630.418,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.866.667,00	872.401.600,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.990.000,00	325.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.556.000,00	227.216.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.187.200,00	213.187.200,00	
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dipenanaman modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.904.500,00	30.452.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.072.000,00	40.153.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.841.000,00	33.920.500,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.488.000,00	135.140.000,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Minat Investasi			
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal Presntase Peningkatan Minat Investasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.739.000,00	395.431.400,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan			
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.766.250,00	76.883.125,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.526.500,00	307.263.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.581.700,00	55.790.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.003.292.600,00	689.646.300,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Nilai Realisasi investasi PMDN Nilai Realisasi investasi PMA			
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Nilai Realisasi investasi PMA Nilai Realisasi investasi PMDN Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	42.189.959,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	84.739.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola			
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah data informasi Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Persentase kesediaan data dan informasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.604.000,00	59.802.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata			
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata			
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Dokumen yang disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.806.000,00	40.738.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.880.000,00	9.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.819.000,00	24.909.500,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Administrasi perkantoran berjalan dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.052.807.310,00	9.423.530.076,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.728.750,00	52.728.750,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah, Meningkatnya Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.098.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.386.000,00	94.386.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah, Meningkatnya Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	29.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.211.600,00	200.052.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.935.400,00	44.935.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.620,00	99.999.810,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.999.150,00	158.282.275,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.996.000,00	99.998.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaaan barang milik daerah Penyediaan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.219.080,00	20.531.448,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan jasa penunjang kantor			
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.756.472,00	1.703.756.472,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.137.888.889,00	2.898.864.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.560.000,00	328.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.746.000,00	171.104.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	15.250.000,00	
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Indikator Hasil	: Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina			
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.485.000,00	25.928.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	517.785.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.216.500,00	107.530.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.637.000,00	15.907.000,00	
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Organisasi yang mendapatkan pembinaan			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.690.000,00	237.526.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Indikator Hasil	: Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga			
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Termanfaatkan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.843.923,00	5.393.004.023,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	13.912.225.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.430.000,00	72.430.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.105.692.900,00	24.902.010.500,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah cabang olahraga yang ditandingkan/ diikuti			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.305.150.399,00	12.405.150.399,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.350.000,00	190.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.710.000,00	606.710.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.797.500,00	99.797.500,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Cabang Olahraga yang dibina			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.006.000,00	51.103.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.972.168.250,00	11.066.078.250,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	386.755.000,00	55.470.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
Indikator Keluaran	: Pembinaan dan Kerjasama Organisasi Olahraga			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	27.061.098.300,00	28.481.098.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kejuaraan/ Kegiatan yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.207.960,00	154.292.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.195.199.879,00	1.102.581.879,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.410.000,00	140.955.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi			
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
Indikator Keluaran	: Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.670.500,00	31.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.062.000,00	214.081.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.424.890,00	236.493.530,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.997.600,00	10.926.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	189.071.600,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakai kan			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.530.017,00	79.714.305,30	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.204.758,00	171.233.558,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.073.000,00	327.036.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.308.000,00	154.814.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.102.000,00	33.211.000,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemkab muba Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00	380.678.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	8.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.800.401,00	825.480.200,50	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.135.505,00	40.068.960,50	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	259.904.250,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	62.664.495,00	37.598.697,00	

Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Indikator Hasil	: Penyelenggaraan festival seni dan budaya Pembinaan Sanggar/Komunitas Seni Budaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dilestarikan Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.408.000,00	171.004.000,00	

Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.784.491.850,00	1.575.264.275,00	
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	2.471.999.550,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	164.100.000,00	164.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.250.000,00	785.875.000,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Indikator Hasil	: Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan			
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	343.150.000,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi			
Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Meningkatnya Kualitas Cagar Budaya			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.995.000,00	286.397.500,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Indikator Hasil	: Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi Jumlah Koleksi Penyelenggaraan Kegiatan yang di laksanakan di Museum Jumlah Kunjungan			
Kegiatan	: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi Meningkatnya Penegelolaan dan Pemanfaatan Museum			
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.716.000,00	185.466.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	80.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	149.885.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.915.165,00	50.866.915,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.700,00	5.008.302,50	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.991.633,00	9.108.010,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: lancarnya administrasi keuangan PD			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.572.257.252,00	7.476.594.326,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: lancarnya administrasi kepegawaian PD			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	97.500.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: lancarnya administrasi umum PD			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.994.835,00	59.994.835,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.554.929,00	9.955.424,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.419.896,00	76.678.689,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.503,00	59.992.503,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.998.249,00	96.907.891,50	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.961.651,00	54.972.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.055.030,00	47.055.030,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.993.000,00	101.454.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	482.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.247.100,00	12.412.100,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.476.250,00	188.170.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.838.400,00	376.421.200,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: terpeliharanya barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.410.000,00	243.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.925.000,00	266.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.410.000,00	48.410.000,00	
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terkelolahnya Perpustakaan di wilayah Kab. Muba Terkelolahnya Perpustakaan di wilayah Kab. Muba			

Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.889.000,00	31.021.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan informasi Perpustakaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.007.828,00	24.477.828,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.942.446,00	52.955.446,00	
5.1.05	Belanja Hibah	112.107.780,00	112.107.780,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	181.263.460,00	181.263.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.363.374,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.781.715,00	0,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.239.317,00	0,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: meningkatnya gemar membaca di wilayah Kab. Muba			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.012.527,00	514.885.527,00	
5.1.05	Belanja Hibah	42.707.250,00	42.707.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	401.513.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	541.408.883,00	541.408.883,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	64.539.951,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	19.752.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.217.333,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.725.365,00	45.327.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			

Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Indikator Hasil	: Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Terkelolahnya Arsip Statis Kabupaten/Kota Terkelolahnya Arsip Statis Kabupaten/Kota Terkelolanya Arsip Statis di Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.654.432,00	115.265.432,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.978.025,00	52.978.025,00	

Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.792.011,00	116.629.341,00	

Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.783.110,00	138.928.820,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perikanan
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabe			
Kegiatan	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.219.203,00	33.613.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.118.033,00	8.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.945.000,00	9.024.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.422.861.103,00	7.602.201.103,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.371.000,00	52.371.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.910.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.885.000,00	77.800.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.724.080,00	65.724.080,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.057.106,00	159.028.521,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.245.105,00	53.245.105,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.355.808,00	97.819.780,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.884.353,00	36.555.852,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	40.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.304.369,00	35.780.369,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.994.000,00	172.111.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	109.659.700,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.778.001,00	6.913.163,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.458.600,00	288.960.321,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	946.920.000,00	794.884.800,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.609.700,00	330.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.978.000,00	69.978.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.130.000,00	40.130.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Tangkap			
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.473.000,00	67.852.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.494.000,00	69.073.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.244.906.250,00	2.435.784.625,00	

Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.704.100,00	105.856.050,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.683.000,00	42.539.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Budidaya			
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.230.950,00	224.959.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	274.865.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.861.000,00	7.085.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.254.806,00	361.047.306,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.235.130.000,00	1.053.810.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.772.000,00	47.508.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.216.000,00	128.903.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Tingkat Partisipasi Pokmaswas			
Kegiatan	: 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan			
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.212.000,00	33.926.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.548.867,00	18.319.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.651.840,00	180.195.743,00	
5.1.05	Belanja Hibah	194.999.250,00	128.343.750,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Konsumsi Ikan			
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.710.200,00	47.268.000,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.669.000,00	276.791.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.520.950,00	284.675.950,00	
5.1.05	Belanja Hibah	294.000.000,00	294.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.100.000,00	27.100.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			

Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Indikator Hasil	: Jumlah objek wisata
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: terlaksananya event-event pariwisata daerah Terlaksanya Event-event pariwisata daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.319.020.000,00	1.107.555.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	200.000.000,00	

Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Indikator Hasil	: Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah pelaku usaha pariwisata
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.729.791.600,00	2.148.770.800,00	

Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Indikator Hasil	: Jumlah pelaku usaha pariwisata
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.039.250,00	123.364.900,00	

Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.24.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.24.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	49.194.347,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.537.425,00	33.906.883,33	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.312.300,00	54.312.300,00	

Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.178.442.418,00	26.528.357.893,02	

Kegiatan	: 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.191.250,00	88.191.250,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.680.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.035.704,00	28.035.704,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	303.841.965,00	182.305.179,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.918.025,00	56.918.025,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.235.028,00	97.123.788,99	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.719.421,00	50.359.595,16	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.328.104,00	38.328.104,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.000,00	1.665.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.976.000,00	24.988.050,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.044.000,00	142.022.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.076.100,00	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.985.145,00	252.985.145,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.732.622.222,00	3.802.622.222,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.880.000,00	551.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.981.000,00	299.981.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	49.800.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.824.353,00	57.752.176,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.720.671.000,00	4.480.784.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.591.200,00	1.095.810.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.692.000,00	38.686.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.000.000,00	77.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.221.000.000,00	3.635.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.232.200,00	160.931.100,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.775.000,00	17.565.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.828.000,00	58.774.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.099.074.000,00	3.099.074.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.322.040,00	418.660.540,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	277.800.000,00	37.800.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)			
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.414.000,00	20.540.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	233.622.740,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.032.145,00	7.772.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	279.102.160,00	149.164.110,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.040.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.528.200,00	35.429.500,00	

5.1.05	Belanja Hibah	514.129.800,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.080.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.959.180,00	40.316.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.255.745.820,00	1.257.107.940,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.160.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.028.770,00	2.839.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	198.571.230,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.040.000,00	0,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.376.000,00	110.999.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.734.500,00	243.659.500,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.404.200,00	395.609.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.725.000,00	46.362.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.233.000,00	162.226.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.695.000,00	222.685.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			

Indikator Hasil	: Persentase serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani			
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.110.000,00	116.512.500,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani			
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyuluhan pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.381.952,00	2.607.970.974,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.692.835,00	641.527.067,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.919.782,00	183.447.942,50	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	437.760.000,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.25.0000 Dinas Perkebunan			
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.25.0000 Dinas Perkebunan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: [deleted]			
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.560.830,00	63.560.830,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.017.000,00	19.017.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.679.000,00	179.006.800,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.262.396.883,00	9.276.486.946,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.440.000,00	52.440.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.880.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.616.000,00	20.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.874.729,00	29.874.729,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.315.781,00	47.232.831,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.173.561,00	43.173.561,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.993.000,00	6.993.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.540.164,00	139.472.014,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.529.233,00	59.246.499,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.978.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.130.000,00	2.891.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.595.000,00	121.480.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	1.360.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.608.750,00	39.847.500,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.664.000,00	228.339.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.178.766.667,00	1.290.110.667,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.890.000,00	339.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.613.800,00	382.674.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.449.000,00	53.259.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan			
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Perkebunan)			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.476.500,00	903.916.250,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.684.800,00	96.337.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.248.294.000,00	2.984.694.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.538.000,00	4.854.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.195.908.025,00	2.766.818.242,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.047.000,00	9.945.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.543.000,00	0,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan			
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.049.000,00	82.999.500,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.235.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.638.150,00	263.252.665,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.980.068.864,00	7.697.446.864,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			
Indikator Keluaran	: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.616.000,00	18.960.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	270.383.762,00	270.383.762,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan			
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.247.131,00	98.347.649,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.833.400,00	2.351.220.160,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.720.302.998,00	9.032.121.398,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.899.350.080,00	1.989.675.040,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	0,00	
Program	: 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahanya			
Kegiatan	: 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian (Perkebunan) yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota TerlaksananyaPenerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			

Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.839.000,00	1.190.081.000,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani			
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.348.148.946,00	1.017.108.201,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.948.800,00	112.972.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.893.193.200,00	1.603.477.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.412.750,00	68.025.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 3.30.3.31.0.00.26.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Unit Organisasi	: 3.30.3.31.0.00.26.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu			
Kegiatan	: 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat			

Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.854.080,00	49.079.000,50	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.812.378,00	9.492.189,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.899,00	25.066.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.144.103.874,00	10.177.083.129,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.680.000,00	58.680.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.608.000,00	65.430.500,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.983.187,00	29.983.187,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.227.573,00	120.706.173,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.908.032,00	59.908.032,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.989.422,00	99.957.221,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.483.295,00	55.172.217,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	22.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.563.000,00	190.113.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.611.680,00	24.628.680,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perdagangan dan Perindustrian			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.968.500,00	488.110.949,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.729.611.111,00	2.069.458.400,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.860.000,00	316.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.532.000,00	7.407.520,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.541.500,00	41.541.500,00	
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit			
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang terbit			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.516.000,00	69.851.000,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Gudang yang terbit			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.180.000,00	35.667.000,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi cara Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.572.378,00	245.431.378,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik			
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.532.000,00	150.131.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.005.682.850,00	621.112.450,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan			
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.307.000,00	24.491.000,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.307.000,00	30.862.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.196.000,00	805.032.000,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.402.000,00	24.476.000,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan volume penjualan produk			

Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi			
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.551.500,00	935.363.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.717.022.500,00	3.673.267.240,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.643.000,00	25.348.000,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Persentase UTTP Bertanda Tera Sah			
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.483.740,00	144.498.040,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.414.300,00	53.906.000,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Indikator Hasil	: Jumlah Kemitraan Usaha			
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemitraan Usaha			
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.511.050,00	64.473.300,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah			
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Perencanaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Industri			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.725.042,00	102.771.042,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.610.544,00	12.610.544,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.894.650.494,00	422.723.948,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.193.977,00	847.302.320,50	
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali			
Kegiatan	: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Pengawasan usaha industri			
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.749.000,00	27.517.000,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas			
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Informasi Industri yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.629.000,00	103.004.000,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
Organisasi	: 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	106.968.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	49.070.486,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi	: 4.01.5.02.0.00.27.0000 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi	: 4.01.5.02.0.00.27.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas) Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Tersusunanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasni Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.932.015,00	36.844.894,50	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.861.993,00	29.070.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.712.528,00	5.564.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Tersusunanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.985.081.075,00	34.652.564.015,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.969.992,00	581.113.992,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.567.000,00	51.248.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Muba Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.130.540,00	191.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.940.000,00	41.927.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.445.000,00	670.622.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.493.101,00	100.493.101,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Muba Expo di Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Khabar Harian/Mingguan, Tabloid) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya souvenir, cindra mata, pakan ternak dan sewa peralatan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.888.373,00	449.888.373,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.509.200,00	148.352.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	220.000.000,00	1.653.518.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.888.885.643,00	2.441.227.171,78	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.514.000,00	41.514.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.228.875,00	70.608.875,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.771.125,00	1.393.585.370,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.276.392.564,00	795.926.743,90	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.453.050,00	800.393.342,78	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	189.043.800,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	40.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.915.000.000,00	7.347.867.505,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.422.175.000,00	3.839.282.595,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.064.275.373,00	2.057.089.373,35	
5.1.05	Belanja Hibah	1.140.000.000,00	4.892.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.877.627,00	240.600.507,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	756.976.792,00	669.770.841,50	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.544.533.480,00	6.357.739.808,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.027.837.234,00	12.171.436.400,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Rumah Jabatan dan Rehab Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.603.982.400,00	5.833.214.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.663.483.000,00	4.822.905.860,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.082.094.250,00	1.918.190.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Medical Check Up KDH/WKDH Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tersedianya Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi KDH/WKDH			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	357.788.640,00	357.788.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.440.000,00	751.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	799.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.493.512.380,00	3.741.990.328,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	806.487.620,00	1.369.827.620,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.902.715.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	303.035.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	1.437.944.950,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	80.029.050,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Indeks persepsi Reformasi dan Birokrasi se Kabupaten Muba Tercapainya nilai akuntabitas kinerja pemerintah daerah (Keselarasan Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Cascading Perangkat Daerah, Laporan Dokumen LKjIP, dan fasilitasi pelaksanaan SAKIP) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah TerlaKsananya seleksi evaluasi kinerja kecamatan (3 kecamatan terbaik) Terpenuhinya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Ketatalaksanaan Tersusunnya LKPJ Bupati Muba TA. 2024, LPPD dan RLPPD Kab. Muba Tahun 2024, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Muba Tahun 2024			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.684.540,00	450.704.550,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.169.990,00	305.748.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.041.913.000,00	602.058.792,50	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.937.643,00	177.394.360,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Persentase kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terfasilitasi Terdokumentasinya kegiatan peringatan hari besar Terlaksananya kegiatan acara KDH/WKDH Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi Staf Ahli Bupati Terpenuhinya penerimaan kunker pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah Tersusunnya laporan harian dan laporan triwulan bupati			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.360.000,00	2.460.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.663.172.071,00	3.798.642.180,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.531.323,00	220.223.205,69	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten			
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.026.070.030,00	1.241.808.580,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.625.601,00	148.230.351,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.963.725,00	136.433.796,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			

Indikator Keluaran	: Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten Terbinanya mental keagamaan warga kab.muba (Sarjana Bina Desa) Terlaksananya Isbat Nikah Bagi Masyarakat Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar Keagaamaan Terlaksananya Pembinaan Peserta MTQ Terlaksananya Pembinaan UKS Terlaksananya STQH tingkat kabupaten Terlaksananya STQH tingkat Provinsi Terlaksananya TC Peserta STQH Tingkat Provinsi Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah haji kab. Musi banyuasin Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah Umroh kab. Musi Banyuasin
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.604.042.630,00	19.521.927.630,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.603.745,00	146.433.745,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.058.291.566,00	1.368.328.566,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	

Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Indikator Keluaran	: Terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas Terlaksananyan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat umum Terlaksananyan Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di LP Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-UU-an Terlaksananya Sosialisasi RANHAM Kab. Muba Terselesainya sengketa hukum Masyarakat Miskin Terselesainya Sengketa Hukum (Perdata, TUN, Legal Opinion)
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.762.664,00	149.012.607,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.433.499,00	619.901.977,50	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.165.965,00	77.212.982,50	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kerja Sama Dalam Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Terfasilitasinya Kerja Sama Luar Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Luar Negeri dan Meningkatkan Keaktifan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Keanggotaan UCLG ASPAC Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.980.250,00	142.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.191.498,00	198.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.635.000,00	20.742.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam			
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BUMD dan BLUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD Terlaksananya Pembinaan BLUD Terlaksananya Pembinaan BUMD Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Terlaksananya Survey Bahan Pokok Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.802.000,00	121.786.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.868.000,00	95.759.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.043.000,00	99.124.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pemeriksaaan Fisik Tersusunnya Dokumen Standar Harga Bahan dan Upah, Harga Barang, ASB Konstruksi, ASB Perhitungan, ASB Permodelan dan TAPD Tersusunnya Laporan Fasilitasi Serah Terima Pekerjaan, Verifikasi Kontrak dan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN)			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.325.000,00	254.842.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.606.000,00	148.244.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.392.000,00	69.561.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Telaksananya pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa Terlaksanannya bantuan hukum pengadaan barang dan jasa Terlaksananya proses pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Terlaksananya proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dan jasa lainnya pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Terlaksananya proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Terlaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan barang pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.717.950,00	302.621.475,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.468.500,00	189.864.500,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.342.000,00	96.674.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.056.000,00	15.571.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.834.000,00	388.048.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.722.000,00	227.217.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.28.0000 Sekretariat DPRD			
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.28.0000 Sekretariat DPRD			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.882.200,00	15.182.850,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.217.333,00	10.597.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.336.200,00	9.668.100,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.694.319.655,00	9.935.827.448,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.443.500,00	372.443.500,00	

Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.680.000,00	141.009.960,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.741.000,00	94.741.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.280.000,00	608.809.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.955.315,00	146.593.810,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	66.315.270,44	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305.328.180,00	5.837.669.068,32	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.413.200,00	34.433.820,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	879.630.738,00	922.038.871,67	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.784.438,00	105.086.455,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.676.570,00	302.335.071,57	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.500.000,00	400.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.457.568.923,00	7.513.703.326,81	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.422.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	7.117.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	9.475.427,39	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.044.775.178,00	6.074.006.370,61	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.046.459,00	993.243.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.074.922.222,00	5.052.525.422,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.050.000,00	306.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.500.000,00	985.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.100.000,00	541.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.982.015,00	4.323.450.863,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.570.000,00	222.432.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.547.804.780,00	26.552.804.780,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.750.000,00	1.113.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.012.036.150,00	8.189.176.375,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000.000,00	2.604.479.480,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD			
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.848.848.050,00	1.965.226.525,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.329.463,00	64.800.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Indikator Keluaran	: Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.236.591.308,00	1.080.686.654,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.236.591.308,00	1.080.686.654,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.913.503,00	650.435.125,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.913.503,00	650.435.125,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.236.591.308,00	798.287.155,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.236.591.308,00	1.495.369.654,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.672.000,00	1.222.672.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	576.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	420.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.238.499,00	1.366.335.300,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.550.000,00	112.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.971.390.199,00	6.172.576.169,19	
Kegiatan	: 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.360.000,00	1.571.160.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.949.101.200,00	5.256.092.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.789.096.000,00	5.045.840.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.540.872,00	41.153.436,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.464.260,00	8.732.130,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.009.695.983,00	13.311.622.748,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.264.000,00	91.622.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.694.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.206.000,00	300.078.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.962.409,00	29.962.409,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	4.322.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.677.820,00	162.067.104,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.295,00	59.992.295,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.999.584,00	125.678.456,60	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.998.153,00	105.679.021,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.306.000,00	11.306.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.463.000,00	171.396.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	4.322.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.572.680,00	48.343.608,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.508.260,00	435.508.260,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	774.722.222,00	706.680.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharannya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Gedung Kantor dan Peralatan Gedung kantor			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.930.000,00	444.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.060.000,00	199.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.850.000,00	74.850.000,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD			
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.505.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.133.400,00	452.315.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.486.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.799.000,00	358.209.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	976.926.492,00	672.731.492,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			

Indikator Keluaran	:			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.277.000,00	27.661.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.282.050,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.980.894,00	75.229.894,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.061.856,00	225.426.356,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.485.139,00	62.497.375,20	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan			
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.056.000,00	98.978.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.987.000,00	69.109.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.137.500,00	136.935.250,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.910.250,00	228.448.250,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.598.000,00	60.956.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.770.000,00	36.162.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.544.000,00	87.456.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.995.000,00	45.661.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.992.000,00	447.107.820,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.985.000,00	38.588.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.751.000,00	118.422.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.304.000,00	668.997.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.399.000,00	148.766.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan			
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.105.969.000,00	8.771.193.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.45.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.45.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel			
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.054,00	41.667.332,72	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.979,00	9.999.795,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	11.779.470.311,00	12.455.866.618,05	
Kegiatan	: 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang di Asuransikan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.691.000,00	122.582.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.096.000,00	153.386.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.740.000,00	144.840.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.417,00	30.000.417,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.328.000,00	14.008.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.682.500,00	876.253.257,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.995.070,00	59.995.070,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.173.790,00	330.005.636,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.852.810,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.632.095,00	88.355.029,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.009.000,00	50.340.200,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.784.000,00	300.437.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksankan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.301.488,00	136.117.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.444.410,00	445.132.032,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.400.000,00	612.658.400,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.490.000,00	45.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.540.000,00	439.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.528.990,00	424.433.049,92	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.165.560,00	76.165.560,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)			
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	115.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	240.745.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	193.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	157.240.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan Penatausahan Perbendaharaan Daerah			

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.404.000,00	96.702.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.587.000,00	84.293.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.408.900,00	79.204.450,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.250.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	34.186.500,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	29.802.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	136.151.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	69.666.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	97.382.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	41.790.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	43.279.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	39.910.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	58.179.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.500.000,00	64.274.450,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.100.208,00	94.778.104,00	
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.544.780,00	160.143.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	60.277.650,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Data Aset Yang Akurat			
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.211.800,00	104.978.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.627.299,00	150.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.548.000,00	71.126.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.930.780,00	161.478.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.574.950,00	57.287.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.260.000,00	46.630.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.499.000,00	121.810.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.999.900,00	36.609.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.999.800,00	163.647.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.802.000,00	217.086.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.46.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.46.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	44.161.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.684.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.735.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.017.755.485,00	29.664.788.265,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.220.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.465.500,00	54.423.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.534.500,00	127.271.100,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	36.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	267.078.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	363.403.891,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.188.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	189.217.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.988.300,00	16.988.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.011.700,00	49.557.069,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.516.267,00	398.516.267,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.988.444,00	1.072.188.444,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	182.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.970.000,00	327.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.893.970,00	27.744.330,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	316.542.030,00	358.960.670,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.979.500,00	49.979.500,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.100.000,00	183.078.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.800.000,00	267.122.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.666.200,00	103.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.026.900,00	47.026.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.090.900,00	32.573.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.000.000,00	600.584.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	445.429.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	371.304.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.500.000,00	818.478.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	315.995.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	362.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.216.000,00	261.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	269.497.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.200.000,00	361.103.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	25.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	91.325.000,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN			
Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.47.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.47.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentese Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.016.000,00	25.008.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.936.000,00	4.968.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	2.700.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.901.765.152,00	10.035.706.672,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersediannya jaminan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.282.500,00	46.282.500,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.536.000,00	51.536.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.010.000,00	118.005.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Cetakan dan Persediaan			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.023.558,00	30.023.558,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	261.029.820,00	156.617.892,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.009.930,00	60.009.930,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.001.799,00	200.001.799,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.040.020,00	107.040.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	133.883.200,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.413.700,00	65.048.220,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.329.000,00	192.329.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.522.222,00	541.401.200,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.330.000,00	281.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	49.980.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.900.000,00	174.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Survey Kepuasan ASN			
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	220.000.050,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	197.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	44.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	61.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Terlaksananya Pengelolaan Kenaikkan Pangkat ASN Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN Terlaksannya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Mutasi dan Promosi			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.900,00	97.887.950,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.850,00	73.081.925,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.999.850,00	237.479.925,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.799.999.700,00	3.205.712.628,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.999.550,00	1.039.122.847,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.999.800,00	741.663.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.400,00	148.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.800,00	144.874.900,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.243.000,00	51.421.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.240.000,00	25.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.983.700,00	58.991.850,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.459.000,00	60.229.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.129.000,00	15.064.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.248.000,00	76.984.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti [deleted]			
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersusunnya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.378.346,00	248.207.228,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.929.981,00	34.628.150,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	199.999.689,85	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.242.387,00	104.145.212,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	656.121,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.628.332,00	73.560.120,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.342.332,00	49.316.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.068.146,00	48.551.778,00	
Program	: 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.01.0002 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset			
Indikator Keluaran	: Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	299.999.799,85	
Sub Kegiatan	: 5.05.03.2.01.0006 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	129.186.001,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.44.0000 Inspektorat			
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.44.0000 Inspektorat			

Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan administrasi			
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.999.900,00	51.601.450,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800,00	9.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.900,00	29.169.950,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan APIP			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.064.693.797,00	21.648.192.108,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.316.500,00	89.316.500,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian APIP			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.697.560,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.599.000,00	48.387.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.584.000,00	533.584.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum APIP			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.867.180,00	24.867.180,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.718.900,00	117.759.340,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.725.900,00	54.725.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.586.904,00	100.633.452,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.075.793,00	128.741.098,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.776.000,00	48.776.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.574.000,00	429.574.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.720.000,00	354.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.038.000,00	259.150.800,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.199.012,00	282.199.012,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.644.444,00	638.090.844,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.910.000,00	488.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.624.000,00	198.624.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.390.000,00	323.166.320,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Opini terhadap laporan keuangan pemda			
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dengan status selesai Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal BB Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP Jumlah Unit Pelayanan Publik Kategori Baik			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	744.999.800,00	655.441.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	524.718.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	310.357.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	91.866.950,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.999.800,00	558.352.750,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.999.800,00	202.178.900,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	829.999.900,00	814.840.450,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: Nilai Maturitas SPIP Level Kapabilitas APIP Nilai Reformasi Birokrasi PEMDA			
Kegiatan	: 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya elemen kapabilitas APIP			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.999.900,00	152.723.950,00	
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Nilai RB bernilai Baik Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level 3			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	263.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.999.800,00	347.119.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.999.800,00	490.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.001.300,00	95.050.650,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.695.000,00	5.761.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.890.000,00	9.945.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.585.642,00	8.353.190.629,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.702.260,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.195.000,00	45.775.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitas Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.992.205,00	9.992.205,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.587.594,00	42.637.764,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.909.071,00	19.909.071,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.023.558,00	40.023.558,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.039.208,00	34.039.208,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	25.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.037.000,00	75.153.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.421.530,00	28.978.770,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.317.600,00	134.317.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.941.778,00	762.219.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.760.000,00	120.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.045.880,00	68.045.880,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.313.000,00	20.313.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.010.600,00	289.023.400,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.287.700,00	8.143.850,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.785.483,00	73.785.483,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Terselengaranya Penegakan Peraturan Daerah			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselengaranya Penegakan Peraturan Daerah Terselenggarakan penegakan peraturan daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.929.730,00	12.455.430,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Forkompinda Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	26.600.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terselenggaranya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.960.000,00	34.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	31.850.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0001 Kelurahan Serasan Jaya			
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: -			

Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.794.350,00	79.602.186,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.205.650,00	16.602.825,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.999.937,00	346.207.562,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	157.806.499,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0002 Kelurahan Soak Baru
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.035.249,00	48.873.603,02	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.964.750,00	37.231.065,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.999.949,00	347.619.949,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	250.423.915,98	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0003 Kelurahan Balai Agung			
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.840.121,00	56.798.807,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.073.879,00	47.073.879,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.086.000,00	19.386.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.536.000,00	197.536.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.464.000,00	152.464.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.922.080,00	194.186.167,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.077.920,00	2.077.920,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0004 Kelurahan Kayuara			
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.592.053,00	73.830.070,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.407.947,00	20.889.090,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	348.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	238.705.874,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Lais			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Lais			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.855.000,00	4.302.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	7.290.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.156.076.912,00	3.546.976.571,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.130.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.875.000,00	46.575.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.021.636,00	10.021.636,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.628.509,00	49.405.656,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.197.452,00	17.197.452,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.735.180,00	30.653.996,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.958.784,00	17.964.998,20	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.870.000,00	15.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.950.000,00	52.020.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.940.832,00	30.059.332,80	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.521.599,00	85.957.203,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.960.444,00	184.316.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.580.000,00	123.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.904.800,00	74.904.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	14.420.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais) Persentase Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.987.000,00	316.685.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.187.805,00	10.934.340,00	

Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	2.250.000,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	11.388.000,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais)
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.235.000,00	8.550.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	11.088.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	12.333.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.992.520,00	7.496.259,75	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.007.361,00	10.003.680,30	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.372.082.864,00	4.535.273.045,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.538.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.355.000,00	47.355.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.989.800,00	9.989.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.855.292,00	54.446.168,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.016.075,00	20.016.075,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.997.851,00	48.534.751,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.910,00	17.499.956,69	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	107.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.374.000,00	50.163.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.762.632,00	31.336.632,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.336.000,00	85.336.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.905.467,00	380.205.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.500.000,00	83.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.723.860,00	702.360.189,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	7.320.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.723.000,00	581.963.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.251.105,00	2.750.552,25	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	6.390.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			

Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	20.400.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	6.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	5.400.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0001 Kelurahan Babat			
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.270.064,00	89.620.515,96	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.729.680,00	21.326.985,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.999.208,00	399.057.775,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.648.380,00	61.225.877,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	186.793.020,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.351.419,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0002 Kelurahan Mangun Jaya			
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.129.321,00	54.811.157,13	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.870.508,00	37.980.426,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.999.769,00	399.027.409,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.647.750,00	48.894.489,38	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	226.023.750,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.351.419,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan dan Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daera Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.965.200,00	14.965.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.812,00	6.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.986.569.938,00	3.774.985.451,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.538.000,00	20.538.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.436,00	9.998.436,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.509.600,00	1.383.394,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.388.094,00	73.514.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.981.554,00	19.981.554,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.794,00	39.999.794,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.996.080,00	17.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	53.494.401,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.141.948,00	48.141.948,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.190.667,00	277.290.667,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	78.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.970.000,00	74.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.130.000,00	21.130.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.918.000,00	371.918.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: terlaksananaya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.106.000,00	16.978.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahka			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	2.400.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	5.325.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimcam			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.015.000,00	7.060.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Fasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	4.470.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0001 Kelurahan Keluang
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.929.709,00	143.929.709,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.999.550,00	5.999.550,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.593.088,00	347.593.088,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.477.528,00	344.262.364,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Sanga Desa
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Sanga Desa
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.795.000,00	5.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.490.000,00	8.175.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.463.094.014,00	4.030.848.576,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.355.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Adminstrasi Umum Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.988.530,00	9.988.530,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.606.852,00	75.313.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.724.040,00	13.724.040,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.485.330,00	38.485.330,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.662.850,00	28.138.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	126.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.126.000,00	74.639.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.567.400,00	19.540.440,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.621.400,00	47.181.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.882.400,00	458.102.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.880.000,00	120.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.880.000,00	90.204.790,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	22.350.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Keluaran	: persentase penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.500.000,00	303.095.000,00	

Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.524.000,00	5.976.000,00	

Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	2.450.000,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sanga Desa			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	7.650.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: ersentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.225.000,00	10.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	6.780.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sanga Desa			

Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.628.499,00	11.423.499,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	7.500.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Sanga Desa			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0001 Kelurahan Ngulak I			
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.588.543,00	125.408.174,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sanga Desa			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	390.010.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	9.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.374.605,00	96.340.234,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	190.473.225,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.757.000,00	20.757.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Sanga Desa			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0002 Kelurahan Ngulak			
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.708.288,00	125.607.825,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.575.000,00	347.910.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.665.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.281.278,00	122.486.249,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	235.943.820,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Plakat Tinggi			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Plakat Tinggi			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.800.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	9.800.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.894.204.525,00	2.927.734.895,70	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kemampuan aparatur			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.714.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.460.000,00	45.460.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.449,00	15.225.449,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.814.496,00	39.157.248,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.993.556,00	19.993.556,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.993.744,00	19.316.872,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.424,00	34.877.212,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.510.000,00	36.755.000,20	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.543.291,00	77.305.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.170.780,00	13.022.469,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.001.536,00	75.001.536,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.820.622,00	209.836.422,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.260.000,00	118.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.870.000,00	30.870.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	166.714.348,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	13.290.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.224.000,00	366.549.095,10	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.776.000,00	7.138.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	2.562.500,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentasi Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			

Indikator Keluaran	: Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Batanghari Leko			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Batanghari Leko			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	1.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.906.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.291.490.536,00	2.881.959.957,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.328.000,00	340.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.941.000,00	46.283.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.275.500,00	14.230.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	340.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.887.285,00	27.852.371,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.700.000,00	18.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.500,00	19.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.998.300,00	19.999.150,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.986.000,00	17.493.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	24.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.012.000,00	65.006.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	340.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.250.000,00	26.550.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.429.500,00	79.429.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.321.333,00	199.772.667,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	131.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.270.000,00	55.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.854.000,00	449.177.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.530.000,00	4.265.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Batanghari Leko)			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Kec. Batanghari Leko)			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Penerapan PERDA Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.412.000,00	7.206.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.712.000,00	5.856.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Desa Yang dibina Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	3.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.292.000,00	8.240.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sungai Keruh			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sungai Keruh			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evalusai kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.166.000,00	6.524.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	2.106.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya adminstrasi keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.267.058.537,00	2.745.214.507,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.372.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.355.000,00	45.708.750,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.081.100,00	5.081.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	340.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.155.930,00	52.068.830,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.229.600,00	10.229.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.049.972,00	24.934.085,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.200,00	17.489.850,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	25.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	47.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.244.000,00	76.425.250,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	340.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.230.000,00	19.230.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.129.058,00	100.293.437,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.506.489,00	171.417.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.760.000,00	120.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.062.000,00	74.722.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	10.980.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggeraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.300.000,00	410.310.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan PATEN Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.610.000,00	8.215.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	150.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Keruh			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya penegakan peraturan daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Forkompinda Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimda tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.006.000,00	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Keruh			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.580.000,00	4.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.006.000,00	2.520.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.760.000,00	3.552.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.340.579.804,00	4.127.883.854,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.133.744,00	11.133.744,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.200,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.027.335,00	43.954.446,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.279.052,00	16.279.052,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.037.397,00	33.774.489,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.628.800,00	15.221.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.280.000,00	25.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.690.000,00	78.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.880.000,00	107.732.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.983.511,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhanan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.851.620,00	89.586.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.466.933,00	338.533.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.260.000,00	122.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.680.000,00	97.539.638,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.860.000,00	15.860.000,00	

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.584.000,00	406.945.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.176.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Lilin			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Lilin			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggaraan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	5.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	6.300.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin			

Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0001 Kelurahan Sungai Lilin
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.364.550,00	122.057.211,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.635.450,00	10.957.143,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.083.090,00	66.083.090,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	283.916.910,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	283.916.910,00	0,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0002 Kelurahan Sungai Lilin Jaya
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.462.354,00	111.482.274,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.537.646,00	27.436.980,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.125.000,00	76.899.596,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	273.100.404,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	124.875.000,00	0,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: peresentase kualitas pelayanan masyarakat

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggara nya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.974.000,00	8.018.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.680.000,00	9.840.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daera Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.847.999.918,00	3.661.782.065,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terselenggaran ya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.460.000,00	40.460.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.936.150,00	9.936.150,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.914.451,00	46.796.379,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.001.090,00	20.001.090,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.980.758,00	19.980.999,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.976.100,00	17.495.370,40	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.940.000,00	73.969.999,60	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.433.407,00	29.083.332,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.115.000,00	83.115.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.328.800,00	265.978.800,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.460.000,00	85.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.774.000,00	74.774.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.620.000,00	24.620.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

Indikator Keluaran	: terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.347.000,00	479.347.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan terlasananya pelayanan PATEN			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.182.600,00	14.591.364,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penegakan peraturan daerah kecamatan bayung lencir			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terlaksananya penegakan peraturan kepala daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	4.500.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase penyelesaian konflik di wilayah kecamatan (Bayung Lencir Terlaksananya Forkopimda tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	11.740.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Bayung Lencir			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah desa yang dibina terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	4.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.565.000,00	8.282.500,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0001 Kelurahan Bayung Lencir			
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.727.065,00	108.325.253,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.272.477,00	16.502.259,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.755.919,00	341.755.919,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.281.600,00	7.281.600,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.981.052,00	232.761.052,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	117.216.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.996.000,00	0,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0002 Kelurahan Bayung Lencir Indah
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator Hasil	: -

Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.213.415,00	107.679.895,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.760.764,00	17.440.764,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.835.976,00	341.835.976,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.158.500,00	8.158.500,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.949.700,00	4.326.750,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	349.949.700,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Lalan
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Lalan
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran	: Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinnerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.878.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.591.798.099,00	3.391.844.367,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.582.000,00	18.582.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.230.000,00	39.056.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	9.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.074.100,00	74.074.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.093.900,00	17.093.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.967.020,00	39.967.020,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	36.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	122.714.500,50	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.929.000,00	90.479.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.124.000,00	49.124.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.630.167,00	23.630.167,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.141.867,00	108.280.233,50	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.920.000,00	36.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.823.000,00	74.823.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	24.990.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)			

Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	755.380.000,00	511.436.200,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	17.380.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Lalan)			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	10.850.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	10.260.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Desa yang dibina (Kec. Lalan)			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	7.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	6.470.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Tungkal Jaya			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Tungkal Jaya			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan penganggran evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.797.550,00	1.547.750,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.906.825,00	1.947.297,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.467.078.162,00	3.026.789.605,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	14.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.230.000,00	20.230.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.925.065,00	9.925.065,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.783.927,00	87.540.927,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.757.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.992.545,00	17.992.545,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.768.328,00	24.875.678,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.592.800,00	14.292.272,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	60.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.874.000,00	123.413.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.885.960,00	42.885.960,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.916.000,00	146.652.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.914.400,00	135.914.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase saranan dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	78.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	6.710.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintaj di tingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.236.000,00	333.076.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Persentase Penyelenggaraaan Pelayanan PATEN			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.375.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	:			

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.150.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase penyelenggaraan kegiatan koordinasi penerapan perda			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.820.000,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya) Persentase Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.820.000,00	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Jumlah Desa Yang Dibina			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.820.000,00	12.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.929.000,00	31.700.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Lawang Wetan			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Lawang Wetan			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.980.000,00	3.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.510.000,00	3.510.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.792.156.872,00	3.250.582.148,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Peningkatan Kualitas Kepegawaian			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.218.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.696.998,00	7.696.998,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.268.056,00	46.494.459,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.089.356,00	13.089.356,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.016.661,00	46.016.661,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.982.000,00	26.698.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.360.000,00	25.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.880.000,00	25.880.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.640.000,00	131.328.300,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	43.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.765.200,00	44.450.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.798.325,00	87.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.417.244,00	333.730.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.260.000,00	118.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.190.000,00	67.593.950,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.530.000,00	16.340.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) [deleted]			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.700.000,00	378.580.000,00	

Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.860.000,00	3.510.000,00	

Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	2.400.000,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator Hasil	:
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator Keluaran	:
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	8.400.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	8.400.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Desa yang Dibina Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	7.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Babat Supat			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Babat Supat			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.948,00	7.858.974,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.979.448.753,00	2.613.214.200,50	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.959.000,00	46.762.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.927,00	9.996.927,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.356.968,00	99.206.910,50	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.874,00	19.994.874,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.683.349,00	24.471.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.043.720,00	7.021.860,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.070.000,00	55.785.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.319.000,00	108.576.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.330.261,00	48.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemunuhan Layanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.626.244,00	155.616.499,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.960.444,00	190.510.444,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	78.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.792.000,00	149.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.590.000,00	11.590.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.852.000,00	465.577.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.099.200,00	33.099.200,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	2.475.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Babat Supat			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	6.880.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Konflik diwilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.747.000,00	3.873.500,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Desa yang dibina			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	6.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	6.880.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Jirak Jaya			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Jirak Jaya			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase layanan dan perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	4.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.206.893.144,00	2.314.686.608,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kemampuan aparatur Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.824.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	67.845.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.997.200,00	9.997.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.893.483,00	46.343.606,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.500,00	19.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.050.800,00	33.348.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.275.400,00	18.137.700,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	104.462.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.691.920,00	70.333.620,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.460.000,00	65.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.098.578,00	221.609.689,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.040.000,00	42.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.992.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggeraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.354.000,00	461.925.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.031.000,00	9.515.500,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.490.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak			

Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggarakan penegakan peraturan daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.480.000,00	15.240.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya)			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Forkompinda tingkat kecamatan Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.815.000,00	11.070.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	7.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	7.080.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.06.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Unit Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.06.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran			
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	40.568.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.104.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.412.700,00	0,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.848.069.653,00	6.090.240.819,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Kendaraan Dinas Operasional yang di Asuransikan Persentase Pemenuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.902.500,00	36.902.500,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.230.000,00	34.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.250.000,00	46.125.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.638.100,00	36.980.300,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.490.800,00	132.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	163.140.624,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	62.935.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.389.200,00	22.194.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.040.000,00	167.456.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.692.000,00	81.402.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.876.200,00	131.876.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.077.778,00	327.209.600,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.910.000,00	294.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.258.000,00	154.952.320,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	14.640.000,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Indikator Hasil	: Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa			
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa			
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.815.870.270,00	1.630.010.270,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.887.365,00	98.731.900,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.201.000,00	13.475.000,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Indikator Hasil	: Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik			
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.521.458.372,00	5.461.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.139.000,00	88.222.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.340.000,00	102.755.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.250.000,00	250.345.000,00	

Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Indikator Hasil	: Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.062.000,00	71.504.000,00	

Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.937.890,00	381.819.890,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial			
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Indikator Keluaran	: Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.250.000,00	37.859.840,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.750.000,00	65.312.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	95.686.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	144.497.300,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	50.056.371.759,01	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	50.056.371.759,01	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	26.586.109.626,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	26.586.109.626,00	

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100 %											
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	85.000.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	53.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	99.999.700,00	49.999.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.700,00	49.999.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
4	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6450 Orang/bulan	550.078.483.467,00	772.564.354.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.078.483.467,00	772.564.354.246,00	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
5	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
6	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	88.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.998.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	97.385.000,00	97.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.385.000,00	97.385.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %											
8	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.993.640,00	29.993.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.993.640,00	29.993.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	199.191.500,00	514.564.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.191.500,00	514.564.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
13	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
15	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	222.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	222.586.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
16	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	442.800.000,00	723.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.800.000,00	723.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	100.632.000,00	453.058.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.632.000,00	453.058.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %											
18	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.040.582.400,00	2.810.542.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.582.400,00	2.810.542.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	55.101.500.000,00	5.626.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.101.500.000,00	5.626.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %											
20	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	535.499.600,00	535.499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.499.600,00	535.499.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
21	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	730.608.000,00	730.608.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.608.000,00	2.230.608.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
22	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	139.787.000,00	139.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787.000,00	139.787.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	0,65 % 1 % 100 % 101,18 % 107,56 % 61,2 % 61,20 % 70,81 % 97,42 % 99,9 % 99,90 %										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-											
23	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	0,00	0,00	3.364.900.000,00	3.364.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.900.000,00	3.364.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
24	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	0,00	337.050.000,00	1.135.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.050.000,00	1.135.566.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
25	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
26	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	450.000.000,00	650.000.000,00	2.784.000.000,00	7.462.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.000.000,00	8.112.836.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
27	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
28	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	1.889.300.000,00	5.037.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.300.000,00	5.037.060.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
29	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	550.000.000,00	362.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	362.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
30	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	345 Orang	1.579.082.000,00	705.554.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.082.000,00	705.554.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
31	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	479 Satuan Pendidikan	600.000.000,00	318.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	318.852.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
32	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	486 Satuan Pendidikan	0,00	54.021.974.936,00	0,00	20.706.058.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.728.033.180,00	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1004 Orang	341.066.850,00	298.991.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.066.850,00	298.991.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
34	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	0,00	5.791.400.000,00	0,00	330.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.120.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Alokasi Umum (DAU)
35	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	200.000.000,00	299.395.000,00	4.825.386.200,00	5.564.250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025.386.200,00	5.863.645.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Pembiayaan
36	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	485 Satuan Pendidikan	506.850.000,00	265.951.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.850.000,00	265.951.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
37	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	970.487.000,00	970.487.000,00	1.916.713.750,00	5.032.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.200.750,00	6.003.016.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Pembiayaan
38	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0,00	2.997.000,00	3.387.500.000,00	624.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.500.000,00	626.997.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-											
39	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	1.107.450.000,00	1.107.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.450.000,00	1.107.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
40	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	148.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.701.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
41	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	350.000.000,00	847.903.000,00	1.000.000.000,00	3.137.901.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	3.985.804.901,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
42	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	350.000.000,00	750.000.000,00	568.187.050,00	1.760.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.187.050,00	2.510.836.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Penerimaan Pembiayaan
43	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
44	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	481.950.000,00	397.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.950.000,00	397.663.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
45	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	200.000.000,00	2.520.000.000,00	5.520.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000.000,00	5.720.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
46	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1040 Peserta Didik	472.600.000,00	326.941.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	354.341.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
47	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1563 Orang	1.055.787.200,00	474.101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.787.200,00	474.101.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
48	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	162 Satuan Pendidikan	1.734.000.000,00	1.929.958.000,00	66.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	1.962.958.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
49	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	174 Satuan Pendidikan	0,00	28.107.747.897,00	0,00	8.807.938.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.915.686.889,00	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU)
50	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	346 Orang	152.648.700,00	110.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.648.700,00	110.573.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
51	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	630 Satuan Pendidikan	199.999.700,00	1.227.871.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.700,00	1.227.871.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
52	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	600.000.000,00	800.000.000,00	828.203.581,00	1.396.462.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.203.581,00	2.196.462.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Penerimaan Pembiayaan
53	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	0,00	5.721.600.000,00	0,00	137.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859.400.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU)
54	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	100.000.000,00	313.475.000,00	1.912.500.000,00	1.770.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.500.000,00	2.084.377.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	61,20 % 23 % 100 %											
55	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	910.000.000,00	1.209.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000.000,00	1.209.473.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
56	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD													
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
57	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	723.310.800,00	270.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.310.800,00	270.244.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
58	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	482 Satuan Pendidikan	1.290.583.700,00	967.736.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.583.700,00	967.736.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
59	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	479 Satuan Pendidikan	0,00	11.271.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271.013.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler Dana Alokasi Umum (DAU)
60	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	89.916.600,00	44.958.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.916.600,00	44.958.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
61	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	400.000.000,00	1.695.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	1.695.142.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
62	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	200.000.000,00	0,00	198.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.440.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
63	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	49.547.000,00	2.876.763.000,00	275.000.000,00	725.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.547.000,00	3.601.763.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
64	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	460 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	104.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
65	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000,00	637.622.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	637.622.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	61,20 % 100 %											
66	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	446.083.600,00	369.702.900,00	0,00	31.363.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.083.600,00	401.066.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
67	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	0,00	1.402.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Dana Alokasi Umum (DAU)
68	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100 Orang	22.980.200,00	11.490.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980.200,00	11.490.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya Pembinaan Sanggar/Komunitas Seni Budaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	11 Kali 15 Kelompok 45 Orang 5 Kali											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dilestarikan Penyelenggaraan festival seni dan budaya	100 % 11 Kali											
69	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	120 Orang	326.408.000,00	171.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.408.000,00	171.004.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
70	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional													
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	2.134.491.850,00	4.047.263.825,00	199.100.000,00	199.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.591.850,00	4.246.363.825,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
71	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	365 Sertifikat	868.250.000,00	785.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.250.000,00	785.875.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15 Unit 25 % 73 %											
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan	73 % 100 %											
72	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	10 Dokumen	275.000.000,00	343.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	343.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	34 % 68 Unit											
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Meningkatnya Kualitas Cagar Budaya	68 % 100 %											
73	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	7 Objek	299.995.000,00	286.397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.995.000,00	286.397.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi Jumlah Koleksi Penyelenggaraan Kegiatan yang di laksanakan di Museum Jumlah Kunjungan	394 Unit 446 Unit 5 Kali 6838 Orang											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi Meningkatnya Penegelolaan dan Pemanfaatan Museum	394 Unit 100 %											
74	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	215.716.000,00	185.466.000,00	130.000.000,00	229.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.716.000,00	415.351.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	100 %											
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 % 100 %											
75	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	6.105.969.000,00	8.771.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.969.000,00	8.771.193.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUMLAH KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI TAHUNAN YANG DISUSUN SESUAI PEDOMAN YANG BERLAKU Persenatase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 DOKUMEN 100 %											
76	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	85.000.000,00	77.978.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	77.978.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
77	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	40.000.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	34.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	84.156.000,00	56.476.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.156.000,00	56.476.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatse Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100 % 100 %											
79	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5044 Orang/bulan	239.768.555.073,00	268.274.333.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.768.555.073,00	268.274.333.909,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100 %											
80	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	79.441.000,00	78.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.441.000,00	78.530.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
81	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	30.000.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	12.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100 %											
82	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	283.322.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.322.000,00	680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	100.000.000,00	99.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	99.675.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100 % 100 %											
84	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000,00	29.997.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.997.789,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
85	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	2.904.629,00	0,00	116.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696.629,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
86	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	59.994.100,00	59.994.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.994.100,00	59.994.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
87	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.000.000,00	105.142.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	105.142.384,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
88	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000,00	55.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	55.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
89	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
90	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	74.996.000,00	74.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.996.000,00	74.996.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
91	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	187.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	187.694.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 % 100 %											
92	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.297.260,00	2.909.060,00	98.702.740,00	57.770.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	60.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenatse Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
93	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.624.287.120,00	2.150.462.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.287.120,00	2.150.462.134,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
94	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.663.371,00	0,00	198.336.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
95	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.269.332.489,00	28.359.744.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.269.332.489,00	28.359.744.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
96	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	696.660.000,00	733.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.660.000,00	733.810.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	189.992.000,00	378.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.992.000,00	378.578.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
98	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.890.000,00	69.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.890.000,00	69.352.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP	100 % 10 Dokumen 12 Dokumen 13 % 29 PKM 2 Dokumen 3 RS 40 Aplikasi 4 PKM 5/1000 KH 52/100000 KH 95 % 96 % 98 %											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE FASYANKES YANG MEMIIKI FASILITASPELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP SESUAI STANDAR Persentase Fasyankes yang memiliki Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %											
99	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	2.830.000,00	0,00	497.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
100	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	0,00	24.572.000,00	0,00	16.975.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
101	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	2.040.000,00	2.040.000,00	2.097.960.000,00	1.792.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	1.794.415.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
102	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	5.330.000,00	4.025.000,00	1.567.300.400,00	3.822.424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.630.400,00	3.826.449.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
103	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	5.030.000,00	5.915.000,00	994.970.000,00	1.892.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.898.845.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
104	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4 Unit	5.390.000,00	4.055.000,00	894.610.000,00	894.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	898.665.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
105	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	8.709.094.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	8.709.094.084,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
106	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	0,00	161.877.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.877.700,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
107	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit													
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	0,00	0,00	142.178.850,00	5.221.743.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.178.850,00	5.221.743.650,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
108	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	103 Paket	8.850.000.000,00	14.525.149.500,00	0,00	5.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000.000,00	14.530.318.300,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
109	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	348 Paket	321.000.000,00	135.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000.000,00	135.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar	100 % 100 %											
110	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	85.884.666,00	65.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.884.666,00	65.916.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14519 Orang	50.000.000,00	219.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	219.741.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
112	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	109.256.000,00	587.211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.256.000,00	587.211.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
113	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69074 Orang	136.505.000,00	75.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.505.000,00	75.879.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
114	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	74.232.000,00	38.428.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.232.000,00	38.428.499,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
115	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	83.673.000,00	32.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.673.000,00	32.965.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
116	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29 Orang	46.778.000,00	67.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.778.000,00	67.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
117	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121228 Orang	84.493.000,00	33.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.493.000,00	33.016.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
118	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36283 Orang	36.240.000,00	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240.000,00	14.130.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
119	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1368 Orang	49.980.000,00	21.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980.000,00	21.036.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
120	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11295 Orang	57.865.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.865.000,00	23.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
121	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18156 Orang	62.040.000,00	25.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.040.000,00	25.230.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
122	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	199.983.000,00	71.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.983.000,00	71.922.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
123	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	122.390.500,00	111.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.390.500,00	111.440.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
124	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	48.430.000,00	19.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.430.000,00	19.388.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
125	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	92.207.000,00	35.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.207.000,00	35.278.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
126	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000,00	560.871.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	560.871.322,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
127	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	34.262.000,00	13.704.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.262.000,00	13.704.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
128	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	69.030.000,00	76.679.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.030.000,00	76.679.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
129	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	298.293.900,00	209.702.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.293.900,00	209.702.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
130	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	42.500.000.000,00	56.242.823.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000.000,00	56.242.823.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
131	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	176 Paket	0,00	436.284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.284.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
132	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	105.301.900,00	41.927.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.301.900,00	41.927.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
133	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	2.879.633.527,00	2.381.023.426,00	785.105.127,00	825.959.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.738.654,00	3.206.983.283,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
134	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	69.595.000,00	24.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.595.000,00	24.875.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
135	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2092 Orang	49.064.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.064.000,00	19.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
136	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	115 Orang	51.489.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489.000,00	21.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
137	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	58.892.000,00	22.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.892.000,00	22.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
138	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok													
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	33.820.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820.000,00	13.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
139	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	0,00	50.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.575.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	40 Aplikasi											
140	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	155.968.000,00	132.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.968.000,00	132.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	100 % 100 %											
141	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	33 Unit	470.009.000,00	211.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.009.000,00	211.194.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	80 % 87 %											
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang Berjalan PERSENTASE IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN YANG BERJALAN	100 % 100 %											
142	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	39.695.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.695.000,00	19.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Profil SDMK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN DAN PROFIL SDMK	1 Dokumen 1 DOKUMEN											
143	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	283.398.000,00	252.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.398.000,00	252.755.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi PERSENTASE SDM KESEHATAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENINGKATAN KOPETENSI	80 % 80 %											
144	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	505 Orang	594.501.700,00	993.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.501.700,00	993.743.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	50 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik serta UMOT yang memiliki izin	90 Persentase 100 %											
145	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	33.200.000,00	104.930.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	104.930.800,00	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah tangga Persentase IRTP yang memiliki sertifikat	1 Dokumen											
146	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	64.720.000,00	36.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.720.000,00	36.296.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang mendapatkan sertifikat produksi Persentase IRTP yang memiliki sertifikat	1 Dokumen 60 %											
147	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	0,00	195.241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.241.200,00	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	" Jumlah TPM, jasa boga, rumah makan, dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene Jumlah TPM, Jasa Boga, Rumah Makan dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene "	30 Unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
148	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60 Dokumen	98.317.000,00	52.524.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.317.000,00	52.524.996,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	214.942 Keluarga											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN	3 Dokumen 3 DOKUMEN											
149	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	91.912.000,00	39.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.912.000,00	39.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 Dokumen											
150	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	87.928.000,00	41.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.928.000,00	41.539.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 % 100 %											
151	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	86.014.980,00	114.488.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.014.980,00	114.488.040,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
152	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.437.500.000,00	28.850.163.622,00	4.312.500.000,00	3.226.745.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.000.000,00	32.076.909.582,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP	100 % 10 Dokumen 12 Dokumen 13 % 29 PKM 2 Dokumen 3 RS 40 Aplikasi 4 PKM 5/1000 KH 52/100000 KH 95 % 96 % 98 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen											
153	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	2.212.500.000,00	2.230.800.000,00	287.500.000,00	287.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.518.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	33 UNIT											
154	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	22.480.000.000,00	32.667.493.470,00	2.520.000.000,00	8.202.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	40.869.743.470,00	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP	100 % 10 Dokumen 12 Dokumen 13 % 29 PKM 2 Dokumen 3 RS 40 Aplikasi 4 PKM 5/1000 KH 52/100000 KH 95 % 96 % 98 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR	100 %											
155	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	2.144.616.728,00	2.495.801.431,00	355.383.272,00	354.789.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.850.590.953,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Ngulak													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
156	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.007.905.000,00	2.762.300.847,00	280.940.000,00	530.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.845.000,00	3.293.240.847,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
157	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
158	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	0,00	57.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
159	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121717 Orang	0,00	39.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
160	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	0,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
161	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
162	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	77.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
163	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	20.843.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.843.573,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
164	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
165	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	19.467.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467.828,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
166	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	58 Orang	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
167	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	58.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
168	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	101.767.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.767.318,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
169	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
170	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
171	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
172	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	55.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
173	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Babat Toman													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit											
174	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.396.536.200,00	3.567.321.000,00	266.281.800,00	366.281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.818.000,00	3.933.602.800,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
175	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	97.471.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.471.988,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
176	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	77.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
177	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
178	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
179	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
180	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0,00	166.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.125.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
181	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
182	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0,00	32.150.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150.232,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
183	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
184	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
185	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	93.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
186	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	197.231.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.231.662,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
187	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
188	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
189	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	0,00	86.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Ulak Paceh													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit											
190	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.262.565.700,00	1.683.290.000,00	399.276.300,00	189.349.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.842.000,00	1.872.639.689,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
191	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	0,00	93.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
192	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4482 Orang	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
193	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	53 Orang	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
194	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	400 Orang	0,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
195	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	163.157.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.157.139,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
196	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
197	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
198	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	11.512.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512.880,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
199	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	53 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
200	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	50.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
201	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	94.650.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.650.233,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
202	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	13.846.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846.978,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
203	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
204	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
205	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
206	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Tanah Abang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
207	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.411.539.750,00	799.023.360,00	249.095.250,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00	867.023.360,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
208	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221 Orang	0,00	50.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
209	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1334 Orang	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
210	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
211	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	133 Orang	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
212	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	0,00	114.964.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.964.971,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - - -
213	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
214	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
215	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
216	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
217	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	0,00	35.231.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.231.897,00	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
218	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	65.012.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.012.895,00	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
219	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00	12.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
220	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	0,00	2.711.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.265,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
221	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
222	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
223	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Lubuk Bintialo													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
224	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	730.150.000,00	509.781.636,00	128.850.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.000.000,00	564.781.636,00	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
225	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	0,00	35.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
226	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14 Orang	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
227	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486 Orang	0,00	72.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
228	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
229	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	98 Orang	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
230	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18 Orang	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
231	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	408 Dokumen	0,00	133.702.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.702.236,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
232	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	216 Dokumen	0,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
233	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	162 Dokumen	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
234	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	192 Dokumen	0,00	30.014.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014.628,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
235	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
236	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	343 Dokumen	0,00	51.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
237	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1150 Dokumen	0,00	160.607.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.607.559,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
238	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
239	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
240	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	18 Orang	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
241	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	444 Dokumen	0,00	26.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
242	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	612 Dokumen	0,00	35.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
243	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	48 Dokumen	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
244	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	266 Dokumen	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
245	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	624 Dokumen	0,00	37.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.790.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Bukit Selabu													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
246	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	513.126.400,00	407.313.071,00	128.281.600,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.408.000,00	452.313.071,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
247	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	0,00	27.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
248	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1295 Orang	0,00	40.232.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.232.840,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
249	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 Orang	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
250	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	131 Orang	0,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
251	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	122.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
252	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	32.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
253	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
254	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
255	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1701 Orang	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
256	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	54.395.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.395.372,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
257	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	85.832.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.832.022,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
258	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
259	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
260	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
261	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
262	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Cinta Karya													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	33 UNIT 32 Unit											
263	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.024.835.800,00	1.027.370.540,00	176.078.200,00	176.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.914.000,00	1.203.448.740,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
264	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	0,00	32.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
265	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	314 Orang	0,00	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
266	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	0,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
267	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	257 Orang	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
268	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15 Dokumen	0,00	97.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
269	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21 Dokumen	0,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
270	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 Dokumen	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
271	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
272	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	250 Orang	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
273	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen	0,00	60.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
274	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	0,00	163.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.788.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
275	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
276	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	0,00	5.470.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.618,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
277	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
278	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	0,00	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
279	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	8.528.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528.677,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Suka Damai													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	33 UNIT 32 Unit											
280	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	862.541.600,00	881.496.846,00	215.635.400,00	215.635.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.177.000,00	1.097.132.246,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
281	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	0,00	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
282	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
283	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	0,00	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
284	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1988 Orang	0,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
285	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
286	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	230 Orang	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
287	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10740 Dokumen	0,00	132.115.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.115.024,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
288	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10740 Dokumen	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
289	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10740 Dokumen	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
290	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10740 Dokumen	0,00	137.700.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700.838,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
291	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	63 Dokumen	0,00	107.401.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.401.433,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Sido Rahayu													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
292	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	829.864.574,00	775.817.974,00	202.680.426,00	163.533.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.545.000,00	939.351.435,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
293	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang	0,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
294	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	242 Orang	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
295	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2458 Orang	0,00	72.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
296	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
297	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	0,00	20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
298	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	196 Orang	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
299	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0,00	84.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.330.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
300	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0,00	9.580.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580.611,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
301	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
302	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	87.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
303	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	78.443.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.443.388,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
304	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
305	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	2.174.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.696,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Tebing Bulang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	undefined	1 Tahun											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	undefined	1 Tahun											
306	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.058.749.300,00	1.979.127.964,00	363.308.700,00	82.433.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.058.000,00	2.061.561.457,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	undefined	undefined undefined											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang											
307	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	461 Orang	0,00	72.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
308	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3764 Orang	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
309	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
310	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	322 Orang	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
311	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0,00	143.721.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.721.474,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
312	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
313	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
314	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
315	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
316	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	48.504.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.504.799,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
317	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	94.381.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.381.819,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
318	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
319	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
320	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
321	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
322	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	undefined	1 Tahun											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	undefined	1 Tahun											
323	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	10.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Jirak													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL undefined	100 % 29 PKM 3 RS undefined undefined											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Unit											
324	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.381.756.800,00	1.443.686.800,00	22.506.200,00	181.202.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.263.000,00	1.624.889.242,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
325	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	106.363.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.363.006,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
326	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	0,00	100.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
327	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
328	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
329	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
330	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
331	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
332	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
333	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	93.756.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.756.459,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
334	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	158.152.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.152.319,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
335	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	150 Orang	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
336	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	17.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
337	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
338	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	84.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Balai Agung													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 1 unit 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Unit											
339	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.284.530.000,00	3.399.854.796,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.530.000,00	3.849.854.796,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
340	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	188.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
341	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
342	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
343	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
344	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0,00	174.088.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.088.516,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
345	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
346	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
347	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
348	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
349	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	101.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.602.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
350	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	164.158.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.158.462,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
351	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00	5.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
352	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	8.400.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.975,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
353	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
354	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
355	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
356	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	0,00	62.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Lumpatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
357	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.475.768.000,00	2.475.768.000,00	373.550.000,00	377.856.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.318.000,00	2.853.624.460,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
358	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	0,00	35.861.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.861.486,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
359	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5161 Orang	0,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
360	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
361	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
362	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	0,00	164.998.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.998.330,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
363	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 Dokumen	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
364	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
365	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	81 Dokumen	0,00	36.717.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.717.394,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
366	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7 Orang	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
367	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	0,00	74.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.198.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
368	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	0,00	161.356.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.356.259,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
369	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7 Dokumen	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
370	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
371	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	7 Dokumen	0,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
372	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	30 Dokumen	0,00	132.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
373	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen	0,00	5.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Lais													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
374	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.514.506.768,00	2.747.617.062,60	268.627.732,00	357.457.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.134.500,00	3.105.074.547,60	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
375	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	0,00	87.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.990.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
376	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	0,00	23.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
377	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang	0,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
378	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	460 Orang	0,00	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
379	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	121.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.270.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
380	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
381	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
382	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	7.911.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911.510,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
383	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1011 Orang	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
384	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	92.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.145.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
385	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	130.701.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.701.818,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
386	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
387	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	15 Orang	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
388	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
389	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
390	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
391	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
392	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Gardu Harapan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit											
393	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	792.535.500,00	738.553.591,00	139.860.000,00	81.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.395.500,00	819.618.591,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
394	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	0,00	48.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
395	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2035 Orang	0,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
396	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
397	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34 Orang	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
398	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	123.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.417.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
399	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
400	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
401	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
402	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
403	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	38.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.519.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
404	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	87.665.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.665.030,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
405	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	250 Orang	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
406	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
407	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
408	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
409	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	34.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
410	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	2.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Teluk Kijing													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
411	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.109.355.280,00	731.866.722,00	151.275.720,00	81.318.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.631.000,00	813.185.247,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
412	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang	0,00	51.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
413	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1174 Orang	0,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
414	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
415	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
416	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	121.495.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.495.008,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
417	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
418	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
419	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
420	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	190 Orang	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
421	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	84.804.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.804.882,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
422	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	110.730.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.730.592,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
423	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	8 Orang	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
424	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	25.131.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131.341,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
425	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
426	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
427	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	38.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
428	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	14.017.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017.078,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Tanjung Kerang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit											
429	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.552.361.800,00	1.488.040.910,00	156.805.000,00	156.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.166.800,00	1.644.845.910,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
430	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	116.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
431	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	42.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
432	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
433	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
434	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0,00	163.324.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.324.632,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
435	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
436	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
437	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
438	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	12.008.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008.727,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
439	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
440	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	120.322.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.322.850,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
441	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	1.554.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.573,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
442	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
443	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
444	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
445	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	0,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Sungai Lilin													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit											
446	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.647.935.700,00	2.658.079.051,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.935.700,00	2.958.079.051,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
447	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	896 Orang	0,00	41.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
448	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1650 Orang	0,00	102.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
449	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
450	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	787 Orang	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
451	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0,00	113.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.555.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
452	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
453	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0,00	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
454	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
455	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	112 Orang	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
456	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	91.684.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.684.788,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
457	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	207.576.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.576.652,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
458	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	0,00	8.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
459	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	55723 Orang	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
460	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00	16.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
461	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	0,00	5.245.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245.092,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
462	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
463	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	0,00	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
464	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	12.185.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185.237,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Sri Gunung													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	33 UNIT 32 Unit											
465	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.177.957.000,00	1.240.636.055,00	130.250.000,00	130.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.207.000,00	1.370.886.055,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
466	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	27.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
467	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
468	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
469	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
470	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0,00	86.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
471	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0,00	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
472	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
473	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
474	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	73.524.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.524.716,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
475	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	97.748.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.748.058,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
476	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
477	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
478	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
479	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0,00	36.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
480	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
481	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Karya Maju													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 100 % 29 PKM 29 PKM 3 RS 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	33 UNIT 32 Unit											
482	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.620.413.157,00	1.648.067.923,00	201.100.843,00	242.100.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.514.000,00	1.890.168.766,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
483	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	410 Orang	0,00	65.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
484	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2950 Orang	0,00	70.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
485	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
486	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	335 Orang	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
487	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0,00	153.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.954.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
488	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
489	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
490	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
491	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	39 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
492	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	0,00	42.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.071.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
493	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	0,00	84.862.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.862.881,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
494	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1290 Orang	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
495	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	8 Dokumen	0,00	24.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.056.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
496	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
497	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	8 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
498	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	8 Dokumen	0,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Mekar jaya													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
499	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	841.397.400,00	1.071.252.594,00	93.488.600,00	193.488.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.886.000,00	1.264.741.194,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
500	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337 Orang	0,00	31.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
501	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3776 Orang	0,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
502	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
503	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	566 Orang	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
504	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	144.985.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.985.067,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
505	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
506	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
507	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
508	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	375 Orang	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
509	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	78.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.190.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
510	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	117.941.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.941.640,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
511	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	415 Orang	0,00	10.852.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852.798,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
512	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	25.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
513	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
514	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
515	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	38.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Bayung Lencir													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
516	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.029.028.000,00	4.136.404.854,00	660.342.000,00	660.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.370.000,00	4.796.746.854,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
517	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	570 Orang	0,00	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
518	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13207 Orang	0,00	49.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.080.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
519	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
520	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	172 Orang	0,00	76.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
521	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	135 Orang	0,00	50.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
522	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	72 Dokumen	0,00	301.886.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.886.200,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
523	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
524	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	0,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
525	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36 Dokumen	0,00	69.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
526	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50400 Orang	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
527	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	168 Dokumen	0,00	142.773.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.773.471,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
528	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 Dokumen	0,00	219.940.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.940.866,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
529	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	0,00	11.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
530	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
531	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
532	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	0,00	4.368.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.447,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
533	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen	0,00	93.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
534	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	14.280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280.900,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Suka Jaya													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit											
535	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.253.372.516,00	832.709.355,00	219.640.484,00	80.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.013.000,00	913.559.355,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
536	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	0,00	36.341.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.341.796,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
537	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3237 Orang	0,00	63.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
538	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
539	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	0,00	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
540	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen	0,00	221.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.532.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
541	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas -
542	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	150 Dokumen	0,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
543	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
544	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	0,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
545	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	150 Dokumen	0,00	81.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.394.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
546	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	128.378.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.378.646,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
547	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	25 Orang	0,00	2.469.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.189,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
548	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00	4.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
549	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
550	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
551	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1500 Dokumen	0,00	55.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
552	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	6.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Peninggalan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
553	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	28 Unit Kerja	1.411.539.750,00	1.456.831.516,00	249.095.250,00	270.495.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00	1.727.326.766,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
554	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3005 Orang	0,00	25.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
555	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
556	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	63 Orang	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
557	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0,00	248.134.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.134.740,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
558	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
559	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0,00	31.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
560	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0,00	8.510.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510.400,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
561	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11 Orang	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
562	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	95.344.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.344.780,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
563	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	131.879.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.879.618,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
564	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
565	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
566	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
567	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	0,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
568	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Sumber Harum													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
569	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.065.623.000,00	832.274.534,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.623.000,00	957.274.534,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
570	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	0,00	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
571	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3449 Orang	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
572	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	0,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
573	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 Orang	0,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
574	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	191.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.432.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
575	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
576	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
577	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
578	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
579	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	47.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.410.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
580	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	91.016.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.016.517,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
581	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
582	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
583	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
584	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Berojaya Timur													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	100 % 1 PKM											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
585	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	912.397.500,00	942.385.893,00	101.377.500,00	284.857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.775.000,00	1.227.243.393,00	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
586	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322 Orang	0,00	24.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
587	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1771 Orang	0,00	24.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
588	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2786 Orang	0,00	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
589	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
590	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	253 Orang	0,00	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
591	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0,00	76.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.688.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
592	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
593	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
594	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0,00	28.135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.135.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
595	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3742 Orang	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
596	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	43.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
597	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	97.508.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.508.690,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
598	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	37 Orang	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
599	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
600	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
601	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
602	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	0,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
603	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Bandar Agung													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
604	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	959.859.950,00	1.274.677.896,00	169.387.050,00	169.387.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.247.000,00	1.444.064.946,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
605	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	0,00	84.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
606	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	0,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
607	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	0,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
608	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55 Orang	0,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
609	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	0,00	99.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.097.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
610	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
611	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
612	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
613	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	19 Orang	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
614	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	0,00	81.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
615	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	142.545.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.545.205,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
616	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	0,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
617	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
618	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	4.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
619	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
620	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
621	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	0,00	19.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.267.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Karang Mukti													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
622	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.556.339.000,00	1.664.945.970,00	224.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.339.000,00	1.964.945.970,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
623	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang	0,00	118.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
624	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4552 Orang	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
625	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	135 Orang	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
626	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0,00	232.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.222.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
627	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
628	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0,00	48.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
629	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	0,00	89.416.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.416.049,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
630	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	168.462.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.462.362,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
631	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
632	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	18 Dokumen	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
633	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	46 Dokumen	0,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Air Balui													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1 UNIT											
634	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	544.737.150,00	585.003.792,00	60.526.350,00	88.626.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.263.500,00	673.630.142,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
635	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	432 Orang	0,00	48.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
636	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	0,00	42.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
637	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2 Orang	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
638	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48 Orang	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
639	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	0,00	122.011.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.011.137,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
640	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
641	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	0,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
642	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	0,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
643	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
644	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	0,00	48.478.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.478.806,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
645	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	0,00	97.472.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.472.591,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
646	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	124 Orang	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
647	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	0,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
648	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
649	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
650	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4 Dokumen	0,00	43.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Perkantoran	100 %											
651	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	139.854.285.981,00	0,00	317.559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.171.845.881,00	Pendapatan dari BLUD
652	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	140.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000.000,00	0,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
653	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	5.600.359.929,00	5.632.545.505,00	4.399.640.000,00	5.918.434.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.999.929,00	11.550.980.015,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %											
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	5 Dokumen											
654	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	65.000.000,00	47.648.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	47.648.480,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
655	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	9.999.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	9.999.999,80	Pajak Daerah Pajak Daerah
656	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	54.860.667,00	27.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.860.667,00	27.712.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan											
657	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	14.364.480.153,00	16.321.623.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364.480.153,00	16.321.623.503,60	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlindunginya Kendaraan Dinas dan tersertifikasinya Aset Tanah bawah jalan	1 Dokumen											
658	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	98.614.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	98.614.614,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian dinas dan attribut lainnya serta jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	96 Orang											
659	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75.484.000,00	75.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.484.000,00	75.484.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
660	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
661	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
662	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	331.561.329,00	1.397.213.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.561.329,00	1.397.213.468,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
663	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
664	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	100.075.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.075.101,49	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
665	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	55.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
666	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	38.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.738.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
667	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
668	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	170.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis											
669	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2.989.330,00	1.494.665,00	97.010.670,00	306.903.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	308.397.865,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Terpenuhinya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	2 Dokumen 12 Bulan											
670	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.424.807.346,00	14.438.487.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424.807.346,00	14.438.487.346,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
671	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.769.413.333,00	3.361.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.413.333,00	3.361.070.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	19 Unit											
672	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	646.970.000,00	646.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.970.000,00	646.970.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
673	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	213.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.235.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
674	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	276.878.000,00	925.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.878.000,00	925.261.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
675	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	111 Unit	108.872.120,00	108.872.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.872.120,00	108.872.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	65 %											
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi, sungai dan penampung air lainnya dalam kondisi baik	65 % 65 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
676	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir													
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	9 Unit	2.085.000.000,00	1.627.753.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000.000,00	1.627.753.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
677	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	45.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	22.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
678	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai													
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	7,5 KM	300.000.000,00	289.090.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	289.090.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
679	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	5 Lembaga	565.000.000,00	225.397.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000.000,00	225.397.475,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
680	1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
681	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	5 Lembaga	450.000.000,00	282.802.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	282.802.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
682	1.03.02.2.01.0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau													
			Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Danau	350.000.000,00	346.679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	346.679.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
683	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi													
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	96.363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	96.363.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
684	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai													
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	76800 KM	3.997.010.000,00	22.590.137.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.010.000,00	22.590.137.350,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
685	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.645 KM	1.500.000.000,00	2.095.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	2.095.120.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
686	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing													
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.500 KM	400.000.000,00	3.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	3.697.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
687	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya													
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3 Unit	27.885.000,00	13.942.500,00	872.115.000,00	1.272.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	1.286.057.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
688	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	700.000.000,00	922.603.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	922.603.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
689	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya													
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	8 Unit	85.735.200,00	42.867.600,00	4.504.264.800,00	951.087.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.000.000,00	993.954.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
690	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir													
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	6 Unit	1.900.000.000,00	1.044.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	1.044.072.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
691	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	347.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	347.501.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
692	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	615.995.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	615.995.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi, sungai dan penampung air lainnya dalam kondisi baik	65 % 65 %											
693	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa													
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 KM	450.000.000,00	433.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	433.636.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
694	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	423.934.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	423.934.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	76,52 %											
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap	76,52 %											
695	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen	3.800.000.000,00	3.063.153.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	3.063.153.307,42	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
696	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	4.284.000.010,00	6.426.663.110,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000.010,00	6.726.663.110,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
697	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa													
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	100 KM	332.597.500,00	223.097.500,00	97.402.500,00	401.707.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	624.804.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
698	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan													
			Panjang Jalan yang Dibangun	1000 KM	3.660.805.000,00	1.847.693.090,00	218.495.167.894,00	403.453.725.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.155.972.894,00	405.301.418.924,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH)
699	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	10 Jembatan	1.500.000.000,00	3.436.903.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	3.436.903.880,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
700	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	10 Jembatan	1.700.000.000,00	2.217.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	2.217.230.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
701	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	524.310.000,00	278.214.500,40	39.636.699.827,00	34.665.158.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.161.009.827,00	34.943.373.131,29	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
702	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	1.350.000.000,00	1.718.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	1.718.864.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
703	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	5.000.000.000,00	5.101.816.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.101.816.526,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
704	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	30.450.000.000,00	31.358.611.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450.000.000,00	31.358.611.682,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	40 %											
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya Tenaga Konstruksi yang terampil dan bersertifikat	200 Orang											
705	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	200 Orang	750.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	200.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
706	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
707	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI													
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
708	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi													
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	40 % 40 %											
709	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1000 Paket Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
710	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82 %											
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang	82 %											
711	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang													
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	85.000.000,00	39.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	39.440.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Daerah	82 % 100 %											
712	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.845.000.000,00	3.250.167.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000.000,00	3.250.167.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
713	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang													
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 Orang	285.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000.000,00	85.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang	82 %											
714	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang													
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	4 Layanan	350.000.000,00	171.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	171.327.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
715	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang													
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
716	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	825.000.000,00	800.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000.000,00	800.401.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang	82 %											
717	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.550.000.000,00	1.062.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000.000,00	1.062.577.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
718	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	50.000.000,00	27.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	27.491.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
719	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	75.000.000,00	38.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	38.876.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
720	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR													
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	400.000.000,00	363.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	363.156.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
721	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang													
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00	89.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	89.072.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu jalan dalam kondisi baik	88,73 %											
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Lampu Jalan dalam Kondisi Baik	88.73 %											
722	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	395 Unit	416.118.000,00	220.200.800,00	7.653.882.000,00	14.245.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070.000.000,00	14.465.337.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
723	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3900 Unit	9.422.952.000,00	11.562.254.900,00	27.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000.000,00	11.562.254.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)	90 %											
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)	90 %											
724	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	60 Unit	6.495.004.600,00	16.009.280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.004.600,00	16.009.280.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
725	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	2.300.000.000,00	470.235.200,00	0,00	1.727.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	2.197.707.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	90 %											
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	90 %											
726	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)													
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	3 M³/Hari	0,00	1.778.034.200,00	0,00	1.191.061.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.095.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
727	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	42.160.000,00	9.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160.000,00	9.768.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
728	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	2 Penyelenggara	99.434.000,00	77.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.434.000,00	77.217.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
729	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja													
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	5 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
730	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	477.570.200,00	477.570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.570.200,00	477.570.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
731	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	3062 Rumah Tangga	8.842.902.712,00	16.059.346.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.902.712,00	16.059.346.300,00	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
732	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0,00	158.241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.241.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	87,83 %											
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	87,33 % 87,83 %											
733	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan													
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	99843 M	780.180.000,00	1.141.172.200,00	17.258.585.186,00	25.439.509.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038.765.186,00	26.580.681.410,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
734	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani	85 %											
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani Persentase Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani	85 % 85 %											
735	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	97 Dokumen	50.820.885.088,00	77.786.575.763,00	37.030.367.150,00	19.380.227.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.851.252.238,00	97.166.802.863,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
736	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	15 Dokumen	400.000.000,00	185.472.100,00	0,00	80.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	266.432.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani	40 %											
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangan	40 %											
737	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150 Dokumen	2.987.632.400,00	1.636.001.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.632.400,00	1.636.001.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100 %											
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
738	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.000,00	36.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	36.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
739	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
740	1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	40 Data	85.000.000,00	50.023.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	50.023.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
741	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.192.841.256,00	9.630.489.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192.841.256,00	9.630.489.745,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananyaKegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
742	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	92.295.000,00	92.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.295.000,00	92.295.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
743	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	48.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.548.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
744	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
745	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
746	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	0,00	0,00	200.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	280.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
747	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
748	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	66 Paket	200.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
749	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	110.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
750	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
751	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
752	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.000.000,00	465.436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	465.436.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
753	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0,00	1.448.332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.332.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
754	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	819.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	819.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
755	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	552.000.000,00	564.104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000.000,00	564.104.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
756	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.013.729.545,00	870.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.729.545,00	870.731.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
757	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	649.100.200,00	649.100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.100.200,00	649.100.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
758	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	139.454.000,00	139.454.000,00	105.745.150,00	2.677.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.199.150,00	2.816.894.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
759	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	67.601.120,00	117.601.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.601.120,00	117.601.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab	75 %											
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	537 Unit											
760	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	32 Unit Rumah	0,00	135.000.000,00	0,00	1.501.866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.866.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
761	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	32 Unit Rumah	460.000.000,00	250.000.000,00	4.975.523.050,00	4.612.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435.523.050,00	4.862.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksana nya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
762	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000,00	31.949.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	31.949.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %											
763	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus													
			Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	1 Unit	80.000.000,00	74.092.000,00	2.319.610.400,00	4.801.080.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.610.400,00	4.875.172.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	75 %											
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	75 %											
764	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	376 Unit Rumah	19.710.000.000,00	25.534.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710.000.000,00	25.534.904.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Yang dibangun / direhab	32 %											
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	n Persentase PSU Yang dibangun / direhab	36 %											
765	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	73 Lokasi	1.805.249.000,00	3.389.462.333,00	48.827.837.756,00	67.239.014.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.633.086.756,00	70.628.476.982,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
766	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang													
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	50.000.000,00	16.774.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	16.774.625,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	94,4 % 94.4 %											
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	94,4 % 94.4 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
767	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	11 Dokumen	285.880.000,00	4.760.000,00	9.614.120.000,00	1.106.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000.000,00	1.111.413.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
768	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
769	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
770	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.872.000,00	19.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872.000,00	19.872.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
771	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	49.934.214,00	49.934.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.934.214,00	49.934.214,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran	100 %											
772	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.009.985.878,00	7.501.912.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.985.878,00	7.501.912.693,70	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah perkantoran	100 %											
773	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	185.375.000,00	185.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.375.000,00	185.375.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %											
774	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.418.560,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.418.560,00	680.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
775	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	149.867.000,00	195.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.867.000,00	195.059.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perkantoran	100 %											
776	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.958.300,00	19.958.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.958.300,00	19.958.300,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
777	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00	1.360.000,00	148.568.678,00	313.548.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149.248.678,00	314.908.774,80	Pajak Daerah Pajak Daerah
778	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.946.458,00	39.946.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.946.458,00	39.946.458,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
779	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.991.994,00	169.987.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.991.994,00	169.987.497,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
780	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.981,00	49.840.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.981,00	49.840.490,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
781	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
782	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
783	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	150.130.000,00	212.060.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.130.000,00	212.060.432,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %											
784	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	680.000,00	680.000,00	78.248.340,00	46.949.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.928.340,00	47.629.004,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
785	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	680.000,00	680.000,00	198.640.000,00	198.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.320.000,00	199.320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Perkantoran	100 %											
786	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	302.164.790,00	334.186.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.164.790,00	334.186.790,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
787	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.006.811.111,00	2.367.301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.811.111,00	2.367.301.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %											
788	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	1.019.450.000,00	1.019.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.450.000,00	1.019.450.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
789	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	149.792.000,00	949.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.792.000,00	949.792.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
790	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	24.880.000,00	24.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.000,00	24.880.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)	100 %											
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Data Kebencanaan yang Akurat	100 %											
791	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	102.637.550,00	102.637.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.637.550,00	102.637.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Koordinasi & pengendalian, Desa Siaga Bencana dan Kesiapsiagaan Petugas	100 %											
792	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	224 Unit	53.750.000,00	89.067.750,00	1.523.157.321,00	257.857.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.907.321,00	346.924.821,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
793	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	50 Orang	234.323.000,00	99.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.323.000,00	99.323.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
794	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	22 Orang	187.660.000,00	187.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.660.000,00	187.660.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
795	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	930.623.000,00	885.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.623.000,00	885.623.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan Data Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %											
796	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas													
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	51.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
797	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	950.810.000,00	832.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.810.000,00	832.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
798	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	80 Orang	102.950.000,00	102.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.950.000,00	102.950.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
799	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80 Orang	154.954.700,00	154.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.954.700,00	154.954.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
800	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit													
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	51.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
801	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan	833.760.000,00	833.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.760.000,00	833.760.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %											
802	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana													
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
803	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	449.741.000,00	199.741.000,00	0,00	7.757.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.741.000,00	7.956.917.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil (DBH)
804	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	210.080.500,00	210.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.080.500,00	210.080.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Satuan Polisi Pamong Praja													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan sangat tepat	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
805	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	66.985.000,00	49.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.985.000,00	49.881.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
806	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	38.448.000,00	29.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.448.000,00	29.088.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
807	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	32.328.000,00	22.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.328.000,00	22.503.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
808	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	11.702.794.937,00	23.399.622.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702.794.937,00	23.399.622.621,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
809	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	121.093.250,00	116.357.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.093.250,00	116.357.250,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
810	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	132.758.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.758.900,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
811	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	93.851.000,00	73.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.851.000,00	73.903.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
812	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.397.874,00	14.858.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397.874,00	14.858.074,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
813	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.973.000,00	11.973.000,00	196.936.034,00	112.992.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.909.034,00	124.965.284,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
814	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	52.808.486,00	52.808.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.808.486,00	52.808.486,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
815	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	161.603.223,00	96.699.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.603.223,00	96.699.038,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
816	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.138.871,00	74.792.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.138.871,00	74.792.165,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
817	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
818	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.080.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080.000,00	7.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
819	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	212.042.000,00	188.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.042.000,00	188.424.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
820	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	67.350.888,00	75.765.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.350.888,00	75.765.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
821	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.935.011.111,00	5.530.909.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935.011.111,00	5.530.909.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
822	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	84.230.000,00	84.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.230.000,00	84.230.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
823	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1.121.950.000,00	1.158.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.950.000,00	1.158.870.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
824	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	94.662.862,00	89.964.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.662.862,00	89.964.862,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
825	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	680.000,00	0,00	198.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.759.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
826	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten	100 %											
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
827	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	196.500.000,00	105.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500.000,00	105.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
828	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	98.846.000,00	53.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.846.000,00	53.099.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
829	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	391 Orang	165.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.557.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
830	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	176.850.000,00	176.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.850.000,00	176.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
831	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional													
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	12 Orang	0,00	67.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.120.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
832	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	4 Orang	145.886.000,00	15.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.886.000,00	15.380.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
833	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas													
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	40 Orang	276.950.000,00	25.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.950.000,00	25.215.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
834	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	421.425.000,00	308.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.425.000,00	308.625.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
835	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	47.416.000,00	47.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.416.000,00	47.416.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
836	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah													
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	230.520.000,00	221.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.520.000,00	221.520.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
837	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	110 Unit	767.513,00	767.513,00	37.947.737,00	37.947.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.715.250,00	38.715.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %											
838	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	88.973.460,00	88.973.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.973.460,00	88.973.460,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
839	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	54.912.000,00	24.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.912.000,00	24.996.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
840	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	541.900.000,00	451.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.900.000,00	451.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1 orang setiap RT											
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %											
841	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	40 Orang	44.843.040,00	22.851.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.843.040,00	22.851.537,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %											
842	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	490.982.000,00	453.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.982.000,00	453.482.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
843	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40 Orang	68.000.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	58.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85 %											
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	100 %											
844	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	643.389.000,00	593.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.389.000,00	593.931.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
845	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	0,00	0,00	4.355.000.000,00	4.355.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.000.000,00	4.355.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %											
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100 %											
846	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	70.000.000,00	40.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.568.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
847	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	10.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.104.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
848	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	36.412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.412.700,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD	12 Bulan 100 %											
849	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	4.848.069.653,00	6.090.240.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848.069.653,00	6.090.240.819,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional yang di Asuransikan Persentase Pemenuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah	5 Unit 100 %											
850	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	36.902.500,00	36.902.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.902.500,00	36.902.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100 %											
851	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.230.000,00	34.230.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
852	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	92.250.000,00	46.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00	46.125.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
853	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	27.638.100,00	36.980.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638.100,00	36.980.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
854	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	0,00	197.490.800,00	132.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.490.800,00	132.455.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
855	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	42 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
856	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	150.000.000,00	163.140.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	163.140.624,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
857	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	73.000.000,00	62.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	62.935.000,00	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
858	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
859	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	44.389.200,00	22.194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.389.200,00	22.194.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
860	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	335.040.000,00	167.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.040.000,00	167.456.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 % 100 %											
861	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	108.692.000,00	81.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.692.000,00	81.402.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	100 %											
862	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.876.200,00	131.876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.876.200,00	131.876.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
863	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	349.077.778,00	327.209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.077.778,00	327.209.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %											
864	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	246.910.000,00	294.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.910.000,00	294.165.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
865	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	142.258.000,00	154.952.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.258.000,00	154.952.320,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
866	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	78 %											
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %											
867	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 Orang	1.815.870.270,00	1.630.010.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.870.270,00	1.630.010.270,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
868	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	334 Orang	209.887.365,00	98.731.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.887.365,00	98.731.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
869	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	24.201.000,00	13.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.201.000,00	13.475.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dokumen											
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %										
870	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	6.521.458.372,00	5.561.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521.458.372,00	5.561.440.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
871	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	150.139.000,00	88.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.139.000,00	88.222.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
872	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	151.340.000,00	102.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.340.000,00	102.755.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
873	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	365 Laporan	498.250.000,00	250.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.250.000,00	250.345.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100 %											
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %											
874	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	150.062.000,00	71.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.062.000,00	71.504.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %											
875	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125 Orang	399.937.890,00	381.819.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.937.890,00	381.819.890,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100 %											
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %											
876	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	84.250.000,00	37.859.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250.000,00	37.859.840,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
877	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	130.750.000,00	65.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750.000,00	65.312.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
878	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	185.000.000,00	95.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	95.686.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
879	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	300.000.000,00	144.497.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	144.497.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Sosial													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI	100 %											
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PD	100 %											
880	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.811.000,00	59.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.811.000,00	59.908.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
881	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	19.320.000,00	14.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320.000,00	14.429.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
882	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	26 Data	44.852.000,00	30.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.852.000,00	30.336.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN PD	100 %											
883	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	6.251.712.975,00	7.957.740.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251.712.975,00	7.957.740.069,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD	100 %											
884	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.778.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
885	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	97.543.000,00	119.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.543.000,00	119.668.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM PD	100 %											
886	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.075.000,00	27.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.075.000,00	27.075.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
887	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.331.000,00	7.651.000,00	178.690.000,00	82.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.021.000,00	90.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
888	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	40.485.200,00	40.485.200,00	19.511.000,00	19.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.996.200,00	59.996.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
889	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	177.513.750,00	88.818.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.513.750,00	88.818.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
890	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.329.675,00	93.315.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.329.675,00	93.315.675,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
891	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
892	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	49.132.500,00	49.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.132.500,00	49.132.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
893	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133 Laporan	250.004.000,00	229.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.004.000,00	229.347.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD	100 %											
894	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0,00	680.000,00	99.360.000,00	79.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.360.000,00	80.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PD	100 %											
895	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.675.440,00	124.010.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.675.440,00	124.010.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
896	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	957.854.756,00	1.116.295.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.854.756,00	1.116.295.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD	100 %											
897	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	281.330.000,00	360.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.330.000,00	360.170.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
898	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.940.000,00	715.505.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.940.000,00	715.505.238,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
899	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	69.280.000,00	69.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.280.000,00	69.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat Layanan Persentase PMKS yang mendapat Layanan	79 % 79,00 %											
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Sosial (KAT)	100 %											
900	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT													
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	175.107.000,00	49.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.107.000,00	49.582.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
901	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8 Dokumen	11.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
902	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang	378.631.000,00	105.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.631.000,00	105.045.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
903	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	9.551.495.000,00	6.443.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551.495.000,00	6.443.879.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
904	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	292 Keluarga	1.702.695.670,00	24.779.869.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.695.670,00	24.779.869.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
905	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	1.400.050.700,00	826.290.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.050.700,00	826.290.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
906	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	60.305.000,00	33.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.305.000,00	33.585.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-											
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia, Serta Gepeng di Luar	100 %											
907	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	486 Orang	1.711.924.000,00	1.471.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.924.000,00	1.471.563.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
908	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	403.292.700,00	220.415.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.292.700,00	220.415.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
909	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	76,45 %											
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %											
910	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	342.959.800,00	312.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.959.800,00	312.434.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
911	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10300 Keluarga	47.002.853.721,00	30.271.433.825,00	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.044.103.721,00	30.271.433.825,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	100 %											
912	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	367.767.000,00	304.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.767.000,00	304.180.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA	100 %											
913	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	809.948.000,00	655.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.948.000,00	655.175.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	90 %											
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	100 %											
914	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	116 Orang	0,00	4.506.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.892.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %											
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
915	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	62.360.000,00	50.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.360.000,00	50.392.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
916	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.320.000,00	14.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320.000,00	14.364.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
917	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	40.619.000,00	20.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.619.000,00	20.029.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
918	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	5.607.708.665,00	7.766.652.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607.708.665,00	7.766.652.740,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pendapatan Bagi Hasil
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
919	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	17.590.000,00	17.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590.000,00	17.590.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
920	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.164.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
921	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	112.355.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.355.000,00	56.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
922	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.963.364,00	19.963.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963.364,00	19.963.364,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
923	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	132.044.490,00	127.342.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.724.490,00	128.022.796,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
924	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.602.400,00	39.602.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.602.400,00	39.602.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
925	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	135.785.356,00	68.217.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.785.356,00	68.217.778,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
926	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.764.430,00	54.741.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.764.430,00	54.741.050,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
927	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
928	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	45.308.400,00	25.268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.308.400,00	25.268.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
929	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196.735.500,00	122.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.735.500,00	122.410.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
930	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0,00	0,00	87.104.000,00	70.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.104.000,00	70.772.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
931	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.658.568,00	250.658.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.658.568,00	250.658.568,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
932	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	478.881.333,00	417.131.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.881.333,00	417.131.333,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Umum Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
933	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	89.350.000,00	89.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.350.000,00	89.350.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
934	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	96.873.000,00	96.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873.000,00	96.873.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
935	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	25.490.000,00	25.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.490.000,00	25.490.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen											
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 % 100 %											
936	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	418.587.050,00	364.317.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.587.050,00	364.317.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	90 %											
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	100 %											
937	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	3.366.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.572.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
938	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	69.894.600,00	0,00	1.088.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.246.600,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Kab. MUBA Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %											
939	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	119.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.962.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pekerja yang ditempatkan	45,80 %											
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	100 % 100 %											
940	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50 Orang	257.679.925,00	152.769.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.679.925,00	152.769.925,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 % 100 %											
941	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online													
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	51.928.000,00	45.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.928.000,00	45.642.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
942	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	273.501.000,00	109.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.501.000,00	109.323.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
943	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja													
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	304.823.700,00	156.422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.823.700,00	156.422.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
944	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	90.102.900,00	47.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.102.900,00	47.428.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	5,4 % 56 %											
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
945	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	337.940.000,00	165.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.940.000,00	165.655.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HUbungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %											
946	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara	228.034.000,00	115.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.034.000,00	115.694.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
947	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	177.129.000,00	89.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.129.000,00	89.678.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-											
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %											
948	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	225.000.000,00	106.968.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	106.968.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
949	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi													
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	75.000.000,00	49.070.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	49.070.486,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													Dana Bagi Hasil (DBH)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %											
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	100 % 100 %											
950	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	64.931.000,00	34.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.931.000,00	34.354.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
951	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.808.000,00	9.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808.000,00	9.904.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952	2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	32.005.500,00	21.131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005.500,00	21.131.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
953	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	4.485.038.425,00	6.069.903.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.038.425,00	6.069.903.639,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Terlaksanaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (PD)	100 % 100 %											
954	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
955	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99.125.000,00	99.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.125.000,00	99.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (PD) Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %											
956	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	19.912.850,00	19.912.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912.850,00	19.912.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
957	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	0,00	809.781,00	113.494.440,00	33.787.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.494.440,00	34.597.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
958	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39 Paket	34.621.900,00	36.245.900,00	5.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130.900,00	36.245.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
959	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	124.193.110,00	124.193.110,00	1.167.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.360.275,00	124.193.110,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
960	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	95.150.899,00	95.150.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.150.899,00	95.150.899,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
961	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
962	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
963	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	222.788.000,00	159.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.788.000,00	159.822.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerrintah	100 %											
964	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	24.968.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968.340,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah pada PD	100 % 100 %											
965	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	101.665.920,00	101.665.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.665.920,00	101.665.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
966	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	298.939.644,00	292.089.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.939.644,00	292.089.644,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan DPPPA	100 % 100 %											
967	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	200.100.000,00	200.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100.000,00	200.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
968	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.101.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
969	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	32.330.000,00	32.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330.000,00	32.330.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	30 Jumlah 66,9 Indeks											
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Jumlah PD yang menerapkan PUG melalui PPRG Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Lembaga Pemerintah	100 % 100 %											
970	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	100 Orang	233.487.250,00	116.743.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.487.250,00	116.743.625,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan MeninkatnyaPemberday aan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	100 % 100 %											
971	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	185.060.000,00	92.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.060.000,00	92.530.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
972	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Organisasi	515.499.300,00	393.145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.499.300,00	393.145.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	0,011 % 100 %											
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Persentase Kekerasan terhadap Perempuan Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	100 % 100 %											
973	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 perusahaan Perangkat Daerah	63.251.246,00	40.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.251.246,00	40.552.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya layanan Perlindungan lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tersedianya [KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 % 100 %											
974	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	209.710.000,00	130.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.710.000,00	130.415.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak Tersedianya Sistem Profil Gender dan Anak Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin dan umur antara Laki laki dan perempua serta Data Terpilha Anak Perempuan dan Anak Laki laki Tersusunnya Data Gender Gender dan Anak secara terpilah tingkat Kabupaten	100 % 100 % 100 %												
975	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Dokumen	156.533.000,00	99.387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.533.000,00	99.387.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan Dunia Usaha Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA) penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Persentase Kecamatan Layak Anak	100 % 4 Jumlah 70 % 86,66 %											
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di dalam Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Persentase terbentuknya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	100 % 100 %												
976	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248.500.000,00	128.060.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500.000,00	128.060.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan upaya dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 % 100 %											
977	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kecamatan Orang	150.747.500,00	150.747.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.747.500,00	150.747.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
978	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	93.558.000,00	56.200.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.558.000,00	56.200.961,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	0,015 % 100 %											
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Persentase kekerasan terhadap anak Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Dampingan Korban bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	100 % 100 %											
979	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	7 Orang	645.563.000,00	625.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.563.000,00	625.983.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Memberikan bantuan kepada anak yang berhadapan dengan huku Persentase Menurunannya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk tindak Pidana, Perdagangan Orang dengan Fokus Pada Pencegahan, Penanganan Korban	100 % 100 %											
980	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	100% Orang	200.843.500,00	156.824.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.843.500,00	156.824.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Ketahanan Pangan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel	100 %											
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
981	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	79.098.200,00	49.597.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.098.200,00	49.597.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
982	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	38.784.600,00	20.760.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784.600,00	20.760.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
983	2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	39.089.000,00	20.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.089.000,00	20.366.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
984	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	4.973.986.531,00	6.280.357.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973.986.531,00	6.280.357.133,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %											
985	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	40.730.000,00	40.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.730.000,00	40.730.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian	100 %											
986	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
987	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	64.545.000,00	55.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.545.000,00	55.730.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %											
988	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.965.373,00	29.965.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965.373,00	29.965.373,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
989	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	120.536.010,00	165.106.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.216.010,00	165.786.506,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
990	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	57.913.584,00	57.913.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.913.584,00	57.913.584,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
991	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.839.136,00	74.903.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.839.136,00	74.903.173,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
992	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	99.999.750,00	49.976.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.750,00	49.976.350,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
993	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
994	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.994.000,00	49.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.994.000,00	49.994.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
995	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	312.613.000,00	115.529.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.613.000,00	115.529.655,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah	100 %											
996	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	680.000,00	680.000,00	97.071.720,00	59.247.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.751.720,00	59.927.350,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %											
997	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.209.000,00	86.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.209.000,00	86.733.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
998	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	542.055.556,00	490.952.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.055.556,00	490.952.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %											
999	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	163.070.000,00	163.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070.000,00	163.070.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1000	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	142.906.000,00	380.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906.000,00	380.550.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1001	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari	2.100 Kkal/ Kap/Hari											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3 Dokumen											
1002	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya													
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	72.800.000,00	33.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800.000,00	33.129.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1003	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	60 Keluarga	256.556.000,00	88.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.556.000,00	88.196.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1004	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota													
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	596.173.000,00	187.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.173.000,00	187.923.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1005	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	598.508.700,00	115.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.508.700,00	115.031.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1006	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota													
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4 Unit	265.790.200,00	232.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.790.200,00	232.226.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1007	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota													
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67.679.545,00	33.912.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.679.545,00	33.912.996,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1008	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan													
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan	15 Dokumen	62.960.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.960.000,00	21.155.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1009	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)													
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	47.983.843,00	23.108.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.983.843,00	23.108.196,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten	17,5 Ton											
1010	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	139.380.000,00	139.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.380.000,00	139.380.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1011	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	20 Ton	46.405.000,00	54.837.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.405.000,00	56.377.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-											
1012	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	136.964.450,00	47.341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.964.450,00	47.341.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1013	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1.450.163.000,00	1.173.917.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.163.000,00	1.173.917.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)	21 %											
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen											
1014	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	81.902.388,00	40.987.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.902.388,00	40.987.545,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	93 %											
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diawasi	25 item											
1015	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.998.000,00	44.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.998.000,00	44.825.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1016	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan													
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	66.450.900,00	26.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.450.900,00	26.991.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1017	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	149.652.019,00	91.911.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.652.019,00	91.911.019,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1018	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.988.000,00	22.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.988.000,00	22.494.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1019	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	8.688.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.688.762,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1020	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	65.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan											
1021	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	9.914.222.744,00	11.235.623.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914.222.744,00	11.235.623.328,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
1022	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	49.917.250,00	99.116.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.917.250,00	99.116.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											
1023	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.614.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1024	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	99.858.000,00	38.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.858.000,00	38.256.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %											
1025	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.998.873,00	29.998.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998.873,00	29.998.873,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1026	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	5.200.000,00	199.826.300,00	489.385.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.826.300,00	494.585.900,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1027	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	59.992.272,00	59.992.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.992.272,00	59.992.272,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1028	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	199.997.942,00	99.998.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.997.942,00	99.998.972,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1029	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	110.000.000,00	54.716.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	54.716.561,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1030	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1031	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1032	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	152.385.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	152.385.996,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %											
1033	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	60.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1034	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	440.067.252,00	442.467.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.067.252,00	442.467.252,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1035	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.475.537.911,00	25.163.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475.537.911,00	25.163.425.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1036	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	263.240.000,00	263.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.240.000,00	263.240.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1037	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	137.234.000,00	266.054.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.234.000,00	266.054.559,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1038	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	69.119.700,00	172.047.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.119.700,00	172.047.306,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100 %											
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen											
1039	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	800.000.000,00	397.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	397.795.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	66.29 indeks											
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	66.29 Indeks											
1040	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	125.082.000,00	62.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.082.000,00	62.648.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1041	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota													
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	175.486.750,00	70.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.486.750,00	70.938.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1042	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah													
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen	99.983.000,00	49.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.983.000,00	49.023.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1043	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan													
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	204 Paket	345.360.000,00	204.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.360.000,00	204.786.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1044	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	99.986.000,00	51.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.986.000,00	51.798.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1045	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	850 Dokumen	538.750.774,00	465.801.174,00	165.767.400,00	142.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.518.174,00	608.658.174,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-											
1046	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	32.048.000,00	12.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.048.000,00	12.842.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-											
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-											
1047	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275,94 Ha	2.080.000.000,00	1.658.172.000,00	400.000.000,00	498.113.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000.000,00	2.156.285.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1048	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	680.000,00	340.000,00	1.451.320.000,00	1.451.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000.000,00	1.451.660.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100 %											
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100 %											
1049	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	124.998.000,00	62.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.998.000,00	62.369.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1050	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	24 Badan Usaha	128.737.000,00	65.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.737.000,00	65.054.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1051	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	99.937.000,00	49.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.937.000,00	49.711.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-											
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadila	100 %											
1052	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	26 Pengaduan	171.952.000,00	84.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.952.000,00	84.114.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan sampah	100 %											
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	100 %											
1053	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	90 Kelompok	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1054	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	5.050.939.287,00	5.620.243.903,00	3.412.802.150,00	3.287.800.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463.741.437,00	8.908.044.153,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1055	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1056	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	21516 Ton	1.536.651.200,00	1.421.055.700,00	13.348.800,00	2.764.514.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000.000,00	4.185.570.575,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 15 Dokumen											
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[deleted] Jumlah Capaian Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen 100 %											
1057	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.000.000,00	37.897.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	37.897.378,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1058	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1059	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan											
1060	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.985.404.269,00	10.598.617.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985.404.269,00	10.598.617.187,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Diklat PIM dan Bimtek-Bimtek terhadap SDM	100 %											
1061	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	37.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1062	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	97.386.000,00	97.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.386.000,00	97.386.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan											
1063	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1064	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	199.953.000,00	119.971.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.953.000,00	119.971.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1065	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33.555.360,00	60.000.000,00	26.444.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1066	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1067	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	141.873.000,00	70.936.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.873.000,00	70.936.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1068	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1069	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1070	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000,00	249.933.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	249.933.160,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %											
1071	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	400.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1072	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	368.085.029,00	488.127.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.085.029,00	488.127.779,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1073	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.224.744.444,00	1.228.064.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.744.444,00	1.228.064.444,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1074	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	207.610.000,00	207.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.610.000,00	207.610.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1075	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	99.930.600,00	99.930.600,00	2.250.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.930.600,00	2.249.930.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1076	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	80.008.800,00	80.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.008.800,00	80.008.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-											
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-											
1077	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1090 Dokumen	100.000.000,00	34.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	34.365.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1078	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	43000 Dokumen	235.000.000,00	203.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	203.778.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1079	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	300 Orang	93.363.500,00	47.839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.363.500,00	47.839.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1080	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	48000 Dokumen	65.000.000,00	40.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	40.004.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1081	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6000 Dokumen	226.315.419,00	126.715.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.315.419,00	126.715.419,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-											
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-											
1082	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17426 Dokumen	260.000.000,00	163.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	163.297.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-											
1083	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	163.029.402,00	91.844.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.029.402,00	91.844.402,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-											
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-											
1084	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	28 Dokumen	84.000.000,00	38.377.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	38.377.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1085	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25 Dokumen	160.144.701,00	160.144.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.144.701,00	160.144.701,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 bulan											
1086	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	1.602.394.436,00	1.573.873.426,00	2.768.507.025,00	2.912.466.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.901.461,00	4.486.339.681,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-											
1087	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	669.998.631,00	358.448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.998.631,00	358.448.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1088	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	53.417.847,00	26.708.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.417.847,00	26.708.923,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1089	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	154.315.995,00	4.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.315.995,00	4.361.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1090	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	161.504.510,00	80.752.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.504.510,00	80.752.255,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1091	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan													
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	15 Dokumen	114.996.688,00	57.270.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.996.688,00	57.270.454,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 bulan											
1092	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	91.559.690,00	45.869.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.559.690,00	45.869.845,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1093	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	352.693.000,00	298.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.693.000,00	298.933.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %											
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	12 bulan											
1094	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain													
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	108.176.708,00	51.919.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.176.708,00	51.919.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %											
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
1095	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.000.000,00	68.834.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	68.834.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1096	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	22.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	11 Data	35.000.000,00	31.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	31.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1098	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.919.344.180,00	6.102.962.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919.344.180,00	6.102.962.376,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %											
1099	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	43.925.000,00	43.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925.000,00	43.925.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
1100	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	33.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1101	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.250.000,00	99.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum	100 %											
1102	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.787.628,00	29.787.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.787.628,00	29.787.628,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1103	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00	680.000,00	181.404.525,00	171.890.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.084.525,00	172.570.715,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1104	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.004.582,00	60.004.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.004.582,00	60.004.582,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1105	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.999.135,00	168.738.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.135,00	168.738.213,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1106	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	104.925.830,00	102.531.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.925.830,00	102.531.541,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1107	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1108	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.986.000,00	49.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986.000,00	49.986.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1109	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.969.000,00	249.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.969.000,00	249.375.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	100 %											
1110	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	131.246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.246.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1111	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	680.000,00	680.000,00	99.936.630,00	73.296.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.616.630,00	73.976.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoraan	100 %											
1112	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176.571.396,00	176.571.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.571.396,00	176.571.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1113	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	509.856.267,00	573.149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.856.267,00	573.149.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur Berfungsi dengan baik	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1114	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	241.910.000,00	318.339.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.910.000,00	318.339.570,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1115	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91.025.000,00	91.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.025.000,00	91.025.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1116	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	30.888.500,00	30.888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888.500,00	30.888.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	8 Desa											
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terpenuhinya Kerjasama antar desa Terpenuhinya Kerjasama antar Desa	8 Desa 8 Desa											
1117	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	80.000.000,00	53.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	53.747.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1118	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	58.223.000,00	43.893.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.223.000,00	43.893.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	80 %											
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa	80 % 80 %											
1119	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	145.701.198,00	145.701.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.701.198,00	145.701.198,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1120	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	65 Dokumen	323.939.250,00	251.788.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.939.250,00	251.788.075,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1121	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	196.159.740,00	143.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.159.740,00	143.434.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1122	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2972 Orang	5.061.078.240,00	5.161.078.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061.078.240,00	5.161.078.240,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1123	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	229 Dokumen	49.952.000,00	39.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.952.000,00	39.952.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1124	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	229 Dokumen	180.035.334,00	152.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.035.334,00	152.094.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1125	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	2.706.316.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.316.944,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1126	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	229 Dokumen	80.597.000,00	52.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.597.000,00	52.675.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1127	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	100.089.980,00	55.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.089.980,00	55.464.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1128	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	3 Desa	114.380.600,00	55.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.380.600,00	55.464.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1129	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15 Dokumen	124.810.000,00	96.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.810.000,00	96.888.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina	100 % 150 Keluarga 15 Lembaga											
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	100 %												
1130	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	1.066.366.250,00	1.046.484.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.366.250,00	1.046.484.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1131	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	49.999.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.427,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1132	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	174.999.850,00	117.581.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.999.850,00	117.581.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1133	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	208.872.000,00	152.736.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.872.000,00	152.736.225,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1134	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	599.972.047,00	482.682.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.972.047,00	482.682.858,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1135	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	129.999.800,00	91.272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999.800,00	91.272.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1136	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	15 Dokumen	47.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.571.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1137	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	1.178.507.025,00	926.689.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.507.025,00	926.689.817,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1138	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	49.985.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.985.700,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1139	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45 Keluarga	49.999.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.675,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Yang Dilaksanakan Sangat Tepat	100 %											
1140	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.000,00	41.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	41.105.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1141	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1142	2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	38.713.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.713.950,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1143	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.198.999.495,00	9.617.299.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198.999.495,00	9.617.299.460,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada DPPKB Kab. Muba	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1144	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	104.842.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.842.400,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1145	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	88.355.691,00	61.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.355.691,00	61.677.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran (100%)	100 %											
1146	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.952.255,00	29.952.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952.255,00	29.952.255,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1147	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	198.496.210,00	119.097.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.176.210,00	119.777.726,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1148	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.996.200,00	49.996.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996.200,00	49.996.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1149	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.980.343,00	100.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.980.343,00	100.680.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1150	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	84.345.625,00	42.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.345.625,00	42.173.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1151	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1152	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	49.922.500,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.922.500,00	25.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1153	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	237.381.000,00	167.274.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.381.000,00	167.274.796,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 %											
1154	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	638.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.880.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1155	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	680.000,00	680.000,00	97.012.000,00	58.207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.692.000,00	58.887.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1156	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1157	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	223.182.825,00	223.182.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.182.825,00	223.182.825,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1158	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	297.546.600,00	346.628.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.546.600,00	346.628.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1159	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	224.070.000,00	224.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.070.000,00	224.070.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1160	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	63.554.000,00	63.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.554.000,00	63.554.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1161	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Jumlah peta persebaran penggunaan alat kontrasepsi Persentase stakeholder yang memahami kajian dampak kependudukan.	2,23 % 93 % 94 %											
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	93 %											
1162	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal													
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	6 Kegiatan	66.469.867,00	31.141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.469.867,00	31.141.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1163	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1164	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	99.338.000,00	72.309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.338.000,00	72.309.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1165	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	0,00	235.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.080.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1166	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-											
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	90,50 %											
1167	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana													
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Unit	156.966.000,00	85.233.000,00	87.017.000,00	87.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.983.000,00	172.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1168	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	0,00	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1169	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	73.466.000,00	335.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.466.000,00	335.483.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Dana Bagi Hasil (DBH)
1170	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1171	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1172	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20 Organisasi	0,00	85.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	94 %											
1173	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	972 Orang	0,00	1.944.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1174	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	133.116.200,00	64.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.116.200,00	64.978.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten / Kota	98 %											
1175	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	84.395.000,00	67.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.395.000,00	67.618.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1176	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3008 Orang	0,00	1.078.620.000,00	0,00	1.498.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.620.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
1177	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	75 Unit	46.020.000,00	40.246.000,00	729.476.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.496.800,00	40.246.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1178	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	375 Orang	124.011.000,00	62.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.011.000,00	62.005.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1179	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	139.784.498,00	64.342.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.784.498,00	64.342.249,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Dana Bagi Hasil (DBH)
1180	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	138.182.700,00	82.591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.182.700,00	82.591.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pembinaan Kesertan Ber-KB	85 %											
1181	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	70.523.600,00	42.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.523.600,00	42.011.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1182	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	84.150.000,00	42.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.150.000,00	42.073.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1183	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah DASHAT di Kampung KB	15 Unit	0,00	136.274.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.274.997,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1184	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kampung	49.291.203,00	874.566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.291.203,00	874.566.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina Cakupan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat Yang di Bina	85 % 94 % 95,07 %											
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	95,07 %											
1185	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	0,00	134.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
1186	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	176.285.000,00	90.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.285.000,00	90.006.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1187	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	154 Unit	160.842.320,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842.320,00	130.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Bagi Hasil (DBH)
1188	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	350 Orang	154.528.000,00	77.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.528.000,00	77.264.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	94 %											
1189	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	0,00	1.305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1190	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	0,00	1.566.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
		Dinas Perhubungan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah	100 %											
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen											
1191	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	63.000.150,00	47.445.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.150,00	47.445.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1192	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1193	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	46.999.850,00	6.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.999.850,00	6.912.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 Orang											
1194	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.708.891.232,00	8.358.875.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708.891.232,00	8.358.875.877,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik SKPD	1 Dokumen											
1195	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	70.135.750,00	68.734.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.135.750,00	68.734.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian	2 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1196	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	9 Dokumen											
1197	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1198	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.372.994,00	3.197.967,00	144.627.006,00	85.078.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	88.276.203,60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1199	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.139.200,00	40.000.000,00	5.860.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1200	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	83.795.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	83.795.474,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1201	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	42.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1202	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1203	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1204	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	150.000.000,00	194.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	194.738.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik SKPD	2 Dokumen											
1205	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1206	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	5.160.620,00	0,00	41.548.188,00	24.928.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.708.808,00	24.928.912,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen enyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD	24 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1207	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	254.729.655,00	279.577.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.729.655,00	279.577.563,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1208	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.715.660.000,00	1.885.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.660.000,00	1.885.178.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik SKPD	3 Dokumen											
1209	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	1.809.265.000,00	1.704.427.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.265.000,00	1.704.427.146,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1210	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	205.919.192,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.919.192,00	190.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1211	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	97 %											
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manjemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Dokumen											
1212	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	509.270.000,00	455.315.000,00	1.265.533.200,00	1.265.533.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.803.200,00	1.720.848.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1213	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	449.634.000,00	425.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.634.000,00	425.897.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pengelolaan Fasilitas Parkir	1 Dokumen											
1214	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	9.915.300,00	3.724.050,00	5.089.350,00	2.689.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004.650,00	6.413.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Dokumen											
1215	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Orang	45.116.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.116.000,00	7.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1216	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	28.084.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084.000,00	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1217	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji													
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5 Laporan	15.190.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190.000,00	3.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1218	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	183.549.000,00	238.070.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.549.000,00	238.070.161,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1219	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	40.244.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.244.000,00	4.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-											
1220	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	284.148.045,00	157.074.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.148.045,00	157.074.023,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1221	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	120.608.000,00	59.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.608.000,00	59.194.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1222	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	4.620.000,00	4.100.000,00	95.460.000,00	95.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.080.000,00	99.560.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1223	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 Laporan	800.859.178,00	731.584.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.859.178,00	731.584.678,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Dokumen											
1224	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	316.398.041,00	161.308.720,00	3.442.378,00	3.442.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.840.419,00	164.751.098,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik	89 %											
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan dan Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen											
1225	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	91.014.000,00	45.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.014.000,00	45.507.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabauhan Sungai dan Danau persentase sarana prasarana pelayaran dalam kondisi baik	4 Dokumen 100 %											
1226	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau													
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	60.402.000,00	30.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.402.000,00	30.201.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1227	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau													
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Unit	645.666.050,00	535.253.054,00	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.426.050,00	553.013.054,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1228	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau													
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	1.649.799.000,00	213.719.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.799.000,00	213.719.499,60	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1229	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan													
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	176 Unit	54.495.000,00	41.947.500,00	181.041.000,00	143.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.536.000,00	185.137.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik	87 %											
	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara	1 Dokumen											
1230	2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter													
			Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	88.860.000,00	48.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.860.000,00	48.020.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Komunikasi dan Informatika													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %											
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem perencanaan dan evaluasi kinerja berjalan dengan baik Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik	10 laporan 10 Laporan											
1231	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	51.720.000,00	25.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.720.000,00	25.860.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1232	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	33.120.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120.000,00	16.560.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1233	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	50.003.000,00	25.001.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	25.001.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran Terlaksananya kelancaran Administrasi Perkantoran	100 % 100 %											
1234	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.452.246.736,00	7.688.530.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.246.736,00	7.688.530.587,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dinas Meningkaynya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas	100 % 100 %											
1235	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.824.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.824.140,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1236	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	94.855.000,00	94.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.855.000,00	94.855.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1237	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.427,00	30.000.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.427,00	30.000.427,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1238	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	200.816.649,00	120.489.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200.816.649,00	120.489.989,40	Pajak Daerah Pajak Daerah
1239	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.998.117,00	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.998.117,00	112.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1240	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	109.252.473,00	54.626.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.252.473,00	54.626.236,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
1241	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	49.950.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1242	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1243	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.051.000,00	215.350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.051.000,00	215.350.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan mebeleur penunjang kenyamanan kerja Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja	10 unit 10 unit											
1244	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	78.531.390,00	47.118.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.531.390,00	47.118.834,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	1 laporan 1 Laporan											
1245	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	407.931.948,00	427.357.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.931.948,00	427.357.460,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1246	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.287.566.489,00	1.092.069.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.566.489,00	1.092.069.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang kenyamanan bekerja	67 unit											
1247	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	331.230.000,00	341.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.230.000,00	341.230.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1248	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	123.711.250,00	123.711.250,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.711.250,00	323.711.250,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1249	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64 Unit	54.240.000,00	54.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.240.000,00	54.240.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100 %											
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik pemerintah kab. muba yang menyampaikan informasi kepada masyarakat Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Muba yang menyampaikan Informasi Kepada masyarakat	150 media 160 Media											
1250	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 Komunitas	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1251	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik													
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	333.924.500,00	166.962.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.924.500,00	166.962.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1252	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1253	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	583.312.000,00	643.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.312.000,00	643.829.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1254	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	150 Media	5.557.000.000,00	5.957.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557.000.000,00	5.957.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1255	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik													
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	200 Dokumen	882.140.293,00	443.104.000,00	150.753.207,00	88.418.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.893.500,00	531.522.070,70	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1256	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten													
			Jumlah Konten Informasi Publik	3 Konten	845.014.002,00	660.222.309,50	388.328.740,00	244.480.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.342.742,00	904.703.109,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	75 %											
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pelayanan pemerintah dan masyarakat melalui teknologi informatika Terlaksananya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika	100 % 100 %											
1257	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah													
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	507.218.760,00	253.609.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.218.760,00	253.609.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1258	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	48 Perangkat Daerah	6.056.657.019,00	11.427.912.779,50	257.217.303,00	154.330.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.874.322,00	11.582.243.161,30	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1259	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas													
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	18 Program	242.616.000,00	121.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.616.000,00	121.308.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-											
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakai kan	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1260	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral													
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	162.530.017,00	79.714.305,30	119.204.758,00	171.233.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.734.775,00	250.947.863,30	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1261	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional													
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	604.073.000,00	327.036.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.073.000,00	327.036.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1262	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia													
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	310.308.000,00	154.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.308.000,00	154.814.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1263	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar													
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	67.102.000,00	33.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.102.000,00	33.211.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100 %											
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemkab muba Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba	100 % 100 %											
1264	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	430.000.000,00	380.678.500,00	0,00	8.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	389.678.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1265	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	456.800.401,00	825.480.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.800.401,00	825.480.200,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1266	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	48 Perangkat Daerah	333.135.505,00	40.068.960,50	62.664.495,00	297.502.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.800.000,00	337.571.907,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98 %											
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %											
1267	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	57.532.000,00	37.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.532.000,00	37.370.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1268	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.440.000,00	6.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440.000,00	6.590.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1269	2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	35.000.000,00	18.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	18.366.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	36 Orang											
1270	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	4.352.480.321,00	5.473.626.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.480.321,00	5.473.626.142,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang mengikuti Diklat PIm IV dan III serta mengikuti pendidikan dan Pelatihan / Bimtek	18 Orang											
1271	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.024.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1272	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	100.000.000,00	86.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	86.274.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi	100 %											
1273	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1274	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	0,00	150.000.000,00	147.885.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	147.885.900,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1275	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1276	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	77.109.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	77.109.625,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1277	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82.957.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.957.000,00	41.400.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1278	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1279	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00	27.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	27.040.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1280	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	163.027.000,00	83.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.027.000,00	83.856.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang	100 %											
1281	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	354.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.720.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1282	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	75.000.000,00	69.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	69.469.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1283	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	120.370.268,00	131.107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.370.268,00	131.107.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1284	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	376.266.666,00	392.788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.266.666,00	392.788.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %											
1285	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	113.210.000,00	113.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.210.000,00	113.210.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1286	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	49.987.400,00	49.987.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.987.400,00	49.987.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1287	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	33.140.000,00	33.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140.000,00	33.140.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi aktif	120 Koperasi											
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	120 koperasi											
1288	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	312 Unit Usaha	299.840.000,00	142.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.840.000,00	142.255.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1289	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Unit Usaha	153.863.800,00	76.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.863.800,00	76.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi sehat	80 Koperasi											
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP serta UKM berprestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Kota	80 koperasi											
1290	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	75 Unit Usaha	300.000.000,00	247.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	247.357.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya	7 Koperasi											
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi	7 koperasi											
1291	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	350.000.000,00	173.292.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	173.292.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing	10 Koperasi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 koperasi											
1292	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	242 Unit Usaha	0,00	605.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1293	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	60 Unit Usaha	450.000.000,00	224.699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	224.699.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMK yang berdaya saing	400 UMK											
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terpenuhinya Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan , penguatan kelembagaan dan koordinasi	400 UMK											
1294	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	3200 Unit Usaha	199.999.800,00	160.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.800,00	160.735.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1295	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit Usaha	150.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1296	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil													
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	100 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1297	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	260 Unit Usaha	160.000.000,00	139.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	139.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1298	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	3000 Unit Usaha	159.199.800,00	122.799.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.199.800,00	122.799.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1299	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90 Orang	173.000.000,00	259.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000.000,00	259.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	25 UMK											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terpenuhinya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	25 UMK											
1300	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 Unit Usaha	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1301	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	536 Unit Usaha	3.368.179.850,00	7.278.631.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.179.850,00	7.278.631.425,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %											
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1302	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	64.999.764,00	38.499.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999.764,00	38.499.882,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1303	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	19.999.758,00	9.999.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.758,00	9.999.879,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1304	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	43.373.488,00	21.686.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.373.488,00	21.686.744,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah Persentase adminitrasi keuangan perangkat Daerah	100 % 100 %											
1305	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	9.507.763.187,00	10.508.528.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507.763.187,00	10.508.528.008,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
1306	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	47.417.000,00	47.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.417.000,00	47.417.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 % 100 %											
1307	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	63.643.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.643.640,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1308	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	97.784.000,00	77.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.784.000,00	77.892.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 % 100 %											
1309	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.969.087,00	64.629.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.969.087,00	64.629.087,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1310	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.416.000,00	2.708.000,00	2.185.571.821,00	3.041.190.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.987.821,00	3.043.898.821,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1311	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	99.999.789,00	75.075.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.789,00	75.075.516,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1312	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	249.998.364,00	124.999.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.998.364,00	124.999.182,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1313	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	134.999.491,00	67.499.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.999.491,00	67.499.745,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
1314	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1315	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	94.310.000,00	47.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.310.000,00	47.155.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1316	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	199.977.000,00	99.988.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.977.000,00	99.988.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1317	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	4.322.000,00	2.161.000,00	270.147.510,00	270.147.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.469.510,00	272.308.510,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %											
1318	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	814.705.146,00	683.630.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.705.146,00	683.630.418,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1319	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	513.866.667,00	872.401.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.866.667,00	872.401.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 %											
1320	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	325.990.000,00	325.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.990.000,00	325.990.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1321	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	227.556.000,00	227.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.556.000,00	227.216.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1322	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	213.187.200,00	213.187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.187.200,00	213.187.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-											
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dipenanaman modal	100 %											
1323	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	132.904.500,00	30.452.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.904.500,00	30.452.250,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1324	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	28 Dokumen	73.072.000,00	40.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.072.000,00	40.153.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1325	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko													
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen	67.841.000,00	33.920.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.841.000,00	33.920.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-											
1326	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	239.488.000,00	135.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.488.000,00	135.140.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Minat Investasi	80 %											
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal Presntase Peningkatan Minat Investasi	100 % 80 %											
1327	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	624.739.000,00	395.431.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.739.000,00	395.431.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan	2600 Jumlah 87 % 88,76 Nilai											
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	2600 Izin dan Non Izin 88,76 Nilai 87 % 100 %												
1328	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	153.766.250,00	76.883.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.766.250,00	76.883.125,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1329	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.600 Pelaku Usaha	364.526.500,00	307.263.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.526.500,00	307.263.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1330	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13 Pelaku Usaha	111.581.700,00	55.790.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.581.700,00	55.790.850,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1331	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	4 Kegiatan Usaha	1.003.292.600,00	689.646.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.292.600,00	689.646.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi investasi PMDN Nilai Realisasi investasi PMA	1,7 T Rupiah 2,2 T Rupiah											
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi investasi PMA Nilai Realisasi investasi PMDN Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2,2 T 1,7 T 100 %											
1332	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	160.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	80.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1333	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	90.000.000,00	42.189.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	42.189.959,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1334	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 Kegiatan Usaha	170.000.000,00	84.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	84.739.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	3 Dok Dokumen 3 Dokumen											
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Persentase kesediaan data dan informasi	3 Dokumen 100 %											
1335	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	119.604.000,00	59.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.604.000,00	59.802.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %											
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang disampaikan tepat waktu	4 Dokumen											
1336	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	64.806.000,00	40.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.806.000,00	40.738.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1337	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19.880.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880.000,00	9.940.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1338	2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	49.819.000,00	24.909.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.819.000,00	24.909.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bulan											
1339	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	7.052.807.310,00	9.423.530.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052.807.310,00	9.423.530.076,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
1340	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	52.728.750,00	52.728.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.728.750,00	52.728.750,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah, Meningkatnya Pelayanan	undefined undefined											
1341	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.098.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1342	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	94.386.000,00	94.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.386.000,00	94.386.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah, Meningkatnya Pelayanan	100 %											
1343	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.999.900,00	29.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999.900,00	29.999.900,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1344	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	198.211.600,00	200.052.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.211.600,00	200.052.960,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1345	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	44.935.400,00	44.935.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.935.400,00	44.935.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1346	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.999.620,00	99.999.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.620,00	99.999.810,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1347	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	109.999.150,00	158.282.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999.150,00	158.282.275,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1348	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1349	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1350	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.996.000,00	99.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.996.000,00	99.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaaan barang milik daerah Penyediaan barang milik daerah	100 % 100 %											
1351	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	34.219.080,00	20.531.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.219.080,00	20.531.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang kantor	12 bulan											
1352	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.703.756.472,00	1.703.756.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.756.472,00	1.703.756.472,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1353	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.137.888.889,00	2.898.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.888.889,00	2.898.864.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1354	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	328.560.000,00	328.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.560.000,00	328.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1355	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	176.746.000,00	171.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.746.000,00	171.104.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1356	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	36,79 %											
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-											
1357	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota													
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	305 Orang	622.485.000,00	543.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.485.000,00	543.713.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1358	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	200 Orang	233.216.500,00	107.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.216.500,00	107.530.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1359	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota													
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	75 Orang	207.637.000,00	15.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.637.000,00	15.907.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi yang mendapatkan pembinaan	20 Organisasi											
1360	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	20 Organisasi	614.690.000,00	237.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.690.000,00	237.526.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	0,30 Unit / 1000 penduduk 18,95 %											
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Termanfaatkan	100 %											
1361	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	27 Unit	13.200.843.923,00	19.305.229.023,00	14.178.122.900,00	24.974.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.378.966.823,00	44.279.669.523,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang ditandingkan/ diikuti	40 Cabor											
1362	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	12.305.150.399,00	12.405.150.399,00	190.350.000,00	190.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495.500.399,00	12.595.500.399,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1363	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga													
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	145 Orang	606.710.000,00	606.710.000,00	99.797.500,00	99.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.507.500,00	706.507.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	19 Cabor											
1364	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah													
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	70.006.000,00	51.103.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.006.000,00	51.103.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1365	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota													
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	248 Orang	10.972.168.250,00	11.066.078.250,00	386.755.000,00	55.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358.923.250,00	11.121.548.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Kerjasama Organisasi Olahraga	2 Organisasi											
1366	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota													
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	27.061.098.300,00	28.481.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.061.098.300,00	28.481.098.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1367	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kejuaraan/ Kegiatan yang dilaksanakan	5 Event											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1368	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	274.207.960,00	154.292.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.207.960,00	154.292.960,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1369	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan													
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Laporan	1.195.199.879,00	1.102.581.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.199.879,00	1.102.581.879,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1370	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	5 Dokumen	147.410.000,00	140.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.410.000,00	140.955.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	30,52 %											
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	30,52 % 30.52 %											
1371	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	103.670.500,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.670.500,00	31.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1372	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1373	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	245.062.000,00	214.081.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.062.000,00	214.081.020,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1374	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	386.424.890,00	236.493.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.424.890,00	236.493.530,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1375	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	16 Unit	199.997.600,00	199.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.997.600,00	199.997.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek wisata	69 Unit											
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	terlaksananya event-event pariwisata daerah Terlaksanya Event-event pariwisata daerah	6 Event 6 Event											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1376	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	5 Lokasi	1.319.020.000,00	1.107.555.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.020.000,00	1.307.555.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah pelaku usaha pariwisata	38.408 Orang 459 Orang											
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	42.184 Orang 42184 Orang											
1377	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	1.729.791.600,00	2.148.770.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.791.600,00	2.148.770.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku usaha pariwisata	459 Orang											
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang											
1378	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	328.039.250,00	123.364.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.039.250,00	123.364.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan											
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD	12 Bulan											
1379	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	64.915.165,00	50.866.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.915.165,00	50.866.915,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1380	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	19.997.700,00	5.008.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997.700,00	5.008.302,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
1381	2.23.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	49.991.633,00	9.108.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.991.633,00	9.108.010,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	lancarnya administrasi keuangan PD	12 Bulan											
1382	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	5.572.257.252,00	7.476.594.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572.257.252,00	7.476.594.326,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	lancarnya administrasi kepegawaian PD	12 Bulan											
1383	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1384	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	lancarnya administrasi umum PD	12 Bulan											
1385	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	59.994.835,00	59.994.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.994.835,00	59.994.835,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1386	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.554.929,00	9.955.424,00	128.419.896,00	76.678.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.974.825,00	86.634.113,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1387	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	59.992.503,00	59.992.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.992.503,00	59.992.503,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1388	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	199.998.249,00	96.907.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.998.249,00	96.907.891,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
1389	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	109.961.651,00	54.972.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.961.651,00	54.972.750,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1390	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1391	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1392	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.055.030,00	47.055.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055.030,00	47.055.030,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1393	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.993.000,00	101.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.993.000,00	101.454.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik daerah	12 Bulan											
1394	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	482.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1395	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	0,00	0,00	24.247.100,00	12.412.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.247.100,00	12.412.100,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan											
1396	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183.476.250,00	188.170.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.476.250,00	188.170.650,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1397	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	397.838.400,00	376.421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.838.400,00	376.421.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	12 Bulan											
1398	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	243.410.000,00	243.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.410.000,00	243.410.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1399	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	266.925.000,00	266.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.925.000,00	266.925.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1400	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	48.410.000,00	48.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.410.000,00	48.410.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,5 % 9 %											
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolahnya Perpustakaan di wilayah Kab. Muba Terkelolahnya Perpustakaan di wilayah Kab. Muba	15 kecamatan 15 Kecamatan											
1401	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	33 Perpustakaan	98.889.000,00	31.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889.000,00	31.021.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1402	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan													
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	40 Dokumen	47.007.828,00	24.477.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.007.828,00	24.477.828,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1403	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4500 Eksemplar	230.050.226,00	165.063.226,00	181.263.460,00	181.263.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.313.686,00	346.326.686,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1404	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Eksemplar	68.363.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.363.374,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1405	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	12 Perpustakaan	55.781.715,00	0,00	100.239.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.021.032,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya gemar membaca di wilayah Kab. Muba	15 kecamatan											
1406	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	665.719.777,00	557.592.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.719.777,00	557.592.777,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1407	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Perpustakaan	541.408.883,00	942.921.883,00	0,00	84.292.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.408.883,00	1.027.213.934,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1408	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	30 Orang	453.217.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.217.333,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1409	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat													
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	13 Lokus	71.725.365,00	45.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.725.365,00	45.327.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan 6 Keg. 82 %											
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolahnya Arsip Statis Kabupaten/Kota Terkelolahnya Arsip Statis Kabupaten/Kota Terkelolanya Arsip Statis di Perangkat Daerah	48 PD 48 perangkat daerah 2 Kegiatan											
1410	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1500 Arsip	175.654.432,00	115.265.432,00	52.978.025,00	52.978.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.632.457,00	168.243.457,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan 48 Bulan 48 perangkat daerah											
1411	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN													
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	352.792.011,00	116.629.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.792.011,00	116.629.341,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1412	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	48 Laporan	174.783.110,00	138.928.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.110,00	138.928.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perikanan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabe	100 %											
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1413	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	77.219.203,00	33.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.219.203,00	33.613.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1414	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.118.033,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118.033,00	8.775.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1415	3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	18.945.000,00	9.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945.000,00	9.024.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1416	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.422.861.103,00	7.602.201.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.861.103,00	7.602.201.103,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
1417	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	52.371.000,00	52.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.371.000,00	52.371.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											
1418	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.910.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1419	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	100.885.000,00	77.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.885.000,00	77.800.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1420	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.724.080,00	65.724.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.724.080,00	65.724.080,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1421	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	170.057.106,00	159.028.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.737.106,00	159.708.521,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1422	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	53.245.105,00	53.245.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.245.105,00	53.245.105,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1423	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.355.808,00	97.819.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.355.808,00	97.819.780,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1424	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	81.884.353,00	36.555.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.884.353,00	36.555.852,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1425	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680.000,00	40.680.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1426	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.304.369,00	35.780.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.304.369,00	35.780.369,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1427	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	279.994.000,00	172.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.994.000,00	172.111.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1428	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	109.659.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	109.659.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1429	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	680.000,00	680.000,00	81.778.001,00	6.913.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.458.001,00	7.593.163,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1430	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205.458.600,00	288.960.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.458.600,00	288.960.321,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1431	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	946.920.000,00	794.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.920.000,00	794.884.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1432	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	340.609.700,00	330.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.609.700,00	330.590.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1433	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.978.000,00	69.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.978.000,00	69.978.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1434	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	40.130.000,00	40.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130.000,00	40.130.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	24.434 Ton											
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	100 %											
1435	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	149.473.000,00	67.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.473.000,00	67.852.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1436	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	990 Unit	2.393.400.250,00	2.504.857.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.400.250,00	2.504.857.625,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	100 %											
1437	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil													
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	204.704.100,00	105.856.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.704.100,00	105.856.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1438	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	89.683.000,00	42.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.683.000,00	42.539.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	27.349 Ton											
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100 %											
1439	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	98.230.950,00	499.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230.950,00	499.824.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1440	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	166.861.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.861.000,00	7.085.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 %											
1441	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	210 Unit	1.833.384.806,00	1.414.857.806,00	5.772.000,00	47.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.156.806,00	1.462.365.806,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1442	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat													
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	500 Unit	174.216.000,00	128.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.216.000,00	128.903.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Partisipasi Pokmaswas	78 %											
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	100 %											
1443	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota													
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	1176 Pelaku Usaha	536.212.000,00	33.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.212.000,00	33.926.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1444	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota													
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	96 Pelaku Usaha	162.548.867,00	18.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.548.867,00	18.319.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1445	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota													
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	7866 Pelaku Usaha	549.651.090,00	308.539.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.651.090,00	308.539.493,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	54,97 Kg/Kap/Th											
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-											
1446	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko													
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	316.710.200,00	47.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.710.200,00	47.268.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	100 %											
1447	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Ton	805.669.000,00	276.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.669.000,00	276.791.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1448	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	580.520.950,00	578.675.950,00	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.620.950,00	605.775.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %											
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
1449	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	65.000.000,00	49.194.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	49.194.347,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1450	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1451	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	68.537.425,00	33.906.883,33	54.312.300,00	54.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.849.725,00	88.219.183,33	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1452	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	305 Orang/bulan	20.178.442.418,00	26.528.357.893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178.442.418,00	26.528.357.893,02	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
1453	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14 Dokumen	88.191.250,00	88.191.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.191.250,00	88.191.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
1454	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.680.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1455	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1456	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.035.704,00	28.035.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035.704,00	28.035.704,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1457	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	303.841.965,00	182.305.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.841.965,00	182.305.179,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1458	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	56.918.025,00	56.918.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.918.025,00	56.918.025,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1459	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.235.028,00	97.123.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.235.028,00	97.123.788,99	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1460	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.719.421,00	50.359.595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.719.421,00	50.359.595,16	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1461	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.328.104,00	38.328.104,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.993.104,00	39.993.104,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1462	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.976.000,00	24.988.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.976.000,00	24.988.050,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1463	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.044.000,00	142.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.044.000,00	142.022.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1464	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	46.076.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.076.100,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1465	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	252.985.145,00	252.985.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.985.145,00	252.985.145,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1466	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.732.622.222,00	3.802.622.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732.622.222,00	3.802.622.222,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1467	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	551.880.000,00	551.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.880.000,00	551.880.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1468	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	679.981.000,00	299.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.981.000,00	299.981.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1469	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-											
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %											
1470	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2.835.495.353,00	4.538.536.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.495.353,00	4.538.536.676,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1471	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	550.591.200,00	1.095.810.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.591.200,00	1.095.810.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1472	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih													
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton	348.692.000,00	38.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.692.000,00	38.686.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1473	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan													
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan	2.375.000.000,00	3.712.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000.000,00	3.712.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1474	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura													
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	780.232.200,00	160.931.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.232.200,00	160.931.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1475	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan													
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	35.775.000,00	17.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.775.000,00	17.565.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-											
1476	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2000 Ekor	3.213.902.000,00	3.157.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.902.000,00	3.157.848.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1477	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 Dosis	591.322.040,00	418.660.540,00	277.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.122.040,00	456.460.540,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	25 %											
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	100 %											
1478	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian													
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	40.414.000,00	20.540.000,00	233.622.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.036.740,00	20.540.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1479	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	294.134.305,00	156.936.610,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.174.305,00	156.936.610,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1480	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air													
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	583.658.000,00	35.429.500,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.738.000,00	35.429.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1481	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1.333.705.000,00	1.297.423.940,00	4.160.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.865.000,00	1.497.423.940,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1482	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	203.600.000,00	2.839.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.640.000,00	2.839.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-											
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1483	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	15 Wilayah	173.376.000,00	110.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.376.000,00	110.999.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1484	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	299.734.500,00	243.659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.734.500,00	243.659.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
1485	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	445.404.200,00	395.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.404.200,00	395.609.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	100 %											
1486	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan													
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	92.725.000,00	46.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.725.000,00	46.362.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1487	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner													
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	212.233.000,00	162.226.500,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.233.000,00	162.226.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1488	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan													
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	20 Orang	337.695.000,00	222.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.695.000,00	222.685.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani	65,00 %											
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100 %											
1489	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	70 Ha	355.110.000,00	116.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.110.000,00	116.512.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	20 %											
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan pertanian	100 %											
1490	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	2.472.381.952,00	2.607.970.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.381.952,00	2.607.970.974,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1491	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	1.130.692.835,00	741.527.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.692.835,00	741.527.067,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1492	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	396.919.782,00	183.447.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.919.782,00	183.447.942,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1493	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian													
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	96 Orang	0,00	437.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.760.000,00	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
		Dinas Perkebunan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	[deleted]												
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1494	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	63.560.830,00	63.560.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.560.830,00	63.560.830,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1495	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.017.000,00	19.017.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1496	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	193.679.000,00	179.006.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.679.000,00	179.006.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1497	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	6.262.396.883,00	9.276.486.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262.396.883,00	9.276.486.946,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1498	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.440.000,00	52.440.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %											
1499	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1500	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	72.616.000,00	20.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.616.000,00	20.230.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1501	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1502	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.874.729,00	29.874.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.874.729,00	29.874.729,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1503	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00	680.000,00	125.315.781,00	47.232.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.995.781,00	47.912.831,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1504	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.173.561,00	43.173.561,00	6.993.000,00	6.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.166.561,00	50.166.561,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1505	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.540.164,00	139.472.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.540.164,00	139.472.014,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1506	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	111.529.233,00	59.246.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.529.233,00	59.246.499,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1507	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	0,00	3.978.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1508	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1509	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36.130.000,00	2.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.130.000,00	2.891.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1510	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	208.595.000,00	121.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.595.000,00	121.480.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
1511	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	680.000,00	1.360.000,00	67.608.750,00	39.847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.288.750,00	41.207.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 % 100 %											
1512	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	191.664.000,00	228.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.664.000,00	228.339.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1513	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.178.766.667,00	1.290.110.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.766.667,00	1.290.110.667,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1514	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	249.890.000,00	339.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.890.000,00	339.455.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1515	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	680.000,00	680.000,00	155.613.800,00	382.674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.293.800,00	383.354.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1516	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	60.449.000,00	53.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.449.000,00	53.259.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1,85 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Perkebunan)	100 % 100 %											
1517	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	230.476.500,00	903.916.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.476.500,00	903.916.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1518	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	15 Laporan	2.380.978.800,00	3.081.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.978.800,00	3.081.031.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 % 100 %											
1519	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	100.538.000,00	4.854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.538.000,00	4.854.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1520	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman													
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3.195.908.025,00	2.766.818.242,00	304.590.000,00	9.945.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.498.025,00	2.776.763.842,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,85 % 1,85 %											
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)	100 % 100 %											
1521	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	15 Laporan	200.049.000,00	82.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.049.000,00	82.999.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-											
1522	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian													
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	37.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1523	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11 Unit	7.465.707.014,00	7.960.699.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465.707.014,00	7.960.699.529,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Penerimaan Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Penerimaan Pembiayaan
1524	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	299.999.762,00	289.343.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999.762,00	289.343.762,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,85 %											
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota	100 % 100 %											
1525	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	200.247.131,00	98.347.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.247.131,00	98.347.649,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1526	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	914602 Ha	10.691.136.398,00	11.383.341.558,00	3.899.350.080,00	1.989.675.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590.486.478,00	13.373.016.598,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1527	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahanya	2,75 %											
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian (Perkebunan) yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota TerlaksananyaPenerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %											
1528	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian													
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	385.839.000,00	1.190.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.839.000,00	1.190.081.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani	2,75 %											
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)	100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1529	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Unit	1.348.148.946,00	1.017.108.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.148.946,00	1.017.108.201,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1530	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30 Unit	2.122.142.000,00	1.716.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.142.000,00	1.716.450.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1531	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani													
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	5 Unit	100.412.750,00	68.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.412.750,00	68.025.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %											
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	100 %											
1532	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	64.854.080,00	49.079.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.854.080,00	49.079.000,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
1533	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	19.812.378,00	9.492.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812.378,00	9.492.189,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1534	3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	121 Data	49.999.899,00	25.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.899,00	25.066.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %											
1535	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.144.103.874,00	10.177.083.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144.103.874,00	10.177.083.129,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %											
1536	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58.680.000,00	58.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.680.000,00	58.680.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1537	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	103.608.000,00	65.430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.608.000,00	65.430.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %											
1538	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.983.187,00	29.983.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.983.187,00	29.983.187,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1539	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	0,00	199.227.573,00	120.706.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.227.573,00	120.706.173,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1540	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.908.032,00	59.908.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.908.032,00	59.908.032,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1541	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.989.422,00	99.957.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.989.422,00	99.957.221,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1542	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.483.295,00	55.172.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.483.295,00	55.172.217,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1543	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050.000,00	22.050.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1544	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	199.563.000,00	190.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.563.000,00	190.113.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Unit											
1545	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	41.611.680,00	24.628.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.611.680,00	24.628.680,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perdagangan dan Perindustrian	100 %											
1546	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	457.968.500,00	488.110.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.968.500,00	488.110.949,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1547	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.729.611.111,00	2.069.458.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.611.111,00	2.069.458.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %											
1548	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	316.860.000,00	316.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.860.000,00	316.860.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1549	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	197.532.000,00	7.407.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.532.000,00	7.407.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1550	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	41.541.500,00	41.541.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.541.500,00	41.541.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit	22,44 %											
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang terbit	15 Dokumen											
1551	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	141.516.000,00	69.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.516.000,00	69.851.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang terbit	16 Dokumen											
1552	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang													
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	16 Dokumen	71.180.000,00	35.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.180.000,00	35.667.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi cara Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	140 Pelaku Usaha											
1553	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	409.572.378,00	245.431.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.572.378,00	245.431.378,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	50,00 %											
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun	9 unit											
1554	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	118.532.000,00	150.131.000,00	4.005.682.850,00	621.112.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.214.850,00	771.243.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	100 %											
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Laporan											
1555	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	78.307.000,00	24.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307.000,00	24.491.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Laporan											
1556	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	78.307.000,00	30.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307.000,00	30.862.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1557	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	21 Laporan	1.245.196.000,00	805.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.196.000,00	805.032.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	2 Laporan											
1558	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	49.402.000,00	24.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402.000,00	24.476.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume penjualan produk	12,5 %											
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi	360 Pelaku Usaha											
1559	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	1.061.551.500,00	935.363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.551.500,00	935.363.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1560	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	350 Pelaku Usaha	3.717.022.500,00	3.673.267.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.022.500,00	3.673.267.240,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1561	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	54.643.000,00	25.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.643.000,00	25.348.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	42,57 %											
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal	3000 unit											
1562	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2000 Unit	226.483.740,00	144.498.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.483.740,00	144.498.040,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1563	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	800 Orang	146.414.300,00	53.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.414.300,00	53.906.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Kemitraan Usaha	8 Mitra Usaha											
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemitraan Usaha	100 Pelaku Usaha											
1564	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	100 UMKM	131.511.050,00	64.473.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.511.050,00	64.473.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah	1,5 %											
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Perencanaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Industri	141 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1565	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	135.725.042,00	102.771.042,00	1.907.261.038,00	435.334.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.986.080,00	538.105.534,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1566	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	135 Dokumen	960.193.977,00	847.302.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.193.977,00	847.302.320,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali	24,50 %											
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pengawasan usaha industri	10 Pelaku Industri											
1567	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10 Dokumen	59.749.000,00	27.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749.000,00	27.517.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas	32 Unit Usaha											
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang tersedia	1 Dokumen											
1568	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	235.629.000,00	103.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.629.000,00	103.004.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas) Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	100 % 134 Laporan 16 Laporan 3 Laporan 420 Unit 80 % 85 % 8 Dokumen B Predikat											
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasni Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen												
1569	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	116.932.015,00	36.844.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.932.015,00	36.844.894,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
1570	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	108.861.993,00	29.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.861.993,00	29.070.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1571	4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.712.528,00	5.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.712.528,00	5.564.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Tersusunanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200 Dokumen 1 Tahun 1 Laporan 4 Laporan											
1572	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	26.985.081.075,00	34.652.564.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985.081.075,00	34.652.564.015,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
1573	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	599.969.992,00	581.113.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.969.992,00	581.113.992,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1574	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	99.567.000,00	51.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.567.000,00	51.248.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Muba Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 % 300 Orang 143 Orang 2 Dokumen 12 Paket											
1575	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	371.130.540,00	191.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.130.540,00	191.170.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1576	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	99.940.000,00	41.927.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.940.000,00	41.927.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1577	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	143 Orang	809.445.000,00	670.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.445.000,00	670.622.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1578	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	100.493.101,00	100.493.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.493.101,00	100.493.101,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Muba Expo di Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Khabar Harian/Mingguan, Tabloid) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya souvenir, cindra mata, pakan ternak dan sewa peralatan	26 Paket 100 % 1 Paket 12 Bulan 10 Paket 11 Paket 12 Bulan 10 Paket 20 Laporan 4 Paket 1 Paket 4 Paket											
1579	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	349.888.373,00	449.888.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.888.373,00	449.888.373,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1580	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			0	68 0	374.509.200,00	1.801.870.200,00	2.930.399.643,00	2.482.741.171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.908.843,00	4.284.611.371,78	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1581	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	92.228.875,00	70.608.875,00	1.407.771.125,00	1.393.585.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.464.194.245,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1582	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.276.392.564,00	795.926.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.392.564,00	795.926.743,90	Pajak Daerah Pajak Daerah
1583	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	979.453.050,00	800.393.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.453.050,00	800.393.342,78	Pajak Daerah Pajak Daerah
1584	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	150.000.000,00	189.043.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	189.043.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1585	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680.000,00	40.680.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1586	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.915.000.000,00	7.347.867.505,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.000.000,00	7.597.867.505,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1587	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.422.175.000,00	3.839.282.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.175.000,00	3.839.282.595,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1588	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	3.204.275.373,00	6.949.789.373,35	272.877.627,00	240.600.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.153.000,00	7.190.389.880,35	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1589	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1.360.000,00	680.000,00	756.976.792,00	669.770.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	758.336.792,00	670.450.841,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1590	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.544.533.480,00	6.357.739.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544.533.480,00	6.357.739.808,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1591	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.027.837.234,00	12.171.436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027.837.234,00	12.171.436.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Rumah Jabatan dan Rehab Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	117 Unit 2 Paket 561 unit											
1592	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	117 Unit	5.603.982.400,00	5.833.214.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.982.400,00	5.833.214.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1593	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.663.483.000,00	4.822.905.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.483.000,00	4.822.905.860,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
1594	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	561 Unit	2.082.094.250,00	1.918.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.094.250,00	1.918.190.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up KDH/WKDH Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tersedianya Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi KDH/WKDH	2 orang 12 Bulan 12 Bulan 2 paket											
1595	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	357.788.640,00	357.788.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.788.640,00	357.788.640,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1596	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	398.440.000,00	751.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.440.000,00	751.480.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1597	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1598	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	799.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	799.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-											
1599	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	3.493.512.380,00	3.741.990.328,00	806.487.620,00	1.369.827.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000.000,00	5.111.817.948,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1600	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.500.000.000,00	1.902.715.000,00	0,00	303.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	2.205.750.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1601	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.300.000.000,00	1.437.944.950,00	0,00	80.029.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	1.517.974.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tercapainya Indeks persepsi Reformasi dan Birokrasi se Kabupaten Muba Tercapainya nilai akuntabitas kinerja pemerintah daerah (Keselarasan Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Cascading Perangkat Daerah, Laporan Dokumen LKjIP, dan fasilitasi pelaksanaan SAKIP) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah TerlaKsananya seleksi evaluasi kinerja kecamatan (3 kecamatan terbaik) Terpenuhinya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Ketatalaksanaan Tersusunnya LKPJ Bupati Muba TA. 2024, LPPD dan RLPPD Kab. Muba Tahun 2024, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Muba Tahun 2024	48 Perangkat Daerah 48 Perangkat Daerah 60 Perangkat Daerah BB Predikat 15 Kecamatan 60 Perangkat Daerah 3 Laporan 2 Dokumen 4 Dokumen											
1602	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	691.684.540,00	450.704.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.684.540,00	450.704.550,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pajak Daerah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pajak Daerah
1603	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	551.169.990,00	305.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.169.990,00	305.748.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1604	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	1.041.913.000,00	602.058.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.913.000,00	602.058.792,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1605	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
			0	4 0	366.937.643,00	177.394.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.937.643,00	177.394.360,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terfasilitasi Terdokumentasinya kegiatan peringatan hari besar Terlaksananya kegiatan acara KDH/WKDH Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi Staf Ahli Bupati Terpenuhinya penerimaan kunker pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah Tersusunnya laporan harian dan laporan triwulan bupati	100 % 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 108 kali 2 Laporan											
1606	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	2.740.360.000,00	2.460.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.360.000,00	2.460.420.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1607	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	2.663.172.071,00	3.798.642.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.172.071,00	3.798.642.180,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
1608	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	254.531.323,00	220.223.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.531.323,00	220.223.205,69	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	9 Dokumen											
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-											
1609	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	2.026.070.030,00	1.241.808.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.070.030,00	1.241.808.580,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1610	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	296.625.601,00	148.230.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.625.601,00	148.230.351,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1611	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	291.963.725,00	136.433.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.963.725,00	136.433.796,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten Terbinanya mental keagamaan warga kab.muba (Sarjana Bina Desa) Terlaksananya Isbat Nikah Bagi Masyarakat Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar Keagaamaan Terlaksananya Pembinaan Peserta MTQ Terlaksananya Pembinaan UKS Terlaksananya STQH tingkat kabupaten Terlaksananya STQH tingkat Provinsi Terlaksananya TC Peserta STQH Tingkat Provinsi Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah haji kab. Musi banyuasin Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah Umroh kab. Musi Banyuasin	200 Pasang 845 Orang 50 orang 500 orang 9 hari besar keagamaan 40 orang 15 kecamatan 300 orang 20 orang 20 orang 300 orang 100 orang											
1612	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	13.604.042.630,00	19.521.927.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604.042.630,00	19.521.927.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1613	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	161.603.745,00	146.433.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.603.745,00	146.433.745,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1614	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	3.058.291.566,00	1.368.328.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.291.566,00	1.368.328.566,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas Terlaksananyan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat umum Terlaksananyan Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di LP Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-UU-an Terlaksananya Sosialisasi RANHAM Kab. Muba Terselesainya sengketa hukum Masyarakat Miskin Terselesainya Sengketa Hukum (Perdata, TUN, Legal Opinion)	742 peraturan 1400 orang 40 orang 2 kecamatan 100 orang 154 kasus 34 kasus											
1615	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	742 Dokumen	242.762.664,00	149.012.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.762.664,00	149.012.607,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1616	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	210 Kasus	622.433.499,00	619.901.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.433.499,00	619.901.977,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1617	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	86.165.965,00	77.212.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.165.965,00	77.212.982,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya Kerja Sama Dalam Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Terfasilitasinya Kerja Sama Luar Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Luar Negeri dan Meningkatkan Keaktifan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Keanggotaan UCLG ASPAC Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen											
1618	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	282.980.250,00	142.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.980.250,00	142.136.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1619	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	330.191.498,00	198.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.191.498,00	198.320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1620	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 Laporan	48.635.000,00	20.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.635.000,00	20.742.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	18 Laporan 8 Dokumen											
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BUMD dan BLUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD Terlaksananya Pembinaan BLUD Terlaksananya Pembinaan BUMD Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Terlaksananya Survey Bahan Pokok Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi	2 Dokumen 2 Laporan 32 BLUD 3 BUMD 1 Kegiatan 14 Kecamatan 4 Laporan											
1621	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	41 Dokumen	240.802.000,00	121.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.802.000,00	121.786.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1622	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	18 Laporan	189.868.000,00	95.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.868.000,00	95.759.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1623	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	15 Dokumen	217.043.000,00	99.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.043.000,00	99.124.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pemeriksaaan Fisik Tersusunnya Dokumen Standar Harga Bahan dan Upah, Harga Barang, ASB Konstruksi, ASB Perhitungan, ASB Permodelan dan TAPD Tersusunnya Laporan Fasilitasi Serah Terima Pekerjaan, Verifikasi Kontrak dan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN)	15 Laporan 4 Laporan 3 Laporan											
1624	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	694.325.000,00	254.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.325.000,00	254.842.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1625	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	296.606.000,00	148.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.606.000,00	148.244.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1626	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Laporan	161.392.000,00	69.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.392.000,00	69.561.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Telaksananya pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa Terlaksanannya bantuan hukum pengadaan barang dan jasa Terlaksananya proses pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Terlaksananya proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dan jasa lainnya pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Terlaksananya proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Terlaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan barang pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin	23 orang 1 Kasus 1 Pelayanan 40 Paket 435 Paket 30 Paket										
1627	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	505 Dokumen	634.717.950,00	302.621.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.717.950,00	302.621.475,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1628	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	274.468.500,00	189.864.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.468.500,00	189.864.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1629	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	23 Orang	207.342.000,00	96.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.342.000,00	96.674.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-											
1630	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	31.056.000,00	15.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.056.000,00	15.571.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1631	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	444.834.000,00	388.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.834.000,00	388.048.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1632	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	154.722.000,00	227.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.722.000,00	227.217.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sekretariat DPRD													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1633	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	57.882.200,00	15.182.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.882.200,00	15.182.850,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1634	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.217.333,00	10.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217.333,00	10.597.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1635	4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	19.336.200,00	9.668.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336.200,00	9.668.100,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1636	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	7.694.319.655,00	9.935.827.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694.319.655,00	9.935.827.448,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	90 % 90 %											
1637	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35 Dokumen	372.443.500,00	372.443.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.443.500,00	372.443.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	90 % 90 %											
1638	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58.680.000,00	141.009.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.680.000,00	141.009.960,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1639	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	94.741.000,00	94.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.741.000,00	94.741.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1640	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	275.280.000,00	608.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.280.000,00	608.809.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	90 % 90 %											
1641	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	96.955.315,00	146.593.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.955.315,00	146.593.810,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1642	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	680.000,00	66.315.270,44	305.328.180,00	5.837.669.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	306.008.180,00	5.903.984.338,76	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1643	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	73.413.200,00	34.433.820,00	879.630.738,00	922.038.871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	953.043.938,00	956.472.691,67	Pajak Daerah Pajak Daerah
1644	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.784.438,00	105.086.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.784.438,00	105.086.455,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1645	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	211.676.570,00	302.335.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.676.570,00	302.335.071,57	Pajak Daerah Pajak Daerah
1646	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1647	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	400.500.000,00	400.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500.000,00	400.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1648	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	7.457.568.923,00	7.513.703.326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457.568.923,00	7.513.703.326,81	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 % 90 %											
1649	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00	21.422.000,00	0,00	7.117.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138.522.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1650	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	680.000,00	9.475.427,39	2.044.775.178,00	6.074.006.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.455.178,00	6.083.481.798,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 % 90 %											
1651	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.170.046.459,00	993.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.046.459,00	993.243.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1652	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	4.074.922.222,00	5.052.525.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.922.222,00	5.052.525.422,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %											
1653	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	224.050.000,00	306.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.050.000,00	306.550.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1654	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	985.500.000,00	985.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.500.000,00	985.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1655	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	341.100.000,00	541.100.000,00	425.982.015,00	4.323.450.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.082.015,00	4.864.550.863,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1656	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	137 Unit	165.570.000,00	222.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.570.000,00	222.432.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	90 % 90 %											
1657	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	26.547.804.780,00	26.552.804.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547.804.780,00	26.552.804.780,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1658	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	1.113.750.000,00	1.113.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.750.000,00	1.113.750.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1659	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	90 %											
1660	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11 Laporan	10.012.036.150,00	8.189.176.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012.036.150,00	8.189.176.375,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1661	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	2.520.000.000,00	2.604.479.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000.000,00	2.604.479.480,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	95 %											
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	90 % 90 %											
1662	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen	3.848.848.050,00	1.965.226.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848.848.050,00	1.965.226.525,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1663	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	398.329.463,00	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.329.463,00	64.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 % 90 %											
1664	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	2.236.591.308,00	1.080.686.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.591.308,00	1.080.686.654,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1665	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	2.236.591.308,00	1.080.686.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.591.308,00	1.080.686.654,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1666	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.359.913.503,00	650.435.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.913.503,00	650.435.125,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1667	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1.359.913.503,00	650.435.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.913.503,00	650.435.125,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1668	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	2.236.591.308,00	798.287.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.591.308,00	798.287.155,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	90 % 90 %											
1669	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah													
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	2.236.591.308,00	1.495.369.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.591.308,00	1.495.369.654,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	90 %											
1670	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.222.672.000,00	1.222.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.672.000,00	1.222.672.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1671	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	720.000.000,00	576.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	576.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1672	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	480.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00	420.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1673	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	7 Dokumen	865.238.499,00	1.366.335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.238.499,00	1.366.335.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	90 %											
1674	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	250.550.000,00	112.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.550.000,00	112.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1675	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	1.971.390.199,00	6.172.576.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.390.199,00	6.172.576.169,19	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	90 %											
1676	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi													
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	1.575.360.000,00	1.571.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.360.000,00	1.571.160.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	90 % 90 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1677	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	8.949.101.200,00	5.256.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949.101.200,00	5.256.092.600,00	Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah
1678	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	6.789.096.000,00	5.045.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789.096.000,00	5.045.840.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %											
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1679	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	52.540.872,00	41.153.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.540.872,00	41.153.436,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1680	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	17.464.260,00	8.732.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464.260,00	8.732.130,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1681	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	13.009.695.983,00	13.311.622.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.695.983,00	13.311.622.748,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
1682	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	95.264.000,00	91.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.264.000,00	91.622.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
1683	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	76.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.694.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1684	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	227.206.000,00	300.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.206.000,00	300.078.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1685	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.962.409,00	29.962.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.962.409,00	29.962.409,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1686	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.322.000,00	4.322.000,00	168.677.820,00	162.067.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.999.820,00	166.389.104,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1687	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.992.295,00	59.992.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.992.295,00	59.992.295,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1688	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	249.999.584,00	125.678.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.999.584,00	125.678.456,60	Pajak Daerah Pajak Daerah
1689	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	209.998.153,00	105.679.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.998.153,00	105.679.021,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1690	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1691	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.306.000,00	11.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306.000,00	11.306.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1692	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	330.463.000,00	171.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.463.000,00	171.396.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1693	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	4.322.000,00	4.322.000,00	80.572.680,00	48.343.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.894.680,00	52.665.608,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1694	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	435.508.260,00	435.508.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.508.260,00	435.508.260,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1695	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	774.722.222,00	706.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.722.222,00	706.680.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Gedung Kantor dan Peralatan Gedung kantor	100 % 100 %											
1696	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	444.930.000,00	444.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.930.000,00	444.930.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1697	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.060.000,00	199.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.060.000,00	199.060.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1698	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850.000,00	74.850.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	100 %											
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-											
1699	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	0,00	50.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.505.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1700	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya													
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	553.133.400,00	452.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.133.400,00	452.315.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1701	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	48 Berita Acara	40.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.486.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1702	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	48 Berita Acara	846.799.000,00	358.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.799.000,00	358.209.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1703	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen	976.926.492,00	672.731.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.926.492,00	672.731.492,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													
1704	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	10 Orang	63.277.000,00	27.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.277.000,00	27.661.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1705	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	0,00	37.282.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.282.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %											
1706	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	212.980.894,00	75.229.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.980.894,00	75.229.894,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1707	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	399.061.856,00	225.426.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.061.856,00	225.426.356,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-											
1708	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	97.485.139,00	62.497.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.485.139,00	62.497.375,20	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	90 %											
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %											
1709	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	210.056.000,00	98.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.056.000,00	98.978.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1710	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	149.987.000,00	69.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.987.000,00	69.109.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1711	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	279.137.500,00	136.935.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.137.500,00	136.935.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1712	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	408.910.250,00	228.448.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.910.250,00	228.448.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %											
1713	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	65.598.000,00	60.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.598.000,00	60.956.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1714	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	20.770.000,00	36.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.770.000,00	36.162.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1715	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	111.544.000,00	87.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.544.000,00	87.456.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1716	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	52.995.000,00	45.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995.000,00	45.661.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %											
1717	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	313.992.000,00	447.107.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.992.000,00	447.107.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1718	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	77.985.000,00	38.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.985.000,00	38.588.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1719	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	144.751.000,00	118.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.751.000,00	118.422.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1720	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	466.304.000,00	668.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.304.000,00	668.997.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1721	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	196.399.000,00	148.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.399.000,00	148.766.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti [deleted]	90 %											
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersusunnya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 % 100 %											
1722	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	273.378.346,00	248.207.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.378.346,00	248.207.228,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 % 100 %											
1723	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	159.929.981,00	34.628.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.929.981,00	34.628.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1724	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	0,00	199.999.689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.689,85	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-											
1725	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	202.242.387,00	104.145.212,00	0,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.242.387,00	104.801.333,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 % 100 %											
1726	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	149.628.332,00	73.560.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.628.332,00	73.560.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1727	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	100.342.332,00	49.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.342.332,00	49.316.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1728	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	90.068.146,00	48.551.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.068.146,00	48.551.778,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-											
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-											
1729	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset													
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	0,00	299.999.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999.799,85	Dana Bagi Hasil (DBH)
1730	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah													
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	0,00	129.186.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.186.001,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel	100 %											
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100 %											
1731	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.054,00	41.667.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.054,00	41.667.332,72	Pajak Daerah Pajak Daerah
1732	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	19.999.979,00	9.999.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.979,00	9.999.795,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1733	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	11.779.470.311,00	12.455.866.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779.470.311,00	12.455.866.618,05	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang di Asuransikan	13 Unit											
1734	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	136.691.000,00	122.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.691.000,00	122.582.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %											
1735	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.096.000,00	153.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.096.000,00	153.386.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1736	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	149.740.000,00	144.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.740.000,00	144.840.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	100 %											
1737	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.417,00	30.000.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.417,00	30.000.417,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1738	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.328.000,00	14.008.000,00	186.682.500,00	876.253.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.010.500,00	890.261.257,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1739	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.995.070,00	59.995.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.995.070,00	59.995.070,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1740	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	270.173.790,00	330.005.636,00	3.852.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.026.600,00	330.005.636,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1741	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	174.632.095,00	88.355.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.632.095,00	88.355.029,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1742	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1743	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.009.000,00	50.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.009.000,00	50.340.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1744	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.784.000,00	300.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.784.000,00	300.437.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksankan	100 %											
1745	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	680.000,00	680.000,00	99.301.488,00	136.117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.981.488,00	136.797.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1746	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100 %											
1747	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	445.444.410,00	445.132.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.444.410,00	445.132.032,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1748	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	970.400.000,00	612.658.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.400.000,00	612.658.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	100 %											
1749	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.490.000,00	45.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490.000,00	45.490.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1750	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	439.540.000,00	439.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.540.000,00	439.540.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1751	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	439.528.990,00	424.433.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.528.990,00	424.433.049,92	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1752	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	76.165.560,00	76.165.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.165.560,00	76.165.560,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100 %											
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen											
1753	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	130.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	115.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1754	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	105.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1755	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.000.000,00	240.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	240.745.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1756	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	285.000.000,00	193.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000.000,00	193.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1757	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	165.000.000,00	157.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	157.240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan Penatausahan Perbendaharaan Daerah	100 %											
1758	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	133.404.000,00	96.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.404.000,00	96.702.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1759	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	108.587.000,00	84.293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.587.000,00	84.293.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1760	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	98.408.900,00	79.204.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.408.900,00	79.204.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1761	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	0,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan											
1762	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	70.000.000,00	34.186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	34.186.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1763	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	40.000.000,00	29.802.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	29.802.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1764	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	170.000.000,00	136.151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	136.151.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1765	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	140.000.000,00	69.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	69.666.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1766	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	190.000.000,00	97.382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	97.382.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1767	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	120.000.000,00	41.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	41.790.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1768	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	43.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	43.279.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1769	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	39.910.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	39.910.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1770	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	130.000.000,00	58.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	58.179.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1771	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota													
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	33 Lembaga	132.500.000,00	64.274.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500.000,00	64.274.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-											
1772	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1773	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	219.100.208,00	94.778.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	494.886.482.508,00	544.746.901.358,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1774	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	0,00	0,00	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-											
1775	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	299.544.780,00	160.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.544.780,00	160.143.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1776	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	125.000.000,00	60.277.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	60.277.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Data Aset Yang Akurat	100 %											
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan											
1777	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	209.211.800,00	104.978.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.211.800,00	104.978.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1778	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	221.627.299,00	150.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.627.299,00	150.080.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1779	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	158.548.000,00	71.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.548.000,00	71.126.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1780	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	449.930.780,00	161.478.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.930.780,00	161.478.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1781	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	123.574.950,00	57.287.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.574.950,00	57.287.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1782	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	93.260.000,00	46.630.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.260.000,00	46.630.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1783	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	234.499.000,00	121.810.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.499.000,00	121.810.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1784	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	84.999.900,00	36.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.999.900,00	36.609.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1785	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	314.999.800,00	163.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.999.800,00	163.647.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1786	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	280.802.000,00	217.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.802.000,00	217.086.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1787	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.000,00	44.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	44.161.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1788	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	10.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.684.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1789	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	35.000.000,00	33.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	33.735.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
1790	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/bulan	22.017.755.485,00	29.664.788.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017.755.485,00	29.664.788.265,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %											
1791	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1792	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %											
1793	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1794	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	56.465.500,00	54.423.100,00	143.534.500,00	163.811.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	218.234.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1795	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1796	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00	267.078.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	267.078.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1797	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	420.000.000,00	363.403.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	363.403.891,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1798	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1799	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	50.000.000,00	25.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.188.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1800	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	200.000.000,00	189.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	189.217.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %											
1801	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	16.988.300,00	16.988.300,00	83.011.700,00	49.557.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	66.545.369,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1802	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	398.516.267,00	398.516.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.516.267,00	398.516.267,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1803	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	748.988.444,00	1.072.188.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.988.444,00	1.072.188.444,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %											
1804	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	186.000.000,00	182.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	182.560.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1805	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	327.970.000,00	327.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.970.000,00	327.970.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1806	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	21.893.970,00	27.744.330,00	316.542.030,00	358.960.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.436.000,00	386.705.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1807	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit	49.979.500,00	49.979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.979.500,00	49.979.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15,64 %											
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 % 100 % 100 %											
1808	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	478.100.000,00	183.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.100.000,00	183.078.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1809	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	324.800.000,00	267.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.800.000,00	267.122.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1810	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	427.666.200,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.666.200,00	103.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1811	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Unit	47.026.900,00	47.026.900,00	55.090.900,00	32.573.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.117.800,00	79.600.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1812	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan	860.000.000,00	600.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000.000,00	600.584.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1813	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	250.000.000,00	445.429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	445.429.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1814	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	270000 Obyek Pajak	264.000.000,00	371.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000.000,00	371.304.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1815	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	270000 Dokumen	875.500.000,00	818.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.500.000,00	818.478.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1816	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	480.000.000,00	315.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00	315.995.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1817	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	90 Dokumen	550.000.000,00	362.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	362.410.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1818	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	250 Dokumen	371.216.000,00	261.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.216.000,00	261.136.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1819	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen	220.000.000,00	269.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	269.497.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1820	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	392.200.000,00	361.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.200.000,00	361.103.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1821	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	100.000.000,00	25.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	25.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1822	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	100.000.000,00	91.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	91.325.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 % 4 Laporan 2 Dokumen											
1823	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	38.016.000,00	25.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.016.000,00	25.008.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1824	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.936.000,00	4.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936.000,00	4.968.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1825	5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	15.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.700.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1826	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	8.901.765.152,00	10.035.706.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901.765.152,00	10.035.706.672,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersediannya jaminan barang milik daerah	1 Dokumen 100 %											
1827	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	46.282.500,00	46.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.282.500,00	46.282.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Orang 100 % 2 Paket											
1828	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.536.000,00	51.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.536.000,00	51.536.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1829	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	161.010.000,00	118.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.010.000,00	118.005.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Persediaan	2 Paket											
1830	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.023.558,00	30.023.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023.558,00	30.023.558,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1831	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	261.029.820,00	156.617.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.709.820,00	157.297.892,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1832	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.009.930,00	60.009.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.009.930,00	60.009.930,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1833	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.001.799,00	200.001.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001.799,00	200.001.799,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1834	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.040.020,00	107.040.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.040.020,00	107.040.020,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1835	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1836	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1837	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.000.000,00	133.883.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	133.883.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %											
1838	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	680.000,00	680.000,00	108.413.700,00	65.048.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.093.700,00	65.728.220,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan 12 Laporan 100 % 12 Laporan											
1839	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	192.329.000,00	192.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.329.000,00	192.329.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1840	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	492.522.222,00	541.401.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.522.222,00	541.401.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	1 Unit 10 Unit 10 Unit 100 % 8 Unit											
1841	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	281.330.000,00	281.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.330.000,00	281.330.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1842	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.980.000,00	49.980.000,00	174.900.000,00	174.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.880.000,00	224.880.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1843	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Survey Kepuasan ASN	87,75 %											
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-											
1844	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	500.000.000,00	220.000.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	220.000.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1845	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	300.000.000,00	197.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	197.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1846	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1847	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	80.000.000,00	44.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	44.625.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1848	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	100.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	61.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Terlaksananya Pengelolaan Kenaikkan Pangkat ASN Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN Terlaksannya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Mutasi dan Promosi	60 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen 100 %											
1849	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	199.999.900,00	97.887.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.900,00	97.887.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1850	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	199.999.850,00	73.081.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.850,00	73.081.925,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1851	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	249.999.850,00	237.479.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.999.850,00	237.479.925,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	40 Orang											
1852	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN													
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	385 Orang	2.799.999.700,00	3.205.712.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.999.700,00	3.205.712.628,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1853	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	18 Orang	1.039.999.550,00	1.039.122.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.999.550,00	1.039.122.847,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1854	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen	799.999.800,00	741.663.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.999.800,00	741.663.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1855	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	14 Orang	199.999.400,00	148.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.400,00	148.999.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1856	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen	199.999.800,00	144.874.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.800,00	144.874.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	160 Orang 1 Laporan 6901 Dokumen 100 % 20 Dokumen 300 Orang 60 Laporan											
1857	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	102.243.000,00	51.421.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.243.000,00	51.421.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1858	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	50.240.000,00	25.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.240.000,00	25.120.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1859	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	117.983.700,00	58.991.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.983.700,00	58.991.850,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1860	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60 Laporan	120.459.000,00	60.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.459.000,00	60.229.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1861	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai													
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	30.129.000,00	15.064.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.129.000,00	15.064.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1862	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	153.248.000,00	76.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.248.000,00	76.984.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Inspektorat													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %											
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1863	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	64.999.900,00	51.601.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999.900,00	51.601.450,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1864	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.999.800,00	9.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.800,00	9.999.900,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1865	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	34.999.900,00	29.169.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999.900,00	29.169.950,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan APIP	100 %											
1866	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	17.064.693.797,00	21.648.192.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064.693.797,00	21.648.192.108,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
1867	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	89.316.500,00	89.316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.316.500,00	89.316.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian APIP	100 %											
1868	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	83.697.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.697.560,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1869	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	58.599.000,00	48.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.599.000,00	48.387.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1870	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	208.584.000,00	533.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.584.000,00	533.584.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum APIP	100 %											
1871	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	24.867.180,00	24.867.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867.180,00	24.867.180,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1872	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	680.000,00	680.000,00	196.718.900,00	117.759.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.398.900,00	118.439.340,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1873	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	54.725.900,00	54.725.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725.900,00	54.725.900,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1874	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	200.586.904,00	100.633.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.586.904,00	100.633.452,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1875	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	210.075.793,00	128.741.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.075.793,00	128.741.098,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1876	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1877	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	48.776.000,00	48.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.776.000,00	48.776.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1878	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	229.574.000,00	429.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.574.000,00	429.574.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1879	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	354.720.000,00	354.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.720.000,00	354.720.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1880	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	680.000,00	680.000,00	99.038.000,00	259.150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.718.000,00	259.830.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1881	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	257.199.012,00	282.199.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.199.012,00	282.199.012,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1882	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	430.644.444,00	638.090.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.644.444,00	638.090.844,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1883	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	488.910.000,00	488.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.910.000,00	488.910.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1884	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.624.000,00	198.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.624.000,00	198.624.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1885	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	60.390.000,00	323.166.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.390.000,00	323.166.320,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Opini terhadap laporan keuangan pemda	70 % 75 % 87 % 90 % WTP Predikat											
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dengan status selesai Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal BB Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP Jumlah Unit Pelayanan Publik Kategori Baik	20 Jumlah 39 Jumlah 0 Jumlah 15 Jumlah											
1886	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43 Laporan	744.999.800,00	655.441.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.999.800,00	655.441.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1887	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Laporan	600.000.000,00	524.718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	524.718.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1888	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	315.000.000,00	310.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00	310.357.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1889	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	99.999.900,00	91.866.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.900,00	91.866.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1890	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75 Laporan	799.999.800,00	558.352.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.999.800,00	558.352.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1891	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	209.999.800,00	202.178.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.999.800,00	202.178.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1892	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54 Laporan	829.999.900,00	814.840.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.999.900,00	814.840.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Level Kapabilitas APIP Nilai Reformasi Birokrasi PEMDA	3,3 Skor 3 Level B Skor											
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terpenuhinya elemen kapabilitas APIP	100 %											
1893	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	184.999.900,00	152.723.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.999.900,00	152.723.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Nilai RB bernilai Baik Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level 3	80 % 70 %											
1894	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 perangkat daerah	325.000.000,00	263.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	263.930.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1895	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 perangkat daerah	374.999.800,00	347.119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.999.800,00	347.119.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1896	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	489.999.800,00	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.999.800,00	490.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1897	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 perangkat daerah	125.001.300,00	95.050.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.001.300,00	95.050.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Sekayu													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	4 laporan 3 dokumen 100 % 100 %											
1898	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.695.000,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695.000,00	5.761.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1899	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.890.000,00	9.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890.000,00	9.945.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	100 % 100 % 100 %											
1900	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7.260.585.642,00	8.353.190.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260.585.642,00	8.353.190.629,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	3 orang 1 paket 240 dokumen 100 %											
1901	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.702.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.702.260,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1902	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	49.195.000,00	45.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.195.000,00	45.775.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	30 laporan 240 dokumen 2 paket 2 paket 1 paket 3 paket 1 paket 400 laporan 100 % 100 %											
1903	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.992.205,00	9.992.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992.205,00	9.992.205,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1904	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	680.000,00	680.000,00	72.587.594,00	42.637.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.267.594,00	43.317.764,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1905	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.909.071,00	19.909.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.909.071,00	19.909.071,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1906	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.023.558,00	40.023.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.023.558,00	40.023.558,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1907	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34.039.208,00	34.039.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.039.208,00	34.039.208,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1908	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.680.000,00	25.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680.000,00	25.680.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1909	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1910	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	100.037.000,00	75.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.037.000,00	75.153.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit 14 unit 100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1911	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	680.000,00	680.000,00	48.421.530,00	28.978.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.101.530,00	29.658.770,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan 12 laporan 100 % 100 %												
1912	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.317.600,00	134.317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.317.600,00	134.317.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1913	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	767.941.778,00	762.219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.941.778,00	762.219.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1914	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	120.760.000,00	120.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.760.000,00	120.760.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1915	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68.045.880,00	68.045.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.045.880,00	68.045.880,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1916	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	20.313.000,00	20.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313.000,00	20.313.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %											
1917	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	570.010.600,00	289.023.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.010.600,00	289.023.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 % 100 % 4 Kelurahan											
1918	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.287.700,00	8.143.850,00	73.785.483,00	73.785.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.073.183,00	81.929.333,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 % 7 Desa/Kelurahan											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Desa/Kelurahan											
1919	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselengaranya Penegakan Peraturan Daerah	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselengaranya Penegakan Peraturan Daerah Terselenggarakan penegakan peraturan daerah	100 % 100 %											
1920	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	113 Laporan	24.929.730,00	12.455.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.929.730,00	12.455.430,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Forkompinda Tingkat Kecamatan	4 Kali											
1921	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	420 Orang	40.000.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	26.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terselenggaranya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 % 100 %											
1922	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40 Dokumen	49.960.000,00	34.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960.000,00	34.930.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1923	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	40 Laporan	50.000.000,00	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	31.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Serasan Jaya													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan 100 % 100 % 4 Kelurahan											
1924	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116.794.350,00	79.602.186,00	33.205.650,00	16.602.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	96.205.011,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit											
1925	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	349.999.937,00	346.207.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999.937,00	346.207.562,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1926	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	157.806.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	157.806.499,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Soak Baru													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan											
1927	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.035.249,00	48.873.603,02	60.964.750,00	37.231.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.999,00	86.104.668,02	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit											
1928	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	349.999.949,00	347.619.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999.949,00	347.619.949,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1929	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	250.423.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	250.423.915,98	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Balai Agung													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 %											
1930	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	77.840.121,00	56.798.807,00	72.159.879,00	66.459.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	123.258.686,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
1931	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1932	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	347.922.080,00	194.186.167,00	2.077.920,00	2.077.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	196.264.087,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Kayuara													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											
1933	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115.592.053,00	73.830.070,00	34.407.947,00	20.889.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	94.719.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit											
1934	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	350.000.000,00	348.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	348.640.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1935	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	238.705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	238.705.874,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Lais													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	79 % 96,86 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 % 93 %											
1936	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.855.000,00	4.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00	4.302.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1937	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.880.000,00	7.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880.000,00	7.290.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan											
1938	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.156.076.912,00	3.546.976.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.076.912,00	3.546.976.571,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70 % 95 %											
1939	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1940	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	49.875.000,00	46.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875.000,00	46.575.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	85 % 97 %											
1941	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.021.636,00	10.021.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021.636,00	10.021.636,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1942	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	84.628.509,00	49.405.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.308.509,00	50.085.656,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1943	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.197.452,00	17.197.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197.452,00	17.197.452,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1944	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.735.180,00	30.653.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.735.180,00	30.653.996,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1945	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.958.784,00	17.964.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.958.784,00	17.964.998,20	Pajak Daerah Pajak Daerah
1946	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1947	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	30.870.000,00	15.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.870.000,00	15.485.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1948	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	99.950.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.950.000,00	52.020.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	70 % 98 %											
1949	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	680.000,00	680.000,00	48.940.832,00	30.059.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.620.832,00	30.739.332,80	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan 100 %											
1950	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	71.521.599,00	85.957.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.521.599,00	85.957.203,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1951	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	172.960.444,00	184.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.960.444,00	184.316.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	90 % 95 %											
1952	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	86.580.000,00	123.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.580.000,00	123.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1953	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.904.800,00	74.904.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.904.800,00	74.904.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1954	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420.000,00	14.420.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais) Persentase Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70 % 90 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 % 70 %											
1955	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	470.987.000,00	316.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.987.000,00	316.685.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	90 % 70 %											
1956	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	22.187.805,00	10.934.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.187.805,00	10.934.340,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	90 %											
1957	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4.950.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	2.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais	70 % 85 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada	85 % 70 %											
1958	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	22.650.000,00	11.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650.000,00	11.388.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais)	70 % 83 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	70 % 83 %											
1959	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	17.235.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235.000,00	8.550.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais	70 % 97 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70 % 97 %											
1960	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	22.050.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050.000,00	11.088.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1961	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	25.650.000,00	12.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650.000,00	12.333.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Babat Toman													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
1962	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.992.520,00	7.496.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992.520,00	7.496.259,75	Pajak Daerah Pajak Daerah
1963	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	20.007.361,00	10.003.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007.361,00	10.003.680,30	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1964	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.372.082.864,00	4.535.273.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.082.864,00	4.535.273.045,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											
1965	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	20.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1966	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	47.355.000,00	47.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.355.000,00	47.355.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1967	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.989.800,00	9.989.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989.800,00	9.989.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1968	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	74.855.292,00	54.446.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.855.292,00	54.446.168,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1969	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.016.075,00	20.016.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016.075,00	20.016.075,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1970	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.997.851,00	48.534.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.997.851,00	48.534.751,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1971	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.999.910,00	17.499.956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999.910,00	17.499.956,69	Pajak Daerah Pajak Daerah
1972	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1973	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.050.000,00	107.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050.000,00	107.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
1974	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.374.000,00	50.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.374.000,00	50.163.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1975	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	49.762.632,00	31.336.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.762.632,00	31.336.632,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1976	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.336.000,00	85.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.336.000,00	85.336.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1977	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	387.905.467,00	380.205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.905.467,00	380.205.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1978	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	123.500.000,00	83.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500.000,00	83.960.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1979	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74.723.860,00	702.360.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.723.860,00	702.360.189,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1980	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-											
1981	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	508.723.000,00	581.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.723.000,00	581.963.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											
1982	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.251.105,00	2.750.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251.105,00	2.750.552,25	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
1983	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-											
1984	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1985	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	12.780.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780.000,00	6.390.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-											
1986	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	14.300.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	20.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-											
1987	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	12.150.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	6.075.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1988	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.800.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	5.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Babat													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1989	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115.270.064,00	89.620.515,96	34.729.680,00	21.326.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.744,00	110.947.500,96	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
1990	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	399.999.208,00	399.057.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.999.208,00	399.057.775,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1991	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	292.648.380,00	248.018.897,00	7.351.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999.799,00	248.018.897,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Mangun Jaya													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											
1992	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.129.321,00	54.811.157,13	65.870.508,00	37.980.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.829,00	92.791.583,13	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
1993	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	399.999.769,00	399.027.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.999.769,00	399.027.409,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1994	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	292.647.750,00	274.918.239,38	7.351.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999.169,00	274.918.239,38	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Keluang													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan dan Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daera Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
1995	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.965.200,00	14.965.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965.200,00	14.965.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1996	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.999.812,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.812,00	6.600.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
1997	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.986.569.938,00	3.774.985.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.569.938,00	3.774.985.451,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %											
1998	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538.000,00	20.538.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1999	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	44.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.998.436,00	9.998.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998.436,00	9.998.436,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2001	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.509.600,00	1.383.394,00	73.388.094,00	73.514.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.897.694,00	74.897.694,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2002	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	19.981.554,00	19.981.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981.554,00	19.981.554,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2003	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	39.999.794,00	39.999.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999.794,00	39.999.794,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2004	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.996.080,00	17.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.996.080,00	17.240.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2005	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2006	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2007	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100.000.000,00	53.494.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	53.494.401,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %											
2008	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	48.141.948,00	48.141.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.141.948,00	48.141.948,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan 100 %											
2009	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2010	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	253.190.667,00	277.290.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.190.667,00	277.290.667,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
2011	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	78.840.000,00	78.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.840.000,00	78.840.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2012	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970.000,00	74.970.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2013	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	21.130.000,00	21.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.130.000,00	21.130.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2014	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	496.918.000,00	371.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.918.000,00	371.918.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	terlaksananaya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %											
2015	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.106.000,00	16.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106.000,00	16.978.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahka	100 %											
2016	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	4.995.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	2.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	100 %											
2017	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah	100 % 100 %											
2018	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	10.650.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00	5.325.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimcam	100 % 100 %											
2019	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang	14.015.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015.000,00	7.060.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Fasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 % 100 %											
2020	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2021	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	9.000.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.470.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Keluang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											
2022	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	143.929.709,00	143.929.709,00	5.999.550,00	5.999.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.929.259,00	149.929.259,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2023	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	347.593.088,00	347.593.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.593.088,00	347.593.088,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
2024	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	352.477.528,00	344.262.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.477.528,00	344.262.364,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Sanga Desa													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %											
2025	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	33.795.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.795.000,00	5.820.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2026	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.490.000,00	8.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490.000,00	8.175.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	100 %											
2027	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.463.094.014,00	4.030.848.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.094.014,00	4.030.848.576,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
2028	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2029	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.355.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Adminstrasi Umum Kecamatan	100 %											
2030	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.988.530,00	9.988.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.530,00	9.988.530,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2031	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	680.000,00	680.000,00	96.606.852,00	75.313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.286.852,00	75.993.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2032	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	13.724.040,00	13.724.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724.040,00	13.724.040,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2033	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	38.485.330,00	38.485.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.485.330,00	38.485.330,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2034	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	42.662.850,00	28.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.662.850,00	28.138.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2035	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2036	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	68.000.000,00	126.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	126.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
2037	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	104.126.000,00	74.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.126.000,00	74.639.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2038	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	680.000,00	680.000,00	32.567.400,00	19.540.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.247.400,00	20.220.440,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
2039	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.621.400,00	47.181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.621.400,00	47.181.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2040	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	429.882.400,00	458.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.882.400,00	458.102.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %											
2041	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	120.880.000,00	120.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.880.000,00	120.880.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2042	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.880.000,00	90.204.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880.000,00	90.204.790,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2043	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00	22.350.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2044	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	476.500.000,00	303.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500.000,00	303.095.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 % 100 %											
2045	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13.524.000,00	5.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524.000,00	5.976.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
2046	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4.900.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.450.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-											
2047	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sanga Desa	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %											
2048	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	18.300.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	7.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	ersentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100 % 100 %											
2049	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang	12.225.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225.000,00	10.020.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2050	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	12.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780.000,00	6.780.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sanga Desa	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %											
2051	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	13.628.499,00	11.423.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628.499,00	11.423.499,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2052	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	25.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	7.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Ngulak I													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2053	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149.588.543,00	125.408.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.588.543,00	125.408.174,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sanga Desa	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan	100 % 100 %											
2054	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	400.000.000,00	390.010.000,00	0,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
2055	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	278.374.605,00	286.813.459,00	20.757.000,00	20.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.131.605,00	307.570.459,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Ngulak													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 % 100 %											
2056	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149.708.288,00	125.607.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.708.288,00	125.607.825,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan	100 % 100 %											
2057	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	349.575.000,00	347.910.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.575.000,00	349.575.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2058	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	349.281.278,00	358.430.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.281.278,00	358.430.069,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Plakat Tinggi													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen/ Laporan											
2059	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000,00	4.800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.800.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2060	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	9.800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.800.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan											
2061	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.894.204.525,00	2.927.734.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.204.525,00	2.927.734.895,70	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kemampuan aparatur	100 %											
2062	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	12.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2063	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	45.460.000,00	45.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.460.000,00	45.460.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
2064	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	9.995.449,00	15.225.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995.449,00	15.225.449,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2065	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	680.000,00	0,00	72.814.496,00	39.157.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.494.496,00	39.157.248,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2066	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	19.993.556,00	19.993.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993.556,00	19.993.556,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2067	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	39.993.744,00	19.316.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.993.744,00	19.316.872,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2068	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	34.999.424,00	34.877.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999.424,00	34.877.212,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2069	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2070	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	41.510.000,00	36.755.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.510.000,00	36.755.000,20	Pajak Daerah Pajak Daerah
2071	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	120.543.291,00	77.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.543.291,00	77.305.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %											
2072	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	680.000,00	0,00	49.170.780,00	13.022.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850.780,00	13.022.469,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
2073	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.001.536,00	75.001.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.001.536,00	75.001.536,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2074	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	226.820.622,00	209.836.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.820.622,00	209.836.422,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
2075	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	118.260.000,00	118.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260.000,00	118.260.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2076	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.870.000,00	30.870.000,00	0,00	166.714.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.870.000,00	197.584.348,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2077	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290.000,00	13.290.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	8 Dokumen											
2078	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	522.224.000,00	366.549.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.224.000,00	366.549.095,10	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	12 Laporan											
2079	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.776.000,00	7.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776.000,00	7.138.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan											
2080	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.125.000,00	2.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00	2.562.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %											
2081	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %											
2082	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 % 65 % 75 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	75 % 65 %											
2083	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi	100 % 70 % 75 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70 % 75 %											
2084	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2085	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Batanghari Leko													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2086	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.250.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2087	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	15.000.000,00	5.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	5.906.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2088	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.291.490.536,00	2.881.959.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.490.536,00	2.881.959.957,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2089	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.328.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328.000,00	340.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2090	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	47.941.000,00	46.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.941.000,00	46.283.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2091	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.275.500,00	14.230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275.500,00	14.230.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2092	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00	340.000,00	77.587.285,00	46.552.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.267.285,00	46.892.371,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2093	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19.999.500,00	19.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.500,00	19.999.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2094	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	39.998.300,00	19.999.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998.300,00	19.999.150,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2095	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.986.000,00	17.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.986.000,00	17.493.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2096	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	32.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2097	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2098	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.012.000,00	65.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.012.000,00	65.006.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %											
2099	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	680.000,00	340.000,00	44.250.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.930.000,00	26.890.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
2100	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	79.429.500,00	79.429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.429.500,00	79.429.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2101	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	203.321.333,00	199.772.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.321.333,00	199.772.667,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
2102	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	126.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	131.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2103	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	56.270.000,00	55.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.270.000,00	55.930.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2104	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2105	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	519.854.000,00	449.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.854.000,00	449.177.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %											
2106	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.530.000,00	4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530.000,00	4.265.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
2107	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Batanghari Leko)	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %											
2108	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Kec. Batanghari Leko)	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Penerapan PERDA Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah	100 % 100 %											
2109	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	14.412.000,00	7.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412.000,00	7.206.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2110	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	11.712.000,00	5.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712.000,00	5.856.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Yang dibina Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
2111	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16 Dokumen	7.200.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	3.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2112	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16 Laporan	13.292.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292.000,00	8.240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Sungai Keruh													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evalusai kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2113	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.166.000,00	6.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166.000,00	6.524.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2114	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.150.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150.000,00	2.106.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2115	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.267.058.537,00	2.745.214.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.058.537,00	2.745.214.507,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2116	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	14.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2117	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	52.355.000,00	45.708.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.355.000,00	45.708.750,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2118	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.081.100,00	5.081.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.100,00	5.081.100,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2119	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	680.000,00	340.000,00	88.155.930,00	52.068.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.835.930,00	52.408.830,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2120	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	10.229.600,00	10.229.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229.600,00	10.229.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2121	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	50.049.972,00	24.934.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.049.972,00	24.934.085,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2122	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	35.000.200,00	17.489.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.200,00	17.489.850,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2123	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	25.600.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2124	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.800.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	47.250.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2125	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.244.000,00	76.425.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.244.000,00	76.425.250,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2126	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	680.000,00	340.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910.000,00	19.570.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %											
2127	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	35.129.058,00	100.293.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.129.058,00	100.293.437,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2128	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	171.506.489,00	171.417.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506.489,00	171.417.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
2129	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	120.760.000,00	120.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.760.000,00	120.760.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2130	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.062.000,00	74.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.062.000,00	74.722.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2131	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggeraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	100 % 100 %											
2132	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	466.300.000,00	410.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.300.000,00	410.310.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan PATEN Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %											
2133	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.610.000,00	8.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.610.000,00	8.215.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
2134	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Keruh	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya penegakan peraturan daerah	100 %											
2135	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Laporan	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forkompinda Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimda tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2136	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Keruh	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah	10 Dokumen 100 %											
2137	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Dokumen	20.580.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580.000,00	4.180.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2138	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	20.006.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006.000,00	2.520.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Sungai Lilin													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2139	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.760.000,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760.000,00	3.552.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2140	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 % 100 %											
2141	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.340.579.804,00	4.127.883.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.579.804,00	4.127.883.854,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %											
2142	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.133.744,00	11.133.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133.744,00	11.133.744,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2143	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	702.200,00	680.000,00	82.027.335,00	43.954.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.729.535,00	44.634.446,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2144	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.279.052,00	16.279.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.279.052,00	16.279.052,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2145	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.037.397,00	33.774.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.037.397,00	33.774.489,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2146	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.628.800,00	15.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.628.800,00	15.221.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2147	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29.280.000,00	25.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00	25.680.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2148	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	81.690.000,00	78.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.690.000,00	78.630.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2149	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	133.880.000,00	107.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.880.000,00	107.732.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 % 100 %											
2150	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	680.000,00	0,00	5.983.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663.511,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhanan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %											
2151	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.851.620,00	89.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.851.620,00	89.586.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2152	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	333.466.933,00	338.533.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.466.933,00	338.533.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 % 100 %											
2153	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	122.260.000,00	122.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.260.000,00	122.260.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2154	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.680.000,00	97.539.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680.000,00	97.539.638,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2155	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860.000,00	15.860.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %											
2156	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	537.584.000,00	406.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.584.000,00	406.945.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan	100 % 100 % 100 %											
2157	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %											
2158	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Lilin	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan	100 % 100 %											
2159	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 % 100 %											
2160	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Lilin	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggaraan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 % 100 %											
2161	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	7.560.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	5.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2162	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	12.600.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	6.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Sungai Lilin													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan	100 % 100 % 100 %												
2163	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	124.364.550,00	122.057.211,00	25.635.450,00	10.957.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	133.014.354,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan	100 % 100 %											
2164	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
2165	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Sungai Lilin Jaya													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan	100 % 100 % 100 %												
2166	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	111.462.354,00	111.482.274,00	38.537.646,00	27.436.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	138.919.254,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan	100 % 100 %											
2167	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
2168	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Bayung Lencir													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	peresentase kualitas pelayanan masyarakat	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggara nya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 12 bulan 100 %											
2169	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	14.974.000,00	8.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974.000,00	8.018.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2170	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	19.680.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680.000,00	9.840.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daera Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 1 tahun											
2171	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.847.999.918,00	3.661.782.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.999.918,00	3.661.782.065,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terselenggaran ya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 4 orang 100 %											
2172	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	19.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2173	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.460.000,00	40.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460.000,00	40.460.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
2174	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.936.150,00	9.936.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936.150,00	9.936.150,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2175	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	0,00	78.914.451,00	46.796.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.914.451,00	46.796.379,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2176	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20.001.090,00	20.001.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.090,00	20.001.090,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2177	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	39.980.758,00	19.980.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980.758,00	19.980.999,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2178	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	34.976.100,00	17.495.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976.100,00	17.495.370,40	Pajak Daerah Pajak Daerah
2179	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2180	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2181	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.940.000,00	73.969.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.940.000,00	73.969.999,60	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2182	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	48.433.407,00	29.083.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.433.407,00	29.083.332,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2183	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.115.000,00	83.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.115.000,00	83.115.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2184	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.328.800,00	265.978.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.328.800,00	265.978.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2185	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	85.460.000,00	85.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.460.000,00	85.460.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2186	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.774.000,00	74.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.774.000,00	74.774.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2187	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	24.620.000,00	24.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620.000,00	24.620.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan	7 kegiatan											
2188	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	499.347.000,00	479.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.347.000,00	479.347.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan terlasananya pelayanan PATEN	100 % 12 bulan											
2189	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.182.600,00	14.591.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.182.600,00	14.591.364,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
2190	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penegakan peraturan daerah kecamatan bayung lencir	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terlaksananya penegakan peraturan kepala daerah	100 % 1 tahun											
2191	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	9.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelesaian konflik di wilayah kecamatan (Bayung Lencir Terlaksananya Forkopimda tingkat Kecamatan	100 % 12 bulan											
2192	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27 Orang	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740.000,00	11.740.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Bayung Lencir	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang dibina terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 % 21 Desa											
2193	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	27 Dokumen	9.400.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	4.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2194	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27 Laporan	16.565.000,00	8.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.000,00	8.282.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Bayung Lencir													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											
2195	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	121.727.065,00	108.325.253,00	28.272.477,00	16.502.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.542,00	124.827.512,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2196	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	341.755.919,00	341.755.919,00	7.281.600,00	7.281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.037.519,00	349.037.519,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
2197	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	345.981.052,00	349.977.052,00	3.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.977.052,00	349.977.052,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Bayung Lencir Indah													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											
2198	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	119.213.415,00	107.679.895,00	30.760.764,00	17.440.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.974.179,00	125.120.659,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2199	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	341.835.976,00	341.835.976,00	8.158.500,00	8.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.994.476,00	349.994.476,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
2200	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	349.949.700,00	354.276.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.949.700,00	354.276.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Lalan													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinnerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2201	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.100.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2202	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	12.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.878.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2203	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.591.798.099,00	3.391.844.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.798.099,00	3.391.844.367,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											
2204	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	18.582.000,00	18.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.582.000,00	18.582.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2205	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.230.000,00	39.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.230.000,00	39.056.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2206	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	9.999.500,00	9.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.500,00	9.999.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2207	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	680.000,00	0,00	74.074.100,00	74.074.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.754.100,00	74.074.100,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2208	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	17.093.900,00	17.093.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093.900,00	17.093.900,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2209	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	39.967.020,00	39.967.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967.020,00	39.967.020,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2210	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	35.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	17.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2211	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	36.100.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2212	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	25.000.000,00	122.714.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	122.714.500,50	Pajak Daerah Pajak Daerah
2213	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.929.000,00	90.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.929.000,00	90.479.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %											
2214	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	680.000,00	680.000,00	49.124.000,00	49.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.804.000,00	49.804.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2215	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.630.167,00	23.630.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.630.167,00	23.630.167,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2216	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.141.867,00	108.280.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.141.867,00	108.280.233,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
2217	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	36.920.000,00	36.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.920.000,00	36.920.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2218	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.823.000,00	74.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.823.000,00	74.823.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2219	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2220	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19 Dokumen	755.380.000,00	511.436.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.380.000,00	511.436.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %											
2221	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.700.000,00	17.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	17.380.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %											
2222	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Lalan)	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %											
2223	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-											
2224	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	13.050.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00	10.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-											
2225	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27 Orang	9.290.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	10.260.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang dibina (Kec. Lalan)	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 % 100 %											
2226	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	27 Dokumen	9.290.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	7.160.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2227	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27 Laporan	9.290.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	6.470.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Tungkal Jaya													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan penganggran evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %											
2228	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.797.550,00	1.547.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797.550,00	1.547.750,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2229	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.906.825,00	1.947.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906.825,00	1.947.297,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %											
2230	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.467.078.162,00	3.026.789.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467.078.162,00	3.026.789.605,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %											
2231	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670.000,00	14.670.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2232	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.230.000,00	20.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230.000,00	20.230.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 %											
2233	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.925.065,00	9.925.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925.065,00	9.925.065,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2234	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	87.540.927,00	87.540.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.220.927,00	88.220.927,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2235	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.992.545,00	17.992.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.545,00	17.992.545,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2236	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.768.328,00	24.875.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768.328,00	24.875.678,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2237	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.592.800,00	14.292.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.592.800,00	14.292.272,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2238	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2239	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.750.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2240	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	123.874.000,00	123.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.874.000,00	123.413.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 %											
2241	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	680.000,00	680.000,00	42.885.960,00	42.885.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.565.960,00	43.565.960,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %											
2242	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.916.000,00	146.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.916.000,00	146.652.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2243	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.914.400,00	135.914.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.914.400,00	135.914.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase saranan dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 %											
2244	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	78.840.000,00	78.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.840.000,00	78.840.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2245	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2246	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintaj di tingkat kecamatan	100 % 100 %											
2247	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	428.236.000,00	333.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.236.000,00	333.076.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Persentase Penyelenggaraaan Pelayanan PATEN	100 % 100 %											
2248	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	19.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
2249	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase penyelenggaraan kegiatan koordinasi penerapan perda	100 % 100 %											
2250	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya) Persentase Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan	100 % 85 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)	85 % 100 %											
2251	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya	100 % 85 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Jumlah Desa Yang Dibina	100 % 85 %											
2252	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	23.820.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00	12.540.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2253	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	55.929.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.929.000,00	31.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Lawang Wetan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
2254	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.980.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980.000,00	3.510.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2255	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510.000,00	3.510.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
2256	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.792.156.872,00	3.250.582.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.156.872,00	3.250.582.148,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Peningkatan Kualitas Kepegawaian	100 % 100 %											
2257	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	21.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.218.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2258	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 % 100 %											
2259	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.696.998,00	7.696.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696.998,00	7.696.998,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2260	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	53.268.056,00	46.494.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.948.056,00	47.174.459,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2261	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	13.089.356,00	13.089.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.356,00	13.089.356,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2262	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.016.661,00	46.016.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.016.661,00	46.016.661,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2263	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.982.000,00	26.698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.982.000,00	26.698.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2264	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	41.360.000,00	25.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.360.000,00	25.680.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2265	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	25.880.000,00	25.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880.000,00	25.880.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2266	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	142.640.000,00	131.328.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.640.000,00	131.328.300,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2267	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	43.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2268	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	680.000,00	0,00	34.765.200,00	44.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.445.200,00	44.450.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 % 100 %											
2269	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.798.325,00	87.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.798.325,00	87.375.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2270	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	307.417.244,00	333.730.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.417.244,00	333.730.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 % 100 %											
2271	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	118.260.000,00	118.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260.000,00	118.260.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2272	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	43.190.000,00	67.593.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.190.000,00	67.593.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
2273	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	23.530.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.530.000,00	16.340.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) [deleted]	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)	100 % 100 %											
2274	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	471.700.000,00	378.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.700.000,00	378.580.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											
2275	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	40.860.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.860.000,00	3.510.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
2276	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4.950.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	2.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													
2277	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda	100 %											
2278	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	16.800.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	8.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 % 100 %											
2279	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	16.800.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	8.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang Dibina Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)	100 % 100 %											
2280	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Dokumen	15.540.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540.000,00	7.770.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2281	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Babat Supat													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
2282	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	9.999.948,00	7.858.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.948,00	7.858.974,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2283	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
2284	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	1.979.448.753,00	2.613.214.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.448.753,00	2.613.214.200,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %											
2285	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2286	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	49.959.000,00	46.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.959.000,00	46.762.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	100 %											
2287	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.996.927,00	9.996.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.927,00	9.996.927,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2288	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	0,00	16.200.000,00	54.356.968,00	99.206.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.356.968,00	115.406.910,50	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
2289	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	19.994.874,00	19.994.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994.874,00	19.994.874,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2290	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	24.683.349,00	24.471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683.349,00	24.471.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2291	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.043.720,00	7.021.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043.720,00	7.021.860,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2292	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2293	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.070.000,00	55.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070.000,00	55.785.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2294	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.319.000,00	108.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.319.000,00	108.576.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %											
2295	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	25.330.261,00	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330.261,00	48.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemunuhan Layanan Administrasi	100 %											
2296	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.626.244,00	155.616.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.626.244,00	155.616.499,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Daerah
2297	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172.960.444,00	190.510.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.960.444,00	190.510.444,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %											
2298	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	78.840.000,00	78.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.840.000,00	78.840.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2299	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.792.000,00	149.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.792.000,00	149.792.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2300	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %											
2301	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	492.852.000,00	465.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.852.000,00	465.577.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-											
2302	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.099.200,00	33.099.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.099.200,00	33.099.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
2303	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4.950.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	2.475.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Babat Supat	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda	100 %											
2304	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	13.760.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	6.880.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik diwilayah Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2305	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	7.747.000,00	3.873.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747.000,00	3.873.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat	100 % 65 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang dibina	65 %											
2306	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	13.760.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	6.880.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2307	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	13.760.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	6.880.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Jirak Jaya													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dan perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2308	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.950.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00	4.975.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2309	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2310	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.206.893.144,00	2.314.686.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.893.144,00	2.314.686.608,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan aparatur Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2311	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2312	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000,00	67.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	67.845.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100 % 100 %											
2313	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.997.200,00	9.997.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997.200,00	9.997.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2314	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	680.000,00	67.893.483,00	46.343.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.573.483,00	47.023.606,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2315	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.999.500,00	19.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.500,00	19.999.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2316	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.050.800,00	33.348.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050.800,00	33.348.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2317	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36.275.400,00	18.137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275.400,00	18.137.700,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2318	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	32.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2319	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2320	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	100.000.000,00	104.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	104.462.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %											
2321	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	680.000,00	680.000,00	54.691.920,00	70.333.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.371.920,00	71.013.620,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
2322	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.460.000,00	65.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.460.000,00	65.460.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2323	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	218.098.578,00	221.609.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.098.578,00	221.609.689,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %											
2324	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	42.040.000,00	42.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.040.000,00	42.040.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2325	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.992.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
2326	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggeraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2327	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	483.354.000,00	461.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.354.000,00	461.925.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %											
2328	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.031.000,00	9.515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.031.000,00	9.515.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
2329	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.490.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %											
2330	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggarakan penegakan peraturan daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah	100 % 100 %											
2331	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30.480.000,00	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480.000,00	15.240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya)	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Forkompinda tingkat kecamatan Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan	100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
					Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2332	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	13.815.000,00	11.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815.000,00	11.070.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya	100 %											
	7.01.05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %											
2333	7.01.05.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	14.160.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160.000,00	7.080.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
2334	7.01.05.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	14.160.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160.000,00	7.080.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	611.300.636.807,00	783.966.906.236,00	1.799.823.500,00	2.467.623.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.100.460.307,00	786.434.529.336,00
1	01	1	02	Kesehatan	500.160.315.008,00	548.019.282.940,60	13.636.799.774,00	18.344.473.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.797.114.782,00	566.363.756.288,60
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.699.754.949,00	36.855.286.329,89	428.571.999,00	1.704.116.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.128.326.948,00	38.559.402.997,89
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.715.569.121,00	14.818.919.215,00	405.745.150,00	3.776.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121.314.271,00	18.595.649.215,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	29.659.325.688,00	44.413.986.171,20	622.393.052,00	870.209.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.281.718.740,00	45.284.195.734,00
1	01	1	06	Sosial	8.786.968.296,00	11.143.847.442,00	297.561.000,00	181.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084.529.296,00	11.325.747.442,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	7.402.209.016,00	9.175.413.633,00	219.148.490,00	198.114.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.357.506,00	9.373.528.429,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.037.985.248,00	7.326.738.243,00	145.138.945,00	33.787.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.124.193,00	7.360.526.212,00
1	01	2	09	Pangan	6.959.578.730,00	8.032.888.868,00	217.607.730,00	224.353.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177.186.460,00	8.257.242.724,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	30.330.787.944,00	38.236.206.731,00	299.826.300,00	549.385.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630.614.244,00	38.785.592.631,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.726.788.029,00	16.978.015.723,00	5.744.904.665,00	5.582.438.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471.692.694,00	22.560.453.778,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.729.610.578,00	17.461.971.919,00	281.341.155,00	245.187.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010.951.733,00	17.707.159.264,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.030.622.884,00	11.057.373.336,00	3.295.508.210,00	816.184.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326.131.094,00	11.873.558.262,00
1	01	2	15	Perhubungan	11.720.673.643,00	13.316.981.927,00	192.035.994,00	110.007.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912.709.637,00	13.426.989.076,40
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	8.562.100.580,00	10.391.792.160,50	479.348.039,00	367.608.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041.448.619,00	10.759.400.983,90
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.761.447.255,00	6.976.597.367,00	274.987.400,00	267.342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036.434.655,00	7.243.939.667,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	12.834.277.581,00	13.550.664.761,50	2.455.719.331,00	3.311.338.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.289.996.912,00	16.862.003.092,50
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	12.411.656.491,00	15.286.982.183,00	232.430.680,00	220.584.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.087.171,00	15.507.566.591,00
1	01	2	20	Statistik	1.144.013.017,00	594.775.805,30	119.204.758,00	171.233.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.217.775,00	766.009.363,30
1	01	2	23	Perpustakaan	7.734.271.597,00	9.256.746.837,00	152.666.996,00	571.090.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886.938.593,00	9.827.837.626,00
1	01	2	24	Kearsipan	703.229.553,00	370.823.593,00	52.978.025,00	52.978.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.207.578,00	423.801.618,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	8.148.953.354,00	9.921.263.110,00	251.835.107,00	165.941.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.788.461,00	10.087.204.794,00
1	01	3	27	Pertanian	35.498.617.809,00	44.103.435.653,50	761.426.696,00	715.030.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260.044.505,00	44.818.466.263,50
1	01	3	30	Perdagangan	11.609.016.278,00	13.757.985.324,50	438.371.253,00	152.742.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047.387.531,00	13.910.727.697,50
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	114.637.078.253,00	132.544.645.494,72	6.174.512.807,00	6.789.589.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	120.811.591.060,00	139.334.235.055,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	103.157.715.594,00	96.098.608.057,40	3.655.716.111,00	24.274.265.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.813.431.705,00	120.372.873.231,00
1	01	5	01	Perencanaan	22.036.879.569,00	20.314.338.742,80	249.250.500,00	210.410.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.286.130.069,00	20.524.749.454,80
1	01	5	02	Keuangan	58.020.422.659,00	66.531.311.390,69	888.015.928,00	1.617.273.596,00	6.997.200.620,00	5.442.284.504,55	494.667.382.300,00	544.652.123.254,00	560.573.021.507,00	618.242.992.745,24

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	5	03	Kepegawaian	18.230.742.731,00	18.504.775.054,00	544.343.520,00	396.566.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775.086.251,00	18.901.341.166,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	975.589.524,00	1.187.593.978,70	0,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.589.524,00	1.188.250.099,70
1	01	6	01	Inspektorat	25.325.343.690,00	30.031.219.164,00	295.756.900,00	376.910.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.621.100.590,00	30.408.129.304,00
1	01	7	01	Kecamatan	77.645.953.605,00	85.575.086.637,16	2.651.702.395,00	2.341.519.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.297.656.000,00	87.916.606.622,46
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	17.363.840.028,00	16.225.378.163,00	306.182.800,00	213.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670.022.828,00	16.439.235.163,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	8.070.556.763,00	6.476.674.010,00	5.916.105.058,00	12.407.980.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986.661.821,00	18.884.654.818,00
2	03	1	06	Sosial	1.177.715.000,00	959.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.715.000,00	959.355.000,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.261.040.198,00	168.403.064.883,82	317.894.602.357,00	485.944.490.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	441.155.642.555,00	654.347.554.908,71
3	04	2	07	Tenaga Kerja	5.696.154.175,00	5.753.821.875,00	1.088.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.506.175,00	5.753.821.875,00
3	04	2	09	Pangan	4.120.367.045,00	2.354.871.956,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.367.045,00	2.356.411.956,00
3	04	2	15	Perhubungan	15.236.941.614,00	14.967.871.385,60	9.249.255.928,00	15.773.211.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.486.197.542,00	30.741.082.813,60
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	15.157.882.574,00	19.673.947.719,00	796.299.250,00	487.229.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.954.181.824,00	20.161.176.971,50
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.814.083.250,00	9.574.809.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.083.250,00	9.574.809.775,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	3.310.815.550,00	2.031.411.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.815.550,00	2.031.411.634,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	04	2	21	Persandian	1.219.935.906,00	1.246.227.661,00	62.664.495,00	306.502.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.600.401,00	1.552.730.108,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	8.061.265.213,00	6.035.294.424,00	32.872.000,00	74.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094.137.213,00	6.109.902.424,00
3	04	3	27	Pertanian	47.869.376.693,00	50.522.220.040,50	4.784.682.820,00	2.237.420.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.654.059.513,00	52.759.640.680,50
3	04	3	30	Perdagangan	7.529.638.468,00	6.282.797.458,00	4.005.682.850,00	621.112.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535.321.318,00	6.903.909.908,00
3	04	3	31	Perindustrian	1.391.297.019,00	1.080.594.362,50	1.907.261.038,00	435.334.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.558.057,00	1.515.928.854,50
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.527.066.912,00	24.662.684.950,00	0,00	1.191.061.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527.066.912,00	25.853.746.300,00
4	05	2	10	Pertanahan	385.880.000,00	54.760.000,00	9.614.120.000,00	1.106.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	1.161.413.750,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	11.620.591.011,00	10.351.690.777,00	5.443.238.350,00	8.144.605.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063.829.361,00	18.496.296.152,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.795.004.600,00	16.479.516.000,00	0,00	1.727.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795.004.600,00	18.206.988.000,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22.155.249.000,00	29.432.182.708,00	56.122.971.206,00	78.153.961.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.278.220.206,00	107.586.144.407,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	68.844.098.830,00	106.824.828.298,00	12.121.817.649,00	46.700.458.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.965.916.479,00	153.525.286.521,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.757.369.388,00	9.436.365.596,00	816.493.800,00	1.585.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.863.188,00	11.021.382.596,00
7				PARIWISATA										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
7	08	3	26	Pariwisata	3.376.850.850,00	3.379.690.700,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.850.850,00	3.579.690.700,00
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	14.544.943.350,00	125.558.721.433,00	30.121.540.581,00	77.588.779.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666.483.931,00	203.147.500.620,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	71.050.978.201,00	77.504.647.461,00	14.870.025.400,00	25.320.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.921.003.601,00	102.824.705.461,00
8	10	2	22	Kebudayaan	4.119.860.850,00	5.819.156.325,00	329.100.000,00	428.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.960.850,00	6.248.141.325,00
8	10	2	23	Perpustakaan	2.232.163.501,00	1.766.403.714,00	281.502.777,00	265.555.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.666.278,00	2.031.959.225,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	62.740.536.591,00	64.914.098.175,00	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.781.786.591,00	64.914.098.175,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.702.752.796,00	1.990.589.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.752.796,00	1.990.589.436,00
9	11	3	32	Transmigrasi	300.000.000,00	156.038.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	156.038.586,00
				TOTAL	**2.384.132.390.457,00**	**2.925.722.178.535,88**	**523.070.692.769,00**	**838.023.488.614,17**	**6.997.200.620,00**	**5.442.284.504,55**	**494.667.382.300,00**	**544.652.123.254,00**	**3.408.867.666.146,00**	**4.313.840.074.908,60**

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000,00	1.695.142.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000,00	637.622.250,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	446.083.600,00	401.066.800,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.025.386.200,00	5.863.645.200,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.364.900.000,00	3.364.900.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	6.122.120.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.887.200.750,00	6.003.016.000,00
		Total	12.323.570.550,00	24.087.512.250,00
2.	Literasi dan Numerasi	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.387.500.000,00	626.997.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.579.082.000,00	705.554.300,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	506.850.000,00	265.951.800,00
		Total	5.473.432.000,00	1.598.503.100,00
3.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000,00	318.852.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.800.000.000,00	1.962.958.000,00
		Total	2.400.000.000,00	2.281.810.000,00
4.	Kekhususan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.290.583.700,00	967.736.150,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	324.547.000,00	3.601.763.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	723.310.800,00	270.244.800,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	398.440.000,00
		Total	2.338.441.500,00	5.238.183.950,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	22.535.444.050,00	33.206.009.300,00
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85.884.666,00	1.771.974.276,00
		Total	85.884.666,00	1.771.974.276,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.000.000,00	241.341.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
		Total	50.000.000,00	241.341.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	109.256.000,00	587.211.600,00
		Total	109.256.000,00	587.211.600,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	136.505.000,00	113.319.000,00
		Total	136.505.000,00	113.319.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	74.232.000,00	1.386.720.339,00
		Total	74.232.000,00	1.386.720.339,00
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	83.673.000,00	32.965.000,00
		Total	83.673.000,00	32.965.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	46.778.000,00	111.760.000,00
		Total	46.778.000,00	111.760.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	84.493.000,00	33.016.000,00
		Total	84.493.000,00	33.016.000,00
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	36.240.000,00	14.130.000,00
		Total	36.240.000,00	14.130.000,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.980.000,00	492.086.000,00
		Total	49.980.000,00	492.086.000,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	57.865.000,00	537.540.000,00
		Total	57.865.000,00	537.540.000,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	62.040.000,00	35.430.000,00
		Total	62.040.000,00	35.430.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	876.946.666,00	5.357.493.215,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	6.495.004.600,00	16.009.280.800,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.300.000.000,00	2.197.707.200,00
		Total	8.795.004.600,00	18.206.988.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	477.570.200,00	477.570.200,00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	99.434.000,00	77.217.000,00
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	2.969.095.550,00
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	42.160.000,00	9.768.000,00
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	175.000.000,00	175.000.000,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.842.902.712,00	16.059.346.300,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	158.241.600,00
Total			9.637.066.912,00	19.926.238.650,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			18.432.071.512,00	38.133.226.650,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0,00	1.636.866.250,00
Total			0,00	1.636.866.250,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.435.523.050,00	4.862.000.000,00
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	31.949.750,00
Total			5.485.523.050,00	4.893.949.750,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			5.485.523.050,00	6.530.816.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	421.425.000,00	308.625.000,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.715.250,00	38.715.250,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	145.886.000,00	15.380.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	276.950.000,00	25.215.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	165.557.000,00	0,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	0,00	67.120.000,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	230.520.000,00	221.520.000,00
		Total	1.279.053.250,00	676.575.250,00
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	147.480.590,00	125.489.087,00
		Total	147.480.590,00	125.489.087,00
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	234.323.000,00	99.323.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	930.623.000,00	885.623.000,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.576.907.321,00	346.924.821,00
		Total	2.741.853.321,00	1.331.870.821,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	833.760.000,00	833.760.000,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	593.932.000,00	556.432.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	222.954.700,00	213.204.700,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	950.810.000,00	832.850.000,00
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	51.850.000,00	0,00
		Total	2.653.306.700,00	2.436.246.700,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	643.389.000,00	593.931.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
		Total	643.389.000,00	593.931.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.465.082.861,00	5.164.112.858,00
F SPM Bidang Sosial				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	403.292.700,00	220.415.700,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	0,00	400.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	1.711.924.000,00	1.471.563.000,00
		Total	2.115.216.700,00	2.091.978.700,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	367.767.000,00	304.180.000,00
		Total	367.767.000,00	304.180.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	2.482.983.700,00	2.396.158.700,00

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	3.599.999.200,00	3.157.755.950,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	9.084.529.296,00	11.325.747.442,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	253.735.000,00	127.423.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0,00	6.213.532.523,00	5.557.207.109,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	7.177.186.460,00	8.257.242.724,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	9.097.015.077,00	8.467.406.684,36
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	138.223.000,00	97.640.900,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	1.177.715.000,00	959.355.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	247.321.730,00	101.284.430,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	131.511.050,00	64.473.300,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	0,00	88.860.000,00	48.020.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	108.176.708,00	51.919.700,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	1.500.000.800,00	1.348.824.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	800.000.000,00	397.795.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	892.199.600,00	807.534.900,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	13.326.131.094,00	11.873.558.262,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	613.100.460.307,00	786.434.529.336,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	719.678.919,00	452.701.919,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	491.655.320,00	3.302.670.500,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	978.035.525,00	511.585.825,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0,00	418.587.050,00	364.317.050,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	9.041.448.619,00	10.759.400.983,90
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0,00	80.807.820.111,00	98.738.256.811,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	30.630.614.244,00	38.785.592.631,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	7.294.300.550,00	6.524.910.175,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	6.503.822.111,00	12.310.264.108,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	975.589.524,00	759.064.298,85

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	513.305.500,00	239.665.750,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	9.637.066.912,00	19.926.238.650,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	275.000.000,00	343.150.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	453.703.800,00	218.295.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	68.076.654.056,00	90.843.970.269,81
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	19.647.010.000,00	33.654.797.475,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	4.644.780.600,00	4.506.892.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	513.797.114.782,00	566.363.756.288,60
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	2.987.632.400,00	1.636.001.800,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	2.278.464.756,00	2.098.177.806,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	372.898.040,00	198.404.040,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	10.223.741.437,00	13.168.614.728,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	399.937.890,00	381.819.890,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	10.664.209.821,00	10.083.447.341,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	1.263.217.775,00	766.009.363,30
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	15.289.996.912,00	16.862.003.092,50
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	2.171.453.529,00	1.130.733.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	492.805.500,00	335.008.911,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	2.049.958.635,00	1.742.217.170,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	7.321.187.372,00	6.002.762.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	2.837.260.350,00	2.721.105.175,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	7.048.876.931,00	7.897.576.963,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	11.480.785.701,00	12.376.430.991,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	15.190.843.609,00	13.587.876.747,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	846.406.500,00	782.807.400,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	7.886.938.593,00	9.827.837.626,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	1.248.411.957,00	360.784.493,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	1.730.000.150,00	929.834.950,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	36.260.044.505,00	44.818.466.263,50
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	21.051.766.173,00	23.770.488.235,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	171.952.000,00	84.114.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	88.251.252.238,00	97.433.234.963,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	934.046.550,00	602.418.925,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	240.525.000,00	135.609.500,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	96.212.648.437,00	113.554.434.845,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	119.604.000,00	59.802.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	2.498.428.750,00	2.185.586.820,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	165.807.867,00	578.531.200,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	3.741.363.738,00	2.151.697.392,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	9.083.060.286,00	6.154.538.513,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	345.716.000,00	415.351.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	3.547.176.450,00	2.009.311.975,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	3.368.179.850,00	7.298.631.425,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	7.885.133.450,00	11.405.988.800,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	700.000.000,00	343.355.140,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	743.103.000,00	371.027.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	38.736.777.649,00	29.528.902.961,19
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	3.190.149.781,00	1.961.857.167,20
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	12.047.387.531,00	13.910.727.697,50
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	60.061.922.818,00	71.036.743.878,64
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	4.998.389.000,00	4.948.931.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	13.279.506.370,00	32.238.251.650,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	1.916.400.001,00	7.140.180.896,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	4.124.214.850,00	771.243.450,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	3.528.249.850,00	5.203.242.825,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	2.700.177.050,00	1.027.578.053,60
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	300.000.000,00	247.357.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	30.281.718.740,00	45.284.195.734,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	235.629.000,00	103.004.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	7.621.357.506,00	9.373.528.429,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	21.697.160.492,00	29.665.484.760,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	3.932.000.000,00	3.607.945.250,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	350.000.000,00	173.292.250,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	622.268.378,00	350.949.378,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	2.115.216.700,00	2.091.978.700,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	917.594.700,00	1.266.478.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.582.463.924,00	1.060.693.174,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	8.890.472.742,00	8.204.016.430,20
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	16.597.551.538,00	16.377.305.467,60
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0,00	385.839.000,00	1.190.081.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	6.183.124.193,00	7.360.526.212,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	1.729.791.600,00	2.148.770.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.513.666.278,00	2.031.959.225,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0,00	450.000.000,00	829.699.200,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	5.890.000.000,00	5.927.507.650,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	3.435.154.990,00	3.181.772.150,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	1.282.600.401,00	1.552.730.108,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	18.338.765.186,00	26.580.681.410,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	538.950.499,00	277.491.999,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	756.207.578,00	423.801.618,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	8.400.788.461,00	10.087.204.794,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	150.062.000,00	71.504.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	328.039.250,00	123.364.900,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	196.237.000,00	388.992.996,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0,00	59.749.000,00	27.517.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	47.387.063.521,00	30.583.867.825,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	44.666.483.931,00	203.147.500.620,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	99.937.000,00	49.711.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	2.484.450.710,00	1.625.459.710,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	423.029.402,00	255.141.402,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	41.588.871.170,00	50.438.908.232,69
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	12.644.087.171,00	15.507.566.591,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	11.912.709.637,00	13.426.989.076,40
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	265.854.980,00	370.561.128,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	6.036.434.655,00	7.243.939.667,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	300.000.000,00	156.038.586,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	19.710.000.000,00	25.534.904.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	156.533.000,00	99.387.200,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	34.128.326.948,00	38.559.402.997,89
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	20.521.100.590,00	25.901.548.854,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	3.003.180.057,00	1.385.407.854,50
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	17.221.301.118,00	19.944.404.408,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	420.000.000,00	206.928.959,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	7.063.709.082,00	11.957.160.541,30
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	81.902.388,00	40.987.545,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	272.961.246,00	170.967.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	1.621.167.700,00	1.181.541.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	624.739.000,00	395.431.400,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	5.795.600.000,00	4.555.903.900,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	12.121.314.271,00	18.595.649.215,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	79.586.229.799,00	151.499.254.397,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	8.795.004.600,00	18.206.988.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	1.678.028.500,00	904.676.500,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	299.995.000,00	286.397.500,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	1.319.020.000,00	1.307.555.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	7.570.698.265,00	6.772.289.684,50
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	310.830.982.731,00	494.492.839.260,71
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	10.000.000.000,00	1.161.413.750,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	1.451.212.000,00	884.861.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	15.007.275.142,00	16.243.483.648,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	1.100.000.000,00	550.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	10.111.920.876,00	7.898.070.130,46
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	297.100.919,00	163.727.019,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	511.017.096.808,00	562.117.447.112,55
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	50.683.086.756,00	70.645.251.607,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	1.633.167.050,00	1.129.583.525,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	7.233.395.673,00	8.637.532.451,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	4.833.217.000,00	4.633.978.740,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	3.556.272.774,00	2.817.447.400,00

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.066.702.439.685,00	1.004.601.364.281,00	1.004.601.364.281,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.052.463.105.360,00	989.582.029.956,00	989.582.029.956,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.052.463.105.360,00	989.582.029.956,00	989.582.029.956,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	217.249.625.620,00	203.029.450.620,00	203.147.500.620,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	123.059.989.330,00	115.601.439.330,00	114.545.823.330,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.364.900.000,00	3.364.900.000,00	3.364.900.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	635.566.000,00	1.135.566.000,00	1.135.566.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.262.836.000,00	8.112.836.000,00	8.112.836.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.037.060.000,00	5.037.060.000,00	5.037.060.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	362.300.000,00	362.300.000,00	362.300.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	705.554.300,00	705.554.300,00	705.554.300,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	318.852.000,00	318.852.000,00	318.852.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92.891.099.180,00	75.883.649.180,00	74.728.033.180,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	298.991.850,00	298.991.850,00	298.991.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	335.720.000,00	6.122.120.000,00	6.122.120.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.663.645.200,00	5.863.645.200,00	5.863.645.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	265.951.800,00	265.951.800,00	265.951.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.603.016.000,00	6.003.016.000,00	6.003.016.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.714.497.000,00	526.997.000,00	626.997.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	65.254.161.890,00	65.282.561.890,00	66.456.227.890,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.107.450.000,00	1.107.450.000,00	1.107.450.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	148.701.000,00	148.701.000,00	148.701.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.135.804.901,00	3.985.804.901,00	3.985.804.901,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.710.836.000,00	2.110.836.000,00	2.510.836.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.599.000.000,00	1.599.000.000,00	1.400.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	680.613.000,00	680.613.000,00	397.663.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	2.520.000.000,00	5.720.000.000,00	5.720.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	354.341.000,00	354.341.000,00	354.341.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	474.101.600,00	474.101.600,00	474.101.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.962.958.000,00	1.962.958.000,00	1.962.958.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45.582.770.889,00	35.760.070.889,00	36.915.686.889,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	110.573.700,00	110.573.700,00	110.573.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.227.871.850,00	1.227.871.850,00	1.227.871.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.596.462.950,00	2.196.462.950,00	2.196.462.950,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	145.800.000,00	5.859.400.000,00	5.859.400.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.896.877.000,00	1.984.377.000,00	2.084.377.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	26.818.717.500,00	20.330.592.500,00	20.330.592.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.009.473.000,00	1.209.473.000,00	1.209.473.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	270.244.800,00	270.244.800,00	270.244.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	967.736.150,00	967.736.150,00	967.736.150,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	19.009.138.000,00	11.271.013.000,00	11.271.013.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	44.958.300,00	44.958.300,00	44.958.300,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	995.142.000,00	1.695.142.000,00	1.695.142.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	198.440.000,00	398.440.000,00	398.440.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3.601.763.000,00	3.601.763.000,00	3.601.763.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	104.200.000,00	104.200.000,00	104.200.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	487.622.250,00	637.622.250,00	637.622.250,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.116.756.900,00	1.814.856.900,00	1.814.856.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	401.066.800,00	401.066.800,00	401.066.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.704.200.000,00	1.402.300.000,00	1.402.300.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.490.100,00	11.490.100,00	11.490.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	835.213.479.740,00	786.552.579.336,00	786.434.529.336,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.749.850,00	123.749.850,00	123.749.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.750.000,00	53.750.000,00	53.750.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	49.999.850,00	49.999.850,00	49.999.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	821.624.104.650,00	772.963.204.246,00	772.564.354.246,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	821.624.104.650,00	772.963.204.246,00	772.564.354.246,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.385.000,00	97.385.000,00	97.385.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.385.000,00	97.385.000,00	97.385.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.114.645.040,00	1.114.645.040,00	1.114.645.040,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.993.640,00	29.993.640,00	29.993.640,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.564.900,00	514.564.900,00	514.564.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.586.500,00	222.586.500,00	222.586.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	895.858.200,00	895.858.200,00	1.176.658.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	442.800.000,00	442.800.000,00	723.600.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	453.058.200,00	453.058.200,00	453.058.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.436.842.400,00	8.436.842.400,00	8.436.842.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.810.542.400,00	2.810.542.400,00	2.810.542.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.626.300.000,00	5.626.300.000,00	5.626.300.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.905.894.600,00	2.905.894.600,00	2.905.894.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	535.499.600,00	535.499.600,00	535.499.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.230.608.000,00	2.230.608.000,00	2.230.608.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.787.000,00	139.787.000,00	139.787.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.468.141.325,00	6.248.141.325,00	6.248.141.325,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.468.141.325,00	6.248.141.325,00	6.248.141.325,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.423.242.825,00	5.203.242.825,00	5.203.242.825,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	171.004.000,00	171.004.000,00	171.004.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	171.004.000,00	171.004.000,00	171.004.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.252.238.825,00	5.032.238.825,00	5.032.238.825,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3.466.363.825,00	4.246.363.825,00	4.246.363.825,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	785.875.000,00	785.875.000,00	785.875.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	343.150.000,00	343.150.000,00	343.150.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	343.150.000,00	343.150.000,00	343.150.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	343.150.000,00	343.150.000,00	343.150.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	286.397.500,00	286.397.500,00	286.397.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	286.397.500,00	286.397.500,00	286.397.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	286.397.500,00	286.397.500,00	286.397.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	415.351.000,00	415.351.000,00	415.351.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	415.351.000,00	415.351.000,00	415.351.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	415.351.000,00	415.351.000,00	415.351.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00	8.771.193.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000						Dinas Kesehatan	428.537.710.872,00	419.816.271.829,00	419.816.271.829,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	428.537.710.872,00	419.816.271.829,00	419.816.271.829,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	428.537.710.872,00	419.816.271.829,00	419.816.271.829,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	120.705.131.538,00	116.905.131.538,00	116.905.131.538,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.977.098.534,00	54.177.098.534,00	54.177.098.534,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.794.415.000,00	1.794.415.000,00	1.794.415.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.826.449.800,00	3.826.449.800,00	3.826.449.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.698.845.000,00	1.898.845.000,00	1.898.845.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	898.665.000,00	898.665.000,00	898.665.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.709.094.084,00	8.709.094.084,00	8.709.094.084,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	161.877.700,00	161.877.700,00	161.877.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	5.221.743.650,00	5.221.743.650,00	5.221.743.650,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.530.318.300,00	14.530.318.300,00	14.530.318.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	135.690.000,00	135.690.000,00	135.690.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.383.869.004,00	62.383.869.004,00	62.383.869.004,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.916.000,00	65.916.000,00	65.916.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	219.741.000,00	219.741.000,00	219.741.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	587.211.600,00	587.211.600,00	587.211.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.879.000,00	75.879.000,00	75.879.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.428.499,00	38.428.499,00	38.428.499,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.965.000,00	32.965.000,00	32.965.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67.360.000,00	67.360.000,00	67.360.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33.016.000,00	33.016.000,00	33.016.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.130.000,00	14.130.000,00	14.130.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.036.000,00	21.036.000,00	21.036.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.230.000,00	25.230.000,00	25.230.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	71.922.000,00	71.922.000,00	71.922.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.440.500,00	111.440.500,00	111.440.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.388.000,00	19.388.000,00	19.388.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.278.000,00	35.278.000,00	35.278.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	560.871.322,00	560.871.322,00	560.871.322,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	13.704.800,00	13.704.800,00	13.704.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	76.679.500,00	76.679.500,00	76.679.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	209.702.900,00	209.702.900,00	209.702.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	60.242.823.200,00	56.242.823.200,00	56.242.823.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	436.284.500,00	436.284.500,00	436.284.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	41.927.900,00	41.927.900,00	41.927.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.206.983.283,00	3.206.983.283,00	3.206.983.283,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24.875.000,00	24.875.000,00	24.875.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	21.120.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	22.910.000,00	22.910.000,00	22.910.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	13.270.000,00	13.270.000,00	13.270.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	50.575.000,00	50.575.000,00	50.575.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	132.970.000,00	132.970.000,00	132.970.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132.970.000,00	132.970.000,00	132.970.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.194.000,00	211.194.000,00	211.194.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	211.194.000,00	211.194.000,00	211.194.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.266.478.000,00	1.266.478.000,00	1.266.478.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	252.755.000,00	252.755.000,00	252.755.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	252.755.000,00	252.755.000,00	252.755.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	993.743.000,00	993.743.000,00	993.743.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	993.743.000,00	993.743.000,00	993.743.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	388.992.996,00	388.992.996,00	388.992.996,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	104.930.800,00	104.930.800,00	104.930.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	104.930.800,00	104.930.800,00	104.930.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	36.296.000,00	36.296.000,00	36.296.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	36.296.000,00	36.296.000,00	36.296.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	195.241.200,00	195.241.200,00	195.241.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	195.241.200,00	195.241.200,00	195.241.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	52.524.996,00	52.524.996,00	52.524.996,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	52.524.996,00	52.524.996,00	52.524.996,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	195.267.040,00	195.267.040,00	195.267.040,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.240.000,00	39.240.000,00	39.240.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	39.240.000,00	39.240.000,00	39.240.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.539.000,00	41.539.000,00	41.539.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	41.539.000,00	41.539.000,00	41.539.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.488.040,00	114.488.040,00	114.488.040,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	114.488.040,00	114.488.040,00	114.488.040,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.981.841.298,00	301.060.402.255,00	301.060.402.255,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.255.510,00	169.255.510,00	169.255.510,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.978.710,00	77.978.710,00	77.978.710,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	56.476.800,00	56.476.800,00	56.476.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	273.195.772.952,00	268.274.333.909,00	268.274.333.909,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	273.195.772.952,00	268.274.333.909,00	268.274.333.909,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.970.000,00	90.970.000,00	90.970.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.530.000,00	78.530.000,00	78.530.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.355.000,00	100.355.000,00	100.355.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	680.000,00	680.000,00	680.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.675.000,00	99.675.000,00	99.675.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.860.902,00	672.860.902,00	672.860.902,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.997.789,00	29.997.789,00	29.997.789,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.696.629,00	119.696.629,00	119.696.629,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.994.100,00	59.994.100,00	59.994.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.142.384,00	105.142.384,00	105.142.384,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.340.000,00	55.340.000,00	55.340.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.996.000,00	74.996.000,00	74.996.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.694.000,00	187.694.000,00	187.694.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.680.000,00	60.680.000,00	60.680.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	60.680.000,00	60.680.000,00	60.680.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.510.206.934,00	30.510.206.934,00	30.510.206.934,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.150.462.134,00	2.150.462.134,00	2.150.462.134,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.359.744.800,00	28.359.744.800,00	28.359.744.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.740.000,00	1.181.740.000,00	1.181.740.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	733.810.000,00	733.810.000,00	733.810.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.578.000,00	378.578.000,00	378.578.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.352.000,00	69.352.000,00	69.352.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001						Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	34.595.209.582,00	34.595.209.582,00	34.595.209.582,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.518.300.000,00	2.518.300.000,00	2.518.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.518.300.000,00	2.518.300.000,00	2.518.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.518.300.000,00	2.518.300.000,00	2.518.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.076.909.582,00	32.076.909.582,00	32.076.909.582,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	32.076.909.582,00	32.076.909.582,00	32.076.909.582,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	32.076.909.582,00	32.076.909.582,00	32.076.909.582,00
1.02.0.00.0.00.02.0002						Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	43.720.334.423,00	43.720.334.423,00	43.720.334.423,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.850.590.953,00	2.850.590.953,00	2.850.590.953,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.850.590.953,00	2.850.590.953,00	2.850.590.953,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.850.590.953,00	2.850.590.953,00	2.850.590.953,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.869.743.470,00	40.869.743.470,00	40.869.743.470,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	40.869.743.470,00	40.869.743.470,00	40.869.743.470,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.869.743.470,00	40.869.743.470,00	40.869.743.470,00
1.02.0.00.0.00.02.0003						Puskesmas Ngulak	3.823.709.566,00	3.823.709.566,00	3.823.709.566,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	519.918.719,00	519.918.719,00	519.918.719,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	519.918.719,00	519.918.719,00	519.918.719,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.760.000,00	57.760.000,00	57.760.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	77.050.000,00	77.050.000,00	77.050.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.843.573,00	20.843.573,00	20.843.573,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.467.828,00	19.467.828,00	19.467.828,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.150.000,00	58.150.000,00	58.150.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	101.767.318,00	101.767.318,00	101.767.318,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	55.600.000,00	55.600.000,00	55.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.293.240.847,00	3.293.240.847,00	3.293.240.847,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.293.240.847,00	3.293.240.847,00	3.293.240.847,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.293.240.847,00	3.293.240.847,00	3.293.240.847,00
1.02.0.00.0.00.02.0004						Puskesmas Babat Toman	4.837.309.682,00	4.837.309.682,00	4.837.309.682,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	903.706.882,00	903.706.882,00	903.706.882,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	903.706.882,00	903.706.882,00	903.706.882,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.471.988,00	97.471.988,00	97.471.988,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	77.200.000,00	77.200.000,00	77.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	44.100.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.125.000,00	166.125.000,00	166.125.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.900.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.150.232,00	32.150.232,00	32.150.232,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.200.000,00	93.200.000,00	93.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	197.231.662,00	197.231.662,00	197.231.662,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	86.200.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.933.602.800,00	3.933.602.800,00	3.933.602.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.933.602.800,00	3.933.602.800,00	3.933.602.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.933.602.800,00	3.933.602.800,00	3.933.602.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0005						Puskesmas Ulak Paceh	2.447.926.919,00	2.447.926.919,00	2.447.926.919,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	566.087.230,00	566.087.230,00	566.087.230,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	566.087.230,00	566.087.230,00	566.087.230,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.920.000,00	93.920.000,00	93.920.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	163.157.139,00	163.157.139,00	163.157.139,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.512.880,00	11.512.880,00	11.512.880,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.100.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	94.650.233,00	94.650.233,00	94.650.233,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.846.978,00	13.846.978,00	13.846.978,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	23.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.872.639.689,00	1.872.639.689,00	1.872.639.689,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.872.639.689,00	1.872.639.689,00	1.872.639.689,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.872.639.689,00	1.872.639.689,00	1.872.639.689,00
1.02.0.00.0.00.02.0006						Puskesmas Tanah Abang	1.308.830.388,00	1.308.830.388,00	1.048.520.625,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	440.007.028,00	440.007.028,00	179.697.265,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440.007.028,00	440.007.028,00	179.697.265,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.800.000,00	50.800.000,00	50.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.964.971,00	114.964.971,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.231.897,00	35.231.897,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	65.012.895,00	65.012.895,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.886.000,00	12.886.000,00	12.886.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.711.265,00	2.711.265,00	2.711.265,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	867.023.360,00	867.023.360,00	867.023.360,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	867.023.360,00	867.023.360,00	867.023.360,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	867.023.360,00	867.023.360,00	867.023.360,00
1.02.0.00.0.00.02.0007						Puskesmas Lubuk Bintialo	1.305.040.059,00	1.305.040.059,00	1.305.040.059,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	702.468.423,00	702.468.423,00	702.468.423,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	702.468.423,00	702.468.423,00	702.468.423,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.640.000,00	35.640.000,00	35.640.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.900.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	133.702.236,00	133.702.236,00	133.702.236,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.014.628,00	30.014.628,00	30.014.628,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.900.000,00	51.900.000,00	51.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	160.607.559,00	160.607.559,00	160.607.559,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.664.000,00	26.664.000,00	26.664.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	35.640.000,00	35.640.000,00	35.640.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	39.900.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	37.790.000,00	37.790.000,00	37.790.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.790.000,00	37.790.000,00	37.790.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	37.790.000,00	37.790.000,00	37.790.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	564.781.636,00	564.781.636,00	564.781.636,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	564.781.636,00	564.781.636,00	564.781.636,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	564.781.636,00	564.781.636,00	564.781.636,00
1.02.0.00.0.00.02.0008						Puskesmas Bukit Selabu	895.813.305,00	895.813.305,00	895.813.305,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	440.500.234,00	440.500.234,00	440.500.234,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440.500.234,00	440.500.234,00	440.500.234,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.180.000,00	27.180.000,00	27.180.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.232.840,00	40.232.840,00	40.232.840,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.680.000,00	122.680.000,00	122.680.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.100.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.395.372,00	54.395.372,00	54.395.372,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	85.832.022,00	85.832.022,00	85.832.022,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	452.313.071,00	452.313.071,00	452.313.071,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	452.313.071,00	452.313.071,00	452.313.071,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	452.313.071,00	452.313.071,00	452.313.071,00
1.02.0.00.0.00.02.0009						Puskesmas Cinta Karya	1.744.506.035,00	1.744.506.035,00	1.744.506.035,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	532.528.618,00	532.528.618,00	532.528.618,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	532.528.618,00	532.528.618,00	532.528.618,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.320.000,00	32.320.000,00	32.320.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	97.050.000,00	97.050.000,00	97.050.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.320.000,00	60.320.000,00	60.320.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.788.000,00	163.788.000,00	163.788.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.470.618,00	5.470.618,00	5.470.618,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	32.200.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.528.677,00	8.528.677,00	8.528.677,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.528.677,00	8.528.677,00	8.528.677,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.528.677,00	8.528.677,00	8.528.677,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.203.448.740,00	1.203.448.740,00	1.203.448.740,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.203.448.740,00	1.203.448.740,00	1.203.448.740,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.203.448.740,00	1.203.448.740,00	1.203.448.740,00
1.02.0.00.0.00.02.0010						Puskesmas Suka Damai	1.565.919.541,00	1.565.919.541,00	1.565.919.541,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	468.787.295,00	468.787.295,00	468.787.295,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.787.295,00	468.787.295,00	468.787.295,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	132.115.024,00	132.115.024,00	132.115.024,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	137.700.838,00	137.700.838,00	137.700.838,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	107.401.433,00	107.401.433,00	107.401.433,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.097.132.246,00	1.097.132.246,00	1.097.132.246,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.097.132.246,00	1.097.132.246,00	1.097.132.246,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.097.132.246,00	1.097.132.246,00	1.097.132.246,00
1.02.0.00.0.00.02.0011						Puskesmas Sido Rahayu	1.401.820.130,00	1.401.820.130,00	1.401.820.130,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	460.293.999,00	460.293.999,00	460.293.999,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	460.293.999,00	460.293.999,00	460.293.999,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.900.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	84.330.000,00	84.330.000,00	84.330.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.580.611,00	9.580.611,00	9.580.611,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.040.000,00	87.040.000,00	87.040.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	78.443.388,00	78.443.388,00	78.443.388,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.174.696,00	2.174.696,00	2.174.696,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.174.696,00	2.174.696,00	2.174.696,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.174.696,00	2.174.696,00	2.174.696,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	939.351.435,00	939.351.435,00	939.351.435,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	939.351.435,00	939.351.435,00	939.351.435,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	939.351.435,00	939.351.435,00	939.351.435,00
1.02.0.00.0.00.02.0012						Puskesmas Tebing Bulang	2.618.665.549,00	2.618.665.549,00	2.618.665.549,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	546.928.092,00	546.928.092,00	546.928.092,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	546.928.092,00	546.928.092,00	546.928.092,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.240.000,00	72.240.000,00	72.240.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	143.721.474,00	143.721.474,00	143.721.474,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.504.799,00	48.504.799,00	48.504.799,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	94.381.819,00	94.381.819,00	94.381.819,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	69.200.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.176.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.176.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.176.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.061.561.457,00	2.061.561.457,00	2.061.561.457,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.061.561.457,00	2.061.561.457,00	2.061.561.457,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.061.561.457,00	2.061.561.457,00	2.061.561.457,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0013						Puskesmas Jirak	2.289.681.026,00	2.289.681.026,00	2.289.681.026,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.791.784,00	664.791.784,00	664.791.784,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.791.784,00	664.791.784,00	664.791.784,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	106.363.006,00	106.363.006,00	106.363.006,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.756.459,00	93.756.459,00	93.756.459,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.152.319,00	158.152.319,00	158.152.319,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.120.000,00	17.120.000,00	17.120.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	84.100.000,00	84.100.000,00	84.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.624.889.242,00	1.624.889.242,00	1.624.889.242,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.624.889.242,00	1.624.889.242,00	1.624.889.242,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.624.889.242,00	1.624.889.242,00	1.624.889.242,00
1.02.0.00.0.00.02.0014						Puskesmas Balai Agung	4.671.730.749,00	4.671.730.749,00	4.671.730.749,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	821.875.953,00	821.875.953,00	821.875.953,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	821.875.953,00	821.875.953,00	821.875.953,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	188.160.000,00	188.160.000,00	188.160.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.088.516,00	174.088.516,00	174.088.516,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.602.000,00	101.602.000,00	101.602.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	164.158.462,00	164.158.462,00	164.158.462,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.686.000,00	5.686.000,00	5.686.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.400.975,00	8.400.975,00	8.400.975,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	62.800.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.849.854.796,00	3.849.854.796,00	3.849.854.796,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.849.854.796,00	3.849.854.796,00	3.849.854.796,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.849.854.796,00	3.849.854.796,00	3.849.854.796,00
1.02.0.00.0.00.02.0015						Puskesmas Lumpatan	3.555.216.929,00	3.555.216.929,00	3.555.216.929,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	696.236.469,00	696.236.469,00	696.236.469,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	696.236.469,00	696.236.469,00	696.236.469,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.861.486,00	35.861.486,00	35.861.486,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.700.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	164.998.330,00	164.998.330,00	164.998.330,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.717.394,00	36.717.394,00	36.717.394,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.198.000,00	74.198.000,00	74.198.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	161.356.259,00	161.356.259,00	161.356.259,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	132.600.000,00	132.600.000,00	132.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.356.000,00	5.356.000,00	5.356.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.356.000,00	5.356.000,00	5.356.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.356.000,00	5.356.000,00	5.356.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.853.624.460,00	2.853.624.460,00	2.853.624.460,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.853.624.460,00	2.853.624.460,00	2.853.624.460,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.853.624.460,00	2.853.624.460,00	2.853.624.460,00
1.02.0.00.0.00.02.0016						Puskesmas Lais	3.702.692.875,60	3.702.692.875,60	3.702.692.875,60
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	592.828.328,00	592.828.328,00	592.828.328,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	592.828.328,00	592.828.328,00	592.828.328,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.990.000,00	87.990.000,00	87.990.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.730.000,00	23.730.000,00	23.730.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	121.270.000,00	121.270.000,00	121.270.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.911.510,00	7.911.510,00	7.911.510,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.145.000,00	92.145.000,00	92.145.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	130.701.818,00	130.701.818,00	130.701.818,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	64.200.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.790.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.790.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.790.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.105.074.547,60	3.105.074.547,60	3.105.074.547,60
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.105.074.547,60	3.105.074.547,60	3.105.074.547,60

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.105.074.547,60	3.105.074.547,60	3.105.074.547,60
1.02.0.00.0.00.02.0017						Puskesmas Gardu Harapan	1.244.732.621,00	1.244.732.621,00	1.244.732.621,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	422.276.030,00	422.276.030,00	422.276.030,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	422.276.030,00	422.276.030,00	422.276.030,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.300.000,00	48.300.000,00	48.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	123.417.000,00	123.417.000,00	123.417.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.519.000,00	38.519.000,00	38.519.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	87.665.030,00	87.665.030,00	87.665.030,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	819.618.591,00	819.618.591,00	819.618.591,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	819.618.591,00	819.618.591,00	819.618.591,00
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	819.618.591,00	819.618.591,00	819.618.591,00
1.02.0.00.0.00.02.0018						Puskesmas Teluk Kijing	1.372.814.148,00	1.372.814.148,00	1.372.814.148,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	545.611.823,00	545.611.823,00	545.611.823,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	545.611.823,00	545.611.823,00	545.611.823,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.650.000,00	51.650.000,00	51.650.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	121.495.008,00	121.495.008,00	121.495.008,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.804.882,00	84.804.882,00	84.804.882,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.730.592,00	110.730.592,00	110.730.592,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.131.341,00	25.131.341,00	25.131.341,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.600.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.017.078,00	14.017.078,00	14.017.078,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.017.078,00	14.017.078,00	14.017.078,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.017.078,00	14.017.078,00	14.017.078,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	813.185.247,00	813.185.247,00	813.185.247,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	813.185.247,00	813.185.247,00	813.185.247,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	813.185.247,00	813.185.247,00	813.185.247,00
1.02.0.00.0.00.02.0019						Puskesmas Tanjung Kerang	2.342.665.692,00	2.342.665.692,00	2.342.665.692,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	697.819.782,00	697.819.782,00	697.819.782,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	697.819.782,00	697.819.782,00	697.819.782,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	116.480.000,00	116.480.000,00	116.480.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.899.000,00	42.899.000,00	42.899.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34.650.000,00	34.650.000,00	34.650.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	163.324.632,00	163.324.632,00	163.324.632,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.008.727,00	12.008.727,00	12.008.727,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	120.322.850,00	120.322.850,00	120.322.850,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.554.573,00	1.554.573,00	1.554.573,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.644.845.910,00	1.644.845.910,00	1.644.845.910,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.644.845.910,00	1.644.845.910,00	1.644.845.910,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.644.845.910,00	1.644.845.910,00	1.644.845.910,00
1.02.0.00.0.00.02.0020						Puskesmas Sungai Lilin	3.722.190.820,00	3.722.190.820,00	3.722.190.820,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	751.926.532,00	751.926.532,00	751.926.532,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	751.926.532,00	751.926.532,00	751.926.532,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.820.000,00	41.820.000,00	41.820.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	102.050.000,00	102.050.000,00	102.050.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	113.555.000,00	113.555.000,00	113.555.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.684.788,00	91.684.788,00	91.684.788,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	207.576.652,00	207.576.652,00	207.576.652,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.025.000,00	8.025.000,00	8.025.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.320.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.245.092,00	5.245.092,00	5.245.092,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.185.237,00	12.185.237,00	12.185.237,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.185.237,00	12.185.237,00	12.185.237,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.185.237,00	12.185.237,00	12.185.237,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.958.079.051,00	2.958.079.051,00	2.958.079.051,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.958.079.051,00	2.958.079.051,00	2.958.079.051,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.958.079.051,00	2.958.079.051,00	2.958.079.051,00
1.02.0.00.0.00.02.0021						Puskesmas Sri Gunung	1.873.768.829,00	1.873.768.829,00	1.873.768.829,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	492.182.774,00	492.182.774,00	492.182.774,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	492.182.774,00	492.182.774,00	492.182.774,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.240.000,00	27.240.000,00	27.240.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.524.716,00	73.524.716,00	73.524.716,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	97.748.058,00	97.748.058,00	97.748.058,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	36.240.000,00	36.240.000,00	36.240.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.370.886.055,00	1.370.886.055,00	1.370.886.055,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.370.886.055,00	1.370.886.055,00	1.370.886.055,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.370.886.055,00	1.370.886.055,00	1.370.886.055,00
1.02.0.00.0.00.02.0022						Puskesmas Karya Maju	2.416.302.647,00	2.416.302.647,00	2.416.302.647,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	526.133.881,00	526.133.881,00	526.133.881,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	526.133.881,00	526.133.881,00	526.133.881,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.640.000,00	65.640.000,00	65.640.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	70.950.000,00	70.950.000,00	70.950.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	153.954.000,00	153.954.000,00	153.954.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.071.000,00	42.071.000,00	42.071.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	84.862.881,00	84.862.881,00	84.862.881,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.056.000,00	24.056.000,00	24.056.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.890.168.766,00	1.890.168.766,00	1.890.168.766,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.890.168.766,00	1.890.168.766,00	1.890.168.766,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.890.168.766,00	1.890.168.766,00	1.890.168.766,00
1.02.0.00.0.00.02.0023						Puskesmas Mekar jaya	1.791.890.699,00	1.791.890.699,00	1.791.890.699,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	527.149.505,00	527.149.505,00	527.149.505,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	527.149.505,00	527.149.505,00	527.149.505,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.050.000,00	31.050.000,00	31.050.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	144.985.067,00	144.985.067,00	144.985.067,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.190.000,00	78.190.000,00	78.190.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	117.941.640,00	117.941.640,00	117.941.640,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.852.798,00	10.852.798,00	10.852.798,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.730.000,00	25.730.000,00	25.730.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.800.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.264.741.194,00	1.264.741.194,00	1.264.741.194,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.264.741.194,00	1.264.741.194,00	1.264.741.194,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.264.741.194,00	1.264.741.194,00	1.264.741.194,00
1.02.0.00.0.00.02.0024						Puskesmas Bayung Lencir	5.936.044.738,00	5.936.044.738,00	5.936.044.738,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.125.016.984,00	1.125.016.984,00	1.125.016.984,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.125.016.984,00	1.125.016.984,00	1.125.016.984,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.200.000,00	39.200.000,00	39.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.080.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	76.200.000,00	76.200.000,00	76.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50.440.000,00	50.440.000,00	50.440.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	301.886.200,00	301.886.200,00	301.886.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.900.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.773.471,00	142.773.471,00	142.773.471,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	219.940.866,00	219.940.866,00	219.940.866,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	11.958.000,00	11.958.000,00	11.958.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.368.447,00	4.368.447,00	4.368.447,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	93.840.000,00	93.840.000,00	93.840.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.280.900,00	14.280.900,00	14.280.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.280.900,00	14.280.900,00	14.280.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.280.900,00	14.280.900,00	14.280.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.796.746.854,00	4.796.746.854,00	4.796.746.854,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.796.746.854,00	4.796.746.854,00	4.796.746.854,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.796.746.854,00	4.796.746.854,00	4.796.746.854,00
1.02.0.00.0.00.02.0025						Puskesmas Suka Jaya	1.621.608.986,00	1.621.608.986,00	1.621.608.986,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	701.709.631,00	701.709.631,00	701.709.631,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	701.709.631,00	701.709.631,00	701.709.631,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.341.796,00	36.341.796,00	36.341.796,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	63.150.000,00	63.150.000,00	63.150.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.532.000,00	221.532.000,00	221.532.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.394.000,00	81.394.000,00	81.394.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	128.378.646,00	128.378.646,00	128.378.646,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.469.189,00	2.469.189,00	2.469.189,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.944.000,00	4.944.000,00	4.944.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	55.400.000,00	55.400.000,00	55.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	913.559.355,00	913.559.355,00	913.559.355,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	913.559.355,00	913.559.355,00	913.559.355,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	913.559.355,00	913.559.355,00	913.559.355,00
1.02.0.00.0.00.02.0026						Puskesmas Peninggalan	2.329.776.304,00	2.329.776.304,00	2.329.776.304,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	601.049.538,00	601.049.538,00	601.049.538,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	601.049.538,00	601.049.538,00	601.049.538,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.750.000,00	25.750.000,00	25.750.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	248.134.740,00	248.134.740,00	248.134.740,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.650.000,00	31.650.000,00	31.650.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.510.400,00	8.510.400,00	8.510.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95.344.780,00	95.344.780,00	95.344.780,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.879.618,00	131.879.618,00	131.879.618,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.727.326.766,00	1.727.326.766,00	1.727.326.766,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.727.326.766,00	1.727.326.766,00	1.727.326.766,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.727.326.766,00	1.727.326.766,00	1.727.326.766,00
1.02.0.00.0.00.02.0027						Puskesmas Sumber Harum	1.496.473.051,00	1.496.473.051,00	1.496.473.051,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	539.198.517,00	539.198.517,00	539.198.517,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	539.198.517,00	539.198.517,00	539.198.517,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.900.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.432.000,00	191.432.000,00	191.432.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47.410.000,00	47.410.000,00	47.410.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	91.016.517,00	91.016.517,00	91.016.517,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	957.274.534,00	957.274.534,00	957.274.534,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	957.274.534,00	957.274.534,00	957.274.534,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	957.274.534,00	957.274.534,00	957.274.534,00
1.02.0.00.0.00.02.0028						Puskesmas Berojaya Timur	1.685.915.583,00	1.685.915.583,00	1.685.915.583,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	457.772.190,00	457.772.190,00	457.772.190,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	457.772.190,00	457.772.190,00	457.772.190,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	76.688.000,00	76.688.000,00	76.688.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.135.500,00	28.135.500,00	28.135.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	43.050.000,00	43.050.000,00	43.050.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	97.508.690,00	97.508.690,00	97.508.690,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.227.243.393,00	1.227.243.393,00	1.227.243.393,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.227.243.393,00	1.227.243.393,00	1.227.243.393,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.227.243.393,00	1.227.243.393,00	1.227.243.393,00
1.02.0.00.0.00.02.0029						Puskesmas Bandar Agung	2.034.105.151,00	2.034.105.151,00	2.034.105.151,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	570.772.705,00	570.772.705,00	570.772.705,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.772.705,00	570.772.705,00	570.772.705,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	84.250.000,00	84.250.000,00	84.250.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	99.097.000,00	99.097.000,00	99.097.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.900.000,00	81.900.000,00	81.900.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.545.205,00	142.545.205,00	142.545.205,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.450.500,00	4.450.500,00	4.450.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.267.500,00	19.267.500,00	19.267.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.267.500,00	19.267.500,00	19.267.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.267.500,00	19.267.500,00	19.267.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.444.064.946,00	1.444.064.946,00	1.444.064.946,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.444.064.946,00	1.444.064.946,00	1.444.064.946,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.444.064.946,00	1.444.064.946,00	1.444.064.946,00
1.02.0.00.0.00.02.0030						Puskesmas Karang Mukti	2.798.926.381,00	2.798.926.381,00	2.798.926.381,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	833.980.411,00	833.980.411,00	833.980.411,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	833.980.411,00	833.980.411,00	833.980.411,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.800.000,00	118.800.000,00	118.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232.222.000,00	232.222.000,00	232.222.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48.300.000,00	48.300.000,00	48.300.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.416.049,00	89.416.049,00	89.416.049,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.462.362,00	168.462.362,00	168.462.362,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	79.800.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.964.945.970,00	1.964.945.970,00	1.964.945.970,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.964.945.970,00	1.964.945.970,00	1.964.945.970,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.964.945.970,00	1.964.945.970,00	1.964.945.970,00
1.02.0.00.0.00.02.0031						Puskesmas Air Balui	1.198.322.676,00	1.198.322.676,00	1.198.322.676,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	524.692.534,00	524.692.534,00	524.692.534,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	524.692.534,00	524.692.534,00	524.692.534,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.640.000,00	48.640.000,00	48.640.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.100.000,00	42.100.000,00	42.100.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.011.137,00	122.011.137,00	122.011.137,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.478.806,00	48.478.806,00	48.478.806,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	97.472.591,00	97.472.591,00	97.472.591,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	43.650.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	673.630.142,00	673.630.142,00	673.630.142,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	673.630.142,00	673.630.142,00	673.630.142,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	673.630.142,00	673.630.142,00	673.630.142,00
1.02.0.00.0.00.02.0101						Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	151.722.825.896,00	151.722.825.896,00	151.722.825.896,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.550.980.015,00	11.550.980.015,00	11.550.980.015,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.550.980.015,00	11.550.980.015,00	11.550.980.015,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	11.550.980.015,00	11.550.980.015,00	11.550.980.015,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.171.845.881,00	140.171.845.881,00	140.171.845.881,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	140.171.845.881,00	140.171.845.881,00	140.171.845.881,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	140.171.845.881,00	140.171.845.881,00	140.171.845.881,00
1.03.2.15.0.00.04.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	518.396.931.528,00	599.212.139.583,60	599.212.139.583,60

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	496.709.339.328,00	573.184.547.383,60	573.184.547.383,60
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.338.177.575,00	33.654.797.475,00	33.654.797.475,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.480.607.225,00	32.797.227.125,00	32.797.227.125,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.627.753.200,00	1.627.753.200,00	1.627.753.200,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	289.090.600,00	289.090.600,00	289.090.600,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	225.397.475,00	225.397.475,00	225.397.475,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	282.802.200,00	282.802.200,00	282.802.200,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau	346.679.400,00	346.679.400,00	346.679.400,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	96.363.600,00	96.363.600,00	96.363.600,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	8.673.517.450,00	22.590.137.350,00	22.590.137.350,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.095.120.500,00	2.095.120.500,00	2.095.120.500,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.697.500,00	3.697.500,00	3.697.500,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	886.057.500,00	1.286.057.500,00	1.286.057.500,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	922.603.900,00	922.603.900,00	922.603.900,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	993.954.650,00	993.954.650,00	993.954.650,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.044.072.500,00	1.044.072.500,00	1.044.072.500,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	347.501.000,00	347.501.000,00	347.501.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	615.995.750,00	615.995.750,00	615.995.750,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	857.570.350,00	857.570.350,00	857.570.350,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	433.636.000,00	433.636.000,00	433.636.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	423.934.350,00	423.934.350,00	423.934.350,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	431.299.134.060,71	494.492.839.260,71	494.492.839.260,71
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	431.299.134.060,71	494.492.839.260,71	494.492.839.260,71
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	3.063.153.307,42	3.063.153.307,42	3.063.153.307,42
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.726.663.110,00	6.726.663.110,00	6.726.663.110,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	624.804.700,00	624.804.700,00	624.804.700,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	345.508.043.424,00	405.301.418.924,00	405.301.418.924,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.236.903.880,00	3.436.903.880,00	3.436.903.880,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	2.217.230.000,00	2.217.230.000,00	2.217.230.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	31.293.043.431,29	34.943.373.131,29	34.943.373.131,29
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.718.864.000,00	1.718.864.000,00	1.718.864.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	5.101.816.526,00	5.101.816.526,00	5.101.816.526,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	31.808.611.682,00	31.358.611.682,00	31.358.611.682,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.927.507.650,00	5.927.507.650,00	5.927.507.650,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	39.440.000,00	39.440.000,00	39.440.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	39.440.000,00	39.440.000,00	39.440.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.335.167.650,00	3.335.167.650,00	3.335.167.650,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	3.250.167.650,00	3.250.167.650,00	3.250.167.650,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	971.728.000,00	971.728.000,00	971.728.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	171.327.000,00	171.327.000,00	171.327.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	800.401.000,00	800.401.000,00	800.401.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.581.172.000,00	1.581.172.000,00	1.581.172.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.062.577.000,00	1.062.577.000,00	1.062.577.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	27.491.000,00	27.491.000,00	27.491.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	38.876.000,00	38.876.000,00	38.876.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	363.156.000,00	363.156.000,00	363.156.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	89.072.000,00	89.072.000,00	89.072.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.594.520.042,29	38.559.402.997,89	38.559.402.997,89
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.360.479,80	85.360.479,80	85.360.479,80
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.648.480,00	47.648.480,00	47.648.480,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.999,80	9.999.999,80	9.999.999,80

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	27.712.000,00	27.712.000,00	27.712.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.806.740.548,00	16.321.623.503,60	16.321.623.503,60
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.806.740.548,00	16.321.623.503,60	16.321.623.503,60
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98.614.614,00	98.614.614,00	98.614.614,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.614.614,00	98.614.614,00	98.614.614,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.484.000,00	175.484.000,00	175.484.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.484.000,00	75.484.000,00	75.484.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.876.026.569,49	1.876.026.569,49	1.876.026.569,49
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.397.213.468,00	1.397.213.468,00	1.397.213.468,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.075.101,49	100.075.101,49	100.075.101,49
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	38.738.000,00	38.738.000,00	38.738.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308.397.865,00	308.397.865,00	308.397.865,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	308.397.865,00	308.397.865,00	308.397.865,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.799.557.346,00	17.799.557.346,00	17.799.557.346,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.438.487.346,00	14.438.487.346,00	14.438.487.346,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.361.070.000,00	3.361.070.000,00	3.361.070.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.444.338.620,00	1.894.338.620,00	1.894.338.620,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	646.970.000,00	646.970.000,00	646.970.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.235.000,00	213.235.000,00	213.235.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	475.261.500,00	925.261.500,00	925.261.500,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.872.120,00	108.872.120,00	108.872.120,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21.687.592.200,00	26.027.592.200,00	26.027.592.200,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	21.687.592.200,00	26.027.592.200,00	26.027.592.200,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	21.687.592.200,00	26.027.592.200,00	26.027.592.200,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.687.592.200,00	26.027.592.200,00	26.027.592.200,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.125.337.300,00	14.465.337.300,00	14.465.337.300,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	11.562.254.900,00	11.562.254.900,00	11.562.254.900,00
1.04.1.03.2.10.05.0000						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	259.926.223.306,00	291.126.352.195,00	291.126.352.195,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	258.764.809.556,00	289.964.938.445,00	289.964.938.445,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	142.925.149.673,00	163.883.144.823,00	163.783.144.823,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.918.386.600,00	18.206.988.000,00	18.206.988.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.918.386.600,00	18.206.988.000,00	18.206.988.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	13.720.679.400,00	16.009.280.800,00	16.009.280.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.197.707.200,00	2.197.707.200,00	2.197.707.200,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.801.238.650,00	19.926.238.650,00	19.926.238.650,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.801.238.650,00	19.926.238.650,00	19.926.238.650,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.969.095.550,00	2.969.095.550,00	2.969.095.550,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	9.768.000,00	9.768.000,00	9.768.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	77.217.000,00	77.217.000,00	77.217.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	477.570.200,00	477.570.200,00	477.570.200,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	15.934.346.300,00	16.059.346.300,00	16.059.346.300,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	158.241.600,00	158.241.600,00	158.241.600,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	24.382.983.110,00	26.580.681.410,00	26.580.681.410,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.382.983.110,00	26.580.681.410,00	26.580.681.410,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	24.382.983.110,00	26.580.681.410,00	26.580.681.410,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	0,00	0,00	0,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	81.436.539.513,00	97.533.234.963,00	97.433.234.963,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	81.436.539.513,00	97.533.234.963,00	97.433.234.963,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	81.170.107.413,00	97.347.762.863,00	97.166.802.863,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	266.432.100,00	185.472.100,00	266.432.100,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.386.001.800,00	1.636.001.800,00	1.636.001.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.386.001.800,00	1.636.001.800,00	1.636.001.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.386.001.800,00	1.636.001.800,00	1.636.001.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	115.839.659.883,00	126.081.793.622,00	126.181.793.622,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11.686.122.250,00	11.405.988.800,00	11.405.988.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.679.389.300,00	6.498.866.250,00	6.498.866.250,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.341.866.250,00	1.636.866.250,00	1.636.866.250,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.337.523.050,00	4.862.000.000,00	4.862.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.949.750,00	31.949.750,00	31.949.750,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.949.750,00	31.949.750,00	31.949.750,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4.974.783.200,00	4.875.172.800,00	4.875.172.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus	4.974.783.200,00	4.875.172.800,00	4.875.172.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	22.435.404.000,00	25.434.904.000,00	25.534.904.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	22.435.404.000,00	25.434.904.000,00	25.534.904.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	22.435.404.000,00	25.434.904.000,00	25.534.904.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	63.903.437.857,00	70.645.251.607,00	70.645.251.607,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	63.903.437.857,00	70.645.251.607,00	70.645.251.607,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	63.886.663.232,00	70.628.476.982,00	70.628.476.982,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	16.774.625,00	16.774.625,00	16.774.625,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.814.695.776,00	18.595.649.215,00	18.595.649.215,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.373.250,00	96.373.250,00	96.373.250,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.350.000,00	36.350.000,00	36.350.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.023.250,00	50.023.250,00	50.023.250,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.400.360.856,00	9.630.489.745,00	9.630.489.745,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.400.360.856,00	9.630.489.745,00	9.630.489.745,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.295.000,00	92.295.000,00	92.295.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	92.295.000,00	92.295.000,00	92.295.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.000.000,00	1.340.436.900,00	1.340.436.900,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000,00	465.436.900,00	465.436.900,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.361.990.000,00	2.267.622.800,00	2.267.622.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	542.700.000,00	1.448.332.800,00	1.448.332.800,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	819.290.000,00	819.290.000,00	819.290.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.434.836.200,00	1.434.836.200,00	1.434.836.200,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	564.104.600,00	564.104.600,00	564.104.600,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	870.731.600,00	870.731.600,00	870.731.600,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.563.840.470,00	3.583.595.320,00	3.583.595.320,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	649.100.200,00	649.100.200,00	649.100.200,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.847.139.150,00	2.816.894.000,00	2.816.894.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.601.120,00	117.601.120,00	117.601.120,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.1.03.2.10.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.161.413.750,00	1.161.413.750,00	1.161.413.750,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.161.413.750,00	1.161.413.750,00	1.161.413.750,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.161.413.750,00	1.161.413.750,00	1.161.413.750,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.161.413.750,00	1.161.413.750,00	1.161.413.750,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.111.413.750,00	1.111.413.750,00	1.111.413.750,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.180.220.975,00	25.617.774.825,00	25.617.774.825,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.180.220.975,00	25.617.774.825,00	25.617.774.825,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.180.220.975,00	25.617.774.825,00	25.617.774.825,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.893.640.571,00	11.775.680.571,00	11.775.680.571,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	102.637.550,00	102.637.550,00	102.637.550,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	102.637.550,00	102.637.550,00	102.637.550,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.519.530.821,00	1.519.530.821,00	1.519.530.821,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	346.924.821,00	346.924.821,00	346.924.821,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	54.323.000,00	99.323.000,00	99.323.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	187.660.000,00	187.660.000,00	187.660.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	930.623.000,00	885.623.000,00	885.623.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.042.474.700,00	1.924.514.700,00	1.924.514.700,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	950.810.000,00	832.850.000,00	832.850.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	102.950.000,00	102.950.000,00	102.950.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	154.954.700,00	154.954.700,00	154.954.700,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	833.760.000,00	833.760.000,00	833.760.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8.228.997.500,00	8.228.997.500,00	8.228.997.500,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	7.956.917.000,00	7.956.917.000,00	7.956.917.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	210.080.500,00	210.080.500,00	210.080.500,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.286.580.404,00	13.842.094.254,00	13.842.094.254,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.806.214,00	129.806.214,00	129.806.214,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.872.000,00	19.872.000,00	19.872.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	49.934.214,00	49.934.214,00	49.934.214,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.964.358.843,70	7.501.912.693,70	7.501.912.693,70
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.964.358.843,70	7.501.912.693,70	7.501.912.693,70
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	185.375.000,00	185.375.000,00	185.375.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	185.375.000,00	185.375.000,00	185.375.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.547.000,00	195.739.000,00	195.739.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	680.000,00	680.000,00	680.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.867.000,00	195.059.000,00	195.059.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.933.952,30	886.701.952,30	886.701.952,30
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.958.300,00	19.958.300,00	19.958.300,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.821.206,80	314.908.774,80	314.908.774,80
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.946.458,00	39.946.458,00	39.946.458,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.987.497,00	169.987.497,00	169.987.497,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.840.490,50	49.840.490,50	49.840.490,50
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.380.000,00	212.060.432,00	212.060.432,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.949.004,00	246.949.004,00	246.949.004,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	47.629.004,00	47.629.004,00	47.629.004,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.320.000,00	199.320.000,00	199.320.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.701.488.390,00	2.701.488.390,00	2.701.488.390,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.186.790,00	334.186.790,00	334.186.790,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.367.301.600,00	2.367.301.600,00	2.367.301.600,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.294.122.000,00	1.994.122.000,00	1.994.122.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.019.450.000,00	1.019.450.000,00	1.019.450.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.792.000,00	949.792.000,00	949.792.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.880.000,00	24.880.000,00	24.880.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	39.416.345.437,00	38.551.075.727,00	38.551.075.727,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.625.459.710,00	1.625.459.710,00	1.625.459.710,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.059.690.250,00	1.059.690.250,00	1.059.690.250,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	105.750.000,00	105.750.000,00	105.750.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.099.000,00	53.099.000,00	53.099.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	0,00	0,00	0,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	176.850.000,00	176.850.000,00	176.850.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	89.400.000,00	89.400.000,00	67.120.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	0,00	0,00	15.380.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	18.315.000,00	18.315.000,00	25.215.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	308.625.000,00	308.625.000,00	308.625.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	47.416.000,00	47.416.000,00	47.416.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	221.520.000,00	221.520.000,00	221.520.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.715.250,00	38.715.250,00	38.715.250,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	565.769.460,00	565.769.460,00	565.769.460,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	88.973.460,00	88.973.460,00	88.973.460,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	24.996.000,00	24.996.000,00	24.996.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	451.800.000,00	451.800.000,00	451.800.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	534.583.537,00	534.583.537,00	534.583.537,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	22.851.537,00	22.851.537,00	22.851.537,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	22.851.537,00	22.851.537,00	22.851.537,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	511.732.000,00	511.732.000,00	511.732.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	453.482.000,00	453.482.000,00	453.482.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	58.250.000,00	58.250.000,00	58.250.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.998.931.000,00	4.948.931.000,00	4.948.931.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.998.931.000,00	4.948.931.000,00	4.948.931.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	593.931.000,00	593.931.000,00	593.931.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.405.000.000,00	4.355.000.000,00	4.355.000.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.257.371.190,00	31.442.101.480,00	31.442.101.480,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.472.000,00	101.472.000,00	101.472.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.881.000,00	49.881.000,00	49.881.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.088.000,00	29.088.000,00	29.088.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	22.503.000,00	22.503.000,00	22.503.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.264.892.331,00	23.399.622.621,00	23.399.622.621,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.264.892.331,00	23.399.622.621,00	23.399.622.621,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	116.357.250,00	116.357.250,00	116.357.250,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	116.357.250,00	116.357.250,00	116.357.250,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.903.000,00	73.903.000,00	73.903.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.903.000,00	73.903.000,00	73.903.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.967.047,00	600.047.047,00	600.047.047,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.858.074,00	14.858.074,00	14.858.074,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.965.284,00	124.965.284,00	124.965.284,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.808.486,00	52.808.486,00	52.808.486,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.699.038,00	96.699.038,00	96.699.038,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.792.165,00	74.792.165,00	74.792.165,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.344.000,00	188.424.000,00	188.424.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.606.675.200,00	5.606.675.200,00	5.606.675.200,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.765.600,00	75.765.600,00	75.765.600,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.530.909.600,00	5.530.909.600,00	5.530.909.600,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.507.104.362,00	1.544.024.362,00	1.544.024.362,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.230.000,00	84.230.000,00	84.230.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.121.950.000,00	1.158.870.000,00	1.158.870.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.964.862,00	89.964.862,00	89.964.862,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.759.500,00	198.759.500,00	198.759.500,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.723.424.344,00	16.439.235.163,00	16.439.235.163,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.723.424.344,00	16.439.235.163,00	16.439.235.163,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.723.424.344,00	16.439.235.163,00	16.439.235.163,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.742.217.170,00	1.742.217.170,00	1.742.217.170,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.742.217.170,00	1.742.217.170,00	1.742.217.170,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.630.010.270,00	1.630.010.270,00	1.630.010.270,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	98.731.900,00	98.731.900,00	98.731.900,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13.475.000,00	13.475.000,00	13.475.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.002.762.000,00	6.002.762.000,00	6.002.762.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.002.762.000,00	6.002.762.000,00	6.002.762.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.561.440.000,00	5.561.440.000,00	5.561.440.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	88.222.000,00	88.222.000,00	88.222.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	102.755.000,00	102.755.000,00	102.755.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.345.000,00	250.345.000,00	250.345.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	71.504.000,00	71.504.000,00	71.504.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71.504.000,00	71.504.000,00	71.504.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	71.504.000,00	71.504.000,00	71.504.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	341.819.890,00	381.819.890,00	381.819.890,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	341.819.890,00	381.819.890,00	381.819.890,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	341.819.890,00	381.819.890,00	381.819.890,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	343.355.140,00	343.355.140,00	343.355.140,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	343.355.140,00	343.355.140,00	343.355.140,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.859.840,00	37.859.840,00	37.859.840,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	65.312.000,00	65.312.000,00	65.312.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.686.000,00	95.686.000,00	95.686.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	144.497.300,00	144.497.300,00	144.497.300,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.221.766.144,00	7.897.576.963,00	7.897.576.963,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.672.000,00	50.672.000,00	50.672.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.568.000,00	40.568.000,00	40.568.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.104.000,00	10.104.000,00	10.104.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.374.430.000,00	6.090.240.819,00	6.090.240.819,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.374.430.000,00	6.090.240.819,00	6.090.240.819,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.902.500,00	36.902.500,00	36.902.500,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.902.500,00	36.902.500,00	36.902.500,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.355.000,00	80.355.000,00	80.355.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.125.000,00	46.125.000,00	46.125.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.161.524,00	635.161.524,00	635.161.524,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.980.300,00	36.980.300,00	36.980.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.455.000,00	132.455.000,00	132.455.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.140.624,00	163.140.624,00	163.140.624,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.935.000,00	62.935.000,00	62.935.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.194.600,00	22.194.600,00	22.194.600,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.456.000,00	167.456.000,00	167.456.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.402.000,00	81.402.000,00	81.402.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	81.402.000,00	81.402.000,00	81.402.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.085.800,00	459.085.800,00	459.085.800,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.876.200,00	131.876.200,00	131.876.200,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.209.600,00	327.209.600,00	327.209.600,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.757.320,00	463.757.320,00	463.757.320,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.165.000,00	294.165.000,00	294.165.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.952.320,00	154.952.320,00	154.952.320,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000						Dinas Sosial	64.564.039.048,00	77.199.200.617,00	77.199.200.617,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	64.564.039.048,00	77.199.200.617,00	77.199.200.617,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	64.564.039.048,00	77.199.200.617,00	77.199.200.617,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	18.188.251.650,00	32.238.251.650,00	32.238.251.650,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	49.582.000,00	49.582.000,00	49.582.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	49.582.000,00	49.582.000,00	49.582.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	18.138.669.650,00	32.188.669.650,00	32.188.669.650,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105.045.000,00	105.045.000,00	105.045.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.443.879.000,00	6.443.879.000,00	6.443.879.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.779.869.700,00	24.779.869.700,00	24.779.869.700,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	776.290.950,00	826.290.950,00	826.290.950,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	33.585.000,00	33.585.000,00	33.585.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.091.978.700,00	2.091.978.700,00	2.091.978.700,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.091.978.700,00	2.091.978.700,00	2.091.978.700,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	1.471.563.000,00	1.471.563.000,00	1.471.563.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	220.415.700,00	220.415.700,00	220.415.700,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	30.836.120.825,00	30.583.867.825,00	30.583.867.825,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.836.120.825,00	30.583.867.825,00	30.583.867.825,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	140.494.000,00	312.434.000,00	312.434.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.695.626.825,00	30.271.433.825,00	30.271.433.825,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	959.355.000,00	959.355.000,00	959.355.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	304.180.000,00	304.180.000,00	304.180.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	304.180.000,00	304.180.000,00	304.180.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	655.175.000,00	655.175.000,00	655.175.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	655.175.000,00	655.175.000,00	655.175.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.488.332.873,00	11.325.747.442,00	11.325.747.442,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.673.000,00	104.673.000,00	104.673.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.908.000,00	59.908.000,00	59.908.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.429.000,00	14.429.000,00	14.429.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	30.336.000,00	30.336.000,00	30.336.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.322.578.500,00	7.957.740.069,00	7.957.740.069,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.322.578.500,00	7.957.740.069,00	7.957.740.069,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.668.000,00	119.668.000,00	119.668.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	119.668.000,00	119.668.000,00	119.668.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.162.315,00	677.805.315,00	677.805.315,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.075.000,00	27.075.000,00	27.075.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.120.000,00	90.120.000,00	90.120.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.996.200,00	59.996.200,00	59.996.200,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.818.940,00	88.818.940,00	88.818.940,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93.315.675,00	93.315.675,00	93.315.675,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.132.500,00	49.132.500,00	49.132.500,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.704.000,00	229.347.000,00	229.347.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00	80.600.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	80.600.000,00	80.600.000,00	80.600.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.240.305.820,00	1.240.305.820,00	1.240.305.820,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.010.220,00	124.010.220,00	124.010.220,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.116.295.600,00	1.116.295.600,00	1.116.295.600,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.345.238,00	1.144.955.238,00	1.144.955.238,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.170.000,00	360.170.000,00	360.170.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	567.895.238,00	715.505.238,00	715.505.238,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.280.000,00	69.280.000,00	69.280.000,00
2.07.0.00.5.06.10.0000						Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00
2.07.0.00.5.06.10.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00
2.07.0.00.5.06.10.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00
2.07.0.00.5.06.10.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00
2.07.0.00.5.06.10.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00
2.07.0.00.5.06.10.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00	4.506.892.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000						Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	11.093.432.095,00	10.776.496.890,00	10.776.496.890,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	364.317.050,00	364.317.050,00	364.317.050,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	364.317.050,00	364.317.050,00	364.317.050,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	364.317.050,00	364.317.050,00	364.317.050,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	511.585.825,00	511.585.825,00	511.585.825,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	152.769.925,00	152.769.925,00	152.769.925,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	152.769.925,00	152.769.925,00	152.769.925,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	311.387.900,00	311.387.900,00	311.387.900,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	45.642.000,00	45.642.000,00	45.642.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	109.323.000,00	109.323.000,00	109.323.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	156.422.900,00	156.422.900,00	156.422.900,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	47.428.000,00	47.428.000,00	47.428.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	47.428.000,00	47.428.000,00	47.428.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	371.027.000,00	371.027.000,00	371.027.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.655.000,00	165.655.000,00	165.655.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	165.655.000,00	165.655.000,00	165.655.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	205.372.000,00	205.372.000,00	205.372.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.694.000,00	115.694.000,00	115.694.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	89.678.000,00	89.678.000,00	89.678.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.690.463.634,00	9.373.528.429,00	9.373.528.429,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.785.000,00	84.785.000,00	84.785.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.392.000,00	50.392.000,00	50.392.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.364.000,00	14.364.000,00	14.364.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.029.000,00	20.029.000,00	20.029.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.083.587.945,00	7.766.652.740,00	7.766.652.740,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.083.587.945,00	7.766.652.740,00	7.766.652.740,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.590.000,00	17.590.000,00	17.590.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.590.000,00	17.590.000,00	17.590.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	498.225.788,00	498.225.788,00	498.225.788,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.963.364,00	19.963.364,00	19.963.364,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.022.796,00	128.022.796,00	128.022.796,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.602.400,00	39.602.400,00	39.602.400,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.217.778,00	68.217.778,00	68.217.778,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.741.050,00	54.741.050,00	54.741.050,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.268.400,00	25.268.400,00	25.268.400,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.410.000,00	122.410.000,00	122.410.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.772.000,00	70.772.000,00	70.772.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	70.772.000,00	70.772.000,00	70.772.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.789.901,00	667.789.901,00	667.789.901,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.658.568,00	250.658.568,00	250.658.568,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.131.333,00	417.131.333,00	417.131.333,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.713.000,00	211.713.000,00	211.713.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.350.000,00	89.350.000,00	89.350.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.873.000,00	96.873.000,00	96.873.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.490.000,00	25.490.000,00	25.490.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	156.038.586,00	156.038.586,00	156.038.586,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	156.038.586,00	156.038.586,00	156.038.586,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	156.038.586,00	156.038.586,00	156.038.586,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	156.038.586,00	156.038.586,00	156.038.586,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.968.100,00	106.968.100,00	106.968.100,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	49.070.486,00	49.070.486,00	49.070.486,00
2.08.0.00.0.00.11.0000						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.425.427.193,00	9.351.115.648,00	9.351.115.648,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.425.427.193,00	9.351.115.648,00	9.351.115.648,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.425.427.193,00	9.351.115.648,00	9.351.115.648,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	602.418.925,00	602.418.925,00	602.418.925,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	116.743.625,00	116.743.625,00	116.743.625,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	116.743.625,00	116.743.625,00	116.743.625,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	485.675.300,00	485.675.300,00	485.675.300,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	92.530.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	393.145.300,00	393.145.300,00	393.145.300,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	170.967.000,00	170.967.000,00	170.967.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.552.000,00	40.552.000,00	40.552.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.552.000,00	40.552.000,00	40.552.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	130.415.000,00	130.415.000,00	130.415.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.415.000,00	130.415.000,00	130.415.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	99.387.200,00	99.387.200,00	99.387.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.387.200,00	99.387.200,00	99.387.200,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	99.387.200,00	99.387.200,00	99.387.200,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	335.008.911,00	335.008.911,00	335.008.911,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	128.060.450,00	128.060.450,00	128.060.450,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.060.450,00	128.060.450,00	128.060.450,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	206.948.461,00	206.948.461,00	206.948.461,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.747.500,00	150.747.500,00	150.747.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.200.961,00	56.200.961,00	56.200.961,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	772.807.400,00	772.807.400,00	782.807.400,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	625.983.000,00	625.983.000,00	625.983.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	625.983.000,00	625.983.000,00	625.983.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.824.400,00	146.824.400,00	156.824.400,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.824.400,00	146.824.400,00	156.824.400,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.444.837.757,00	7.370.526.212,00	7.360.526.212,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.389.500,00	65.389.500,00	65.389.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.354.000,00	34.354.000,00	34.354.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.904.000,00	9.904.000,00	9.904.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	21.131.500,00	21.131.500,00	21.131.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.154.215.184,00	6.079.903.639,00	6.069.903.639,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.154.215.184,00	6.079.903.639,00	6.069.903.639,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.125.000,00	99.125.000,00	99.125.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.125.000,00	99.125.000,00	99.125.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.922.509,00	499.922.509,00	499.922.509,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.912.850,00	19.912.850,00	19.912.850,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.597.750,00	34.597.750,00	34.597.750,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.245.900,00	36.245.900,00	36.245.900,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.193.110,00	124.193.110,00	124.193.110,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.150.899,00	95.150.899,00	95.150.899,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.822.000,00	159.822.000,00	159.822.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.755.564,00	393.755.564,00	393.755.564,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.665.920,00	101.665.920,00	101.665.920,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.089.644,00	292.089.644,00	292.089.644,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.430.000,00	232.430.000,00	232.430.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.100.000,00	200.100.000,00	200.100.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.330.000,00	32.330.000,00	32.330.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000						Dinas Ketahanan Pangan	10.881.583.078,00	10.613.654.680,00	10.613.654.680,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.881.583.078,00	10.613.654.680,00	10.613.654.680,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.151.697.392,00	2.151.697.392,00	2.151.697.392,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	734.681.692,00	734.681.692,00	734.681.692,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	33.129.000,00	33.129.000,00	33.129.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	88.196.000,00	88.196.000,00	88.196.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	187.923.000,00	187.923.000,00	187.923.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	115.031.500,00	115.031.500,00	115.031.500,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	232.226.000,00	232.226.000,00	232.226.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	33.912.996,00	33.912.996,00	33.912.996,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	21.155.000,00	21.155.000,00	21.155.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	23.108.196,00	23.108.196,00	23.108.196,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	195.757.000,00	195.757.000,00	195.757.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	139.380.000,00	139.380.000,00	139.380.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	56.377.000,00	56.377.000,00	56.377.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.221.258.700,00	1.221.258.700,00	1.221.258.700,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	47.341.500,00	47.341.500,00	47.341.500,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.173.917.200,00	1.173.917.200,00	1.173.917.200,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.987.545,00	40.987.545,00	40.987.545,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	40.987.545,00	40.987.545,00	40.987.545,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.987.545,00	40.987.545,00	40.987.545,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	163.727.019,00	163.727.019,00	163.727.019,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	163.727.019,00	163.727.019,00	163.727.019,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	44.825.000,00	44.825.000,00	44.825.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	26.991.000,00	26.991.000,00	26.991.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	91.911.019,00	91.911.019,00	91.911.019,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.525.171.122,00	8.257.242.724,00	8.257.242.724,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.723.800,00	90.723.800,00	90.723.800,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.597.200,00	49.597.200,00	49.597.200,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.760.600,00	20.760.600,00	20.760.600,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.366.000,00	20.366.000,00	20.366.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.548.285.531,00	6.280.357.133,00	6.280.357.133,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.548.285.531,00	6.280.357.133,00	6.280.357.133,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.730.000,00	40.730.000,00	40.730.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.730.000,00	40.730.000,00	40.730.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.730.000,00	55.730.000,00	55.730.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.730.000,00	55.730.000,00	55.730.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	584.068.641,00	584.068.641,00	584.068.641,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.965.373,00	29.965.373,00	29.965.373,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.786.506,00	165.786.506,00	165.786.506,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.913.584,00	57.913.584,00	57.913.584,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.903.173,00	74.903.173,00	74.903.173,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.976.350,00	49.976.350,00	49.976.350,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.994.000,00	49.994.000,00	49.994.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.529.655,00	115.529.655,00	115.529.655,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.927.350,00	59.927.350,00	59.927.350,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	59.927.350,00	59.927.350,00	59.927.350,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.685.800,00	577.685.800,00	577.685.800,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.733.000,00	86.733.000,00	86.733.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.952.800,00	490.952.800,00	490.952.800,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.020.000,00	568.020.000,00	568.020.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.070.000,00	163.070.000,00	163.070.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.550.000,00	380.550.000,00	380.550.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000						Dinas Lingkungan Hidup	55.218.972.335,00	57.281.888.783,00	57.281.888.783,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	55.218.972.335,00	57.281.888.783,00	57.281.888.783,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	397.795.000,00	397.795.000,00	397.795.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	397.795.000,00	397.795.000,00	397.795.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	397.795.000,00	397.795.000,00	397.795.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.060.693.174,00	1.060.693.174,00	1.060.693.174,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.047.851.174,00	1.047.851.174,00	1.047.851.174,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	62.648.000,00	62.648.000,00	62.648.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	70.938.000,00	70.938.000,00	70.938.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	49.023.000,00	49.023.000,00	49.023.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	204.786.000,00	204.786.000,00	204.786.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	51.798.000,00	51.798.000,00	51.798.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	608.658.174,00	608.658.174,00	608.658.174,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12.842.000,00	12.842.000,00	12.842.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	12.842.000,00	12.842.000,00	12.842.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.607.945.250,00	3.607.945.250,00	3.607.945.250,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.607.945.250,00	3.607.945.250,00	3.607.945.250,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.156.285.250,00	2.156.285.250,00	2.156.285.250,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.451.660.000,00	1.451.660.000,00	1.451.660.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	127.423.000,00	127.423.000,00	127.423.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	127.423.000,00	127.423.000,00	127.423.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	62.369.000,00	62.369.000,00	62.369.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.054.000,00	65.054.000,00	65.054.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.711.000,00	49.711.000,00	49.711.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.711.000,00	49.711.000,00	49.711.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	49.711.000,00	49.711.000,00	49.711.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84.114.000,00	84.114.000,00	84.114.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	84.114.000,00	84.114.000,00	84.114.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	84.114.000,00	84.114.000,00	84.114.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.548.614.728,00	13.168.614.728,00	13.168.614.728,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	10.548.614.728,00	13.168.614.728,00	13.168.614.728,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	8.908.044.153,00	8.908.044.153,00	8.908.044.153,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.565.570.575,00	4.185.570.575,00	4.185.570.575,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.342.676.183,00	38.785.592.631,00	38.785.592.631,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.682.762,00	63.682.762,00	63.682.762,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.494.000,00	22.494.000,00	22.494.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.688.762,00	8.688.762,00	8.688.762,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.792.706.880,00	11.235.623.328,00	11.235.623.328,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.792.706.880,00	11.235.623.328,00	11.235.623.328,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	99.116.950,00	99.116.950,00	99.116.950,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	99.116.950,00	99.116.950,00	99.116.950,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.642.000,00	38.256.000,00	38.256.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.642.000,00	38.256.000,00	38.256.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	929.292.574,00	981.678.574,00	981.678.574,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.873,00	29.998.873,00	29.998.873,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	494.585.900,00	494.585.900,00	494.585.900,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.272,00	59.992.272,00	59.992.272,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.972,00	99.998.972,00	99.998.972,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.716.561,00	54.716.561,00	54.716.561,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.999.996,00	152.385.996,00	152.385.996,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.605.893.152,00	25.605.893.152,00	25.605.893.152,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.467.252,00	442.467.252,00	442.467.252,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.163.425.900,00	25.163.425.900,00	25.163.425.900,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.341.865,00	701.341.865,00	701.341.865,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.240.000,00	263.240.000,00	263.240.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.054.559,00	266.054.559,00	266.054.559,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.047.306,00	172.047.306,00	172.047.306,00
2.12.0.00.0.00.14.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.061.181.720,00	22.560.453.778,00	22.560.453.778,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.061.181.720,00	22.560.453.778,00	22.560.453.778,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	452.701.919,00	452.701.919,00	452.701.919,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	325.986.500,00	325.986.500,00	325.986.500,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	34.365.000,00	34.365.000,00	34.365.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	203.778.000,00	203.778.000,00	203.778.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	47.839.500,00	47.839.500,00	47.839.500,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	40.004.000,00	40.004.000,00	40.004.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	126.715.419,00	126.715.419,00	126.715.419,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	126.715.419,00	126.715.419,00	126.715.419,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.141.402,00	255.141.402,00	255.141.402,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	163.297.000,00	163.297.000,00	163.297.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	163.297.000,00	163.297.000,00	163.297.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	91.844.402,00	91.844.402,00	91.844.402,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	91.844.402,00	91.844.402,00	91.844.402,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.557.207.109,00	5.557.207.109,00	5.557.207.109,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	198.522.651,00	198.522.651,00	198.522.651,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	38.377.950,00	38.377.950,00	38.377.950,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	160.144.701,00	160.144.701,00	160.144.701,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.486.339.681,00	4.486.339.681,00	4.486.339.681,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.486.339.681,00	4.486.339.681,00	4.486.339.681,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	527.541.432,00	527.541.432,00	527.541.432,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	358.448.800,00	358.448.800,00	358.448.800,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	26.708.923,00	26.708.923,00	26.708.923,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.361.000,00	4.361.000,00	4.361.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	80.752.255,00	80.752.255,00	80.752.255,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	57.270.454,00	57.270.454,00	57.270.454,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	344.803.345,00	344.803.345,00	344.803.345,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.869.845,00	45.869.845,00	45.869.845,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	298.933.500,00	298.933.500,00	298.933.500,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	51.919.700,00	51.919.700,00	51.919.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	51.919.700,00	51.919.700,00	51.919.700,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	51.919.700,00	51.919.700,00	51.919.700,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.744.211.590,00	16.243.483.648,00	16.243.483.648,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.897.378,00	72.897.378,00	72.897.378,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.897.378,00	37.897.378,00	37.897.378,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.099.345.129,00	10.598.617.187,00	10.598.617.187,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.099.345.129,00	10.598.617.187,00	10.598.617.187,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.386.000,00	97.386.000,00	97.386.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.386.000,00	97.386.000,00	97.386.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.841.460,00	820.841.460,00	820.841.460,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.971.800,00	119.971.800,00	119.971.800,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.936.500,00	70.936.500,00	70.936.500,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.933.160,00	249.933.160,00	249.933.160,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.716.192.223,00	1.716.192.223,00	1.716.192.223,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.127.779,00	488.127.779,00	488.127.779,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.228.064.444,00	1.228.064.444,00	1.228.064.444,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.637.549.400,00	2.537.549.400,00	2.537.549.400,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207.610.000,00	207.610.000,00	207.610.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.349.930.600,00	2.249.930.600,00	2.249.930.600,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.008.800,00	80.008.800,00	80.008.800,00
2.13.4.01.0.00.15.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.128.198.925,00	17.707.159.264,00	17.707.159.264,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.128.198.925,00	17.707.159.264,00	17.707.159.264,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	97.640.900,00	97.640.900,00	97.640.900,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	97.640.900,00	97.640.900,00	97.640.900,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	53.747.000,00	53.747.000,00	53.747.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	43.893.900,00	43.893.900,00	43.893.900,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.154.538.513,00	6.154.538.513,00	6.154.538.513,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.154.538.513,00	6.154.538.513,00	6.154.538.513,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	145.701.198,00	145.701.198,00	145.701.198,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	251.788.075,00	251.788.075,00	251.788.075,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	143.434.000,00	143.434.000,00	143.434.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.161.078.240,00	5.161.078.240,00	5.161.078.240,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	39.952.000,00	39.952.000,00	39.952.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	152.094.000,00	152.094.000,00	152.094.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	52.675.000,00	52.675.000,00	52.675.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	55.464.000,00	55.464.000,00	55.464.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	55.464.000,00	55.464.000,00	55.464.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	96.888.000,00	96.888.000,00	96.888.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.817.447.400,00	2.817.447.400,00	2.817.447.400,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.817.447.400,00	2.817.447.400,00	2.817.447.400,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1.046.484.250,00	1.046.484.250,00	1.046.484.250,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,00	0,00	0,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	117.581.450,00	117.581.450,00	117.581.450,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	152.736.225,00	152.736.225,00	152.736.225,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	482.682.858,00	482.682.858,00	482.682.858,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	91.272.800,00	91.272.800,00	91.272.800,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	926.689.817,00	926.689.817,00	926.689.817,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0,00	0,00	0,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.058.572.112,00	8.637.532.451,00	8.637.532.451,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.204.300,00	123.204.300,00	123.204.300,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.834.300,00	68.834.300,00	68.834.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.820.000,00	22.820.000,00	22.820.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	31.550.000,00	31.550.000,00	31.550.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.524.002.037,00	6.102.962.376,00	6.102.962.376,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.524.002.037,00	6.102.962.376,00	6.102.962.376,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.925.000,00	43.925.000,00	43.925.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.925.000,00	43.925.000,00	43.925.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.250.000,00	99.250.000,00	99.250.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.250.000,00	99.250.000,00	99.250.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	872.993.679,00	872.993.679,00	872.993.679,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.787.628,00	29.787.628,00	29.787.628,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.570.715,00	172.570.715,00	172.570.715,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.004.582,00	60.004.582,00	60.004.582,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.738.213,00	168.738.213,00	168.738.213,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.531.541,00	102.531.541,00	102.531.541,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.986.000,00	49.986.000,00	49.986.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.375.000,00	249.375.000,00	249.375.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.223.030,00	205.223.030,00	205.223.030,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.246.400,00	131.246.400,00	131.246.400,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	73.976.630,00	73.976.630,00	73.976.630,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.720.996,00	749.720.996,00	749.720.996,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.571.396,00	176.571.396,00	176.571.396,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573.149.600,00	573.149.600,00	573.149.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.253.070,00	440.253.070,00	440.253.070,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.339.570,00	318.339.570,00	318.339.570,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.025.000,00	91.025.000,00	91.025.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.888.500,00	30.888.500,00	30.888.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000						Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	23.330.072.566,00	22.894.940.858,00	22.894.940.858,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	23.330.072.566,00	22.894.940.858,00	22.894.940.858,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	578.531.200,00	578.531.200,00	578.531.200,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	31.141.500,00	31.141.500,00	31.141.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	31.141.500,00	31.141.500,00	31.141.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	547.389.700,00	547.389.700,00	547.389.700,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	72.309.700,00	72.309.700,00	72.309.700,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	235.080.000,00	235.080.000,00	235.080.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.140.180.896,00	7.140.180.896,00	7.140.180.896,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.142.853.000,00	1.142.853.000,00	1.142.853.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	172.250.000,00	172.250.000,00	172.250.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	335.483.000,00	335.483.000,00	335.483.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	85.120.000,00	85.120.000,00	85.120.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.008.978.000,00	2.008.978.000,00	2.008.978.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.944.000.000,00	1.944.000.000,00	1.944.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	64.978.000,00	64.978.000,00	64.978.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.893.423.099,00	2.893.423.099,00	2.893.423.099,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	67.618.000,00	67.618.000,00	67.618.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.576.620.000,00	2.576.620.000,00	2.576.620.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	40.246.000,00	40.246.000,00	40.246.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	62.005.500,00	62.005.500,00	62.005.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	64.342.249,00	64.342.249,00	64.342.249,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	82.591.350,00	82.591.350,00	82.591.350,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.094.926.797,00	1.094.926.797,00	1.094.926.797,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	42.011.800,00	42.011.800,00	42.011.800,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	42.073.500,00	42.073.500,00	42.073.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	136.274.997,00	136.274.997,00	136.274.997,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	874.566.500,00	874.566.500,00	874.566.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.302.670.500,00	3.302.670.500,00	3.302.670.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	431.670.500,00	431.670.500,00	431.670.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	134.400.000,00	134.400.000,00	134.400.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	90.006.500,00	90.006.500,00	90.006.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	77.264.000,00	77.264.000,00	77.264.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.871.000.000,00	2.871.000.000,00	2.871.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.305.000.000,00	1.305.000.000,00	1.305.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.308.689.970,00	11.873.558.262,00	11.873.558.262,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.105.000,00	51.105.000,00	51.105.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.105.000,00	41.105.000,00	41.105.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.052.431.168,00	9.617.299.460,00	9.617.299.460,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.052.431.168,00	9.617.299.460,00	9.617.299.460,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.677.000,00	61.677.000,00	61.677.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.677.000,00	61.677.000,00	61.677.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	574.853.977,00	574.853.977,00	574.853.977,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.952.255,00	29.952.255,00	29.952.255,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.777.726,00	119.777.726,00	119.777.726,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.996.200,00	49.996.200,00	49.996.200,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.680.000,00	100.680.000,00	100.680.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.173.000,00	42.173.000,00	42.173.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.274.796,00	167.274.796,00	167.274.796,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	697.767.200,00	697.767.200,00	697.767.200,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	638.880.000,00	638.880.000,00	638.880.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	58.887.200,00	58.887.200,00	58.887.200,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.811.625,00	569.811.625,00	569.811.625,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.182.825,00	223.182.825,00	223.182.825,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.628.800,00	346.628.800,00	346.628.800,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.044.000,00	301.044.000,00	301.044.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.070.000,00	224.070.000,00	224.070.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.554.000,00	63.554.000,00	63.554.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.420.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000						Dinas Perhubungan	18.494.716.253,00	18.140.479.690,00	18.140.479.690,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18.494.716.253,00	18.140.479.690,00	18.140.479.690,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.637.892.560,00	3.637.892.560,00	3.637.892.560,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.146.745.200,00	2.146.745.200,00	2.146.745.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.720.848.200,00	1.720.848.200,00	1.720.848.200,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	425.897.000,00	425.897.000,00	425.897.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	6.413.400,00	6.413.400,00	6.413.400,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.413.400,00	6.413.400,00	6.413.400,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	272.570.161,00	272.570.161,00	272.570.161,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	238.070.161,00	238.070.161,00	238.070.161,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.047.412.701,00	1.047.412.701,00	1.047.412.701,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	157.074.023,00	157.074.023,00	157.074.023,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	59.194.000,00	59.194.000,00	59.194.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	99.560.000,00	99.560.000,00	99.560.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	731.584.678,00	731.584.678,00	731.584.678,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	164.751.098,00	164.751.098,00	164.751.098,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	164.751.098,00	164.751.098,00	164.751.098,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.027.578.053,60	1.027.578.053,60	1.027.578.053,60
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	45.507.000,00	45.507.000,00	45.507.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.507.000,00	45.507.000,00	45.507.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	982.071.053,60	982.071.053,60	982.071.053,60
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	30.201.000,00	30.201.000,00	30.201.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	553.013.054,00	553.013.054,00	553.013.054,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	213.719.499,60	213.719.499,60	213.719.499,60
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	185.137.500,00	185.137.500,00	185.137.500,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	48.020.000,00	48.020.000,00	48.020.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	48.020.000,00	48.020.000,00	48.020.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	04	2.01	0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	48.020.000,00	48.020.000,00	48.020.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.781.225.639,40	13.426.989.076,40	13.426.989.076,40
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.557.150,00	69.557.150,00	69.557.150,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.445.150,00	47.445.150,00	47.445.150,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	6.912.000,00	6.912.000,00	6.912.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.713.112.440,00	8.358.875.877,00	8.358.875.877,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.713.112.440,00	8.358.875.877,00	8.358.875.877,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68.734.750,00	68.734.750,00	68.734.750,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	68.734.750,00	68.734.750,00	68.734.750,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.309.677,60	559.309.677,60	559.309.677,60

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.276.203,60	88.276.203,60	88.276.203,60
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.795.474,00	83.795.474,00	83.795.474,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.738.000,00	194.738.000,00	194.738.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.928.912,80	186.928.912,80	186.928.912,80
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	24.928.912,80	24.928.912,80	24.928.912,80
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.164.755.563,00	2.164.755.563,00	2.164.755.563,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.577.563,00	279.577.563,00	279.577.563,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.885.178.000,00	1.885.178.000,00	1.885.178.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.968.827.146,00	1.918.827.146,00	1.918.827.146,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.754.427.146,00	1.704.427.146,00	1.704.427.146,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	33.551.155.557,70	33.239.317.426,70	33.239.317.426,70
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.232.416.086,40	30.920.577.955,40	30.920.577.955,40
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.804.016.430,20	8.204.016.430,20	8.204.016.430,20
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.804.016.430,20	8.204.016.430,20	8.204.016.430,20
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	166.962.250,00	166.962.250,00	166.962.250,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	643.829.000,00	643.829.000,00	643.829.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.557.000.000,00	5.957.000.000,00	5.957.000.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	531.522.070,70	531.522.070,70	531.522.070,70
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	904.703.109,50	904.703.109,50	904.703.109,50
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.561.160.541,30	11.957.160.541,30	11.957.160.541,30
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.561.160.541,30	11.957.160.541,30	11.957.160.541,30
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	253.609.380,00	253.609.380,00	253.609.380,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	11.186.243.161,30	11.582.243.161,30	11.582.243.161,30
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	121.308.000,00	121.308.000,00	121.308.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.867.239.114,90	10.759.400.983,90	10.759.400.983,90
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.421.500,00	67.421.500,00	67.421.500,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.860.000,00	25.860.000,00	25.860.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.560.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.001.500,00	25.001.500,00	25.001.500,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.916.368.718,00	7.688.530.587,00	7.688.530.587,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.916.368.718,00	7.688.530.587,00	7.688.530.587,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.855.000,00	94.855.000,00	94.855.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.855.000,00	94.855.000,00	94.855.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.867.152,90	622.867.152,90	622.867.152,90

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.427,00	30.000.427,00	30.000.427,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.489.989,40	120.489.989,40	120.489.989,40
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.626.236,50	54.626.236,50	54.626.236,50
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.350.500,00	215.350.500,00	215.350.500,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.118.834,00	47.118.834,00	47.118.834,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	47.118.834,00	47.118.834,00	47.118.834,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.519.426.660,00	1.519.426.660,00	1.519.426.660,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	427.357.460,00	427.357.460,00	427.357.460,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.069.200,00	1.092.069.200,00	1.092.069.200,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.181.250,00	719.181.250,00	719.181.250,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.230.000,00	341.230.000,00	341.230.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323.711.250,00	323.711.250,00	323.711.250,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.240.000,00	54.240.000,00	54.240.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	766.009.363,30	766.009.363,30	766.009.363,30
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	766.009.363,30	766.009.363,30	766.009.363,30
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	766.009.363,30	766.009.363,30	766.009.363,30
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	250.947.863,30	250.947.863,30	250.947.863,30
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500,00	327.036.500,00	327.036.500,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	154.814.000,00	154.814.000,00	154.814.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000,00	33.211.000,00	33.211.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.552.730.108,00	1.552.730.108,00	1.552.730.108,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.552.730.108,00	1.552.730.108,00	1.552.730.108,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.552.730.108,00	1.552.730.108,00	1.552.730.108,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	389.678.000,00	389.678.000,00	389.678.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	825.480.200,50	825.480.200,50	825.480.200,50
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	337.571.907,50	337.571.907,50	337.571.907,50
2.17.0.00.0.00.19.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.149.944.634,00	16.818.749.442,00	16.818.749.442,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.149.944.634,00	16.818.749.442,00	16.818.749.442,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	218.295.000,00	218.295.000,00	218.295.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	218.295.000,00	218.295.000,00	218.295.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	142.255.000,00	142.255.000,00	142.255.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	76.040.000,00	76.040.000,00	76.040.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	247.357.000,00	247.357.000,00	247.357.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	247.357.000,00	247.357.000,00	247.357.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	247.357.000,00	247.357.000,00	247.357.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	173.292.250,00	173.292.250,00	173.292.250,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.292.250,00	173.292.250,00	173.292.250,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	173.292.250,00	173.292.250,00	173.292.250,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	829.699.200,00	829.699.200,00	829.699.200,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	829.699.200,00	829.699.200,00	829.699.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	605.000.000,00	605.000.000,00	605.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	224.699.200,00	224.699.200,00	224.699.200,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	807.534.900,00	807.534.900,00	807.534.900,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	807.534.900,00	807.534.900,00	807.534.900,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	160.735.000,00	160.735.000,00	160.735.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	122.799.900,00	122.799.900,00	122.799.900,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	259.500.000,00	259.500.000,00	259.500.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.188.631.425,00	7.298.631.425,00	7.298.631.425,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	6.188.631.425,00	7.298.631.425,00	7.298.631.425,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	6.168.631.425,00	7.278.631.425,00	7.278.631.425,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.685.134.859,00	7.243.939.667,00	7.243.939.667,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.326.000,00	62.326.000,00	62.326.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.370.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.590.000,00	6.590.000,00	6.590.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	18.366.000,00	18.366.000,00	18.366.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.914.821.334,00	5.473.626.142,00	5.473.626.142,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.914.821.334,00	5.473.626.142,00	5.473.626.142,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.274.000,00	86.274.000,00	86.274.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	86.274.000,00	86.274.000,00	86.274.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.291.525,00	477.291.525,00	477.291.525,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.885.900,00	147.885.900,00	147.885.900,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.109.625,00	77.109.625,00	77.109.625,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.040.000,00	27.040.000,00	27.040.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.856.000,00	83.856.000,00	83.856.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	424.189.000,00	424.189.000,00	424.189.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.720.000,00	354.720.000,00	354.720.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	69.469.000,00	69.469.000,00	69.469.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.895.600,00	523.895.600,00	523.895.600,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.107.200,00	131.107.200,00	131.107.200,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.788.400,00	392.788.400,00	392.788.400,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.337.400,00	196.337.400,00	196.337.400,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.210.000,00	113.210.000,00	113.210.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.987.400,00	49.987.400,00	49.987.400,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.140.000,00	33.140.000,00	33.140.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.360.688.817,50	18.893.414.726,50	18.893.414.726,50

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.360.688.817,50	18.893.414.726,50	18.893.414.726,50
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	239.665.750,00	239.665.750,00	239.665.750,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	104.525.750,00	104.525.750,00	104.525.750,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	30.452.250,00	30.452.250,00	30.452.250,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	40.153.000,00	40.153.000,00	40.153.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	33.920.500,00	33.920.500,00	33.920.500,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	135.140.000,00	135.140.000,00	135.140.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	135.140.000,00	135.140.000,00	135.140.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	395.431.400,00	395.431.400,00	395.431.400,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	395.431.400,00	395.431.400,00	395.431.400,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	395.431.400,00	395.431.400,00	395.431.400,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.129.583.525,00	1.129.583.525,00	1.129.583.525,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.129.583.525,00	1.129.583.525,00	1.129.583.525,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	76.883.125,00	76.883.125,00	76.883.125,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	307.263.250,00	307.263.250,00	307.263.250,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	55.790.850,00	55.790.850,00	55.790.850,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	689.646.300,00	689.646.300,00	689.646.300,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	206.928.959,00	206.928.959,00	206.928.959,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	206.928.959,00	206.928.959,00	206.928.959,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	42.189.959,00	42.189.959,00	42.189.959,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	84.739.000,00	84.739.000,00	84.739.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	59.802.000,00	59.802.000,00	59.802.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.802.000,00	59.802.000,00	59.802.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59.802.000,00	59.802.000,00	59.802.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.329.277.183,50	16.862.003.092,50	16.862.003.092,50
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.186.505,00	70.186.505,00	70.186.505,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.499.882,00	38.499.882,00	38.499.882,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.879,00	9.999.879,00	9.999.879,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	21.686.744,00	21.686.744,00	21.686.744,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.975.802.099,00	10.508.528.008,00	10.508.528.008,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.975.802.099,00	10.508.528.008,00	10.508.528.008,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.417.000,00	47.417.000,00	47.417.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.417.000,00	47.417.000,00	47.417.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.892.000,00	77.892.000,00	77.892.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.892.000,00	77.892.000,00	77.892.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.563.245.851,50	3.563.245.851,50	3.563.245.851,50
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.629.087,00	64.629.087,00	64.629.087,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.043.898.821,00	3.043.898.821,00	3.043.898.821,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.075.516,00	75.075.516,00	75.075.516,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.999.182,00	124.999.182,00	124.999.182,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.499.745,50	67.499.745,50	67.499.745,50

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.155.000,00	47.155.000,00	47.155.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.988.500,00	99.988.500,00	99.988.500,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272.308.510,00	272.308.510,00	272.308.510,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	272.308.510,00	272.308.510,00	272.308.510,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.032.018,00	1.556.032.018,00	1.556.032.018,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	683.630.418,00	683.630.418,00	683.630.418,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.401.600,00	872.401.600,00	872.401.600,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	766.393.200,00	766.393.200,00	766.393.200,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.990.000,00	325.990.000,00	325.990.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.216.000,00	227.216.000,00	227.216.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	213.187.200,00	213.187.200,00	213.187.200,00
2.19.3.26.0.00.21.0000						Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	109.008.008.577,00	121.911.962.752,00	121.911.962.752,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	105.334.657.877,00	118.332.272.052,00	118.332.272.052,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	904.676.500,00	904.676.500,00	904.676.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	667.150.500,00	667.150.500,00	667.150.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	543.713.000,00	543.713.000,00	543.713.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	107.530.500,00	107.530.500,00	107.530.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	15.907.000,00	15.907.000,00	15.907.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.526.000,00	237.526.000,00	237.526.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	237.526.000,00	237.526.000,00	237.526.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	85.354.653.811,00	98.738.256.811,00	98.738.256.811,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.046.066.523,00	44.279.669.523,00	44.279.669.523,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	32.046.066.523,00	44.279.669.523,00	44.279.669.523,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.152.007.899,00	13.302.007.899,00	13.302.007.899,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12.445.500.399,00	12.595.500.399,00	12.595.500.399,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	706.507.500,00	706.507.500,00	706.507.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.172.651.250,00	11.172.651.250,00	11.172.651.250,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	51.103.000,00	51.103.000,00	51.103.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	11.121.548.250,00	11.121.548.250,00	11.121.548.250,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	27.586.098.300,00	28.586.098.300,00	28.586.098.300,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	27.481.098.300,00	28.481.098.300,00	28.481.098.300,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.397.829.839,00	1.397.829.839,00	1.397.829.839,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	154.292.960,00	154.292.960,00	154.292.960,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1.102.581.879,00	1.102.581.879,00	1.102.581.879,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	140.955.000,00	140.955.000,00	140.955.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.181.772.150,00	3.181.772.150,00	3.181.772.150,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	3.181.772.150,00	3.181.772.150,00	3.181.772.150,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	214.081.020,00	214.081.020,00	214.081.020,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	236.493.530,00	236.493.530,00	236.493.530,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	199.997.600,00	199.997.600,00	199.997.600,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.893.555.416,00	15.507.566.591,00	15.507.566.591,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.587.500,00	75.587.500,00	75.587.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.738.000,00	40.738.000,00	40.738.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	24.909.500,00	24.909.500,00	24.909.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.809.518.901,00	9.423.530.076,00	9.423.530.076,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.809.518.901,00	9.423.530.076,00	9.423.530.076,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.728.750,00	52.728.750,00	52.728.750,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.728.750,00	52.728.750,00	52.728.750,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.386.000,00	94.386.000,00	94.386.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.386.000,00	94.386.000,00	94.386.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.268.345,00	723.268.345,00	723.268.345,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.999.900,00	29.999.900,00	29.999.900,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.052.960,00	200.052.960,00	200.052.960,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.935.400,00	44.935.400,00	44.935.400,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.999.810,00	99.999.810,00	99.999.810,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	158.282.275,00	158.282.275,00	158.282.275,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.998.000,00	99.998.000,00	99.998.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.531.448,00	20.531.448,00	20.531.448,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.531.448,00	20.531.448,00	20.531.448,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.602.620.472,00	4.602.620.472,00	4.602.620.472,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.703.756.472,00	1.703.756.472,00	1.703.756.472,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.898.864.000,00	2.898.864.000,00	2.898.864.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.914.000,00	514.914.000,00	514.914.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.560.000,00	328.560.000,00	328.560.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.104.000,00	171.104.000,00	171.104.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.673.350.700,00	3.579.690.700,00	3.579.690.700,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.673.350.700,00	3.579.690.700,00	3.579.690.700,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.401.215.000,00	1.307.555.000,00	1.307.555.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.401.215.000,00	1.307.555.000,00	1.307.555.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.401.215.000,00	1.307.555.000,00	1.307.555.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.148.770.800,00	2.148.770.800,00	2.148.770.800,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.148.770.800,00	2.148.770.800,00	2.148.770.800,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.148.770.800,00	2.148.770.800,00	2.148.770.800,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	123.364.900,00	123.364.900,00	123.364.900,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	123.364.900,00	123.364.900,00	123.364.900,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	123.364.900,00	123.364.900,00	123.364.900,00
2.23.2.24.0.00.22.0000						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	13.804.458.469,00	12.283.598.469,00	12.283.598.469,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.804.458.469,00	12.283.598.469,00	12.283.598.469,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	13.380.656.851,00	11.859.796.851,00	11.859.796.851,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.031.959.225,00	2.031.959.225,00	2.031.959.225,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	401.825.514,00	401.825.514,00	401.825.514,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	31.021.000,00	31.021.000,00	31.021.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	24.477.828,00	24.477.828,00	24.477.828,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	346.326.686,00	346.326.686,00	346.326.686,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.630.133.711,00	1.630.133.711,00	1.630.133.711,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	557.592.777,00	557.592.777,00	557.592.777,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.027.213.934,00	1.027.213.934,00	1.027.213.934,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	45.327.000,00	45.327.000,00	45.327.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.348.697.626,00	9.827.837.626,00	9.827.837.626,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.983.227,50	64.983.227,50	64.983.227,50
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.866.915,00	50.866.915,00	50.866.915,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.008.302,50	5.008.302,50	5.008.302,50
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	9.108.010,00	9.108.010,00	9.108.010,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.997.454.326,00	7.476.594.326,00	7.476.594.326,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.997.454.326,00	7.476.594.326,00	7.476.594.326,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.011.122,50	571.011.122,50	571.011.122,50
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.994.835,00	59.994.835,00	59.994.835,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.634.113,00	86.634.113,00	86.634.113,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.503,00	59.992.503,00	59.992.503,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.907.891,50	96.907.891,50	96.907.891,50
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.972.750,00	54.972.750,00	54.972.750,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.055.030,00	47.055.030,00	47.055.030,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.454.000,00	101.454.000,00	101.454.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	494.412.100,00	494.412.100,00	494.412.100,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	482.000.000,00	482.000.000,00	482.000.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	12.412.100,00	12.412.100,00	12.412.100,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.591.850,00	564.591.850,00	564.591.850,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.170.650,00	188.170.650,00	188.170.650,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.421.200,00	376.421.200,00	376.421.200,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.745.000,00	558.745.000,00	558.745.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.410.000,00	243.410.000,00	243.410.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.925.000,00	266.925.000,00	266.925.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.410.000,00	48.410.000,00	48.410.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	423.801.618,00	423.801.618,00	423.801.618,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	423.801.618,00	423.801.618,00	423.801.618,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	168.243.457,00	168.243.457,00	168.243.457,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	168.243.457,00	168.243.457,00	168.243.457,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	255.558.161,00	255.558.161,00	255.558.161,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	116.629.341,00	116.629.341,00	116.629.341,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	138.928.820,00	138.928.820,00	138.928.820,00
3.25.0.00.0.00.23.0000						Dinas Perikanan	16.446.817.218,00	16.197.107.218,00	16.197.107.218,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	16.446.817.218,00	16.197.107.218,00	16.197.107.218,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.446.817.218,00	16.197.107.218,00	16.197.107.218,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.321.105.175,00	2.721.105.175,00	2.721.105.175,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.172.710.125,00	2.572.710.125,00	2.572.710.125,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	67.852.500,00	67.852.500,00	67.852.500,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.104.857.625,00	2.504.857.625,00	2.504.857.625,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	148.395.050,00	148.395.050,00	148.395.050,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	105.856.050,00	105.856.050,00	105.856.050,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	42.539.000,00	42.539.000,00	42.539.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.998.177.806,00	2.098.177.806,00	2.098.177.806,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	506.909.000,00	506.909.000,00	506.909.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	499.824.000,00	499.824.000,00	499.824.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7.085.000,00	7.085.000,00	7.085.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.491.268.806,00	1.591.268.806,00	1.591.268.806,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.362.365.806,00	1.462.365.806,00	1.462.365.806,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	128.903.000,00	128.903.000,00	128.903.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	360.784.493,00	360.784.493,00	360.784.493,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	360.784.493,00	360.784.493,00	360.784.493,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	33.926.000,00	33.926.000,00	33.926.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	18.319.000,00	18.319.000,00	18.319.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	308.539.493,00	308.539.493,00	308.539.493,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	929.834.950,00	929.834.950,00	929.834.950,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	47.268.000,00	47.268.000,00	47.268.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	47.268.000,00	47.268.000,00	47.268.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	882.566.950,00	882.566.950,00	882.566.950,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.791.000,00	276.791.000,00	276.791.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	605.775.950,00	605.775.950,00	605.775.950,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.836.914.794,00	10.087.204.794,00	10.087.204.794,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.412.000,00	51.412.000,00	51.412.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.613.000,00	33.613.000,00	33.613.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	9.024.000,00	9.024.000,00	9.024.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.351.911.103,00	7.602.201.103,00	7.602.201.103,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.351.911.103,00	7.602.201.103,00	7.602.201.103,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.371.000,00	52.371.000,00	52.371.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.371.000,00	52.371.000,00	52.371.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.800.000,00	77.800.000,00	77.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.800.000,00	77.800.000,00	77.800.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	771.284.407,00	771.284.407,00	771.284.407,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.724.080,00	65.724.080,00	65.724.080,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.708.521,00	159.708.521,00	159.708.521,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.245.105,00	53.245.105,00	53.245.105,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.819.780,00	97.819.780,00	97.819.780,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.555.852,00	36.555.852,00	36.555.852,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.680.000,00	40.680.000,00	40.680.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.780.369,00	35.780.369,00	35.780.369,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.111.000,00	172.111.000,00	172.111.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	109.659.700,00	109.659.700,00	109.659.700,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.593.163,00	7.593.163,00	7.593.163,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	7.593.163,00	7.593.163,00	7.593.163,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.845.121,00	1.083.845.121,00	1.083.845.121,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.960.321,00	288.960.321,00	288.960.321,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	794.884.800,00	794.884.800,00	794.884.800,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.698.000,00	440.698.000,00	440.698.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.590.000,00	330.590.000,00	330.590.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.978.000,00	69.978.000,00	69.978.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.130.000,00	40.130.000,00	40.130.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	49.837.704.929,00	52.512.743.436,00	52.512.743.436,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	49.837.704.929,00	52.512.743.436,00	52.512.743.436,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.502.322.916,00	13.177.837.916,00	13.177.837.916,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.870.449.376,00	9.545.964.376,00	9.545.964.376,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.418.536.676,00	4.538.536.676,00	4.538.536.676,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	50.295.600,00	1.095.810.600,00	1.095.810.600,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	38.686.000,00	38.686.000,00	38.686.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	2.202.000.000,00	3.712.000.000,00	3.712.000.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	160.931.100,00	160.931.100,00	160.931.100,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	17.565.000,00	17.565.000,00	17.565.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	17.565.000,00	17.565.000,00	17.565.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.614.308.540,00	3.614.308.540,00	3.614.308.540,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.157.848.000,00	3.157.848.000,00	3.157.848.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	456.460.540,00	456.460.540,00	456.460.540,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.363.169.050,00	1.713.169.050,00	1.713.169.050,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.363.169.050,00	1.713.169.050,00	1.713.169.050,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	20.540.000,00	20.540.000,00	20.540.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	156.936.610,00	156.936.610,00	156.936.610,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	35.429.500,00	35.429.500,00	35.429.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.147.423.940,00	1.497.423.940,00	1.497.423.940,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.839.000,00	2.839.000,00	2.839.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.181.541.500,00	1.181.541.500,00	1.181.541.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	354.658.500,00	354.658.500,00	354.658.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	110.999.000,00	110.999.000,00	110.999.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.659.500,00	243.659.500,00	243.659.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.609.000,00	395.609.000,00	395.609.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	395.609.000,00	395.609.000,00	395.609.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	431.274.000,00	431.274.000,00	431.274.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	46.362.500,00	46.362.500,00	46.362.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	162.226.500,00	162.226.500,00	162.226.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	222.685.000,00	222.685.000,00	222.685.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	116.512.500,00	116.512.500,00	116.512.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	116.512.500,00	116.512.500,00	116.512.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	116.512.500,00	116.512.500,00	116.512.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.970.705.983,50	3.970.705.983,50	3.970.705.983,50
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.970.705.983,50	3.970.705.983,50	3.970.705.983,50
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.607.970.974,00	2.607.970.974,00	2.607.970.974,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	741.527.067,00	741.527.067,00	741.527.067,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	183.447.942,50	183.447.942,50	183.447.942,50
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	437.760.000,00	437.760.000,00	437.760.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.703.452.979,50	32.352.976.486,50	32.352.976.486,50
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.413.530,33	157.413.530,33	157.413.530,33
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.194.347,00	49.194.347,00	49.194.347,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	88.219.183,33	88.219.183,33	88.219.183,33
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.878.834.386,02	26.528.357.893,02	26.528.357.893,02

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.878.834.386,02	26.528.357.893,02	26.528.357.893,02
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.191.250,00	88.191.250,00	88.191.250,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	88.191.250,00	88.191.250,00	88.191.250,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.745.446,15	621.745.446,15	621.745.446,15
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.035.704,00	28.035.704,00	28.035.704,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.305.179,00	182.305.179,00	182.305.179,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.918.025,00	56.918.025,00	56.918.025,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.123.788,99	97.123.788,99	97.123.788,99
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.359.595,16	50.359.595,16	50.359.595,16
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	39.993.104,00	39.993.104,00	39.993.104,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.988.050,00	24.988.050,00	24.988.050,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.022.000,00	142.022.000,00	142.022.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.055.607.367,00	4.055.607.367,00	4.055.607.367,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.985.145,00	252.985.145,00	252.985.145,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.802.622.222,00	3.802.622.222,00	3.802.622.222,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901.661.000,00	901.661.000,00	901.661.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	551.880.000,00	551.880.000,00	551.880.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.981.000,00	299.981.000,00	299.981.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000						Dinas Perkebunan	45.061.252.511,00	45.065.363.508,00	45.065.363.508,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.736.566.492,00	6.766.566.492,00	6.766.566.492,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.954.947.750,00	3.984.947.750,00	3.984.947.750,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	903.916.250,00	903.916.250,00	903.916.250,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.051.031.500,00	3.081.031.500,00	3.081.031.500,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.781.618.742,00	2.781.618.742,00	2.781.618.742,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4.854.900,00	4.854.900,00	4.854.900,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	2.776.763.842,00	2.776.763.842,00	2.776.763.842,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.640.278.291,00	8.370.278.291,00	8.370.278.291,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	82.999.500,00	82.999.500,00	82.999.500,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	82.999.500,00	82.999.500,00	82.999.500,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	7.557.278.791,00	8.287.278.791,00	8.287.278.791,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	37.235.500,00	37.235.500,00	37.235.500,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.230.699.529,00	7.960.699.529,00	7.960.699.529,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	289.343.762,00	289.343.762,00	289.343.762,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	13.471.364.247,00	13.471.364.247,00	13.471.364.247,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	13.471.364.247,00	13.471.364.247,00	13.471.364.247,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	98.347.649,00	98.347.649,00	98.347.649,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	13.373.016.598,00	13.373.016.598,00	13.373.016.598,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.190.081.000,00	1.190.081.000,00	1.190.081.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.190.081.000,00	1.190.081.000,00	1.190.081.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.190.081.000,00	1.190.081.000,00	1.190.081.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.751.583.701,00	2.801.583.701,00	2.801.583.701,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.751.583.701,00	2.801.583.701,00	2.801.583.701,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.017.108.201,00	1.017.108.201,00	1.017.108.201,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.666.450.500,00	1.716.450.500,00	1.716.450.500,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	68.025.000,00	68.025.000,00	68.025.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.271.378.780,00	12.465.489.777,00	12.465.489.777,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.584.630,00	261.584.630,00	261.584.630,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.560.830,00	63.560.830,00	63.560.830,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.017.000,00	19.017.000,00	19.017.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	179.006.800,00	179.006.800,00	179.006.800,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.082.375.949,00	9.276.486.946,00	9.276.486.946,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.082.375.949,00	9.276.486.946,00	9.276.486.946,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.230.000,00	44.230.000,00	44.230.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.230.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.022.234,00	495.022.234,00	495.022.234,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.874.729,00	29.874.729,00	29.874.729,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.912.831,00	47.912.831,00	47.912.831,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.166.561,00	50.166.561,00	50.166.561,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.472.014,00	139.472.014,00	139.472.014,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.246.499,00	59.246.499,00	59.246.499,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.978.600,00	3.978.600,00	3.978.600,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.891.000,00	2.891.000,00	2.891.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.480.000,00	121.480.000,00	121.480.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.207.500,00	41.207.500,00	41.207.500,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	41.207.500,00	41.207.500,00	41.207.500,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.449.667,00	1.518.449.667,00	1.518.449.667,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.339.000,00	228.339.000,00	228.339.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.290.110.667,00	1.290.110.667,00	1.290.110.667,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	776.068.800,00	776.068.800,00	776.068.800,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.455.000,00	339.455.000,00	339.455.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	383.354.800,00	383.354.800,00	383.354.800,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.259.000,00	53.259.000,00	53.259.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	23.006.754.007,00	22.330.566.460,00	22.330.566.460,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.490.825.152,50	20.814.637.605,50	20.814.637.605,50
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	350.949.378,00	350.949.378,00	350.949.378,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	69.851.000,00	69.851.000,00	69.851.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	69.851.000,00	69.851.000,00	69.851.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	35.667.000,00	35.667.000,00	35.667.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	35.667.000,00	35.667.000,00	35.667.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	245.431.378,00	245.431.378,00	245.431.378,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	245.431.378,00	245.431.378,00	245.431.378,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	771.243.450,00	771.243.450,00	771.243.450,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	771.243.450,00	771.243.450,00	771.243.450,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	771.243.450,00	771.243.450,00	771.243.450,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	884.861.000,00	884.861.000,00	884.861.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	24.491.000,00	24.491.000,00	24.491.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24.491.000,00	24.491.000,00	24.491.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	835.894.000,00	835.894.000,00	835.894.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.862.000,00	30.862.000,00	30.862.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	805.032.000,00	805.032.000,00	805.032.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.476.000,00	24.476.000,00	24.476.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24.476.000,00	24.476.000,00	24.476.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4.633.978.740,00	4.633.978.740,00	4.633.978.740,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.633.978.740,00	4.633.978.740,00	4.633.978.740,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	935.363.500,00	935.363.500,00	935.363.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	3.673.267.240,00	3.673.267.240,00	3.673.267.240,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	25.348.000,00	25.348.000,00	25.348.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	198.404.040,00	198.404.040,00	198.404.040,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	198.404.040,00	198.404.040,00	198.404.040,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	144.498.040,00	144.498.040,00	144.498.040,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	53.906.000,00	53.906.000,00	53.906.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	64.473.300,00	64.473.300,00	64.473.300,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	64.473.300,00	64.473.300,00	64.473.300,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	64.473.300,00	64.473.300,00	64.473.300,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.586.915.244,50	13.910.727.697,50	13.910.727.697,50
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.637.189,50	83.637.189,50	83.637.189,50
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.079.000,50	49.079.000,50	49.079.000,50
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.492.189,00	9.492.189,00	9.492.189,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.066.000,00	25.066.000,00	25.066.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.853.270.676,00	10.177.083.129,00	10.177.083.129,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.853.270.676,00	10.177.083.129,00	10.177.083.129,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.110.500,00	124.110.500,00	124.110.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.680.000,00	58.680.000,00	58.680.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.430.500,00	65.430.500,00	65.430.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	577.889.830,00	577.889.830,00	577.889.830,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.983.187,00	29.983.187,00	29.983.187,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.706.173,00	120.706.173,00	120.706.173,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.908.032,00	59.908.032,00	59.908.032,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.957.221,00	99.957.221,00	99.957.221,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.172.217,00	55.172.217,00	55.172.217,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.113.000,00	190.113.000,00	190.113.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.628.680,00	24.628.680,00	24.628.680,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	24.628.680,00	24.628.680,00	24.628.680,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.557.569.349,00	2.557.569.349,00	2.557.569.349,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.110.949,00	488.110.949,00	488.110.949,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.069.458.400,00	2.069.458.400,00	2.069.458.400,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.809.020,00	365.809.020,00	365.809.020,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.860.000,00	316.860.000,00	316.860.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.407.520,00	7.407.520,00	7.407.520,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.541.500,00	41.541.500,00	41.541.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.515.928.854,50	1.515.928.854,50	1.515.928.854,50
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.385.407.854,50	1.385.407.854,50	1.385.407.854,50
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.385.407.854,50	1.385.407.854,50	1.385.407.854,50
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	538.105.534,00	538.105.534,00	538.105.534,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	847.302.320,50	847.302.320,50	847.302.320,50
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	27.517.000,00	27.517.000,00	27.517.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	27.517.000,00	27.517.000,00	27.517.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	27.517.000,00	27.517.000,00	27.517.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	103.004.000,00	103.004.000,00	103.004.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	103.004.000,00	103.004.000,00	103.004.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	103.004.000,00	103.004.000,00	103.004.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.5.02.0.00.27.0000						Sekretariat Daerah	134.495.932.469,00	139.334.235.055,00	139.334.235.055,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	134.495.932.469,00	139.334.235.055,00	139.334.235.055,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	134.495.932.469,00	139.334.235.055,00	139.334.235.055,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.455.488.235,00	23.770.488.235,00	23.770.488.235,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	1.526.472.727,00	1.526.472.727,00	1.526.472.727,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.241.808.580,00	1.241.808.580,00	1.241.808.580,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	148.230.351,00	148.230.351,00	148.230.351,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	136.433.796,00	136.433.796,00	136.433.796,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12.721.689.941,00	21.036.689.941,00	21.036.689.941,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11.206.927.630,00	19.521.927.630,00	19.521.927.630,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	146.433.745,00	146.433.745,00	146.433.745,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.368.328.566,00	1.368.328.566,00	1.368.328.566,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	846.127.567,00	846.127.567,00	846.127.567,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	149.012.607,00	149.012.607,00	149.012.607,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	619.901.977,50	619.901.977,50	619.901.977,50
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	77.212.982,50	77.212.982,50	77.212.982,50
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	361.198.000,00	361.198.000,00	361.198.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	142.136.000,00	142.136.000,00	142.136.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	198.320.000,00	198.320.000,00	198.320.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	20.742.000,00	20.742.000,00	20.742.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.009.311.975,00	2.009.311.975,00	2.009.311.975,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	316.669.000,00	316.669.000,00	316.669.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.786.000,00	121.786.000,00	121.786.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	95.759.000,00	95.759.000,00	95.759.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	99.124.000,00	99.124.000,00	99.124.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	472.647.000,00	472.647.000,00	472.647.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	254.842.000,00	254.842.000,00	254.842.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	148.244.000,00	148.244.000,00	148.244.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	69.561.000,00	69.561.000,00	69.561.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	589.159.975,00	589.159.975,00	589.159.975,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	302.621.475,00	302.621.475,00	302.621.475,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	189.864.500,00	189.864.500,00	189.864.500,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	96.674.000,00	96.674.000,00	96.674.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	630.836.000,00	630.836.000,00	630.836.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15.571.000,00	15.571.000,00	15.571.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	388.048.000,00	388.048.000,00	388.048.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	227.217.000,00	227.217.000,00	227.217.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.031.132.259,00	113.554.434.845,00	113.554.434.845,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.478.894,50	71.478.894,50	71.478.894,50
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.844.894,50	36.844.894,50	36.844.894,50
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.070.000,00	29.070.000,00	29.070.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.564.000,00	5.564.000,00	5.564.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.464.261.429,35	34.652.564.015,00	34.652.564.015,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.464.261.429,35	34.652.564.015,00	34.652.564.015,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	632.361.992,00	632.361.992,00	632.361.992,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	581.113.992,00	581.113.992,00	581.113.992,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.248.000,00	51.248.000,00	51.248.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	904.212.601,00	1.004.212.601,00	1.004.212.601,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	191.170.000,00	191.170.000,00	191.170.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.927.500,00	41.927.500,00	41.927.500,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	570.622.000,00	670.622.000,00	670.622.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.493.101,00	100.493.101,00	100.493.101,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.426.556.136,46	19.461.887.976,46	19.461.887.976,46
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	449.888.373,00	449.888.373,00	449.888.373,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.299.611.371,78	4.284.611.371,78	4.284.611.371,78
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.464.194.245,00	1.464.194.245,00	1.464.194.245,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	795.926.743,90	795.926.743,90	795.926.743,90
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	800.393.342,78	800.393.342,78	800.393.342,78
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	189.043.800,00	189.043.800,00	189.043.800,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.680.000,00	40.680.000,00	40.680.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.597.867.505,00	7.597.867.505,00	7.597.867.505,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.788.950.755,00	3.839.282.595,00	3.839.282.595,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.661.172.561,50	7.860.840.721,85	7.860.840.721,85
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.940.389.880,00	7.190.389.880,35	7.190.389.880,35
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	720.782.681,50	670.450.841,50	670.450.841,50
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.929.176.208,00	18.529.176.208,00	18.529.176.208,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.357.739.808,00	6.357.739.808,00	6.357.739.808,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.571.436.400,00	12.171.436.400,00	12.171.436.400,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.574.310.760,00	12.574.310.760,00	12.574.310.760,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.833.214.900,00	5.833.214.900,00	5.833.214.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.822.905.860,00	4.822.905.860,00	4.822.905.860,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.918.190.000,00	1.918.190.000,00	1.918.190.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.916.868.640,00	1.916.868.640,00	1.916.868.640,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	357.788.640,00	357.788.640,00	357.788.640,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	751.480.000,00	751.480.000,00	751.480.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	799.000.000,00	799.000.000,00	799.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.835.541.948,00	8.835.541.948,00	8.835.541.948,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	5.111.817.948,00	5.111.817.948,00	5.111.817.948,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.205.750.000,00	2.205.750.000,00	2.205.750.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.517.974.000,00	1.517.974.000,00	1.517.974.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	1.535.905.702,50	1.535.905.702,50	1.535.905.702,50
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	450.704.550,00	450.704.550,00	450.704.550,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	305.748.000,00	305.748.000,00	305.748.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	602.058.792,50	602.058.792,50	602.058.792,50
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	177.394.360,00	177.394.360,00	177.394.360,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6.079.285.385,69	6.479.285.385,69	6.479.285.385,69
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.460.420.000,00	2.460.420.000,00	2.460.420.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.398.642.180,00	3.798.642.180,00	3.798.642.180,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	220.223.205,69	220.223.205,69	220.223.205,69
4.02.0.00.0.00.28.0000						Sekretariat DPRD	99.847.296.904,00	120.372.873.231,00	120.372.873.231,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	99.847.296.904,00	120.372.873.231,00	120.372.873.231,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25.940.156.665,19	29.528.902.961,19	29.528.902.961,19

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.224.938.450,00	2.030.026.525,00	2.030.026.525,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.965.226.525,00	1.965.226.525,00	1.965.226.525,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	259.711.925,00	64.800.000,00	64.800.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.622.930.212,00	4.260.530.713,00	4.260.530.713,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.096.686.654,00	1.080.686.654,00	1.080.686.654,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.096.686.654,00	1.080.686.654,00	1.080.686.654,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	666.435.125,00	650.435.125,00	650.435.125,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	666.435.125,00	650.435.125,00	650.435.125,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.096.686.654,00	798.287.155,00	798.287.155,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.633.321.654,00	1.495.369.654,00	1.495.369.654,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.633.321.654,00	1.495.369.654,00	1.495.369.654,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.639.007.300,00	3.585.007.300,00	3.585.007.300,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.222.672.000,00	1.222.672.000,00	1.222.672.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	720.000.000,00	576.000.000,00	576.000.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	480.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.216.335.300,00	1.366.335.300,00	1.366.335.300,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.896.522.449,19	6.284.876.169,19	6.284.876.169,19
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	152.275.000,00	112.300.000,00	112.300.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	2.744.247.449,19	6.172.576.169,19	6.172.576.169,19
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.571.160.000,00	1.571.160.000,00	1.571.160.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.571.160.000,00	1.571.160.000,00	1.571.160.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	9.352.276.600,00	10.301.932.600,00	10.301.932.600,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.256.092.600,00	5.256.092.600,00	5.256.092.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.096.184.000,00	5.045.840.000,00	5.045.840.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.907.140.238,81	90.843.970.269,81	90.843.970.269,81
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.447.950,00	35.447.950,00	35.447.950,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.182.850,00	15.182.850,00	15.182.850,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.597.000,00	10.597.000,00	10.597.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	9.668.100,00	9.668.100,00	9.668.100,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.670.785.000,00	9.935.827.448,00	9.935.827.448,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.670.785.000,00	9.935.827.448,00	9.935.827.448,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	372.443.500,00	372.443.500,00	372.443.500,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	372.443.500,00	372.443.500,00	372.443.500,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	304.381.000,00	703.550.000,00	844.559.960,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	141.009.960,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.741.000,00	94.741.000,00	94.741.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	209.640.000,00	608.809.000,00	608.809.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.656.379.197,81	14.332.288.453,81	15.368.675.693,81
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.955.315,00	146.593.810,00	146.593.810,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.221.762.739,76	5.103.984.338,76	5.903.984.338,76
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	736.914.691,67	956.472.691,67	956.472.691,67
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.086.455,00	105.086.455,00	105.086.455,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	203.384.746,57	302.335.071,57	302.335.071,57
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.500.000,00	400.500.000,00	400.500.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.851.775.249,81	7.277.316.086,81	7.513.703.326,81

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.473.688.012,00	13.371.681.798,00	13.222.003.798,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.507.600.000,00	7.688.200.000,00	7.138.522.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	2.966.088.012,00	5.683.481.798,00	6.083.481.798,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.072.571.881,00	6.045.768.422,00	6.045.768.422,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.170.046.459,00	993.243.000,00	993.243.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.902.525.422,00	5.052.525.422,00	5.052.525.422,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.513.648.863,00	6.379.032.863,00	6.379.032.863,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.050.000,00	306.550.000,00	306.550.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	985.500.000,00	985.500.000,00	985.500.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.117.966.863,00	4.864.550.863,00	4.864.550.863,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.132.000,00	222.432.000,00	222.432.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.841.554.780,00	28.866.554.780,00	27.846.554.780,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.547.804.780,00	27.572.804.780,00	26.552.804.780,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.113.750.000,00	1.113.750.000,00	1.113.750.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	8.952.240.055,00	10.801.375.055,00	10.793.655.855,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6.347.760.575,00	8.076.895.575,00	8.189.176.375,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.604.479.480,00	2.724.479.480,00	2.604.479.480,00
5.01.5.05.0.00.44.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.203.262.109,50	21.712.999.554,50	21.712.999.554,50
5.01.5.05.0.00.44.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	22.203.262.109,50	21.712.999.554,50	21.712.999.554,50
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01				PERENCANAAN	21.015.012.009,80	20.524.749.454,80	20.524.749.454,80
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.737.413.167,20	1.961.857.167,20	1.961.857.167,20
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.309.316.492,00	1.533.760.492,00	1.533.760.492,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50.505.000,00	50.505.000,00	50.505.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	227.871.000,00	452.315.000,00	452.315.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	358.209.000,00	358.209.000,00	358.209.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	672.731.492,00	672.731.492,00	672.731.492,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	64.943.050,00	64.943.050,00	64.943.050,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	27.661.000,00	27.661.000,00	27.661.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	37.282.050,00	37.282.050,00	37.282.050,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.656.250,00	300.656.250,00	300.656.250,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.229.894,00	75.229.894,00	75.229.894,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	225.426.356,00	225.426.356,00	225.426.356,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	62.497.375,20	62.497.375,20	62.497.375,20
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	62.497.375,20	62.497.375,20	62.497.375,20
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.185.586.820,00	2.185.586.820,00	2.185.586.820,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	533.470.500,00	533.470.500,00	533.470.500,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.978.000,00	98.978.000,00	98.978.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	69.109.000,00	69.109.000,00	69.109.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.935.250,00	136.935.250,00	136.935.250,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	228.448.250,00	228.448.250,00	228.448.250,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	230.235.000,00	230.235.000,00	230.235.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.956.000,00	60.956.000,00	60.956.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	36.162.000,00	36.162.000,00	36.162.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.456.000,00	87.456.000,00	87.456.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	45.661.000,00	45.661.000,00	45.661.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.421.881.320,00	1.421.881.320,00	1.421.881.320,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	447.107.820,00	447.107.820,00	447.107.820,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	38.588.000,00	38.588.000,00	38.588.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	118.422.000,00	118.422.000,00	118.422.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	668.997.500,00	668.997.500,00	668.997.500,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	148.766.000,00	148.766.000,00	148.766.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.092.012.022,60	16.377.305.467,60	16.377.305.467,60
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.885.566,00	49.885.566,00	49.885.566,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.153.436,00	41.153.436,00	41.153.436,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.732.130,00	8.732.130,00	8.732.130,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.065.704.000,00	13.311.622.748,00	13.311.622.748,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.065.704.000,00	13.311.622.748,00	13.311.622.748,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.622.000,00	91.622.000,00	91.622.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	91.622.000,00	91.622.000,00	91.622.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.078.000,00	300.078.000,00	300.078.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.078.000,00	300.078.000,00	300.078.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.028.588,60	710.403.285,60	710.403.285,60
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.409,00	29.962.409,00	29.962.409,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.014.407,00	166.389.104,00	166.389.104,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.295,00	59.992.295,00	59.992.295,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.678.456,60	125.678.456,60	125.678.456,60
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.679.021,00	105.679.021,00	105.679.021,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.306.000,00	11.306.000,00	11.306.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.396.000,00	171.396.000,00	171.396.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.665.608,00	52.665.608,00	52.665.608,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	52.665.608,00	52.665.608,00	52.665.608,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.188.260,00	1.142.188.260,00	1.142.188.260,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.508.260,00	435.508.260,00	435.508.260,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.680.000,00	706.680.000,00	706.680.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.840.000,00	718.840.000,00	718.840.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.930.000,00	444.930.000,00	444.930.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.060.000,00	199.060.000,00	199.060.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.850.000,00	74.850.000,00	74.850.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.188.250.099,70	1.188.250.099,70	1.188.250.099,70
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	759.064.298,85	759.064.298,85	759.064.298,85
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	248.207.228,00	248.207.228,00	248.207.228,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	248.207.228,00	248.207.228,00	248.207.228,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	234.627.839,85	234.627.839,85	234.627.839,85
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	34.628.150,00	34.628.150,00	34.628.150,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	199.999.689,85	199.999.689,85	199.999.689,85
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	104.801.333,00	104.801.333,00	104.801.333,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	104.801.333,00	104.801.333,00	104.801.333,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	171.427.898,00	171.427.898,00	171.427.898,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	73.560.120,00	73.560.120,00	73.560.120,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	49.316.000,00	49.316.000,00	49.316.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	48.551.778,00	48.551.778,00	48.551.778,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	429.185.800,85	429.185.800,85	429.185.800,85
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	429.185.800,85	429.185.800,85	429.185.800,85
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	299.999.799,85	299.999.799,85	299.999.799,85
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	129.186.001,00	129.186.001,00	129.186.001,00
5.02.0.00.0.00.45.0000						Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	583.297.367.608,24	571.334.940.609,24	571.334.940.609,24
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02				KEUANGAN	583.297.367.608,24	571.334.940.609,24	571.334.940.609,24
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	564.017.889.112,80	553.346.254.112,55	553.346.254.112,55
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	583.460.000,25	811.825.000,00	811.825.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	65.680.000,25	115.000.000,00	115.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.955.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	205.745.000,00	240.745.000,00	240.745.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	148.840.000,00	193.840.000,00	193.840.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	137.240.000,00	157.240.000,00	157.240.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.420.199.950,00	1.510.199.950,00	1.510.199.950,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	66.702.000,00	96.702.000,00	96.702.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	54.293.500,00	84.293.500,00	84.293.500,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49.204.450,00	79.204.450,00	79.204.450,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	554.622.650,00	614.622.650,00	614.622.650,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.186.500,00	34.186.500,00	34.186.500,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	29.802.400,00	29.802.400,00	29.802.400,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	84.151.400,00	136.151.400,00	136.151.400,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69.666.000,00	69.666.000,00	69.666.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	89.382.500,00	97.382.500,00	97.382.500,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	41.790.000,00	41.790.000,00	41.790.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	43.279.000,00	43.279.000,00	43.279.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	39.910.900,00	39.910.900,00	39.910.900,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	58.179.500,00	58.179.500,00	58.179.500,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	64.274.450,00	64.274.450,00	64.274.450,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	557.239.185.862,55	550.189.185.862,55	550.189.185.862,55
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	541.746.901.358,00	544.746.901.358,00	544.746.901.358,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.442.284.504,55	5.442.284.504,55	5.442.284.504,55

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	220.420.650,00	220.420.650,00	220.420.650,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	160.143.000,00	160.143.000,00	160.143.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60.277.650,00	60.277.650,00	60.277.650,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.080.733.500,00	1.130.733.500,00	1.130.733.500,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.733.500,00	1.130.733.500,00	1.130.733.500,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	104.978.400,00	104.978.400,00	104.978.400,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	110.080.000,00	150.080.000,00	150.080.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	71.126.000,00	71.126.000,00	71.126.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	241.478.700,00	161.478.700,00	161.478.700,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	57.287.400,00	57.287.400,00	57.287.400,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	46.630.200,00	46.630.200,00	46.630.200,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	115.921.800,00	121.810.800,00	121.810.800,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42.498.000,00	36.609.000,00	36.609.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	153.647.000,00	163.647.000,00	163.647.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	137.086.000,00	217.086.000,00	217.086.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.198.744.995,44	16.857.952.996,69	16.857.952.996,69
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.667.127,72	51.667.127,72	51.667.127,72
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.667.332,72	41.667.332,72	41.667.332,72
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.795,00	9.999.795,00	9.999.795,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.586.021.212,00	12.455.866.618,05	12.455.866.618,05
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.586.021.212,00	12.455.866.618,05	12.455.866.618,05
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	122.582.000,00	122.582.000,00	122.582.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	122.582.000,00	122.582.000,00	122.582.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.840.000,00	298.226.000,00	298.226.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	153.386.000,00	153.386.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.840.000,00	144.840.000,00	144.840.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.190.226.784,00	1.749.394.609,00	1.749.394.609,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.417,00	30.000.417,00	30.000.417,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.093.432,00	890.261.257,00	890.261.257,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.995.070,00	59.995.070,00	59.995.070,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.005.636,00	330.005.636,00	330.005.636,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	88.355.029,00	88.355.029,00	88.355.029,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.340.200,00	50.340.200,00	50.340.200,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.437.000,00	300.437.000,00	300.437.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.988.829,80	136.797.600,00	136.797.600,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	59.988.829,80	136.797.600,00	136.797.600,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.057.790.432,00	1.057.790.432,00	1.057.790.432,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.132.032,00	445.132.032,00	445.132.032,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.658.400,00	612.658.400,00	612.658.400,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.628.609,92	985.628.609,92	985.628.609,92
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.490.000,00	45.490.000,00	45.490.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	439.540.000,00	439.540.000,00	439.540.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.433.049,92	424.433.049,92	424.433.049,92

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.165.560,00	76.165.560,00	76.165.560,00
5.02.0.00.0.00.46.0000						Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	38.921.878.496,00	38.136.859.136,00	38.136.859.136,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.555.903.900,00	4.555.903.900,00	4.555.903.900,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.555.903.900,00	4.555.903.900,00	4.555.903.900,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	183.078.000,00	183.078.000,00	183.078.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	267.122.500,00	267.122.500,00	267.122.500,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	79.600.800,00	79.600.800,00	79.600.800,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	600.584.000,00	600.584.000,00	600.584.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	445.429.600,00	445.429.600,00	445.429.600,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	280.284.500,00	371.304.500,00	371.304.500,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	818.478.500,00	818.478.500,00	818.478.500,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	407.015.000,00	315.995.000,00	315.995.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	362.410.000,00	362.410.000,00	362.410.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	261.136.000,00	261.136.000,00	261.136.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	269.497.000,00	269.497.000,00	269.497.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	361.103.000,00	361.103.000,00	361.103.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	25.040.000,00	25.040.000,00	25.040.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	91.325.000,00	91.325.000,00	91.325.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.365.974.596,00	33.580.955.236,00	33.580.955.236,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.580.500,00	88.580.500,00	88.580.500,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.161.500,00	44.161.500,00	44.161.500,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.684.000,00	10.684.000,00	10.684.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	33.735.000,00	33.735.000,00	33.735.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.449.807.625,00	29.664.788.265,00	29.664.788.265,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.449.807.625,00	29.664.788.265,00	29.664.788.265,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.193.121.891,00	1.193.121.891,00	1.193.121.891,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.234.200,00	218.234.200,00	218.234.200,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.078.800,00	267.078.800,00	267.078.800,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	363.403.891,00	363.403.891,00	363.403.891,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.188.000,00	25.188.000,00	25.188.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.217.000,00	189.217.000,00	189.217.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.545.369,00	66.545.369,00	66.545.369,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	66.545.369,00	66.545.369,00	66.545.369,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.470.704.711,00	1.470.704.711,00	1.470.704.711,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.516.267,00	398.516.267,00	398.516.267,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.072.188.444,00	1.072.188.444,00	1.072.188.444,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	947.214.500,00	947.214.500,00	947.214.500,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.560.000,00	182.560.000,00	182.560.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.970.000,00	327.970.000,00	327.970.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	386.705.000,00	386.705.000,00	386.705.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.979.500,00	49.979.500,00	49.979.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	19.390.446.494,00	18.901.341.166,00	18.901.341.166,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	19.390.446.494,00	18.901.341.166,00	18.901.341.166,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.524.910.175,00	6.524.910.175,00	6.524.910.175,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	548.275.050,00	548.275.050,00	548.275.050,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	220.000.050,00	220.000.050,00	220.000.050,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	197.650.000,00	197.650.000,00	197.650.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	44.625.000,00	44.625.000,00	44.625.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	408.449.800,00	408.449.800,00	408.449.800,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	97.887.950,00	97.887.950,00	97.887.950,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73.081.925,00	73.081.925,00	73.081.925,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	237.479.925,00	237.479.925,00	237.479.925,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	5.280.373.975,00	5.280.373.975,00	5.280.373.975,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	3.037.819.700,00	3.205.712.628,00	3.205.712.628,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.207.015.775,00	1.039.122.847,00	1.039.122.847,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	741.663.900,00	741.663.900,00	741.663.900,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	148.999.700,00	148.999.700,00	148.999.700,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	144.874.900,00	144.874.900,00	144.874.900,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.811.350,00	287.811.350,00	287.811.350,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	51.421.500,00	51.421.500,00	51.421.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	25.120.000,00	25.120.000,00	25.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	58.991.850,00	58.991.850,00	58.991.850,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60.229.500,00	60.229.500,00	60.229.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.064.500,00	15.064.500,00	15.064.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	76.984.000,00	76.984.000,00	76.984.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.865.536.319,00	12.376.430.991,00	12.376.430.991,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.676.000,00	32.676.000,00	32.676.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.008.000,00	25.008.000,00	25.008.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.524.812.000,00	10.035.706.672,00	10.035.706.672,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.524.812.000,00	10.035.706.672,00	10.035.706.672,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.282.500,00	46.282.500,00	46.282.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.282.500,00	46.282.500,00	46.282.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.541.000,00	169.541.000,00	169.541.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.536.000,00	51.536.000,00	51.536.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	118.005.000,00	118.005.000,00	118.005.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	768.256.399,00	768.256.399,00	768.256.399,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.023.558,00	30.023.558,00	30.023.558,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.297.892,00	157.297.892,00	157.297.892,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.009.930,00	60.009.930,00	60.009.930,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.001.799,00	200.001.799,00	200.001.799,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.040.020,00	107.040.020,00	107.040.020,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.883.200,00	133.883.200,00	133.883.200,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.728.220,00	65.728.220,00	65.728.220,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	65.728.220,00	65.728.220,00	65.728.220,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.730.200,00	733.730.200,00	733.730.200,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.329.000,00	192.329.000,00	192.329.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.401.200,00	541.401.200,00	541.401.200,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.510.000,00	524.510.000,00	524.510.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.330.000,00	281.330.000,00	281.330.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.880.000,00	224.880.000,00	224.880.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000						Inspektorat	32.759.760.415,00	30.408.129.304,00	30.408.129.304,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	32.759.760.415,00	30.408.129.304,00	30.408.129.304,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	32.759.760.415,00	30.408.129.304,00	30.408.129.304,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.157.755.950,00	3.157.755.950,00	3.157.755.950,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.342.915.500,00	2.342.915.500,00	2.342.915.500,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	655.441.400,00	655.441.400,00	655.441.400,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	524.718.500,00	524.718.500,00	524.718.500,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	310.357.000,00	310.357.000,00	310.357.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	91.866.950,00	91.866.950,00	91.866.950,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	558.352.750,00	558.352.750,00	558.352.750,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	202.178.900,00	202.178.900,00	202.178.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	814.840.450,00	814.840.450,00	814.840.450,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	814.840.450,00	814.840.450,00	814.840.450,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.348.824.500,00	1.348.824.500,00	1.348.824.500,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	152.723.950,00	152.723.950,00	152.723.950,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	152.723.950,00	152.723.950,00	152.723.950,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	1.196.100.550,00	1.196.100.550,00	1.196.100.550,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	263.930.000,00	263.930.000,00	263.930.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	347.119.900,00	347.119.900,00	347.119.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	490.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	95.050.650,00	95.050.650,00	95.050.650,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.253.179.965,00	25.901.548.854,00	25.901.548.854,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.771.300,00	90.771.300,00	90.771.300,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.601.450,00	51.601.450,00	51.601.450,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	29.169.950,00	29.169.950,00	29.169.950,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.999.823.219,00	21.648.192.108,00	21.648.192.108,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.999.823.219,00	21.648.192.108,00	21.648.192.108,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.316.500,00	89.316.500,00	89.316.500,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.316.500,00	89.316.500,00	89.316.500,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.971.000,00	581.971.000,00	581.971.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.387.000,00	48.387.000,00	48.387.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	533.584.000,00	533.584.000,00	533.584.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	945.756.970,00	945.756.970,00	945.756.970,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.867.180,00	24.867.180,00	24.867.180,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.439.340,00	118.439.340,00	118.439.340,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.725.900,00	54.725.900,00	54.725.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.633.452,00	100.633.452,00	100.633.452,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	128.741.098,00	128.741.098,00	128.741.098,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.776.000,00	48.776.000,00	48.776.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.574.000,00	429.574.000,00	429.574.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	614.550.800,00	614.550.800,00	614.550.800,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.720.000,00	354.720.000,00	354.720.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	259.830.800,00	259.830.800,00	259.830.800,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.289.856,00	920.289.856,00	920.289.856,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.199.012,00	282.199.012,00	282.199.012,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	638.090.844,00	638.090.844,00	638.090.844,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.010.700.320,00	1.010.700.320,00	1.010.700.320,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	488.910.000,00	488.910.000,00	488.910.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.624.000,00	198.624.000,00	198.624.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	323.166.320,00	323.166.320,00	323.166.320,00
7.01.0.00.0.00.29.0000						Kecamatan Sekayu	10.663.941.221,00	10.324.889.048,00	10.324.889.048,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	10.663.941.221,00	10.324.889.048,00	10.324.889.048,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01				KECAMATAN	10.663.941.221,00	10.324.889.048,00	10.324.889.048,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	365.952.733,00	370.952.733,00	370.952.733,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	284.023.400,00	289.023.400,00	289.023.400,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	284.023.400,00	289.023.400,00	289.023.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	81.929.333,00	81.929.333,00	81.929.333,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.929.333,00	81.929.333,00	81.929.333,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.455.430,00	12.455.430,00	12.455.430,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.455.430,00	12.455.430,00	12.455.430,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.455.430,00	12.455.430,00	12.455.430,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.780.000,00	66.780.000,00	66.780.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.780.000,00	66.780.000,00	66.780.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	34.930.000,00	34.930.000,00	34.930.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.192.153.058,00	9.848.100.885,00	9.848.100.885,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.706.000,00	15.706.000,00	15.706.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.761.000,00	5.761.000,00	5.761.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.945.000,00	9.945.000,00	9.945.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.692.242.802,00	8.353.190.629,00	8.353.190.629,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.692.242.802,00	8.353.190.629,00	8.353.190.629,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.775.000,00	45.775.000,00	45.775.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.775.000,00	45.775.000,00	45.775.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.114.806,00	298.114.806,00	298.114.806,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.205,00	9.992.205,00	9.992.205,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.317.764,00	43.317.764,00	43.317.764,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.909.071,00	19.909.071,00	19.909.071,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.023.558,00	40.023.558,00	40.023.558,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.039.208,00	34.039.208,00	34.039.208,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.680.000,00	25.680.000,00	25.680.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.153.000,00	75.153.000,00	75.153.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.658.770,00	29.658.770,00	29.658.770,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	29.658.770,00	29.658.770,00	29.658.770,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.536.800,00	896.536.800,00	896.536.800,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.317.600,00	134.317.600,00	134.317.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	762.219.200,00	762.219.200,00	762.219.200,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.118.880,00	209.118.880,00	209.118.880,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.760.000,00	120.760.000,00	120.760.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.045.880,00	68.045.880,00	68.045.880,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.313.000,00	20.313.000,00	20.313.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.29.0001						Kelurahan Serasan Jaya	600.219.072,00	600.219.072,00	600.219.072,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	96.205.011,00	96.205.011,00	96.205.011,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	96.205.011,00	96.205.011,00	96.205.011,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96.205.011,00	96.205.011,00	96.205.011,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	504.014.061,00	504.014.061,00	504.014.061,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	504.014.061,00	504.014.061,00	504.014.061,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	346.207.562,00	346.207.562,00	346.207.562,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157.806.499,00	157.806.499,00	157.806.499,00
7.01.0.00.0.00.29.0002						Kelurahan Soak Baru	684.148.533,00	684.148.533,00	684.148.533,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.104.668,02	86.104.668,02	86.104.668,02
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	86.104.668,02	86.104.668,02	86.104.668,02
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.104.668,02	86.104.668,02	86.104.668,02
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	598.043.864,98	598.043.864,98	598.043.864,98
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	598.043.864,98	598.043.864,98	598.043.864,98
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.619.949,00	347.619.949,00	347.619.949,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	250.423.915,98	250.423.915,98	250.423.915,98
7.01.0.00.0.00.29.0003						Kelurahan Balai Agung	669.522.773,00	669.522.773,00	669.522.773,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.258.686,00	123.258.686,00	123.258.686,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	123.258.686,00	123.258.686,00	123.258.686,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	123.258.686,00	123.258.686,00	123.258.686,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	546.264.087,00	546.264.087,00	546.264.087,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	546.264.087,00	546.264.087,00	546.264.087,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	196.264.087,00	196.264.087,00	196.264.087,00
7.01.0.00.0.00.29.0004						Kelurahan Kayuara	682.065.034,00	682.065.034,00	682.065.034,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	94.719.160,00	94.719.160,00	94.719.160,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	94.719.160,00	94.719.160,00	94.719.160,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94.719.160,00	94.719.160,00	94.719.160,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	587.345.874,00	587.345.874,00	587.345.874,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	587.345.874,00	587.345.874,00	587.345.874,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	348.640.000,00	348.640.000,00	348.640.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	238.705.874,00	238.705.874,00	238.705.874,00
7.01.0.00.0.00.30.0000						Kecamatan Lais	4.880.709.411,00	4.725.637.985,00	4.725.637.985,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.869.340,00	329.869.340,00	329.869.340,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	316.685.000,00	316.685.000,00	316.685.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	316.685.000,00	316.685.000,00	316.685.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.934.340,00	10.934.340,00	10.934.340,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.934.340,00	10.934.340,00	10.934.340,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.388.000,00	11.388.000,00	11.388.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.388.000,00	11.388.000,00	11.388.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.388.000,00	11.388.000,00	11.388.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.421.000,00	23.421.000,00	23.421.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.421.000,00	23.421.000,00	23.421.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11.088.000,00	11.088.000,00	11.088.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.333.000,00	12.333.000,00	12.333.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.507.481.071,00	4.352.409.645,00	4.352.409.645,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.302.000,00	4.302.000,00	4.302.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.702.047.997,00	3.546.976.571,00	3.546.976.571,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.702.047.997,00	3.546.976.571,00	3.546.976.571,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.575.000,00	46.575.000,00	46.575.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.575.000,00	46.575.000,00	46.575.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.428.738,20	233.428.738,20	233.428.738,20
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.021.636,00	10.021.636,00	10.021.636,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.085.656,00	50.085.656,00	50.085.656,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.197.452,00	17.197.452,00	17.197.452,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.653.996,00	30.653.996,00	30.653.996,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.964.998,20	17.964.998,20	17.964.998,20
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.485.000,00	15.485.000,00	15.485.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.020.000,00	52.020.000,00	52.020.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.739.332,80	30.739.332,80	30.739.332,80
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	30.739.332,80	30.739.332,80	30.739.332,80
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.273.203,00	270.273.203,00	270.273.203,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.957.203,00	85.957.203,00	85.957.203,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.316.000,00	184.316.000,00	184.316.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.824.800,00	212.824.800,00	212.824.800,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.904.800,00	74.904.800,00	74.904.800,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000						Kecamatan Babat Toman	7.004.667.105,99	6.864.524.708,99	6.864.524.708,99
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	587.213.552,25	587.213.552,25	587.213.552,25
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	581.963.000,00	581.963.000,00	581.963.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	581.963.000,00	581.963.000,00	581.963.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.750.552,25	2.750.552,25	2.750.552,25
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.750.552,25	2.750.552,25	2.750.552,25
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.390.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.390.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.390.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.475.000,00	11.475.000,00	11.475.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.475.000,00	11.475.000,00	11.475.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.379.188.553,74	6.239.046.156,74	6.239.046.156,74
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.499.940,05	17.499.940,05	17.499.940,05
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.496.259,75	7.496.259,75	7.496.259,75
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.003.680,30	10.003.680,30	10.003.680,30
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.675.415.442,00	4.535.273.045,00	4.535.273.045,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.675.415.442,00	4.535.273.045,00	4.535.273.045,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.355.000,00	47.355.000,00	47.355.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.355.000,00	47.355.000,00	47.355.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.399.750,69	348.399.750,69	348.399.750,69
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.989.800,00	9.989.800,00	9.989.800,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.446.168,00	54.446.168,00	54.446.168,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.016.075,00	20.016.075,00	20.016.075,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.534.751,00	48.534.751,00	48.534.751,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.499.956,69	17.499.956,69	17.499.956,69
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	107.750.000,00	107.750.000,00	107.750.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.163.000,00	50.163.000,00	50.163.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.336.632,00	31.336.632,00	31.336.632,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	31.336.632,00	31.336.632,00	31.336.632,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.541.600,00	465.541.600,00	465.541.600,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.336.000,00	85.336.000,00	85.336.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.205.600,00	380.205.600,00	380.205.600,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	793.640.189,00	793.640.189,00	793.640.189,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.960.000,00	83.960.000,00	83.960.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	702.360.189,00	702.360.189,00	702.360.189,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0001						Kelurahan Babat	758.024.172,96	758.024.172,96	758.024.172,96

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	110.947.500,96	110.947.500,96	110.947.500,96
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	110.947.500,96	110.947.500,96	110.947.500,96
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.947.500,96	110.947.500,96	110.947.500,96
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	647.076.672,00	647.076.672,00	647.076.672,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	647.076.672,00	647.076.672,00	647.076.672,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	399.057.775,00	399.057.775,00	399.057.775,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	248.018.897,00	248.018.897,00	248.018.897,00
7.01.0.00.0.00.31.0002						Kelurahan Mangun Jaya	766.737.231,51	766.737.231,51	766.737.231,51
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.791.583,13	92.791.583,13	92.791.583,13
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	92.791.583,13	92.791.583,13	92.791.583,13
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92.791.583,13	92.791.583,13	92.791.583,13
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	673.945.648,38	673.945.648,38	673.945.648,38
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	673.945.648,38	673.945.648,38	673.945.648,38
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	399.027.409,00	399.027.409,00	399.027.409,00
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	274.918.239,38	274.918.239,38	274.918.239,38
7.01.0.00.0.00.32.0000						Kecamatan Keluang	5.309.617.687,00	5.060.224.145,00	5.060.224.145,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	391.296.000,00	391.296.000,00	391.296.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	371.918.000,00	371.918.000,00	371.918.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	371.918.000,00	371.918.000,00	371.918.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.978.000,00	16.978.000,00	16.978.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.978.000,00	16.978.000,00	16.978.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.060.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.060.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.060.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.901.466.687,00	4.652.073.145,00	4.652.073.145,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.565.200,00	21.565.200,00	21.565.200,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.965.200,00	14.965.200,00	14.965.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.024.378.993,00	3.774.985.451,00	3.774.985.451,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.024.378.993,00	3.774.985.451,00	3.774.985.451,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.538.000,00	20.538.000,00	20.538.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.538.000,00	20.538.000,00	20.538.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.611.879,00	280.611.879,00	280.611.879,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.436,00	9.998.436,00	9.998.436,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.897.694,00	74.897.694,00	74.897.694,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.981.554,00	19.981.554,00	19.981.554,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.999.794,00	39.999.794,00	39.999.794,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.240.000,00	17.240.000,00	17.240.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.494.401,00	53.494.401,00	53.494.401,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.141.948,00	48.141.948,00	48.141.948,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	48.141.948,00	48.141.948,00	48.141.948,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.290.667,00	331.290.667,00	331.290.667,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.290.667,00	277.290.667,00	277.290.667,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.940.000,00	174.940.000,00	174.940.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.840.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.970.000,00	74.970.000,00	74.970.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.130.000,00	21.130.000,00	21.130.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0001						Kelurahan Keluang	841.784.711,00	841.784.711,00	841.784.711,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.929.259,00	149.929.259,00	149.929.259,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.929.259,00	149.929.259,00	149.929.259,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.929.259,00	149.929.259,00	149.929.259,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	691.855.452,00	691.855.452,00	691.855.452,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	691.855.452,00	691.855.452,00	691.855.452,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.593.088,00	347.593.088,00	347.593.088,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	344.262.364,00	344.262.364,00	344.262.364,00
7.01.0.00.0.00.33.0000						Kecamatan Sanga Desa	5.777.905.605,00	5.566.745.605,00	5.566.745.605,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	369.405.790,00	311.521.000,00	311.521.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	360.979.790,00	303.095.000,00	303.095.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	360.979.790,00	303.095.000,00	303.095.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.976.000,00	5.976.000,00	5.976.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.976.000,00	5.976.000,00	5.976.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.923.499,00	18.923.499,00	18.923.499,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.923.499,00	18.923.499,00	18.923.499,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11.423.499,00	11.423.499,00	11.423.499,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.365.126.316,00	5.211.851.106,00	5.211.851.106,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.995.000,00	13.995.000,00	13.995.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.175.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.242.008.576,00	4.030.848.576,00	4.030.848.576,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.242.008.576,00	4.030.848.576,00	4.030.848.576,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.468.900,00	392.468.900,00	392.468.900,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988.530,00	9.988.530,00	9.988.530,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.993.500,00	75.993.500,00	75.993.500,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.724.040,00	13.724.040,00	13.724.040,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.485.330,00	38.485.330,00	38.485.330,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.138.500,00	28.138.500,00	28.138.500,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.500.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.639.000,00	74.639.000,00	74.639.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.220.440,00	20.220.440,00	20.220.440,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.220.440,00	20.220.440,00	20.220.440,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.723.400,00	505.283.400,00	505.283.400,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.621.400,00	47.181.400,00	47.181.400,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.102.000,00	458.102.000,00	458.102.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.110.000,00	233.434.790,00	233.434.790,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.880.000,00	120.880.000,00	120.880.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.880.000,00	90.204.790,00	90.204.790,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.350.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0001						Kelurahan Ngulak I	832.978.633,00	832.978.633,00	832.978.633,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.408.174,00	125.408.174,00	125.408.174,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	125.408.174,00	125.408.174,00	125.408.174,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.408.174,00	125.408.174,00	125.408.174,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	707.570.459,00	707.570.459,00	707.570.459,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	707.570.459,00	707.570.459,00	707.570.459,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	307.570.459,00	307.570.459,00	307.570.459,00
7.01.0.00.0.00.33.0002						Kelurahan Ngulak	833.612.894,00	833.612.894,00	833.612.894,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.607.825,00	125.607.825,00	125.607.825,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	125.607.825,00	125.607.825,00	125.607.825,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.607.825,00	125.607.825,00	125.607.825,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	708.005.069,00	708.005.069,00	708.005.069,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	708.005.069,00	708.005.069,00	708.005.069,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.575.000,00	349.575.000,00	349.575.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	358.430.069,00	358.430.069,00	358.430.069,00
7.01.0.00.0.00.34.0000						Kecamatan Plakat Tinggi	4.516.749.016,00	4.293.670.603,00	4.293.670.603,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	376.249.595,10	376.249.595,10	376.249.595,10
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.549.095,10	366.549.095,10	366.549.095,10
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.549.095,10	366.549.095,10	366.549.095,10
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.138.000,00	7.138.000,00	7.138.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.138.000,00	7.138.000,00	7.138.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.562.500,00	2.562.500,00	2.562.500,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.562.500,00	2.562.500,00	2.562.500,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.120.499.420,90	3.897.421.007,90	3.897.421.007,90
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.601.000,00	14.601.000,00	14.601.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.800.500,00	4.800.500,00	4.800.500,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.800.500,00	9.800.500,00	9.800.500,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.150.813.308,70	2.927.734.895,70	2.927.734.895,70
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.150.813.308,70	2.927.734.895,70	2.927.734.895,70
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.460.000,00	45.460.000,00	45.460.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.460.000,00	45.460.000,00	45.460.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.630.337,20	282.630.337,20	282.630.337,20
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.225.449,00	15.225.449,00	15.225.449,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.157.248,00	39.157.248,00	39.157.248,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.993.556,00	19.993.556,00	19.993.556,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.316.872,00	19.316.872,00	19.316.872,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.877.212,00	34.877.212,00	34.877.212,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.755.000,20	36.755.000,20	36.755.000,20
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.305.000,00	77.305.000,00	77.305.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.022.469,00	13.022.469,00	13.022.469,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	13.022.469,00	13.022.469,00	13.022.469,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.837.958,00	284.837.958,00	284.837.958,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.001.536,00	75.001.536,00	75.001.536,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.836.422,00	209.836.422,00	209.836.422,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.134.348,00	329.134.348,00	329.134.348,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.260.000,00	118.260.000,00	118.260.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.584.348,00	197.584.348,00	197.584.348,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.290.000,00	13.290.000,00	13.290.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000						Kecamatan Batanghari Leko	4.387.092.062,00	4.166.315.645,00	4.166.315.645,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	455.942.000,00	455.942.000,00	455.942.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	449.177.000,00	449.177.000,00	449.177.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	449.177.000,00	449.177.000,00	449.177.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.265.000,00	4.265.000,00	4.265.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.265.000,00	4.265.000,00	4.265.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.840.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.840.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.240.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.906.248.062,00	3.685.471.645,00	3.685.471.645,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.156.000,00	7.156.000,00	7.156.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.906.000,00	5.906.000,00	5.906.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.102.736.374,00	2.881.959.957,00	2.881.959.957,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.102.736.374,00	2.881.959.957,00	2.881.959.957,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.623.000,00	46.623.000,00	46.623.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	340.000,00	340.000,00	340.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.283.000,00	46.283.000,00	46.283.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.110.521,00	241.110.521,00	241.110.521,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.230.500,00	14.230.500,00	14.230.500,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.892.371,00	46.892.371,00	46.892.371,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.500,00	19.999.500,00	19.999.500,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.150,00	19.999.150,00	19.999.150,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.493.000,00	17.493.000,00	17.493.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.006.000,00	65.006.000,00	65.006.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.890.000,00	26.890.000,00	26.890.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	26.890.000,00	26.890.000,00	26.890.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.202.167,00	279.202.167,00	279.202.167,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.429.500,00	79.429.500,00	79.429.500,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.772.667,00	199.772.667,00	199.772.667,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.530.000,00	202.530.000,00	202.530.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.930.000,00	55.930.000,00	55.930.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000						Kecamatan Sungai Keruh	4.161.688.886,00	3.982.090.009,00	3.982.090.009,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	418.675.000,00	418.675.000,00	418.675.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.310.000,00	410.310.000,00	410.310.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.310.000,00	410.310.000,00	410.310.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.215.000,00	8.215.000,00	8.215.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.215.000,00	8.215.000,00	8.215.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.736.313.886,00	3.556.715.009,00	3.556.715.009,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.524.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.924.813.384,00	2.745.214.507,00	2.745.214.507,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.924.813.384,00	2.745.214.507,00	2.745.214.507,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.708.750,00	45.708.750,00	45.708.750,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.708.750,00	45.708.750,00	45.708.750,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.818.715,00	273.818.715,00	259.418.715,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.081.100,00	5.081.100,00	5.081.100,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.408.830,00	52.408.830,00	52.408.830,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.229.600,00	10.229.600,00	10.229.600,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.934.085,00	24.934.085,00	24.934.085,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.489.850,00	17.489.850,00	17.489.850,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	25.600.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.425.250,00	76.425.250,00	76.425.250,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.570.000,00	19.570.000,00	19.570.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	19.570.000,00	19.570.000,00	19.570.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.311.037,00	257.311.037,00	271.711.037,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.293.437,00	100.293.437,00	100.293.437,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.017.600,00	157.017.600,00	171.417.600,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.462.000,00	206.462.000,00	206.462.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.760.000,00	120.760.000,00	120.760.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.722.000,00	74.722.000,00	74.722.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.980.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000						Kecamatan Sungai Lilin	5.814.046.613,00	5.546.584.823,00	5.546.584.823,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	406.945.000,00	406.945.000,00	406.945.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.945.000,00	406.945.000,00	406.945.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.945.000,00	406.945.000,00	406.945.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.395.761.613,00	5.128.299.823,00	5.128.299.823,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.395.345.644,00	4.127.883.854,00	4.127.883.854,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.395.345.644,00	4.127.883.854,00	4.127.883.854,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.084.731,00	333.084.731,00	333.084.731,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.133.744,00	11.133.744,00	11.133.744,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.634.446,00	44.634.446,00	44.634.446,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.279.052,00	16.279.052,00	16.279.052,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.774.489,00	33.774.489,00	33.774.489,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.221.000,00	15.221.000,00	15.221.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.680.000,00	25.680.000,00	25.680.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.630.000,00	78.630.000,00	78.630.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.732.000,00	107.732.000,00	107.732.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.119.600,00	428.119.600,00	428.119.600,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.586.000,00	89.586.000,00	89.586.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.533.600,00	338.533.600,00	338.533.600,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.659.638,00	235.659.638,00	235.659.638,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.260.000,00	122.260.000,00	122.260.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.539.638,00	97.539.638,00	97.539.638,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.860.000,00	15.860.000,00	15.860.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001						Kelurahan Sungai Lilin	833.014.354,00	833.014.354,00	833.014.354,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	133.014.354,00	133.014.354,00	133.014.354,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	133.014.354,00	133.014.354,00	133.014.354,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	133.014.354,00	133.014.354,00	133.014.354,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002						Kelurahan Sungai Lilin Jaya	838.919.254,00	838.919.254,00	838.919.254,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	138.919.254,00	138.919.254,00	138.919.254,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	138.919.254,00	138.919.254,00	138.919.254,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	138.919.254,00	138.919.254,00	138.919.254,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000						Kecamatan Bayung Lencir	5.217.147.297,00	5.061.972.049,00	5.061.972.049,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	496.438.364,00	496.438.364,00	496.438.364,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	479.347.000,00	479.347.000,00	479.347.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	479.347.000,00	479.347.000,00	479.347.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.591.364,00	14.591.364,00	14.591.364,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.591.364,00	14.591.364,00	14.591.364,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.740.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.740.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.740.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.982.500,00	12.982.500,00	12.982.500,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.982.500,00	12.982.500,00	12.982.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.282.500,00	8.282.500,00	8.282.500,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.691.486.433,00	4.536.311.185,00	4.536.311.185,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.858.000,00	17.858.000,00	17.858.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.018.000,00	8.018.000,00	8.018.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.816.957.313,00	3.661.782.065,00	3.661.782.065,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.816.957.313,00	3.661.782.065,00	3.661.782.065,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.460.000,00	40.460.000,00	40.460.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.460.000,00	40.460.000,00	40.460.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.179.988,00	253.179.988,00	253.179.988,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.936.150,00	9.936.150,00	9.936.150,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.796.379,00	46.796.379,00	46.796.379,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.001.090,00	20.001.090,00	20.001.090,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.980.999,00	19.980.999,00	19.980.999,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.495.370,40	17.495.370,40	17.495.370,40
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.969.999,60	73.969.999,60	73.969.999,60
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.083.332,00	29.083.332,00	29.083.332,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	29.083.332,00	29.083.332,00	29.083.332,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.093.800,00	349.093.800,00	349.093.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.115.000,00	83.115.000,00	83.115.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.978.800,00	265.978.800,00	265.978.800,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.854.000,00	184.854.000,00	184.854.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.460.000,00	85.460.000,00	85.460.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.774.000,00	74.774.000,00	74.774.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.620.000,00	24.620.000,00	24.620.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0001						Kelurahan Bayung Lencir	823.842.083,00	823.842.083,00	823.842.083,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.827.512,00	124.827.512,00	124.827.512,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	124.827.512,00	124.827.512,00	124.827.512,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	124.827.512,00	124.827.512,00	124.827.512,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.014.571,00	699.014.571,00	699.014.571,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	699.014.571,00	699.014.571,00	699.014.571,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.037.519,00	349.037.519,00	349.037.519,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.977.052,00	349.977.052,00	349.977.052,00
7.01.0.00.0.00.38.0002						Kelurahan Bayung Lencir Indah	829.391.585,00	829.391.585,00	829.391.585,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.120.659,00	125.120.659,00	125.120.659,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	125.120.659,00	125.120.659,00	125.120.659,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.120.659,00	125.120.659,00	125.120.659,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	704.270.926,00	704.270.926,00	704.270.926,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	704.270.926,00	704.270.926,00	704.270.926,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.994.476,00	349.994.476,00	349.994.476,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	354.276.450,00	354.276.450,00	354.276.450,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.39.0000						Kecamatan Lalan	5.146.504.520,00	4.762.891.988,00	4.762.891.988,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	531.316.200,00	531.316.200,00	531.316.200,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	511.436.200,00	511.436.200,00	511.436.200,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	511.436.200,00	511.436.200,00	511.436.200,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.380.000,00	17.380.000,00	17.380.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.380.000,00	17.380.000,00	17.380.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.260.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.260.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.260.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.630.000,00	13.630.000,00	13.630.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.630.000,00	13.630.000,00	13.630.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.160.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.580.448.320,00	4.196.835.788,00	4.196.835.788,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.078.000,00	17.078.000,00	20.978.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.978.000,00	8.978.000,00	12.878.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.775.456.899,00	3.391.844.367,00	3.391.844.367,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.775.456.899,00	3.391.844.367,00	3.391.844.367,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.638.000,00	57.638.000,00	57.638.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.582.000,00	18.582.000,00	18.582.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.056.000,00	39.056.000,00	39.056.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.828.020,50	411.828.020,50	407.928.020,50
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.500,00	9.999.500,00	9.999.500,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.074.100,00	74.074.100,00	74.074.100,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.093.900,00	17.093.900,00	17.093.900,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.967.020,00	39.967.020,00	39.967.020,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	36.100.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.714.500,50	122.714.500,50	122.714.500,50
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.479.000,00	90.479.000,00	90.479.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.804.000,00	49.804.000,00	49.804.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.804.000,00	49.804.000,00	49.804.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.910.400,50	131.910.400,50	131.910.400,50
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.630.167,00	23.630.167,00	23.630.167,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.280.233,50	108.280.233,50	108.280.233,50
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.733.000,00	136.733.000,00	136.733.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.920.000,00	36.920.000,00	36.920.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.823.000,00	74.823.000,00	74.823.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000						Kecamatan Tungkal Jaya	5.228.881.056,00	4.995.802.499,00	4.995.802.499,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	335.226.000,00	335.226.000,00	335.226.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	333.076.000,00	333.076.000,00	333.076.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	333.076.000,00	333.076.000,00	333.076.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.240.000,00	44.240.000,00	44.240.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.240.000,00	44.240.000,00	44.240.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12.540.000,00	12.540.000,00	12.540.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.849.415.056,00	4.616.336.499,00	4.616.336.499,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.495.047,00	3.495.047,00	3.495.047,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.547.750,00	1.547.750,00	1.547.750,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.947.297,00	1.947.297,00	1.947.297,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.289.868.162,00	3.026.789.605,00	3.026.789.605,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.289.868.162,00	3.026.789.605,00	3.026.789.605,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.900.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.670.000,00	14.670.000,00	14.670.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.230.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.469.487,00	339.469.487,00	339.469.487,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.925.065,00	9.925.065,00	9.925.065,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.220.927,00	88.220.927,00	88.220.927,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.992.545,00	17.992.545,00	17.992.545,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.875.678,00	24.875.678,00	24.875.678,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.292.272,00	14.292.272,00	14.292.272,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.750.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.413.000,00	123.413.000,00	123.413.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.565.960,00	43.565.960,00	43.565.960,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	43.565.960,00	43.565.960,00	43.565.960,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.566.400,00	282.566.400,00	282.566.400,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.652.000,00	146.652.000,00	146.652.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.914.400,00	135.914.400,00	135.914.400,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.550.000,00	885.550.000,00	885.550.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.840.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000						Kecamatan Lawang Wetan	4.884.918.631,00	4.742.295.672,00	4.742.295.672,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	367.225.000,00	384.490.000,00	384.490.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	358.480.000,00	378.580.000,00	378.580.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	358.480.000,00	378.580.000,00	378.580.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.345.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.345.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.487.123.631,00	4.327.235.672,00	4.327.235.672,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.600.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.345.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.255.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.393.205.107,00	3.250.582.148,00	3.250.582.148,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.393.205.107,00	3.250.582.148,00	3.250.582.148,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.617.874,00	323.564.174,00	323.564.174,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.696.998,00	7.696.998,00	7.696.998,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.174.459,00	47.174.459,00	47.174.459,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.089.356,00	13.089.356,00	13.089.356,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.016.661,00	46.016.661,00	46.016.661,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.698.400,00	26.698.400,00	26.698.400,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	41.360.000,00	25.680.000,00	25.680.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.880.000,00	25.880.000,00	25.880.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.702.000,00	131.328.300,00	131.328.300,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.801.300,00	87.770.000,00	87.770.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.320.000,00	43.320.000,00	43.320.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	60.481.300,00	44.450.000,00	44.450.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.705.400,00	421.105.400,00	421.105.400,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.375.000,00	87.375.000,00	87.375.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.330.400,00	333.730.400,00	333.730.400,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.193.950,00	202.193.950,00	202.193.950,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.260.000,00	118.260.000,00	118.260.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.593.950,00	67.593.950,00	67.593.950,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.340.000,00	16.340.000,00	16.340.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000						Kecamatan Babat Supat	4.390.413.685,00	4.217.302.289,00	4.217.302.289,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	501.151.200,00	501.151.200,00	501.151.200,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	465.577.000,00	465.577.000,00	465.577.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	465.577.000,00	465.577.000,00	465.577.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.099.200,00	33.099.200,00	33.099.200,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.099.200,00	33.099.200,00	33.099.200,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.873.500,00	3.873.500,00	3.873.500,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.873.500,00	3.873.500,00	3.873.500,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.873.500,00	3.873.500,00	3.873.500,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.864.748.985,00	3.691.637.589,00	3.691.637.589,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.358.974,00	15.358.974,00	15.358.974,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.858.974,00	7.858.974,00	7.858.974,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.786.325.596,50	2.613.214.200,50	2.613.214.200,50
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.786.325.596,50	2.613.214.200,50	2.613.214.200,50
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.762.000,00	46.762.000,00	46.762.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.762.000,00	46.762.000,00	46.762.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.253.471,50	381.253.471,50	381.253.471,50
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.927,00	9.996.927,00	9.996.927,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.406.910,50	115.406.910,50	115.406.910,50
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.994.874,00	19.994.874,00	19.994.874,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.471.400,00	24.471.400,00	24.471.400,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.021.860,00	7.021.860,00	7.021.860,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.785.000,00	55.785.000,00	55.785.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.576.500,00	108.576.500,00	108.576.500,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.700.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	48.700.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.126.943,00	346.126.943,00	346.126.943,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.616.499,00	155.616.499,00	155.616.499,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.510.444,00	190.510.444,00	190.510.444,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.222.000,00	240.222.000,00	240.222.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.840.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.792.000,00	149.792.000,00	149.792.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.590.000,00	11.590.000,00	11.590.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.43.0000						Kecamatan Jirak Jaya	3.768.072.059,00	3.611.399.223,00	3.611.399.223,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	473.930.500,00	473.930.500,00	473.930.500,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	461.925.000,00	461.925.000,00	461.925.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	461.925.000,00	461.925.000,00	461.925.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.515.500,00	9.515.500,00	9.515.500,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.515.500,00	9.515.500,00	9.515.500,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.240.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.240.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.240.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.070.000,00	11.070.000,00	11.070.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.070.000,00	11.070.000,00	11.070.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.070.000,00	11.070.000,00	11.070.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.160.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.160.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.253.671.559,00	3.096.998.723,00	3.096.998.723,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.475.000,00	12.475.000,00	12.475.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.975.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.471.359.444,00	2.314.686.608,00	2.314.686.608,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.471.359.444,00	2.314.686.608,00	2.314.686.608,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.845.000,00	67.845.000,00	67.845.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.845.000,00	67.845.000,00	67.845.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.906.806,00	290.468.806,00	290.468.806,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.200,00	9.997.200,00	9.997.200,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.923.606,00	47.023.606,00	47.023.606,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.500,00	19.999.500,00	19.999.500,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.348.800,00	33.348.800,00	33.348.800,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.137.700,00	18.137.700,00	18.137.700,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	104.462.000,00	104.462.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.583.620,00	71.013.620,00	71.013.620,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	32.583.620,00	71.013.620,00	71.013.620,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.069.689,00	287.069.689,00	287.069.689,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.460.000,00	65.460.000,00	65.460.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.609.689,00	221.609.689,00	221.609.689,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.432.000,00	53.440.000,00	53.440.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.040.000,00	42.040.000,00	42.040.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.992.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
						TOTAL	**4.243.949.926.742,00**	**4.313.840.074.908,60**	**4.313.579.765.145,60**

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.561.167.700,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.167.700,00	0,00
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	372.898.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.898.040,00	0,00
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.890.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000.000,00	0,00
5	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	1.121.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.950.000,00	0,00
6	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	39.393.950,00	0,00	198.496.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.890.160,00	0,00
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Babat Supat	27.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520.000,00	0,00
8	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Keluang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
10	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	316.710.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.710.200,00	0,00
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.520.630.200,00	0,00	5.376.379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.897.010.000,00	0,00
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	3.741.363.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.363.738,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
13	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perkebunan	9.038.242.067,00	0,00	355.531.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.773.398,00	0,00
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sumber Harum	1.065.623.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.623.000,00	0,00
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	235.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.629.000,00	0,00
16	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lalan	789.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.080.000,00	0,00
17	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	10.731.009.793,00	0,00	277.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008.809.793,00	0,00
18	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Soak Baru	89.035.249,00	0,00	60.964.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.999,00	0,00
19	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lawang Wetan	517.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.510.000,00	0,00
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.144.013.017,00	0,00	119.204.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.217.775,00	0,00
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Perkebunan	3.570.703.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.703.696,00	0,00
22	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	11.720.673.643,00	0,00	192.035.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912.709.637,00	0,00
23	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	13.279.506.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279.506.370,00	0,00
24	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Ngulak	2.007.905.000,00	0,00	280.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.845.000,00	0,00
25	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Babat Toman	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
26	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.144.616.728,00	0,00	355.383.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
27	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.319.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.020.000,00	0,00
28	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	917.594.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.594.700,00	0,00
29	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sanga Desa	494.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.924.000,00	0,00
30	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Mangun Jaya	692.647.519,00	0,00	7.351.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.998.938,00	0,00
31	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.348.301.038,00	0,00	249.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597.551.538,00	0,00
32	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	156.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.533.000,00	0,00
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.321.187.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321.187.372,00	0,00
34	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.995.000,00	0,00
35	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.556.272.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.272.774,00	0,00
36	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bayung Lencir	11.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740.000,00	0,00
37	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	2.807.635.564,00	0,00	1.369.524.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.160.492,00	0,00
38	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	272.961.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.961.246,00	0,00
39	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	2.837.260.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.260.350,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
40	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	38.736.777.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.736.777.649,00	0,00
41	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Babat Toman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.451.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.212.000,00	0,00
43	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Serasan Jaya	116.794.350,00	0,00	33.205.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
44	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Lalan	0,00	13.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630.000,00
45	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.368.179.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.179.850,00	0,00
46	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Keluang	3.839.939.081,00	0,00	121.530.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.469.123,00	0,00
47	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	492.805.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.805.500,00	0,00
48	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sekayu	586.298.300,00	0,00	73.785.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.083.783,00	0,00
49	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Dinas Perhubungan	88.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.860.000,00	0,00
50	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.761.447.255,00	0,00	274.987.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036.434.655,00	0,00
51	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bayung Lencir	3.783.805.816,00	0,00	127.347.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.153.674,00	0,00
52	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.099.906.201,00	0,00	816.493.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.400.001,00	0,00
53	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Lalan	0,00	4.073.637.688,00	0,00	123.198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.835.788,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
54	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	165.807.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.807.867,00	0,00
55	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Serasan Jaya	699.999.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.999.937,00	0,00
56	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sungai Keruh	497.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.310.000,00	0,00
57	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.734.271.597,00	0,00	152.666.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886.938.593,00	0,00
58	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.544.943.350,00	0,00	30.121.540.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666.483.931,00	0,00
59	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.212.500.000,00	0,00	287.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00
60	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.637.066.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637.066.912,00	0,00
61	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.067.544.381,00	0,00	2.455.719.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523.263.712,00	0,00
62	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Plakat Tinggi	17.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.901.000,00	0,00
63	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	2.501.376.050,00	0,00	198.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.177.050,00	0,00
64	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Jirak Jaya	28.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320.000,00	0,00
65	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	491.655.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.655.320,00	0,00
66	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Batanghari Leko	11.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
67	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tanjung Kerang	1.552.361.800,00	0,00	156.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.166.800,00	0,00
68	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sanga Desa	39.128.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.128.499,00	0,00
69	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Satuan Polisi Pamong Praja	603.825.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.825.040,00	0,00
70	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	1.386.189.950,00	0,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.289.950,00	0,00
71	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	12.358.927.741,00	0,00	232.430.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.358.421,00	0,00
72	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tanah Abang	1.411.539.750,00	0,00	249.095.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00	0,00
73	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	267.323.596.313,00	0,00	297.039.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.620.635.682,00	0,00
74	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sungai Lilin	549.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.760.000,00	0,00
75	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	52.728.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.728.750,00	0,00
76	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
77	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
78	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.587.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.587.050,00	0,00
79	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
80	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
81	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	513.305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.305.500,00	0,00
82	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja	643.389.000,00	0,00	4.355.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.389.000,00	0,00
83	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.438.936.644,00	0,00	181.263.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.200.104,00	0,00
84	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	689.990.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.990.100,00	0,00
85	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	453.703.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.703.800,00	0,00
86	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sanga Desa	4.525.294.564,00	0,00	129.174.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.468.816,00	0,00
87	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Cinta Karya	1.024.835.800,00	0,00	176.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.914.000,00	0,00
88	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	624.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.739.000,00	0,00
89	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.952.054.518,00	0,00	281.341.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.395.673,00	0,00
90	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Lawang Wetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.294.300.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294.300.550,00	0,00
92	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Sungai Lilin	124.364.550,00	0,00	25.635.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
93	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51.220.885.088,00	0,00	37.030.367.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.251.252.238,00	0,00
94	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bayung Lencir	25.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965.000,00	0,00
95	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.562.100.580,00	0,00	479.348.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041.448.619,00	0,00
96	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.556.428.600,00	0,00	1.088.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644.780.600,00	0,00
97	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lalan	0,00	531.316.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.316.200,00
98	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	403.292.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.292.700,00	0,00
99	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.062.000,00	0,00
100	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00
101	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	7.965.755.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.755.776,00	0,00
102	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Bayung Lencir Indah	691.785.676,00	0,00	8.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.944.176,00	0,00
103	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.740.509.100,00	0,00	55.090.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795.600.000,00	0,00
104	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	64.420.937.945,00	0,00	3.655.716.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.076.654.056,00	0,00
105	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sekayu	24.929.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.929.730,00	0,00
106	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Babat Toman	4.414.188.708,00	0,00	124.617.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538.806.632,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
107	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.699.754.949,00	0,00	428.571.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.128.326.948,00	0,00
108	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	131.511.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.511.050,00	0,00
109	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	1.711.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.924.000,00	0,00
110	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
111	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.445.025.498,00	0,00	2.768.507.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.532.523,00	0,00
112	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.030.877.502,00	0,00	2.976.397.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007.275.142,00	0,00
113	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	793.226.857,00	0,00	100.239.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.466.174,00	0,00
114	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sekayu	8.778.487.202,00	0,00	121.009.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899.496.326,00	0,00
115	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,00
116	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.742.694.131,00	0,00	306.182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048.876.931,00	0,00
117	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	703.229.553,00	0,00	52.978.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.207.578,00	0,00
118	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	10.936.383.529,00	0,00	3.899.350.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835.733.609,00	0,00
119	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sungai Lilin	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160.000,00	0,00
120	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	265.854.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.854.980,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
121	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Lalan	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	0,00
122	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	47.345.813.521,00	0,00	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.387.063.521,00	0,00
123	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bayung Lencir	4.029.028.000,00	0,00	660.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.370.000,00	0,00
124	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Bayung Lencir Indah	119.213.415,00	0,00	30.760.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.974.179,00	0,00
125	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.855.249.000,00	0,00	48.827.837.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683.086.756,00	0,00
126	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Lalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.806.491.779,00	0,00	257.217.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063.709.082,00	0,00
128	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sekayu	99.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.960.000,00	0,00
129	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	1.416.696.524,00	0,00	165.767.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.463.924,00	0,00
130	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	743.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.103.000,00	0,00
131	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.498.428.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.428.750,00	0,00
132	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Lawang Wetan	3.752.085.456,00	0,00	88.033.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.118.712,00	0,00
133	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Keluang	143.929.709,00	0,00	5.999.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.929.259,00	0,00
134	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Lawang Wetan	27.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
135	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	328.039.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.039.250,00	0,00
136	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Jirak Jaya	1.947.340.622,00	0,00	122.585.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.926.025,00	0,00
137	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sungai Keruh	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00
138	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Keluang	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00	0,00
139	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Plakat Tinggi	2.750.016.147,00	0,00	121.985.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.001.423,00	0,00
140	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lais	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00
141	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sungai Keruh	40.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.586.000,00	0,00
142	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00	0,00
143	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	385.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.839.000,00	0,00
144	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Jirak Jaya	30.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480.000,00	0,00
145	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Balai Agung	3.284.530.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.530.000,00	0,00
146	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00
147	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Lais	2.514.506.768,00	0,00	268.627.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.134.500,00	0,00
148	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perikanan	8.148.953.354,00	0,00	251.835.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.788.461,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
149	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan	6.959.578.730,00	0,00	217.607.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177.186.460,00	0,00
150	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Batanghari Leko	20.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492.000,00	0,00
151	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	57.506.935.493,00	0,00	7.079.294.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.586.229.870,00	0,00
152	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Lalan	3.211.464.553,00	0,00	123.198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.662.653,00	0,00
153	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Karya Maju	1.620.413.157,00	0,00	201.100.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.514.000,00	0,00
154	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	5.600.359.929,00	0,00	4.399.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.999.929,00	0,00
155	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Babat Toman	522.974.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.974.105,00	0,00
156	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.329.149.850,00	0,00	199.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.249.850,00	0,00
157	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.601.712.510,00	0,00	258.229.270.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.830.982.731,00	0,00
158	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	138.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.223.000,00	0,00
159	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sungai Keruh	3.042.303.956,00	0,00	107.385.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.689.886,00	0,00
160	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kayuara	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
161	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	118.532.000,00	0,00	4.005.682.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.214.850,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
162	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sungai Lilin	2.647.935.700,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.935.700,00	0,00
163	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Lumpatan	2.475.768.000,00	0,00	373.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.318.000,00	0,00
164	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	119.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.604.000,00	0,00
165	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Jirak Jaya	13.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815.000,00	0,00
166	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Air Balui	544.737.150,00	0,00	60.526.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.263.500,00	0,00
167	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Lais	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650.000,00	0,00
168	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.167.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.167.050,00	0,00
169	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.999.994.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.994.569,00	0,00
170	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tebing Bulang	2.058.749.300,00	0,00	363.308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.058.000,00	0,00
171	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Kayuara	115.592.053,00	0,00	34.407.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
172	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	171.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.952.000,00	0,00
173	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710.000.000,00	0,00
174	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	766.733.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.733.200,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
175	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Batanghari Leko	533.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.384.000,00	0,00
176	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00
177	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	1.177.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.715.000,00	0,00
178	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.715.569.121,00	0,00	305.745.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021.314.271,00	0,00
179	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Babat Supat	530.901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.901.200,00	0,00
180	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Babat Supat	2.889.104.259,00	0,00	79.687.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.791.488,00	0,00
181	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	25.228.777.466,00	0,00	543.088.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.771.865.696,00	0,00
182	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	140.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000.000,00	0,00
183	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Ulak Paceh	2.262.565.700,00	0,00	399.276.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.842.000,00	0,00
184	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Lalan	18.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580.000,00	0,00
185	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sanga Desa	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	0,00
186	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	385.880.000,00	0,00	9.614.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
187	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Bayung Lencir	687.736.971,00	0,00	11.277.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.014.571,00	0,00
188	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sungai Lilin	4.324.619.550,00	0,00	88.010.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.630.396,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
189	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
190	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Lais	3.952.296.807,00	0,00	133.569.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.866.148,00	0,00
191	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	99.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.937.000,00	0,00
192	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00
193	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Plakat Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sanga Desa	25.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.005.000,00	0,00
195	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Mekar jaya	841.397.400,00	0,00	93.488.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.886.000,00	0,00
196	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Plakat Tinggi	522.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.224.000,00	0,00
197	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Suka Jaya	1.253.372.516,00	0,00	219.640.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.013.000,00	0,00
198	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	3.547.176.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.176.450,00	0,00
199	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.540.618.286,00	0,00	425.457.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.075.304,00	0,00
200	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.246.544.888,00	0,00	0,00	0,00	6.997.200.620,00	0,00	494.667.382.300,00	0,00	504.911.127.808,00	0,00
201	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Teluk Kijing	1.109.355.280,00	0,00	151.275.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.631.000,00	0,00
202	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Peninggalan	1.411.539.750,00	0,00	249.095.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
203	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	934.046.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.046.550,00	0,00
204	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	111.462.354,00	0,00	38.537.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
205	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	65.937.794.711,00	0,00	14.870.025.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.807.820.111,00	0,00
206	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	892.199.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.199.600,00	0,00
207	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bayung Lencir	533.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.529.600,00	0,00
208	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	590.000.000,00	0,00	7.295.133.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885.133.450,00	0,00
209	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	22.480.000.000,00	0,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00
210	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Batanghari Leko	3.121.401.669,00	0,00	121.837.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.238.954,00	0,00
211	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Babat Supat	13.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	0,00
212	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	26.375.375.742,00	0,00	405.895.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781.271.107,00	0,00
213	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	90.038.135.630,00	0,00	6.174.512.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.212.648.437,00	0,00
214	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	399.937.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.937.890,00	0,00
215	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Berojaya Timur	912.397.500,00	0,00	101.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.775.000,00	0,00
216	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bayung Lencir	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
217	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.105.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.969.000,00	0,00
218	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.190.149.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.149.781,00	0,00
219	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	10.936.442.181,00	0,00	544.343.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480.785.701,00	0,00
220	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sanga Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.402.209.016,00	0,00	219.148.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.357.506,00	0,00
222	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.609.016.278,00	0,00	438.371.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047.387.531,00	0,00
223	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	846.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.406.500,00	0,00
224	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.729.791.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.791.600,00	0,00
225	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Jirak	1.381.756.800,00	0,00	22.506.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.263.000,00	0,00
226	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Babat	692.647.588,00	0,00	7.351.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.999.007,00	0,00
227	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bukit Selabu	513.126.400,00	0,00	128.281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.408.000,00	0,00
228	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	297.100.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.100.919,00	0,00
229	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	9.991.228.934,00	0,00	3.097.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.088.240.934,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
230	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat	20.225.343.690,00	0,00	295.756.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.521.100.590,00	0,00
231	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	15.527.168.676,00	0,00	289.836.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.817.005.474,00	0,00
232	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	8.786.968.296,00	0,00	297.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084.529.296,00	0,00
233	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Lalan	0,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00
234	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	19.996.757.402,00	0,00	196.936.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.193.693.436,00	0,00
235	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
236	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Lais	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00	0,00
237	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bandar Agung	959.859.950,00	0,00	169.387.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.247.000,00	0,00
238	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sungai Lilin	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
239	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.376.839.750,00	0,00	1.523.157.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.997.071,00	0,00
240	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	6.797.590.487,00	0,00	3.426.150.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223.741.437,00	0,00
241	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Lais	17.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235.000,00	0,00
242	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Jirak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	550.078.483.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.078.483.467,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
244	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Lalan	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,00
245	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Balai Agung	347.922.080,00	0,00	352.077.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
246	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
247	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.037.985.248,00	0,00	145.138.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.124.193,00	0,00
248	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
249	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	30.330.787.944,00	0,00	299.826.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630.614.244,00	0,00
250	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Ngulak	698.856.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.856.278,00	0,00
251	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Ngulak I	678.374.605,00	0,00	20.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.131.605,00	0,00
252	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	81.902.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.902.388,00	0,00
253	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.083.060.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083.060.286,00	0,00
254	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Batanghari Leko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.049.958.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.958.635,00	0,00
256	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Batanghari Leko	14.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412.000,00	0,00
257	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sekayu	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
258	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.222.153.340,00	0,00	1.799.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.021.976.840,00	0,00
259	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	0,00
260	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Lubuk Bintialo	730.150.000,00	0,00	128.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.000.000,00	0,00
261	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Keluang	14.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015.000,00	0,00
262	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Babat Toman	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00
263	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.839.070.000,00	0,00	7.680.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520.000.000,00	0,00
264	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Babat Toman	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780.000,00	0,00
265	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Plakat Tinggi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
266	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.219.935.906,00	0,00	62.664.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.600.401,00	0,00
267	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	5.907.901.325,00	0,00	304.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212.491.325,00	0,00
268	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Batanghari Leko	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00
269	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Suka Damai	862.541.600,00	0,00	215.635.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.177.000,00	0,00
270	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Bayung Lencir	121.727.065,00	0,00	28.272.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.542,00	0,00
271	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	622.268.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.268.378,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
272	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	59.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749.000,00	0,00
273	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.833.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833.217.000,00	0,00
274	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sri Gunung	1.177.957.000,00	0,00	130.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.207.000,00	0,00
275	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Ngulak I	149.588.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.588.543,00	0,00
276	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Lalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Jirak Jaya	507.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.385.000,00	0,00
278	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	780.180.000,00	0,00	17.258.585.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038.765.186,00	0,00
279	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Babat Toman	2.396.536.200,00	0,00	266.281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.818.000,00	0,00
280	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Gardu Harapan	792.535.500,00	0,00	139.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.395.500,00	0,00
281	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	215.716.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.716.000,00	0,00
282	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	2.080.680.000,00	0,00	1.851.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.000.000,00	0,00
283	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.351.390.795,00	0,00	539.081.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890.472.742,00	0,00
284	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.678.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.028.500,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
285	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.987.632.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.632.400,00	0,00
286	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	978.035.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.035.525,00	0,00
287	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Ngulak	149.708.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.708.288,00	0,00
288	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sekayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tungkal Jaya	3.973.575.675,00	0,00	130.426.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.002.562,00	0,00
290	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	1.248.411.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.411.957,00	0,00
291	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00	0,00
292	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00
293	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Babat Supat	7.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747.000,00	0,00
294	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sido Rahayu	829.864.574,00	0,00	202.680.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.545.000,00	0,00
295	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tungkal Jaya	452.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.611.000,00	0,00
296	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	3.435.154.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.154.990,00	0,00
297	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.171.453.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.453.529,00	0,00
298	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
299	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	975.589.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.589.524,00	0,00
300	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	3.599.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.999.200,00	0,00
301	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	423.029.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.029.402,00	0,00
302	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	196.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.237.000,00	0,00
303	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Keluang	700.070.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.070.616,00	0,00
304	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	21.051.766.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051.766.173,00	0,00
305	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
306	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Balai Agung	77.840.121,00	0,00	72.159.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
307	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	2.272.692.756,00	0,00	5.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.464.756,00	0,00
308	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Mangun Jaya	84.129.321,00	0,00	65.870.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.829,00	0,00
309	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Karang Mukti	1.556.339.000,00	0,00	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.339.000,00	0,00
310	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.176.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.176.708,00	0,00
311	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Keluang	535.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.019.000,00	0,00
312	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	2.446.502.973,00	0,00	37.947.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.450.710,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
313	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	24.437.500.000,00	0,00	4.312.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.000.000,00	0,00
314	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lais	493.174.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.174.805,00	0,00
315	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2.455.511.305,00	0,00	242.942.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.454.045,00	0,00
316	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Keluang	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00
317	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	1.500.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.800,00	0,00
318	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sungai Keruh	20.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006.000,00	0,00
319	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	355.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.110.000,00	0,00
320	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
321	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Babat	115.270.064,00	0,00	34.729.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.744,00	0,00
322	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	719.678.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.678.919,00	0,00
323	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.095.919.019,00	0,00	1.907.261.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.180.057,00	0,00
324	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Daerah 2 : Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.795.004.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795.004.600,00	0,00
325	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Lalan	0,00	10.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260.000,00
326	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	253.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.735.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
327	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tungkal Jaya	79.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.749.000,00	0,00
328	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Daerah 4 : Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Soak Baru	699.999.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.999.949,00	0,00
				TOTAL	2.384.132.390.457,00	4.639.693.888,00	523.070.692.769,00	123.198.100,00	6.997.200.620,00	0,00	494.667.382.300,00	0,00	3.408.867.666.146,00	4.762.891.988,00

Kab. Musi Banyuasin, 7 Oktober 2025

Bupati

H. M. Toha

Lampiran X PERDA P-APBD KAB. MUBA
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
Perubahan APBD TA. 2025

A . PNS

GOLONGAN / RUANG	ESELON							NON ESELON				JUMLAH
	I	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JFT KESEHATAN	JFT PENDIDIKAN	JFT LAINNYA	STAF	
GOLONGAN IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOLONGAN IV/d	0	1	1	0		0	0	0	0	0	0	2
GOLONGAN IV/c	0	0	23	0	1	0	0	5	118	11	2	160
GOLONGAN IV/b	0	0	4	46	2	0	0	22	393	45	0	512
GOLONGAN IV/a	0	0	0	17	79	36	3	26	211	82	39	493
JUMLAH GOLONGAN IV	**0**	**1**	**28**	**63**	**82**	**36**	**3**	**53**	**722**	**138**	**41**	**1167**
GOLONGAN III/d	0	0	0	1	42	114	32	293	808	223	309	1822
GOLONGAN III/c	0	0	0	0	1	55	43	157	239	54	212	761
GOLONGAN III/b	0	0	0	0	0	8	34	279	625	50	263	1259
GOLONGAN III/a	0	0	0	0	0	1	1	30	152	21	295	500
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**0**	**1**	**43**	**178**	**110**	**759**	**1824**	**348**	**1079**	**4342**
GOLONGAN II/d	0	0	0	0	0	0	0	105	14	10	156	285
GOLONGAN II/c	0	0	0	0	0	0	0	12	9	0	112	133
GOLONGAN II/b	0	0	0	0	0	0	0		3	7	50	60
GOLONGAN II/a	0	0	0	0	0	0	0		2	0	24	26
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117**	**28**	**17**	**342**	**504**
GOLONGAN I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
GOLONGAN I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
GOLONGAN I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
GOLONGAN I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**21**
TOTAL	**0**	**1**	**28**	**64**	**125**	**214**	**113**	**929**	**2574**	**503**	**1483**	**6034**

B . PPPK

GOLONGAN	TEKNIS	KESEHATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
X	2	175	0	177
IX	856	176	3363	4395
VII	246	1180	0	1426
V	1538	0	0	1538
III	11			11
I	6			6
TOTAL	**2659**	**1531**	**3363**	**7553**

Sekayu, Oktober 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran XI : Perda Kab. Muba
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1		2	4	5	6	7 = 4+5-6
		PIUTANG PAJAK	**103.951.607.150,34**	**26.269.687.688,27**	**23.012.733.684,04**	**107.208.561.154,57**
1	BPPRD	Pajak Hotel	609.298.953,00	0,00	609.298.953,00	0,00
2	BPPRD	PBJT- Jasa Perhotelan	0,00	618.234.863,00	11.322.000,00	606.912.863,00
3	BPPRD	Pajak Restoran	643.705.365,00	0,00	643.705.365,00	0,00
4	BPPRD	PBJT- Makanan dan/atau Minuman	0,00	1.027.873.960,00	423.744.432,00	604.129.528,00
5	BPPRD	Pajak Hiburan	2.034.664,00	0,00	2.034.664,00	0,00
6	BPPRD	PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	2.630.164,00	295.500,00	2.334.664,00
7	BPPRD	Pajak Reklame	189.255.260,00	9.002.002,00	92.110.823,00	106.146.439,00
8	BPPRD	Pajak Penerangan Jalan	2.795.662.201,34		2.795.662.201,34	0,00
9	BPPRD	PBJT- Tenaga Listrik	0,00	14.619.984.667,27	1.203.799.458,70	13.416.185.208,57
10	BPPRD	Pajak Parkir	32.534.900,00	0,00	32.534.900,00	0,00
11	BPPRD	PBJT- Jasa Parkir	0,00	41.849.700,00	4.357.000,00	37.492.700,00
12	BPPRD	Pajak Air Tanah	878.645.285,00	9.167.860,00	14.174.018,00	873.639.127,00
13	BPPRD	Pajak Sarang Burung Walet	1.750.000,00	2.350.000,00	300.000,00	3.800.000,00
14	BPPRD	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	113.274.690,00	44.686.837,00	350.000,00	157.611.527,00
15	BPPRD	PBB Pedesaan Perkotaan	81.184.163.129,00	9.528.009.295,00	551.891.544,00	90.160.280.880,00
16	BPPRD	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	17.501.282.703,00	365.898.340,00	16.627.152.825,00	1.240.028.218,00
		PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**340.945.660,00**	**7.000.000,00**	**10.590.000,00**	**337.355.660,00**
1	DISKOMINFO	MENARA TELEKOMUNIKASI	336.530.660,00	0,00	0,00	336.530.660,00
2	DLH	LABORATORIUM	4.415.000,00	0,00	3.590.000,00	825.000,00
2	DAGPERIN	PARKIR	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1		2	4	5	6	7 = 4+5-6
		PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**5.529.270.431,81**	**7.117.182.488,08**	**4.657.701.837,74**	**7.988.751.082,15**
1	DINKES	BLUD Puskesmas Ngulak	70.297.000,00	5.420.000,00	70.297.000,00	5.420.000,00
2	DINKES	BLUD Puskesmas Babat Toman	48.294.000,00	17.328.000,00	48.294.000,00	17.328.000,00
3	DINKES	BLUD Puskesmas Ulak Paceh	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00	0,00
4	DINKES	BLUD Puskesmas Tanah Abang	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00
5	DINKES	BLUD Puskesmas Lubuk Bintialo	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	0,00
6	DINKES	BLUD Puskesmas Bukit Selabu	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
7	DINKES	BLUD Puskesmas Cinta Karya	7.027.000,00	0,00	7.027.000,00	0,00
8	DINKES	BLUD Puskesmas Suka Damai	7.435.000,00	0,00	7.435.000,00	0,00
9	DINKES	BLUD Puskesmas Sidorahayu	17.952.000,00	0,00	17.952.000,00	0,00
10	DINKES	BLUD Puskesmas Tebing Bulang	11.635.000,00	5.745.000,00	11.635.000,00	5.745.000,00
11	DINKES	BLUD Puskesmas Jirak	5.600.000,00	1.280.000,00	5.600.000,00	1.280.000,00
12	DINKES	BLUD Puskesmas Balai Agung	21.690.000,00	0,00	21.690.000,00	0,00
13	DINKES	BLUD Puskesmas Lumpatan	12.970.000,00	0,00	12.970.000,00	0,00
14	DINKES	BLUD Puskesmas Lais	23.845.000,00	0,00	23.845.000,00	0,00
15	DINKES	BLUD Puskesmas Gardu Harapan	5.505.000,00	4.062.000,00	5.505.000,00	4.062.000,00
16	DINKES	BLUD Puskesmas Teluk Kijing	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
17	DINKES	BLUD Puskesmas Tanjung Kerang	5.600.000,00	4.000.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00
18	DINKES	BLUD Puskesmas Sungai Lilin	23.065.000,00	0,00	23.065.000,00	0,00
19	DINKES	BLUD Puskesmas Sri Gunung	4.565.000,00	5.600.000,00	4.565.000,00	5.600.000,00
20	DINKES	BLUD Puskesmas Karya Maju	14.795.000,00	20.523.000,00	14.795.000,00	20.523.000,00
21	DINKES	BLUD Puskesmas Mekarjaya	7.031.000,00	873.000,00	7.031.000,00	873.000,00
22	DINKES	BLUD Puskesmas Bayung Lencir	17.580.000,00	0,00	17.580.000,00	0,00
23	DINKES	BLUD Puskesmas Suka Jaya	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00
24	DINKES	BLUD Puskesmas Peninggalan	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00	0,00
25	DINKES	BLUD Puskesmas Sumber Harum	11.940.000,00	0,00	11.940.000,00	0,00
26	DINKES	BLUD Puskesmas Berojaya Timur	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00
27	DINKES	BLUD Puskesmas Bandar Agung	21.260.000,00	11.000.000,00	21.260.000,00	11.000.000,00
28	DINKES	BLUD Puskesmas Karang Mukti	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00
29	DINKES	Puskesmas Air Balui	800.000,00	26.016.000,00	800.000,00	26.016.000,00
30	DINKES	BLUD RSUD SUNGAI LILIN	203.718.935,00	22.243.300,00	129.625.535,00	96.336.700,00
31	DINKES	BLUD RSUD BAYUNG LENCIR	1.681.963.219,00	3.401.000,00	1.664.914.617,00	20.449.602,00
32	DINKES	BLUD RSUD SEKAYU	1.815.073.418,81	4.611.487.537,00	1.037.034.723,74	5.389.526.232,07

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1		2	4	5	6	7 = 4+5-6
33	BPPRD	JASA GIRO(dinsos)	4.447.959,00	0,00	4.447.959,00	0,00
33	DAGPERIND	Dinas Perdagangan dan Perindustrian- PARKIR	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
33	RSUD SKY	Piutang Lainnya (sewa atm RSUD Sekayu)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
33	BPKAD	BPKAD - BPJS	2.387.897,00	0,00	0,00	2.387.897,00
34	BPKAD	BPKAD - PFK	0,00	37.467.122,00	0,00	37.467.122,00
35	BPKAD	BPKAD - Lelang Kendaraan	0,00	204.028.000,00	0,00	204.028.000,00
36	BPKAD	BPKAD - Lelang Alat Kedokteran	0,00	171.642.000,00	0,00	171.642.000,00
	SKPD	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH (SETORAN BPK)	1.403.163.003,00	1.962.066.529,08	1.403.163.003,00	1.962.066.529,08
		PIUT. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-Dana Perimbangan	**360.115,00**	**558.436.605.000,00**	**360.115,00**	**558.436.605.000,00**
1	BPKAD	Dana Bagi Hasil Pajak	360.115,00	558.436.605.000,00	360.115,00	558.436.605.000,00
		PIUT. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	**45.557.880.475,00**	**39.272.678.649,60**	**45.557.880.475,00**	**39.272.678.649,60**
1	BPKAD	Bagi Hasil Provinsi	40.399.855.275,00	12.352.473.483,00	40.399.855.275,00	12.352.473.483,00
2	BPKAD	Bantuan keuangan	5.158.025.200,00	26.920.205.166,60	5.158.025.200,00	26.920.205.166,60
						0,00
		PIUTANG LAINNYA	**104.134.225,15**	**996.431.503,00**	**10.100.000,00**	**1.090.465.728,15**
1	BPPRD	Tuntutan Ganti Rugi	104.134.225,15	996.431.503,00	10.100.000,00	1.090.465.728,15
		JUMLAH	**155.484.198.057,30**	**632.099.585.328,95**	**73.249.366.111,78**	**714.334.417.274,47**

Sekayu, 7 Oktober 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XII : Perda P-APBD Kab.Muba
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
					6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2013	PDAM Kab. Muba.	Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada PDAM Tirta Randik Kab. Muba.	Permanen	708.357.685.624,41	535.532.685.624,58	24.950.000.000,00	560.482.685.624,58	147.874.999.999,83	-	-	560.482.685.624,58
2	2013	BPDSS	Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Pe-nyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada PT. Bank Pem-bangunan Daerah Sumsel-Babel.	Permanen	129.051.643.431,23	119.051.643.431,23	-	119.051.643.431,23	10.000.000.000,00	25.082.895.564,79	-	119.051.643.431,23
3	2013	PT. MUBA ENERGI MAJU BERJAYA	SK Bupati No. 716/KPTS-BPKAD/2022 Tgl 7 Desember 2022	Permanen	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4		**PT.PETROMUBA HOLDING**			**686.504.425.927,24**	**459.828.576.289,00**	-	**459.828.576.289,00**	**226.675.849.638,24**	-	-	**459.828.576.289,00**
	2013	PT. Petro Muba	Perda No. 7 Tahun 2017 tanggal 4 September 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Pe-nyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada Perseroan Terbatas PETRO MUBA	Permanen	4.080.966.560,00	16.630.966.560,00	-	16.630.966.560,00	(12.550.000.000,00)	-	-	16.630.966.560,00
	2013	PT. Muba Link		Permanen	176.475.710.679,00	126.635.680.679,00	-	126.635.680.679,00	49.840.030.000,00	-	-	126.635.680.679,00
	2013	PT. Muba Electric Power		Permanen	456.843.247.188,24	314.022.429.050,00	-	314.022.429.050,00	142.820.818.138,24	-	-	314.022.429.050,00
	2013	PT. Muba Sarana		Permanen	42.494.920.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	40.494.920.000,00	-	-	2.000.000.000,00
	2013	PT. Kilang Muba		Permanen	6.609.581.500,00	-	-	-	6.609.581.500,00	-	-	-
	2019	PT. Perkebunan Muba Lestari	SK Bupati No. 770/KPTS-BPKAD/2019	Permanen	-	539.500.000,00	-	539.500.000,00	(539.500.000,00)	-	-	539.500.000,00
JUMLAH PERMANEN (PENYERTAAN MODAL)					**1.524.913.754.982,88**	**1.114.412.905.344,81**	**24.950.000.000,00**	**1.139.362.905.344,81**	**384.550.849.638,07**	**25.082.895.564,79**	-	**1.139.362.905.344,81**

Sekayu, 7 Oktober 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XIIIa : Perda P-APBD Kab. Muba
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI 2025		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	TANAH	625.804.972.951,18	387.595.350,00	0,00	626.192.568.301,18
2	PERALATAN DAN MESIN	1.286.882.857.970,12	12.268.720.388,00	0,00	1.299.151.578.358,12
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.101.799.625.784,69	15.477.908.291,00	0,00	3.117.277.534.075,69
4	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	9.038.653.512.392,72	46.257.196.310,00	0,00	9.084.910.708.702,72
5	ASET TETAP LAINNYA	83.459.094.489,25	149.504.000,00	0,00	83.608.598.489,25
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	130.852.846.858,98	-	0,00	130.852.846.858,98
	JUMLAH	**14.267.452.910.446,90**	**74.540.924.339,00**	0,00	14.341.993.834.785,90

Sekayu, 7 Oktober 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

LAMPIRAN XIIIb : PERDA P-APBD KAB. MUBA
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tagihan Jangka Panjang	405.104.896,00	1.268.160.673,01	0,00	1.673.265.569,01
2	Aset Tidak Berwujud	67.114.845.698,46	84.295.429.790,46	0,00	151.410.275.488,92
3	Aset Lain-lain	243.231.744.105,40	295.778.834.971,59	0,00	539.010.579.076,99
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(45.790.072.137,30)	(57.344.253.477,80)	0,00	(103.134.325.615,10)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(93.689.183.318,74)	(53.615.349.691,93)	0,00	(147.304.533.010,67)
6	Dana Treasury Deposite Facility (TDF)	526.073.669.535,00	48.910.244.000,00	0,00	574.983.913.535,00
Jumlah		**697.346.108.778,82**	**319.293.066.265,33**	**0,00**	**1.016.639.175.044,15**

Sekayu, 7 Oktober 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran XIV : Perda P-APBD Kab. Muba
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN 2022,TAHUN 2023,TAHUN 2024			JUMLAH AKUMULASI REALISASI S.D AKHIR TAHUN 2024	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8
			NIHIL				
Jumlah			-	-		-	-

Sekayu, 7 Oktober 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran XV : Perda P-APBD Kab. Muba
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			NIHIL					
2								
3								
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-

Sekayu, 7 Oktober 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

LAMPIRAN XVI : PERDA P-APBD KAB. MUBA
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN DAERAH	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/ OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (Tahun)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI	JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								Bunga (Rp)	POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1									-	-
2				NIHIL					-	-
JUMLAH				-	-	-	-	-	-	-

Sekayu, 7 Oktober 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA